BAPPELITBANG
KABUPATEN TAPIN

MAJU BANUANYA
Baiman Warganya

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

KABUPATEN TAPIN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tapin, yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan hutan luas yang menjadi habitat flora dan fauna khas Kalimantan. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya menjadi kekayaan ekologi tetapi juga berpotensi sebagai basis pembangunan berkelanjutan. Selain itu, sumber daya alamnya yang melimpah menjadi modal utama untuk mendukung berbagai sektor, terutama pertanian, perkebunan, dan pertambangan, yang selama ini menjadi sektor unggulan Kabupaten Tapin. Dalam bidang ekonomi, Kabupaten Tapin memiliki peran strategis sebagai salah satu penghasil utama padi dan karet di Kalimantan Selatan. Potensi ini menjadikannya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan sekaligus penyedia bahan baku bagi industri pengolahan karet. Tidak hanya itu, cadangan batu bara yang melimpah di wilayah ini juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah, menjadikannya salah satu penggerak ekonomi lokal yang signifikan. Di sisi lain, Kabupaten Tapin memiliki potensi pariwisata yang menarik dengan keindahan alam serta berbagai situs budaya yang mencerminkan kekayaan warisan lokal. Keberadaan destinasi ini memberikan peluang untuk meningkatkan sektor pariwisata sebagai alternatif pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, potensi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pembangunan daerah merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan memiliki peran penting sebagai panduan strategis yang memberikan arah dan fokus, sehingga mampu mendorong perkembangan dan kemajuan daerah. Perencanaan yang baik tidak hanya membantu mengatur strategi pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pembangunan daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, perencanaan merupakan langkah awal sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan arah pembangunan daerah. Memahami hal itu, perencanaan pembangunan daerah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman bagi berbagai bentuk perencanaan dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus menyusun perencanaan pembangunan secara terintegrasi. Perencanaan tersebut mencakup jangka panjang, menengah, hingga tahunan, dengan substansi yang saling berkaitan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berdaya guna. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah yang

sistematis dan berkesinambungan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan dilantiknya H. Yamani, S.Ak, MM sebagai Bupati dan H. Juanda sebagai wakil Bupati pada tanggal 20 bulan Februari Tahun 2025 maka pembangunan Kabupaten Tapin periode 2025 – 2029 akan segera dilaksanakan. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai pasal 70 Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dilantik. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Tapin harus menyusun RPJMD Tahun 2025 – 2029 dalam rangka menjabarkan visi, misi Bupati terpilih dalam kebijakan dan operasionalisasi dokumen RPJMD selama 5 (lima) tahun dan dilaksanakan tiap tahun dalam dokumen RKPD. Dokumen RPJMD ini merupakan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 pada tahap pertama.

Dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 – 2029, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu:

1) *Teknokratik,* dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2) *Partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
3) *Politis,* dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD; dan
4) *Atas-bawah dan bawah-atas*, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan dari para pemangku kepentingan dan *stakeholder*.
5) *Holistik-tematik*, Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tapin mengadopsi pendekatan holistik-tematik sebagai upaya memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan saling berkesinambungan antar sektor.
6) *Integratif,* Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin menerapkan pendekatan integratif yang menghubungkan seluruh aspek perencanaan pembangunan secara menyeluruh, lintas sektor, dan lintas pelaku pembangunan.
7) *Spasial,* Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tapin, pendekatan spasial memiliki peranan penting untuk memastikan arah kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan nyata di setiap wilayah

kecamatan, serta memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Pendekatan spasial memungkinkan perencanaan pembangunan dilakukan secara lebih merata, berbasis kawasan, dan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 memiliki beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir dan (6) penetapan. Dengan ini, dokumen RPJMD Kabupaten Tapin 2025 – 2029 diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dengan rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD menjadi landasan bagi OPD untuk merumuskan program, kegiatan, dan target kinerja yang selaras dengan visi pembangunan daerah kedalam dokumen Renstra. Dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan, setiap OPD di Kabupaten Tapin diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian prioritas pembangunan, memastikan sinergi antar sektor, stakeholder akan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam rangka menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapin.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04)
23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142)
24 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
25 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09); dan
26 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin merupakan proses komprehensif yang wajib berpedoman pada hierarki perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dan provinsi (RPJMD Provinsi) untuk sinkronisasi tujuan dan sasaran, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan spasial pembangunan. Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diintegrasikan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai arah pengembangan inovasi, evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir sebagai refleksi dan pembelajaran, berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk keselarasan program, serta dokumen manajemen risiko pembangunan sebagai mitigasi potensi hambatan, sehingga menghasilkan RPJMD yang terukur, realistis, dan responsif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Hubungan dan keterpaduan antara RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar I.1.
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

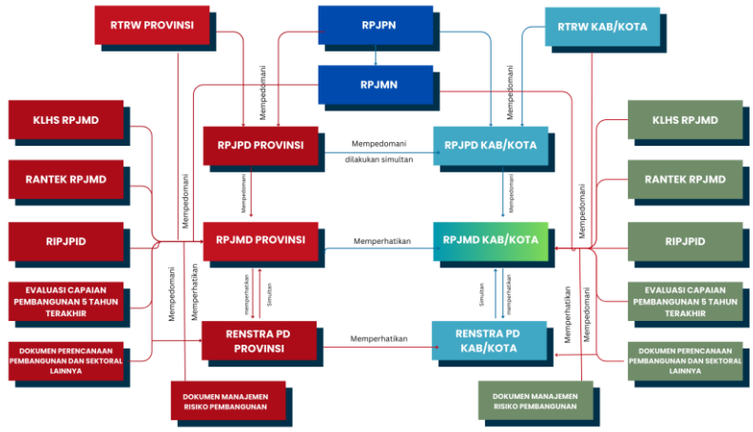

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 dengan RPJMN Tahun 2025 – 2029.

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 terletak pada sinergi antara tujuan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen strategis lima tahunan di tingkat daerah harus sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, khususnya dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dalam konteks Kabupaten Tapin, RPJMD Tahun 2025 – 2029 perlu merumuskan program prioritas yang mendukung fokus RPJMN, seperti transformasi ekonomi hijau, peningkatan daya saing daerah, dan pemerataan pembangunan. Sebagai salah satu daerah penghasil padi, karet, dan batu bara. Dalam pembangunan periode ini diharapkan Kabupaten Tapin berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan baku industri, dan penguatan sektor energi. Oleh karena itu, sinergi antara RPJMD dan RPJMN diperlukan untuk untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Tapin sudah selaras dengan agenda pembangunan nasional (Asta Cita).

RPJMN 2025 – 2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional memiliki agenda prioritas yang terangkum dalam Asta Cita, yang mencakup penguatan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. RPJMD Kabupaten Tapin 2025 – 2029 disusun dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap agenda nasional, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing sektor pertanian dan industri hijau, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sinergi ini memastikan bahwa program pembangunan daerah tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga mendukung visi nasional dalam menciptakan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 dengan RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 terletak pada keterpaduan dan sinergi kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten dengan arah pembangunan provinsi. RPJMD Kabupaten Tapin sebagai panduan pembangunan daerah lima tahunan harus mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kalimantan Selatan. Hal ini melibatkan penyesuaian prioritas, program, dan kegiatan di Kabupaten Tapin agar sesuai dengan kerangka pembangunan yang dirumuskan di tingkat provinsi. RPJMD Kabupaten Tapin 2025 – 2029 juga perlu memastikan keterpaduan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama dalam pembangunan Kalimantan Selatan. Dengan menyelaraskan kebijakan, antara Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih harmonis, efektif, dan inklusif, sehingga dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat di tingkat lokal maupun regional.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 dengan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 bersifat strategis dan berkesinambungan. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, merupakan tahap implementasi dari arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD. Dengan kata lain, RPJMD berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD ke dalam program-program yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek-menengah.

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 harus mencerminkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan sasaran strategis RPJPD 2025-2045, seperti penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Sebagai langkah awal dalam siklus RPJPD yang baru, RPJMD 2025 – 2029 akan menentukan fondasi untuk mencapai visi jangka panjang, termasuk dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan, serta memperkuat infrastruktur wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, RPJMD juga menjadi alat pengukur capaian awal dari target RPJPD. Oleh karena itu, penting bagi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 untuk menyusun kebijakan dan program yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan jangka pendek tetapi juga mendukung kesinambungan pembangunan hingga 2045. Dengan memastikan keselarasan ini, RPJMD dapat berfungsi sebagai langkah konkret yang strategis dalam membawa Kabupaten Tapin menuju visi besar yang telah ditetapkan dalam RPJPD, yaitu menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan di masa depan.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 dengan RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043 adalah pada keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan tata ruang wilayah. RTRW sebagai dokumen perencanaan tata ruang jangka panjang menjadi acuan utama dalam mengatur pemanfaatan ruang di Kabupaten Tapin agar pembangunan yang dirancang dalam RPJMD dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan. Sinergi ini penting untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan pembangunan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 harus merujuk pada arahan RTRW dalam menetapkan lokasi dan prioritas pembangunan, baik untuk pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan, maupun untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Misalnya, kawasan strategis untuk pertanian atau kawasan lindung yang diatur dalam RTRW harus dijadikan pedoman dalam merancang program pembangunan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Demikian pula, wilayah yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi dan industri harus diarahkan agar selaras dengan arahan zonasi dalam RTRW. Selain itu, RTRW juga berfungsi untuk mengintegrasikan aspek tata ruang dengan program pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD, seperti pengembangan kawasan, desa, dan infrastruktur transportasi. Dengan menyelaraskan RPJMD dengan RTRW, Kabupaten Tapin dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan tidak hanya berjalan secara terencana tetapi juga sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

e. RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

f. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin harus mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin harus mampu mengintegrasikan rekomendasi KLHS-RPJMD. Sehingga penyusunan RPJMD harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian rekomendasi dari KLHS dapat diakomodir dalam program pembangunan daerah.

g. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh untuk periode lima tahun, menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan di berbagai sektor, termasuk potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai salah satu pilar kemajuan daerah. RIPJPID kemudian hadir sebagai penjabaran yang lebih spesifik dan terfokus pada upaya pemajuan IPTEK di Kabupaten Tapin. RIPJPID mengidentifikasi potensi dan tantangan daerah dalam pengembangan IPTEK, merumuskan visi dan misi yang lebih spesifik di bidang IPTEK, serta menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang strategis untuk mendorong inovasi, adopsi teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang IPTEK. Dengan demikian, RIPJPID menjadi panduan operasional yang lebih detail dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD yang berkaitan dengan penguatan IPTEK. Program dan kegiatan yang tertuang dalam RIPJPID harus selaras dan berkontribusi pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

h. Hubungan RPJMD dengan Dokumen perencanaan sektoral

RPJMD harus mampu menindaklanjuti dan mengakomodir dokumen rencana sektoral pembangunan. Sehingga rekomendasi/masukan kebijakan pada berbagai bidang urusan yang memiliki dokumen perencanaan harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dengan ini diharapkan kebijakan/perencanaan sectoral dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan RPJMD.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Tapin. Hal ini agar kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 adalah:

1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025 – 2029;
2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3) Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapin ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 – 2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tapin Tahun 2025 – 2029;
4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima)

tahun;

5) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
6) Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7) Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah;
8) Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun;
9) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan;
10) Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi Kabupaten Tapin sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya adalah (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah. Bab ini juga memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah dalam mendukung pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Serta, menyajikan permasalahan serta isu pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tapin.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur

melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan pedoman transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Selain itu, diberikan panduan pelaksanaan RPJMD 2025 – 2029 agar tetap konsisten dan berkelanjutan.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah diwajibkan merumuskan sistem perencanaan pembangunan yang terarah serta terintegrasi yang dapat diukur dengan tingkat keberhasilan dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan strategis setiap daerah memiliki berbagai macam dokumen, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan momentum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan setiap perannya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun pencapaian pembangunan yang optimal merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang relevan sehingga mampu merumuskan berbagai kebijakan dalam menuntaskan segala permasalahan pembangunan yang mengiringi. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Kabupaten Tapin.

Pelaksanaan pembangunan melibatkan berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Pembangunan tersebut masih harus diupayakan percepatan pencapaiannya melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Esensi perencanaan pembangunan suatu daerah sendiri meliputi berbagai aspek yang penting guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah dengan berpijak pada analisis hasil kebijakan pembangunan yang perlu dipahami dan dikaji secara mendalam sebagai gambaran kondisi daerah.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah berisikan berbagai hasil pembangunan yang telah diraih Kabupaten Tapin baik capaian positif maupun sebaliknya. Gambaran Umum ini menyajikan capaian pembangunan periode sebelumnya secara umum, namun masih pada nilai yang komprehensif dari tahun analisis yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan periode sebelumnya. Diharapkan dengan analisis yang komprehensif dan valid pada gambaran umum kondisi daerah ini, mampu menjadi acuan dalam menyusun strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Tapin.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki signifikansi strategis, terutama dalam memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi pembangunan daerah. Penguraian aspek geografi akan memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik wilayah Kabupaten Tapin, termasuk posisi dan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup, ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Tapin akan memaparkan ukuran, struktur, serta distribusi/persebaran penduduk, baik dalam konteks series maupun kewilayahan. Analisis demografi ini sangat penting mengingat penduduk adalah pelaksana utama pembangunan sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu, keterkaitan antara demografi dan aspek-aspek lain perlu diperhatikan dengan seksama untuk memastikan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Pada posisi dan peran strategis daerah menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi dan kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas.

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 215.594 HA. Pada Tahun 2025 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Tapin Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (HA)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Binuang	17.741,80	8	3
2	Hatungun	7.147,59	8	0
3	Tapin Selatan	14.555,84	10	1

No	Kecamatan	Luas (HA)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
4	Salam Babaris	6.418,90	6	0
5	Tapin Tengah	31.575,08	17	0
6	Bungur	8.765,11	12	0
7	Piani	19.387,20	8	0
8	Lokpaikat	9.809,93	8	1
9	Tapin Utara	3.295,02	12	4
10	Bakarangan	7.035,42	12	0
11	Candi Laras Selatan	27.802,99	12	0
12	Candi Laras Utara	62.140,20	13	0
Kabupaten Tapin		**215.594**	**126**	**9**

Sumber: *Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043*

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2⁰32'43" – 3⁰00'43" Bujur Timur dan 114⁰46'13" – 115⁰30'33" Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam. Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Tapin

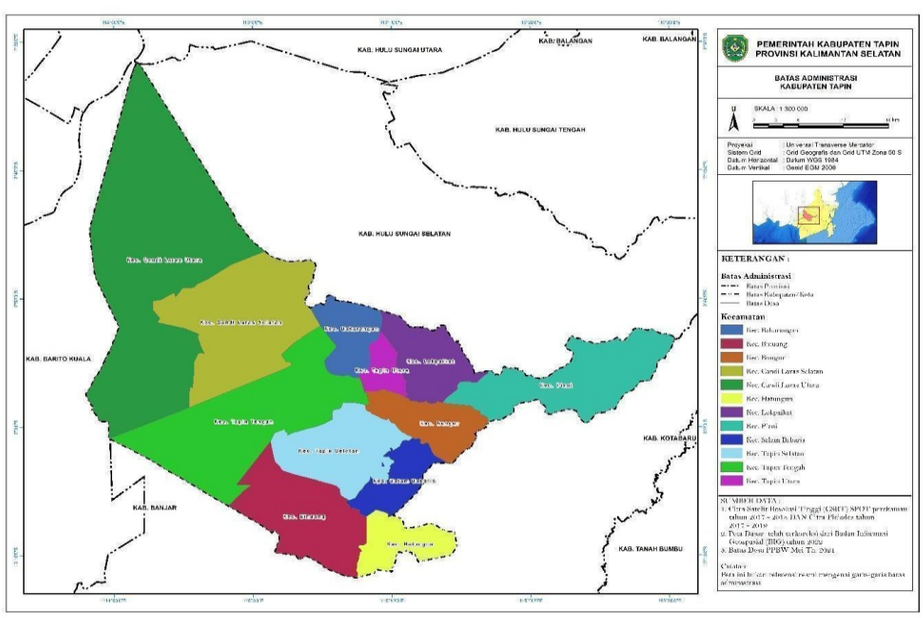

Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin*

3. Kondisi Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada dataran rendah, dan sebagian kecil terletak pada dataran tinggi. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Hatungun.
- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara, dan sebagian Kecamatan Hatungun.

4. Geologi

Tanah diartikan lapisan atas bumi yang merupakan campuran dari pelapukan batuan dan jasad makhluk hidup yang telah mati dan membusuk. Dilihat dari aspek geologi, jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari organosol gleyhumus, sebesar 73,50 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57 persen terletak di Kecamatan Piani.

Seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur halus dan sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah untuk diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat di sebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak ada yang mempunyai kedalaman <30 cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

5. Kondisi Klimatologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 4,7 - 405,2 mm/hari dimana rata-rata curah hujan terendah pada bulan Agustus dan tertinggi pada bulan Maret.

Kelembapan udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 22,8 °C – 29,8 °C. Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari dan rata-rata suhu tertinggi pada

bulan Oktober. Rata-rata kelembapan udara berkisar antara 70,3 – 82,0%. Rata-rata kelembapan terendah pada bulan Agustus, dan rata-rata kelembapan tertinggi pada bulan Desember dan Februari.

6. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 24.715,24 hektar atau 11,36 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air seluas 192.779,76 Hektar atau sekitar 88,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2024-2043, Kabupaten Tapin memiliki rencana pemanfaatan ruang. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang pada perencanaan pembangunan ini difokuskan pada rencana pola ruang dengan peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapin, sesuai dengan ketentuan regulasi, memuat skala informasi yang digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000. Hal ini berdampak pada Tingkat kedetailan informasi yang dapat direfleksikan oleh dokumen RTRW Kabupaten Tapin.

Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Tapin, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada badan air seluas 2.312 Ha dan kawasan perlindungan setempat seluas 1.250 Ha.

Telaah lebih lanjut pada pola ruang Kabupaten Tapin adalah telaah mengenai rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang

ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya di Kabupaten Tapin berupa (1) perumahan yang meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah; (2) perdagangan dan jasa, yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; (3) perkantoran yang meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; (4) industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil (5) pariwisata, yang meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; (6) peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya persentase terbesar terletak pada:

1. Kawasan perkebunan dengan luas 111.529 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
2. Kawasan tanaman pangan dengan luas 30.825 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Kawasan lindung gambut dengan luas 30.612 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel II.2
Luasan Pola Ruang Kabupaten Tapin

No	Pola Ruang	Luas (Ha)
1	Badan Air	2.312
2	Kawasan Hutan Lindung	10.150
3	Kawasan Lindung Gambut	30.612
4	Kawasan Perlindungan Setempat	1.250
5	Kawasan Hortikultura	1.072
6	Kawasan Hutan Produksi Tetap	6.682
7	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	6.735
8	Kawasan Pariwisata	13
9	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	27
10	Kawasan Perikanan Budi Daya	170
11	Kawasan Perkebunan	111.529
12	Kawasan Perlindungan Setempat	1
13	Kawasan Permukiman Perdesaan	10.592
14	Kawasan Permukiman Perkotaan	2.197
15	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2
16	Kawasan Peruntukan Industri	1.238
17	Kawasan Tanaman Pangan	30.825

No	Pola Ruang	Luas (Ha)
18	Kawasan Transportasi	188
Total		**215.594**

Sumber: *Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043*

Berkaitan dengan peran Kabupaten Tapin di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 bahwa Kabupaten Tapin memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) memiliki fungsi sebagai pusat pertanian dan pariwisata. Selain itu, wilayah Kabupaten Tapin juga termasuk di dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Tengah yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Ditinjau berdasarkan pengembangan kawasan strategis provinsi sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Tapin termasuk dalam Kawasan Rawa Batang Banyu yang difokuskan pada pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berwawasan lingkungan. Sedangkan dalam ranah kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup lingkup provinsi, Kabupaten Tapin termasuk dalam kawasan Pegunungan Meratus dimana kawasan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan Pegunungan Meratus sebagai pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam konteks dalam kebijakan pengembangan Wilayah oleh Pemerintah Daerah, penentuan pusat pertumbuhan juga dapat ditinjau berdasarkan pusat kegiatan yang ada di tingkat Kabupaten. Diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043 bahwa pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Tapin terdiri atas:

1. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** yang berupa Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara dengan fungsi utama untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. **Pusat Pelayanan Kawasan** yang terletak di:

a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Bakarangan di Kecamatan Bakarangan
b. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Binuang di Kecamatan Binuang
c. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan
d. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Hatungun di Kecamatan Hatungun
e. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat
f. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Piani di Kecamatan Piani
g. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris
h. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan
i. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Tengah di Kecamatan Tapin Tengah

Kawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

3. **Pusat Pelayanan Lingkungan,** Kawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang terdiri dari:

a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bakarangan di Kecamatan Bakarangan
b. Pusat Pelayanan Lingkungan Bungur di Kecamatan Bungur
c. Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan
d. Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara
e. Pusat Pelayanan Lingkungan Hatungun di Kecamatan Hatungun
f. Pusat Pelayanan Lingkungan Piani di Kecamatan Piani;
g. Pusat Pelayanan Lingkungan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris
h. Pusat Pelayanan Lingkungan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan

Selain berfokus pada wilayah yang teridentifikasi sebagai pusat kegiatan di atas dimana hal tersebut tercantum dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tapin, fokus pusat pertumbuhan wilayah juga dapat ditinjau berdasarkan pada keberadaan kawasan Strategis Kabupaten Tapin.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Penetapan Kawasan Strategis yang ada di wilayah Kabupaten Tapin meliputi:

1. **Kawasan Strategis Provinsi**
   a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu KSP Rawa Batang Banyu
   b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSP Kawasan Pegunungan Meratus
2. **Kawasan Strategis Kabupaten**
   Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:
   - KSK Agropolitan Hatungun terdapat di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun
   - KSK Agropolitan Hiyung terdapat di:
     - Kecamatan Bakarangan
     - Kecamatan Bungur
     - Kecamatan Candi Laras Selatan
     - Kecamatan Tapin Selatan
     - Kecamatan Tapin Tengah
     - Kecamatan Tapin Utara
   - KSK Binuang Baru terdapat di Kecamatan Binuang
   - KSK Perkotaan Margasari terdapat di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara
   - KSK Rantau Baru terdapat di:
     - Kecamatan Bakarangan
     - Kecamatan Bungur
     - Kecamatan Lokpaikat

- Kecamatan Tapin Tengah
- Kecamatan Tapin Utara

- KSK Tambarangan terdapat di:
  - Kecamatan Bungur
  - Kecamatan Salam Babaris
  - Kecamatan Tapin Selatan

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSK Waduk Tapin.

Adanya potensi pusat-pusat pertumbuhan di atas, secara indikatif memberikan arahan mengenai adanya area-area spesifik di Kabupaten Tapin yang dapat memberikan dampak propulsif bagi wilayah Kabupaten Tapin. Baik secara alami melalui dinamika pertumbuhan geografi ekonomi di Kabupaten Tapin, maupun melalui insentif (provinsi dan daerah) karena adanya metode dedicated plan berdasarkan kerangka normatif yang tertuang dalam regulasi perencanaan RTRW Kabupaten Tapin.

Keunggulan komparatif Kabupaten Tapin terletak pada dominasi sektor pertanian dan perkebunan yang telah lama menjadi basis ekonomi daerah. Tapin memiliki lahan perkebunan yang sangat luas dan tersebar merata, menjadikannya salah satu daerah strategis di Kalimantan Selatan untuk pengembangan komoditas seperti karet, kelapa sawit, dan hortikultura.

Dibandingkan dengan Kabupaten Barito Kuala yang fokus pada pertanian lahan pasang surut dan perikanan, Kabupaten Tapin lebih unggul dalam diversifikasi lahan budidaya daratan yang cocok untuk pengembangan agroindustri. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang lebih terbatas dalam ketersediaan lahan skala besar, Tapin memiliki potensi ekspansi perkebunan dan pertanian dalam skala ekonomi yang lebih menguntungkan. Sementara itu, dibanding Kabupaten Banjar, yang cenderung lebih padat penduduk dan terfokus pada pengembangan perkotaan dan jasa, Tapin masih memiliki ruang pengembangan wilayah berbasis sumber daya alam secara masif dan berkelanjutan.

Ditinjau dari perspektif pusat pertumbuhan di atas, secara geografis, simpul utama pusat pertumbuhan wilayah terkonsentrasi di daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di Kecamatan Tapin Utara. PKL tersebut terfokus pada pelayanan kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara dari segi pusat pertumbuhan berdasarkan penetapan hirarki struktur ruang maupun penetapan simpul kawasan strategis, strategi pengembangan wilayah terfokus pada simpul sektor agropolitan dan pariwisata yang didukung oleh sektor industri serta perdagangan dan jasa. Yang mana dalam implementasinya, pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Tapin perlu ditunjang oleh konektivitas antar wilayah dan ditunjang oleh simpul Transportasi baik angkutan penumpang maupun jaringan logistik barang.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem dalam mendukung rangkaian aktivitas pembangunan dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Pada kajian ini, penentuan D3TLH Kabupaten Tapin mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya

Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) sebagai berikut.

1. Daya dukung lahan permukiman

   Daya dukung lahan permukiman didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Penentuan daya dukung lahan permukiman (DDLPm) berdasarkan perbandingan luas lahan permukiman dengan luas kebutuhan lahan permukiman (Latue & Rakuasa, 2023). Semakin tinggi DDLPm maka semakin tinggi kemampuan wilayah dalam penyediaan lahan permukiman.

   Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tapin tahun 2022 sebanyak 194.628 jiwa dan asumsi kebutuhan lahan permukiman layak 60 m2/orang maka kebutuhan lahan permukiman di Kabupaten Tapin ± 11.677.680 m2. Berdasarkan hasil analisis spasial, lahan permukiman di Kabupaten Tapin tahun 2022 seluas ± 34.389.173 m2. Dengan demikian, DDLPm Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 2,9 yang berarti termasuk dalam kategori "Tinggi" dan masih mampu menampung penduduk hingga ± 570.012 jiwa.

2. Daya dukung pangan

   Daya dukung pangan didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam mendukung aktivitas pertanian untuk menghasilkan makanan (terutama beras) yang memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut. Penentuan daya dukung pangan (DDPn) berdasarkan perbandingan jumlah produksi dengan jumlah konsumsi beras pada tahun yang sama (Sabila, 2020). Semakin tinggi DDPn maka semakin tinggi kemampuan wilayah dalam penyediaan pangan.

   Dengan jumlah penduduk sebanyak 194.628 jiwa dan angka konsumsi beras 124 kg/kapita/tahun maka jumlah konsumsi beras di Kabupaten Tapin tahun 2022 sebanyak 24.134 ton. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa jumlah produksi padi di Kabupaten Tapin tahun 2022 sebanyak 104.741,11 ton atau setara dengan 61.975 ton gabah kering giling (GKG). Dengan demikian, DDPn Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 2,57 yang berarti termasuk dalam kategori "surplus" dan masih mencukupi hingga ± 499.089 penduduk.

Gambar II.2
Peta Daya Dukung Pangan

Sumber: *KLHS RPJPD Kab. Tapin 2025-2045*

3. Daya dukung air

Daya dukung air didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan air secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan berbagai jenis pemanfaatan. Penentuan daya dukung air (DDA) berdasarkan perbandingan jumlah ketersediaan dengan jumlah kebutuhan air. Semakin tinggi DDA maka semakin tinggi kemampuan wilayah untuk memenuhi kebutuhan air.

Mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor SK.146/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, diketahui bahwa 9,13% (19.725 Km2) wilayah Kabupaten Tapin berstatus telah melampaui (kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), sedangkan 90,87% (196.428 Km2) berstatus belum melampaui (ketersediaan air lebih besar daripada kebutuhan air) sebagaimana disajikan pada Gambar 3.33..

Sementara itu, mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) diketahui bahwa 53,08% (114.477 Km2) wilayah Kabupaten Tapin berstatus telah buruk/terlampaui (kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), 8,11% (17.489 Km2) berstatus sedang/bersyarat (kebutuhan air hampir seimbang dengan ketersediaan air), dan 38,81% (83.709 Km2) berstatus belum baik/aman (ketersediaan lebih besar daripada kebutuhan air). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan ketersediaan air di wilayah Kabupaten Tapin sebanyak 1.722.969.404 m3/tahun dan total kebutuhan air sebesar 2.175.877.095 m3/tahun (kebutuhan domestik 5.532.670 m3/tahun dan non- domestik 2.170.344.425 m3/tahun), maka DDA Kabupaten Tapin tahun 2022 sebesar 0,79 yang berarti termasuk dalam kategori “buruk/terlampaui” sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar II.3
Peta Daya Dukung Lahan Permukiman

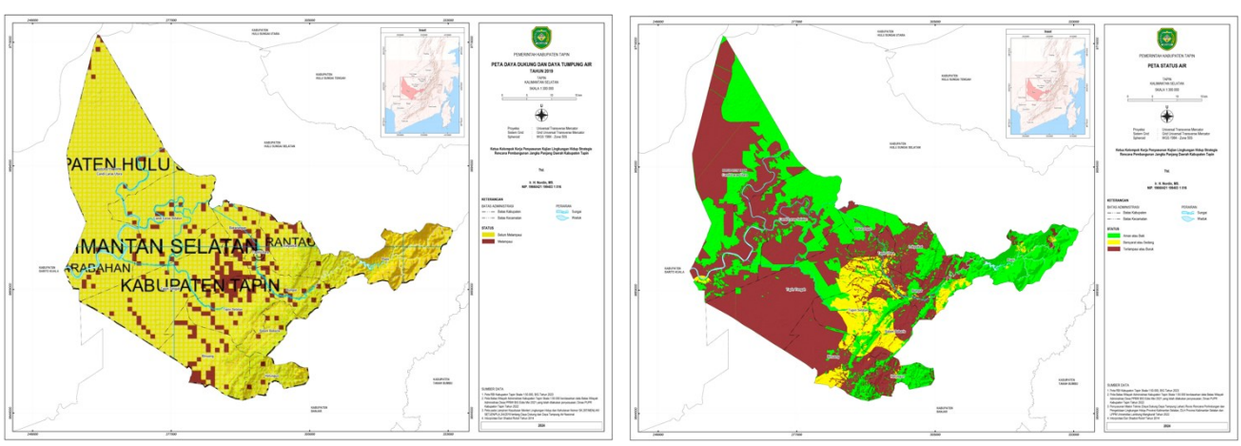

Sumber: *KLHS RPJPD Kab. Tapin 2025-2045*

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Air bersih tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti konsumsi dan sanitasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas sektor-sektor utama, seperti pertanian, industri, dan energi. Ketahanan air yang baik berarti ketersediaan air dalam jumlah dan kualitas yang memadai di setiap waktu, bahkan di tengah perubahan iklim dan

pertumbuhan penduduk yang pesat. Tanpa akses air bersih yang layak, risiko penyebaran penyakit meningkat, kualitas hidup menurun, dan produktivitas masyarakat terganggu.

Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dari tahun 2020 hingga 2024 semakin meningkat. Hal ini terlihat pada tahun 2020 sebanyak 63,00 persen meningkat menjadi 75,20 persen pada tahun 2024.

Gambar II.4
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

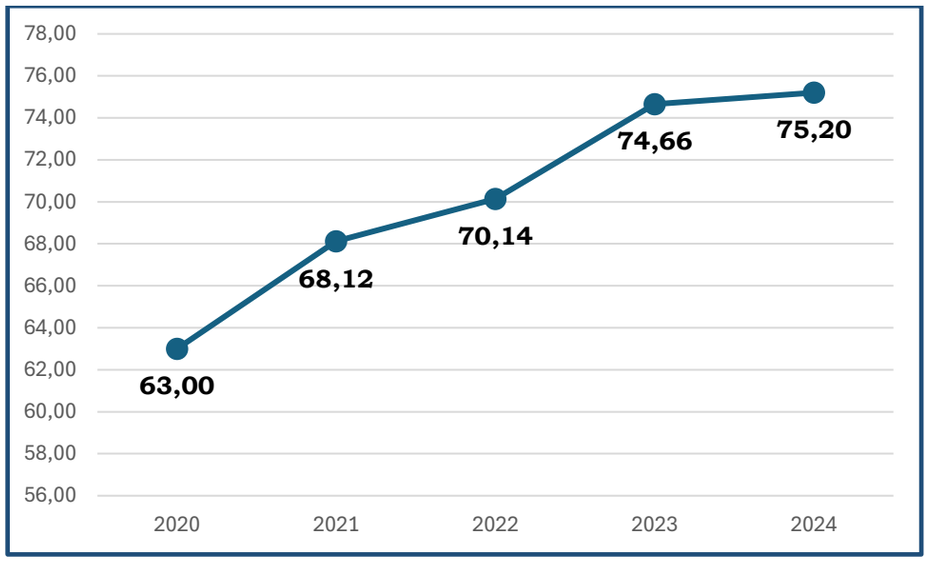

Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025*

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, meskipun sempat mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, indeks berada di angka 83,98 dan meningkat menjadi 85,18 di tahun 2021. Namun, tahun 2022 terjadi penurunan tipis ke level 84,6. Setelah itu, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2023 menjadi 88,1, yang kemudian kembali naik meski relatif landai menjadi 88,58 di tahun

2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di daerah.

Keberhasilan peningkatan ketahanan pangan daerah ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain optimalisasi produksi pangan lokal, peningkatan akses distribusi melalui infrastruktur yang lebih baik, serta intervensi program pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan daerah. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat dan penguatan kelembagaan pangan di tingkat desa turut berkontribusi pada membaiknya ketahanan pangan. Kerja sama antara pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, dan lembaga terkait dalam pengelolaan pangan juga menjadi kunci keberhasilan.

Gambar II.5
Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

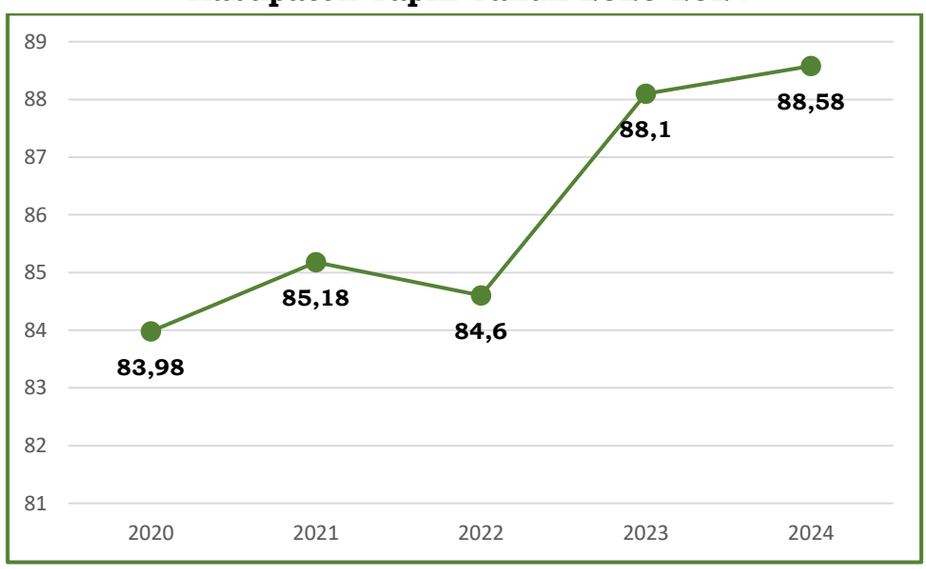

Sumber: *Badan Pangan Nasional, 2025*

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, ketersediaan energi listrik menjadi salah satu faktor penunjang utama. Produksi listrik yang memadai harus diimbangi dengan kemampuan distribusi serta pertumbuhan jumlah pelanggan atau pengguna listrik. Oleh karena itu, untuk memahami pemanfaatan energi di Kabupaten Tapin, perlu dilihat perkembangan jumlah produksi listrik seiring dengan pertumbuhan jumlah pelanggan selama lima tahun terakhir.

Tabel II.3
Jumlah Produksi dan Jumlah Pelanggan Listrik
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Listrik (KWh)	88.457.013,95	93.269.813,28	NA	112.181.199.00	213.228946,90
Jumlah Pelanggan Listrik	58.858	61.766	59.149	62.505	72.390

Sumber : Kabupaten Tapin dalam Angka, 2021-2025.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dalam jumlah produksi listrik, meskipun terdapat data yang tidak tersedia (NA) pada tahun 2022. Jumlah produksi listrik tercatat sebesar

88.457.013,95 KWh pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 93.269.813,28 KWh pada tahun 2021. Produksi listrik kembali naik pada tahun 2023, dan melonjak hingga 213.228.946,90 KWh pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan kebutuhan dan ketersediaan energi listrik di Kabupaten Tapin, terutama dalam dua tahun terakhir.

Sejalan dengan peningkatan produksi, jumlah pelanggan listrik juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 58.858 pelanggan, yang kemudian meningkat pada tahun 2021. Meskipun sempat menurun pada tahun 2022, jumlah pelanggan kembali naik hingga mencapai 72.390 pelanggan pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi listrik diimbangi oleh pertumbuhan jumlah pelanggan, yang mencerminkan perluasan akses layanan listrik serta peningkatan konsumsi energi masyarakat seiring perkembangan sosial dan ekonomi daerah.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Sebagai wilayah yang didominasi aktivitas ekonomi sektor pertambangan dan penggalian, *concern* pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus menjadi acuan dalam menyusun setiap arah kebijakan pembangunan dari sisi ekonomi berkelanjutan.

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tapin apabila ditinjau dari capaian indeks kualitas lingkungan hidup terjadi peningkatan capaian dari 65,33 persen pada tahun 2020 menjadi 66,11 persen tahun 2024. Kemudian pada komponen penyusunnya seperti pada indeks kualitas air pada tahun 2022 (56,84) hingga 2024 (53,53) mengalami penurunan. Kemudian Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang mencapai 91,89 menjadi 97,92 di tahun 2024. Selanjutnya pada komponen IKLH terkait indeks tutupan lahan mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang mencapai 65,33 menjadi 66,11 tahun 2024.

Tabel II.4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Beserta Komponennya Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	57,78	52,80	56,84	56,67	53,53
Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,89	92,02	92,05	93,48	97,92
ITH/IKL	29,19	29,50	30,09	31,02	28,90
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**65,33**	**63,58**	**65,25**	**65,96**	**66,11**

Sumber: *Kabupaten Tapin dalam Angka, 2025*

2.1.1.6. Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memiliki pendekatan dalam perumusannya yakni *Hazard* (bahaya) yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Selanjutnya *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan serta *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan

daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Secara keseluruhan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2018 hingga 2023 indeks risiko bencana mengalami penurunan dimana capaiannya berada pada angka 140,4 pada tahun 2018 menjadi 110,71 pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 capaian resiko bencana kembali meningkat menjadi 121,07 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga mencapai 106,70.

Gambar II.5
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

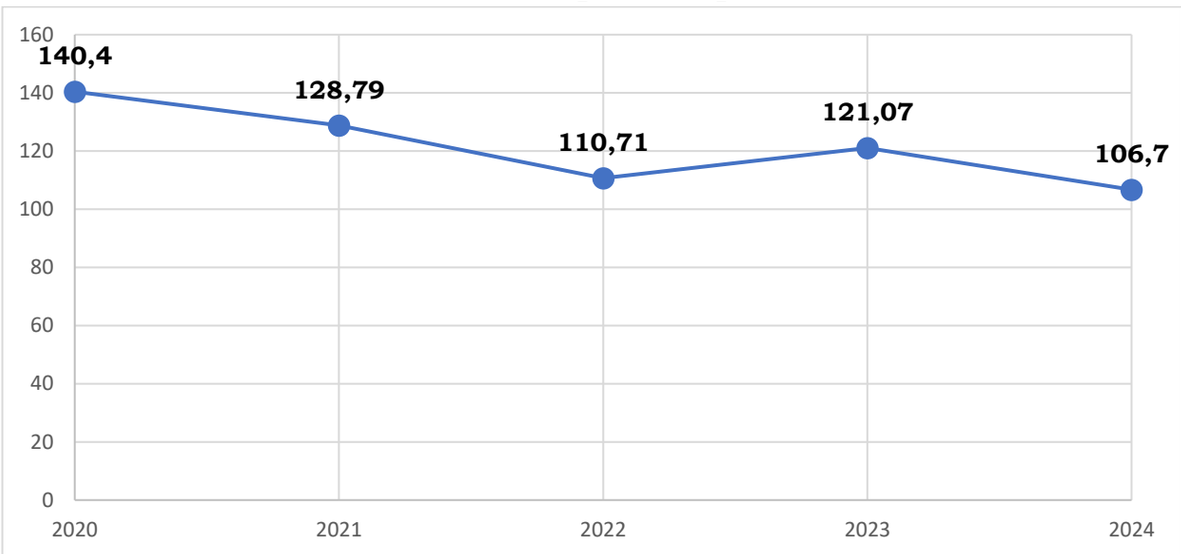

Sumber: *Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2020-2024*

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Tapin berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi yang terdapat di seluruh kecamatan. Berikut merupakan peta persebaran bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tapin:

Gambar II.6
Peta Persebaran Bencana Alam Kabupaten Tapin

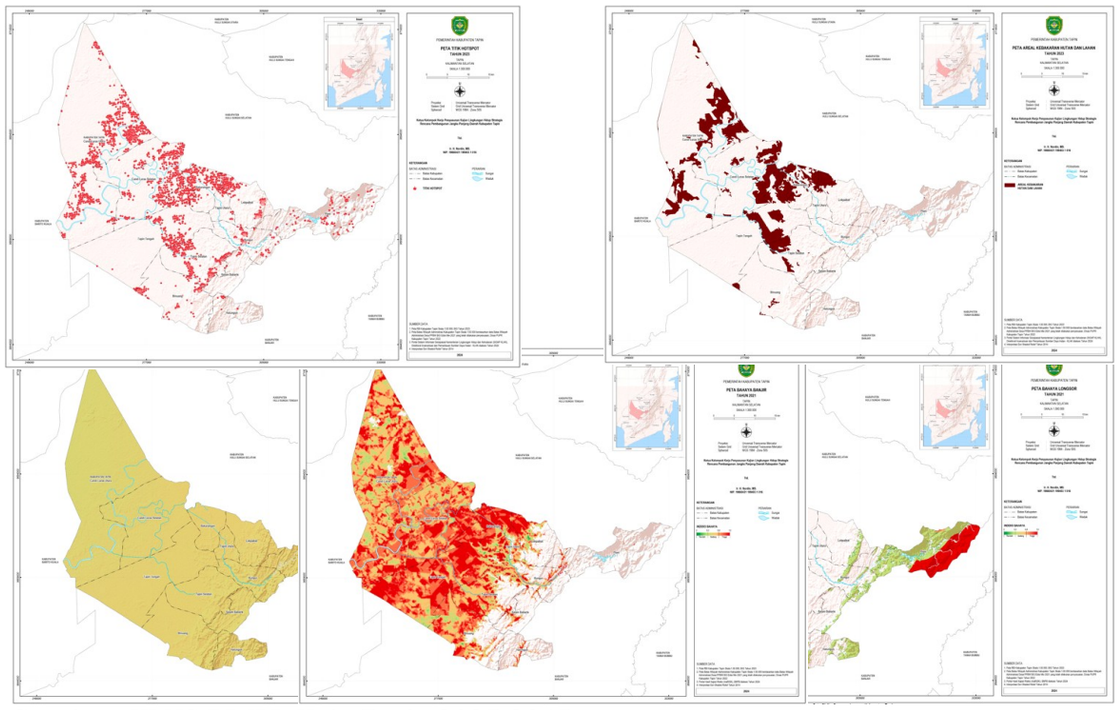

Sumber: *KLHS RPJPD Kab. Tapin 2025-2045*

2.1.1.7. Demografi

Aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Tapin mencakup analisis dan pemahaman karakteristik populasi yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, dimana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah.

1. Kependudukan

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2024 mencapai 202.061 jiwa.

Tabel II.5
Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Binuang	31.258	31.683	32.191	35.536	33.296

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Hatungun	9.256	9.388	9.545	9.912	21.835
3.	Tapin Selatan	20.369	20.622	20.928	21.282	22.099
4.	Salam Babaris	11.858	11.942	12.055	12.583	26.466
5.	Tapin Tengah	21.195	21.583	22.030	21.523	12.825
6.	Bungur	13.246	13.419	13.627	14.404	17.500
7.	Piani	5.770	5.813	5.871	6.334	11.163
8.	Lokpaikat	11.580	11.882	12.221	12.396	6.507
9.	Tapin Utara	25.396	25.628	25.925	26.054	14.780
10.	Bakarangan	10.047	10.200	10.381	10.978	12.715
11.	Candi Laras Selatan	12.362	12.396	12.459	12.608	12.739
12.	Candi Laras Utara	17.138	17.245	17.395	17.283	10.136
	Tapin	**189.475**	**191.801**	**194.628**	**197.893**	**202.061**

Sumber: *Kabupaten Tapin dalam Angka, 2020-2025*

Jika dilihat dari persebarannya, pada tahun 2024 dominasi tempat tinggal penduduk berada di Kecamatan Binuang dengan penduduk sebanyak 33.296 jiwa, Kecamatan Tapin Utara dengan penduduk sebanyak 14.780 jiwa, Kecamatan Tapin Tengah dengan penduduk sebanyak 12.825 jiwa, dan Kecamatan Tapin Selatan dengan penduduk sebanyak 22.099 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Piani dengan penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut sebanyak 11.163 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tapin pada tahun 2024 berada di angka 93 jiwa per kilometer persegi, apabila dilihat dalam capaian lima tahun terakhir, terlihat bahwa pada tahun 2024 menunjukkan angka kepadatan penduduk paling tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah populasi penduduk yang ada di Kabupaten Tapin. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Tapin Utara dengan kepadatan penduduk sebanyak 818 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Candi Laras Utara sebanyak 26 jiwa per kilometer persegi.

Tabel II.6
Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per km^2
Binuang	132,39	33.296	251
Hatungun	95,60	21.835	106
Tapin Selatan	153,44	22.099	142
Salam Babaris	72,80	26.466	175
Tapin Tengah	309,56	12.825	71
Bungur	91,26	17.500	162
Piani	200,09	11.163	33
Lokpaikat	93,89	6.507	135
Tapin Utara	32,34	14.780	818

Kecamatan	Luas (km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per km²
Bakarangan	62,57	12.715	178
Candi Laras Selatan	249,61	12.739	51
Candi Laras Utara	681,40	10.136	26
2024	**2.174,95**	**202.061**	**93**
2023	**2.174,95**	**197.893**	**92**
2022	**2.174,95**	**194.628**	**89**
2021	**2.174,95**	**191.801**	**88**
2020	**2.174,95**	**189.475**	**88**

Sumber: *Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020-2025*

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk terakhir yang dihitung merupakan pertumbuhan penduduk tahun 2020-2024 dimana pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin mencapai 1,65 persen. Adapun kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Lokpaikat dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,40 persen dan disusul oleh Kecamatan Piani sebesar 2,04 persen. Sedangkan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Tapin Utara dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 persen.

Tabel II.7

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2010-2024

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010 - 2020 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2021 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2022 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2023 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2024 (%)
1.	Binuang	1,33	1,36	1,48	1,75	1,75
2.	Hatungun	1,39	1,43	1,55	1,75	1,70
3.	Tapin Selatan	1,21	1,24	1,36	1,57	1,58
4.	Salam Babaris	0,67	0,71	0,83	1,27	0,92
5.	Tapin Tengah	1,80	1,83	1,95	2,21	2,21
6.	Bungur	1,27	1,31	1,43	2,37	2,29
7.	Piani	0,71	0,75	0,87	2,43	2,04
8.	Lokpaikat	2,58	2,61	2,73	2,54	2,40
9.	Tapin Utara	0,88	0,91	1,04	0,93	1,28
10.	Bakarangan	1,49	1,52	1,65	1,90	1,71
11.	Candi Laras Selatan	0,24	0,28	0,39	1,01	1,10
12.	Candi Laras Utara	0,59	0,62	0,75	1,30	1,14
Tapin		-	**1,18**	**1,23**	**1,35**	**1,65**

Sumber: *Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020-2025*

2. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tapin selalu lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, sex ratio Kabupaten Tapin menunjukkan angka 101,27 yang mengindikasikan bahwa diantara 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Tabel II.8 .
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	2024	101.669	100.392	202.061	101,27
2	2023	99.527	98.366	197.893	101
3	2022	98.346	96.282	194.628	102,14
4	2021	96.952	94.849	191.801	102
5	2020	95.810	93.665	189.475	102

Sumber: *Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020-2025*

3. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Analisis kependudukan salah satunya adalah piramida penduduk yang dilihat dari karakteristik umur. Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2024, komposisi penduduk didominasi oleh penduduk dalam usia muda (0-14 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari struktur piramida penduduk daerah, maka penduduk usia muda dan produktif memiliki porsi yang seimbang dimana akan menurun pada usia tua. Hal ini tentu saja menjadi suatu potensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar mampu memberdayakan generasi muda untuk berkreasi dan mengembangkan diri sehingga dapat bersaing di berbagai aspek kehidupan.

Tabel II.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Tapin Tahun 2024 (Jiwa)

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	7.113	6.786	13.899
5-9	8.650	7.931	16.581
10-14	9.276	8.682	17.958
15-19	8.090	7.569	15.659
20-24	8.459	8.128	16.587
25-29	7.780	7.251	15.031

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
30-34	7.924	7.976	15.900
35-39	8.072	8.089	16.161
40-44	8.164	8.008	16.172
45-49	7.218	7.418	14.636
50-54	6.444	6.597	13.041
55-59	5.252	5.496	10.748
60-64	3.897	4.049	7.946
65-69	2.577	2.721	5.298
70-74	1.437	1.648	3.085
75+	1.316	2.043	3.359
Kabupaten Tapin	**101.669**	**100.392**	**202.061**

Sumber: *Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2025*

Kabupaten Tapin memiliki jumlah penduduk sebanyak 202.061 jiwa, dengan kelompok usia 10-14 tahun yang paling banyak, berjumlah 16.581 jiwa. Berdasarkan klasifikasi generasi yang diadopsi dari Badan Pusat Statistik, penduduk di Kabupaten Tapin terdiri dari berbagai generasi, yaitu Generasi Baby Boomers (lahir 1946-1964), Generasi X (lahir 1965-1980), Generasi Y atau Millennials (lahir 1981-1996), Generasi Z (lahir 1997-2012), dan Generasi Alpha (lahir 2013-2025). Data menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Tapin didominasi oleh Generasi Y, Generasi Z, dan Generasi Alpha.

Jumlah penduduk usia produktif, yaitu mereka yang berada dalam kelompok umur 15-64 tahun, mencapai 141.881 jiwa. Sementara itu, kelompok usia non-produktif (0-14 tahun dan >64 tahun) berjumlah 60.180 jiwa. Tingginya jumlah penduduk usia produktif mengindikasikan pentingnya perluasan lapangan pekerjaan untuk memastikan adanya penyerapan tenaga kerja yang memadai. Kondisi ini juga membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk memanfaatkan tenaga kerja usia produktif guna mempercepat pembangunan, terutama di sektor ekonomi.

Gambar II.7
Piramida Penduduk Kabupaten Tapin 2024

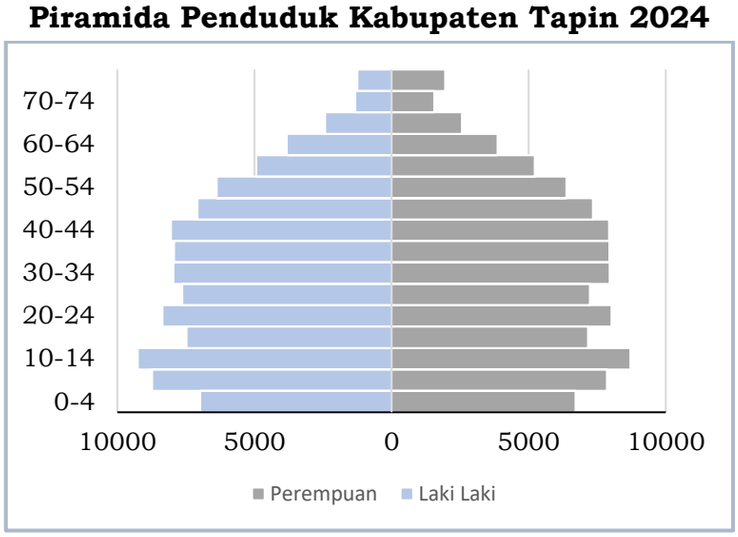

Sumber: *Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2025, diolah*

Piramida penduduk Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa populasi didominasi oleh kelompok usia muda, diikuti oleh kelompok usia produktif, sementara jumlah penduduk usia tua relatif kecil. Piramida penduduk ini memberikan gambaran awal tentang struktur umur penduduk yang dapat digunakan untuk menganalisis produktivitas serta mengevaluasi keberhasilan program-program kependudukan, termasuk program Keluarga Berencana.

Penting untuk mempertimbangkan tren migrasi yang mempengaruhi distribusi penduduk usia produktif di berbagai wilayah. Migrasi dapat memberikan tekanan tambahan pada pusat-pusat layanan publik dan infrastruktur, serta menambah atau mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Selain itu, distribusi penduduk usia produktif yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, proyeksi demografi selama 20 tahun ke depan harus diperhitungkan untuk memprediksi kebutuhan layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menyerap tenaga kerja yang terus bertambah.

4. Keberadaan Masyarakat Adat

Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, yang memiliki keberagaman budaya yang kaya, termasuk masyarakat adat yang tinggal di sana. Beberapa kelompok masyarakat adat yang memiliki keberagaman budaya dan tradisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Suku Banjar: Suku Banjar merupakan kelompok etnis mayoritas di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tapin. Mereka memiliki budaya yang kaya, termasuk dalam hal bahasa, adat istiadat, seni, dan kepercayaan.
2. Suku Dayak: Meskipun mayoritas suku Dayak terdapat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, ada juga masyarakat Dayak yang tinggal di daerah perbatasan Kabupaten Tapin dengan Kabupaten lainnya. Suku Dayak dikenal dengan kehidupan tradisional mereka yang terkait erat dengan hutan dan sungai.
3. Suku Jawa dan Madura: Terdapat juga komunitas suku Jawa dan Madura yang tinggal di Kabupaten Tapin. Mereka membawa tradisi dan budaya khas dari daerah asal mereka di Jawa dan Madura, termasuk dalam hal bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan.
4. Suku Minoritas Lainnya: Selain ketiga kelompok utama di atas, terdapat juga kelompok-kelompok minoritas lainnya seperti suku Bugis, suku Banjar Hulu, dan suku-suku kecil lainnya yang turut berkontribusi dalam keberagaman budaya di Kabupaten Tapin.

Masyarakat adat di Tapin menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka, termasuk dalam hal agama, adat istiadat, bahasa, dan sistem sosial yang unik. Pentingnya menjaga keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Tapin adalah untuk melestarikan warisan budaya yang berharga bagi Indonesia, serta mempromosikan keberagaman budaya yang menjadi salah satu kekayaan bangsa. Pemerintah setempat dan berbagai pihak telah berupaya untuk mendukung dan melindungi hak-hak serta keberlangsungan hidup masyarakat adat di Tapin.

Namun demikian, tantangan seperti modernisasi, perubahan iklim, dan tekanan dari pembangunan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat adat di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus memperhatikan dan menghargai peran serta serta keberadaan mereka dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

5. Proyeksi Demografi Kabupaten Tapin

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Penduduk di Kabupaten Tapin diproyeksikan mengalami peningkatan dalam lima tahun mendatang. Penduduk yang diproyeksikan sejumlah 201,20 ribu jiwa pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 210,02 ribu jiwa pada tahun 2029. Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 105,93 ribu jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 104,08 ribu jiwa sehingga rasio jenis kelamin mencapai 101,78. Penambahan penduduk di setiap tahunnya ini tentu saja meningkatkan kepadatan penduduk dimana pada tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 96-97 jiwa per kilometer persegi.

Kabupaten Tapin pada tahun 2025 hingga 2029 berada pada jendela bonus demografi dimana rasio ketergantungan selama lima tahun tersebut berada di bawah 50. Hal ini mengindikasikan bahwa angka ketergantungan penduduk usia non produktif berada dibawah setengah dari jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus ditindaklanjuti sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik. Adapun bonus demografi bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

Tabel II.10
Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	201,20	203,48	205,72	207,89	210,02
Laki-laki	101,63	102,75	103,84	104,90	105,93
Perempuan	99,57	100,73	101,87	102,98	104,08
Rasio Jenis Kelamin	102,07	102,01	101,93	101,86	101,78
Kepadatan Penduduk	92,51	93,56	94,59	95,58	96,56
Rasio Ketergantungan	47,10	46,90	46,61	46,25	45,91
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)					
0–14	51,62	51,27	50,78	50,16	49,53
15–64	136,78	138,51	140,32	142,14	143,94
65+	12,81	13,69	14,63	15,58	16,56

Sumber: *Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2025, data diolah*

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Tapin merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinamis atau lebih baik. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya. Pada sub bab ini dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Tapin utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian Kabupaten Tapin. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Tapin antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua, yakni atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga-harga pada tahun perhitungan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada tahun yang dijadikan dasar perhitungan. Adapun dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi, menggunakan PDRB atas dasar harga konstan.

Gambar II.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)

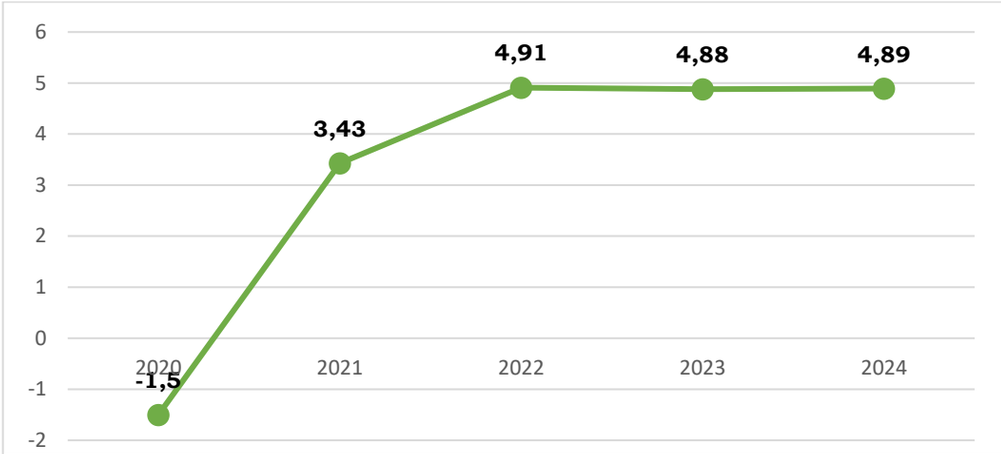

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin berada pada -1,50 persen akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda berbagai sektor. Namun, pada 2021, perekonomian mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 3,43 persen seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan berbagai upaya pemulihan dari pemerintah dan terus meningkat hingga mencapai 4,91 persen pada 2022. Meskipun pertumbuhan sedikit melambat, angka tersebut tetap stabil pada 4,88 persen di 2023 dan 4,89 persen di 2024.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kondisi ekonomi Kabupaten Tapin juga memiliki peran penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 8, yang berfokus pada Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Salah satu aspek utama dari SDG 8 adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong kesempatan kerja yang produktif bagi semua kelompok usia, termasuk kaum muda dan perempuan. Dengan adanya perlambatan ekonomi di beberapa tahun terakhir, pemulihan ekonomi di Tapin harus diarahkan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses ke pekerjaan yang layak dengan upah yang adil dan kondisi kerja yang baik. Dukungan terhadap SDG 8 dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mempromosikan sektor-sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan, dan sektor jasa keuangan, yang telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tahun 2023. Mendorong sektor-sektor ini dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja lokal serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Tabel II.11
Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Laju Pertumbuhan Ekonomi) di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4,34	-1,57	-0,36	3,60	2,74
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,04	5,82	7,84	5,89	4,75
C	Industri Pengolahan	-4,29	4,37	2,69	1,24	4,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,38	4,27	7,40	9,41	4,67

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,33	3,48	4,03	6,53	4,99
F	Konstruksi	-0,68	2,40	4,56	4,76	5,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,23	1,27	7,55	6,17	6,56
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,60	4,68	6,62	5,77	5,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,87	5,62	6,49	6,61	7,18
J	Informasi dan Komunikasi	7,42	7,32	5,31	6,03	6,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,85	-1,34	-1,60	7,58	7,63
L	Real Estate	2,97	3,09	5,71	4,40	2,70
M, N	Jasa Perusahaan	-2,64	5,54	6,19	6,26	4,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,96	3,39	2,23	2,62	5,06
P	Jasa Pendidikan	-0,38	4,59	4,62	3,06	6,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,11	9,13	3,65	6,22	5,72
R, S, T, U	Jasa Lainnya	-0,68	1,30	5,22	6,99	8,60
PDRB		**-1,49**	**3,43**	**4,91**	**4,88**	**4,89**

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

Adapun pertumbuhan ekonomi sektoral tertinggi pada 2024 terdapat pada kategori jasa lainnya yang mencapai 8,60 persen, diikuti oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,63 persen, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 7,18 persen.

Sebagai daerah yang memiliki pondasi ekonomi di sektor pertambangan, tentu memiliki konsekuensi adanya fluktuasi pada skala internasional khususnya ketika terjadi gejolak global. Perubahan pasar global turut berperan dalam mempengaruhi ekonomi lokal. Misalnya, perubahan harga komoditas global dan fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi daya saing produk daerah. Pasar ekspor yang lebih kompetitif dan kebijakan perdagangan internasional dapat meningkatkan atau menekan pertumbuhan di sektor-sektor ekonomi tertentu.

Perubahan iklim juga menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Dampak perubahan iklim terhadap sumber daya alam, terutama dalam sektor pengadaan air, akan semakin menuntut adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan limbah dan daur ulang juga akan menjadi semakin penting, seiring meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan dan kebutuhan akan keberlanjutan.

Adanya perlambatan di beberapa sektor strategis seperti pertanian dan perdagangan tentu menyebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kedepannya diharapkan bertambahnya beberapa sektor potensial di Kabupaten Tapin yang dapat menjadi penggerak utama ekonomi adalah sektor pariwisata, energi terbarukan, serta teknologi pertanian dan perikanan. Pariwisata memiliki potensi besar jika dikembangkan dengan konsep ekowisata dan keberlanjutan.

Energi terbarukan, seperti tenaga surya dan biomassa, dapat menjadi sektor unggulan seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi ramah lingkungan.

2. Angka Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin mengalami perubahan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 3,06%, namun meningkat menjadi 3,6% pada 2021 dan bertahan di angka yang sama pada 2022. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pada 2023, angka kemiskinan mulai menurun menjadi 3,19%, mencerminkan pemulihan ekonomi yang didorong oleh berbagai program bantuan sosial dan penguatan sektor usaha kecil. Namun, pada 2024, angka tersebut kembali meningkat menjadi 3,33%, yang disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa, sehingga kelompok kelas menengah mengalami tekanan ekonomi dan tidak dapat meningkatkan pengeluarannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemulihan ekonomi berlangsung, stabilitas daya beli masyarakat masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Gambar II.9
Angka Kemiskinan (Persen) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

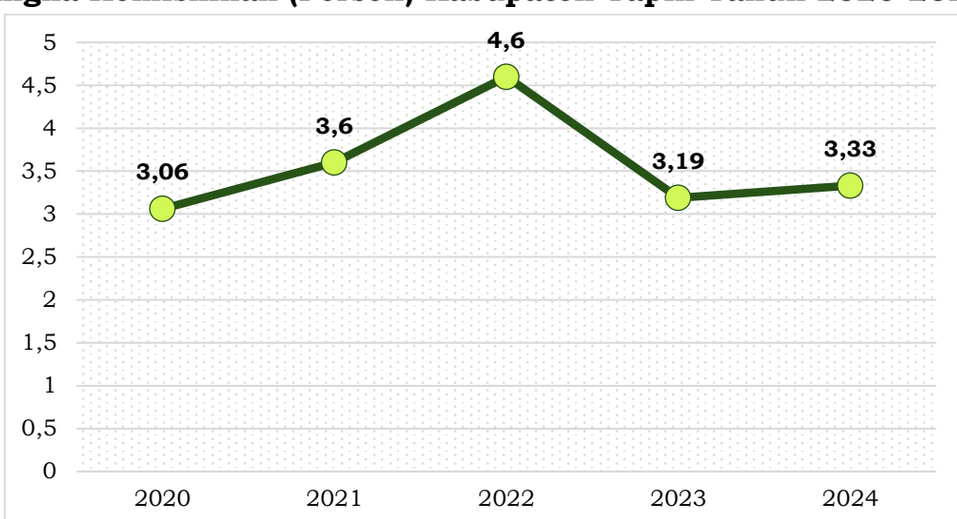

Sumber: *BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025*

Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Tapin juga dipengaruhi oleh peningkatan garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan batas pengeluaran minimum per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Kenaikan harga barang

dari tahun ke tahun berdampak langsung pada peningkatan garis kemiskinan, karena biaya hidup yang lebih tinggi membuat semakin banyak penduduk masuk dalam kategori miskin.

Garis kemiskinan di Kabupaten Tapin terus meningkat sepanjang 2020–2024, dipengaruhi oleh inflasi dan dinamika perekonomian. Pada 2024, garis kemiskinan mencapai Rp561.101, naik dari Rp516.532 pada 2023. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya kebutuhan dasar yang membebani kelompok berpendapatan rendah, sehingga berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Selain angka kemiskinan, terdapat indikator kemiskinan lain yang juga perlu mendapat perhatian, yaitu: dan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan. Berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tapin tercatat sebesar 0,303, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,311. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, menandakan perbaikan kondisi ekonomi kelompok miskin. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan juga menurun dari 0,075 pada tahun 2023 menjadi 0,070 pada 2024. Penurunan ini mencerminkan semakin berkurangnya ketimpangan di antara penduduk miskin, artinya kesenjangan pengeluaran di dalam kelompok masyarakat miskin semakin kecil. Secara keseluruhan, tren penurunan kedua indikator ini mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tapin mulai memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang lebih dalam dan mengurangi kesenjangan di antara kelompok miskin.

Tabel II.12
Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	446.577	459.160	484.113	516.532	561.101
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	5.899	6.925	6.982	6.224	6.554
Persentase Penduduk Miskin (%)	3,06	3,6	3,6	3,19	3,33
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,45	0,283	0,328	0,311	0,303
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,12	0,042	0,071	0,075	0,070

Sumber: *BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025*

3. PDRB per Kapita

Pengukuran kesejahteraan belum bisa dilakukan secara mutlak hanya dengan menggunakan satu indikator. Ada banyak dimensi yang perlu dilihat untuk menyatakan kesejahteraan. Di antara indikator yang sering digunakan untuk melihat kesejahteraan secara ekonomi adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan

tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per satu kepala/penduduk, sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Nilai PDRB per kapita ADHB dan ADHK di Kabupaten Tapin secara umum mengalami peningkatan menjadi 72,40 juta rupiah pada tahun 2024 untuk ADHB, sementara pada capaian PDRB per kapita ADHK menjadi 38,16 juta rupiah. Adapun PDRB per Kapita tertinggi berada di tahun 2024 dan terendah di tahun 2020 dengan capaian 44.42 juta rupiah untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan 33,55 juta rupiah untuk PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel II.13
PDRB per Kapita (Juta Rupiah per Kapita)
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	2020	2021	2022	2023	2024
Atas Dasar Harga Berlaku	44,42	47,17	65,61	69,7	72,4
Atas Dasar Harga Konstan	33,55	34,33	35,55	36,82	38,16

**Angka sementara*
***Angka sangat sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2025

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Tapin dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar II.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin tahun 2020-2024

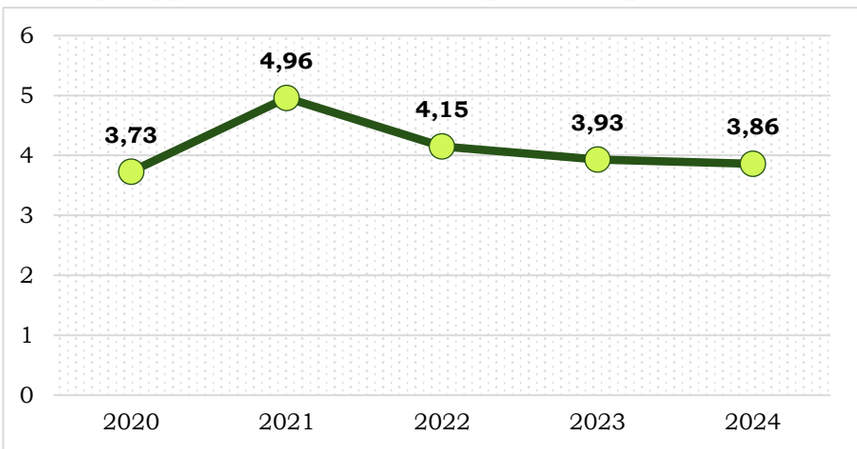

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

Angka pengangguran di Kabupaten Tapin dalam lima tahun terakhir mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 4,96 persen, akibat dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian dan sektor ketenagakerjaan. Setelah mengalami lonjakan pada tahun tersebut, angka pengangguran mulai menurun hingga mencapai 3,86 persen pada tahun 2024.

Meskipun angka pengangguran relatif rendah, kondisi ini perlu dikaji lebih lanjut karena masih banyak pekerja yang memiliki keterampilan terbatas atau tingkat pendidikan rendah, yang berakibat pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi, terutama bagi perempuan, melalui penguatan UMKM, pelatihan keterampilan, serta penyelenggaraan kursus vokasi agar mereka memiliki peluang kerja yang lebih baik dan berdaya saing di pasar tenaga kerja.

5. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horizontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Tapin adalah sulitnya kondisi geografis wilayah. Selain itu, walaupun pemerataan cukup baik, namun dari segi kualitas masih perlu banyak perbaikan. Nilai Koefisien Gini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Tapin mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, mencapai puncaknya pada 2022. Pada 2020, indeks Gini tercatat sebesar 0,274 dan terus naik hingga 0,291 pada 2022, terutama akibat pandemi COVID-19 yang memperburuk ketimpangan pendapatan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, angka ini mulai menurun menjadi 0,281 pada 2023 dan kembali turun ke 0,26 pada 2024, yang tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Penurunan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti bantuan sosial dan penguatan sektor UMKM yang mendukung pemerataan pendapatan.

Meskipun ketimpangan telah berkurang dalam dua tahun terakhir, upaya menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi tetap diperlukan agar kesenjangan tidak kembali meningkat. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat kebijakan yang mendukung inklusivitas ekonomi dan akses peluang usaha bagi kelompok rentan.

Gambar II.11
Indeks Gini Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

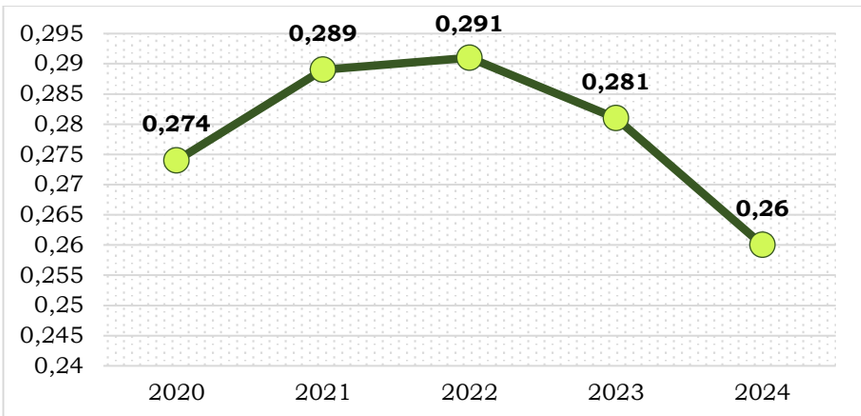

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan,baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar II.12
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

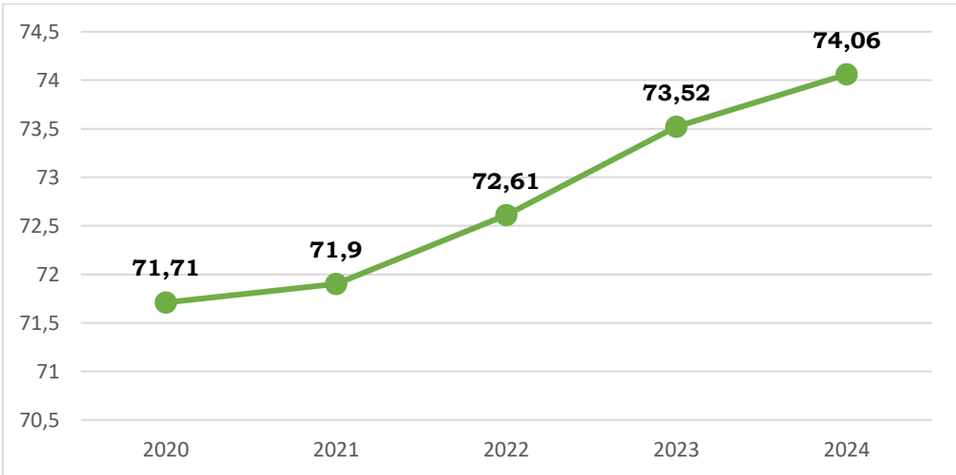

**Menurut UHH Hasil Long Form SP2020*
Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan capaian IPM juga diikuti oleh peningkatan komponen penyusunnya. Nilai IPM sepanjang tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini didukung komponen penyusun IPM di antaranya Rata-rata lama sekolah bertambah dari 7,76 tahun pada 2020 menjadi 8,15 tahun pada 2024, sementara harapan lama sekolah meningkat dari 11,94 tahun menjadi 12,34 tahun, mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan. Di bidang kesehatan, indeks kesehatan naik dari 0,830 menjadi 0,842, sejalan dengan angka harapan hidup yang meningkat dari 73,92 tahun menjadi 74,72 tahun, menunjukkan perbaikan layanan kesehatan. Capaian pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2020 sebesar Rp 11.841.000/kapita/tahun dan terus meningkat hingga mencapai Rp 13.163.000/kapita/tahun pada tahun 2024.

Tabel II.14
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	**-**	**71,71**	**71,9**	**72,61**	**73,52**	**74,06**
Indeks Pendidikan	-	0.590	0.591	0.599	0.611	0.614

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.76	7.77	7.95	8.05	8.15
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.94	11.95	12.04	12.33	12.34
Indeks Kesehatan	-	0.830	0.832	0.837	0.838	0.842
Angka Harapan Hidup	Tahun	73.92	74.09	74.39	74.47	74.72
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Kapita/Tahun	11841000	11952000	12247000	12776000	13163000

**Menurut Hasil Long Form SP2020*
Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Dari indikator angka harapan hidup, terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan secara simultan, di mana angka harapan hidup masyarakat pada tahun 2020 sebesar 73,92 tahun meningkat hingga menjadi 74,72 tahun di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 74-75 tahun.

Gambar II.13
Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

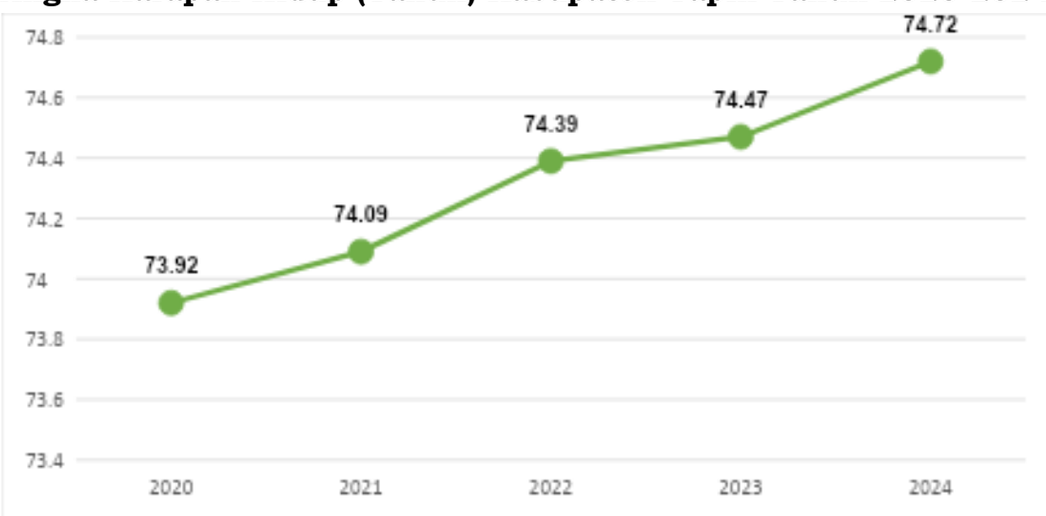

**Menurut UHH Hasil Long Form SP2020*
Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

Pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Tapin dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren angka yang cukup berbeda-beda. Pada tahun 2020, Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat sebesar 149 per 100.000 kelahiran hidup, namun melonjak tajam menjadi 385 pada tahun 2021. Meskipun demikian, tren menunjukkan penurunan bertahap di tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai 226 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya intensif Pemerintah Kabupaten Tapin dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak,

baik melalui peningkatan fasilitas kesehatan maupun intervensi medis yang lebih tepat waktu dan terjangkau.

Sementara itu, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan dan penurunan angka. Setelah menurun dari 13,73 persen pada tahun 2020 menjadi 11,54 persen pada tahun 2021, angkanya kembali meningkat menjadi 14,50 persen pada tahun 2022, dan meskipun sedikit menurun pada 2023, prevalensinya masih berada di angka 12,34 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi perbaikan gizi dan pola asuh masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal ketahanan pangan rumah tangga, edukasi ibu, serta ketersediaan layanan gizi di tingkat desa dan puskesmas.

Tabel II.15
Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	149,00	385,00	301,00	294,43	226
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,73	11,54	14,50	14,09	12.34
3	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	20,23	28,92	35,65	47,32	47.50
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	N/A	N/A	N/A	59,84	100

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024*

Dalam hal penanggulangan tuberkulosis (TBC), cakupan penemuan dan pengobatan kasus menunjukkan tren positif yang sangat jelas. Dari hanya 20,23% pada tahun 2020, cakupan meningkat secara konsisten hingga mencapai 47,50% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan penguatan sistem surveilans dan peran aktif tenaga kesehatan dalam pelacakan serta pengobatan pasien TBC. Selain itu, lonjakan signifikan dalam cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 59,84% pada 2023 menjadi 100% pada 2024 menandai pencapaian penting dalam menjamin akses layanan kesehatan yang lebih merata dan inklusif bagi seluruh penduduk Kabupaten Tapin.

Selanjutnya beberapa capaian terkait kesehatan Kabupaten Tapin dapat dilihat dari cakupan imunisasi bayi lengkap yang mencapai 75,95 persen ditahun 2024, persentase hipertensi dalam pengendalian mencapai 10,83 persen ditahun 2024, capaian proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup mencapai 37 persen ditahun 2024. Kemudian terkait dengan kondisi gizi masyarakat Kabupaten Tapin dapat dilihat pada beberapa capaian prevalensi Ibu Hamil anemia yang mencapai 19,25 ditahun 2024, Persentase Remaja Putri Anemia yang mencapai 29,24 persen ditahun 2024. Selanjutnya pada indikator persentase Balita Gizi Buruk mencapai 0,8 persen ditahun 2024 dan persentase Balita gizi kurang mencapai 5,2 ditahun 2024.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas memperlihatkan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapin mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 8,15 tahun pada tahun 2024. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 terlihat cukup landai dengan penambahan 0,01 poin setiap tahunnya kemudian pada tahun 2021 hingga 2024 terlihat peningkatan yang signifikan. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam bangku pendidikan selama 8,15 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMP kelas 2. Dengan begitu, capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapin perlu perhatian khusus karena belum dapat menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.

Gambar II.14
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

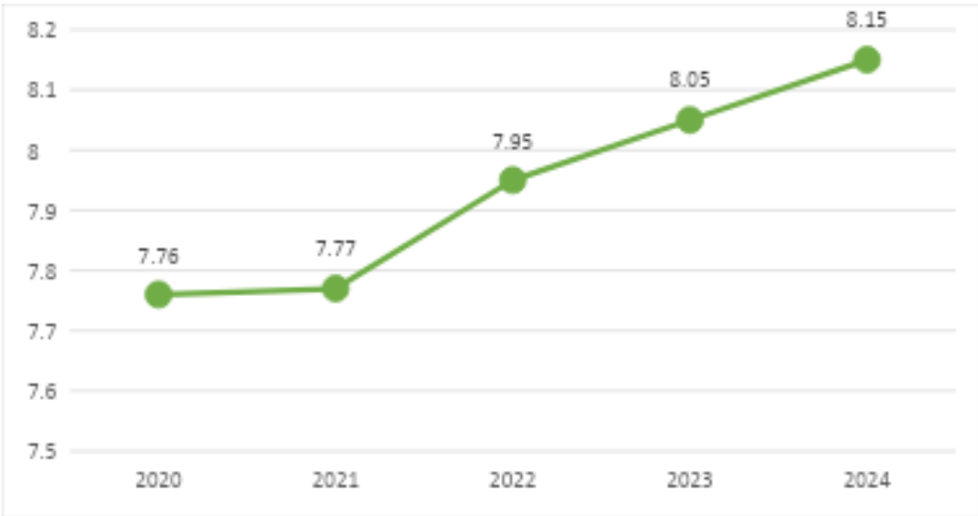

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi

karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Pada capaian harapan lama sekolah Kabupaten Tapin mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2024, capaian harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Tapin berada pada 12,34 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk usia sekolah (7 tahun) pada tahun 2024 memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun atau pendidikan yang setara dengan SMA kelas 3.

Gambar II.15
Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

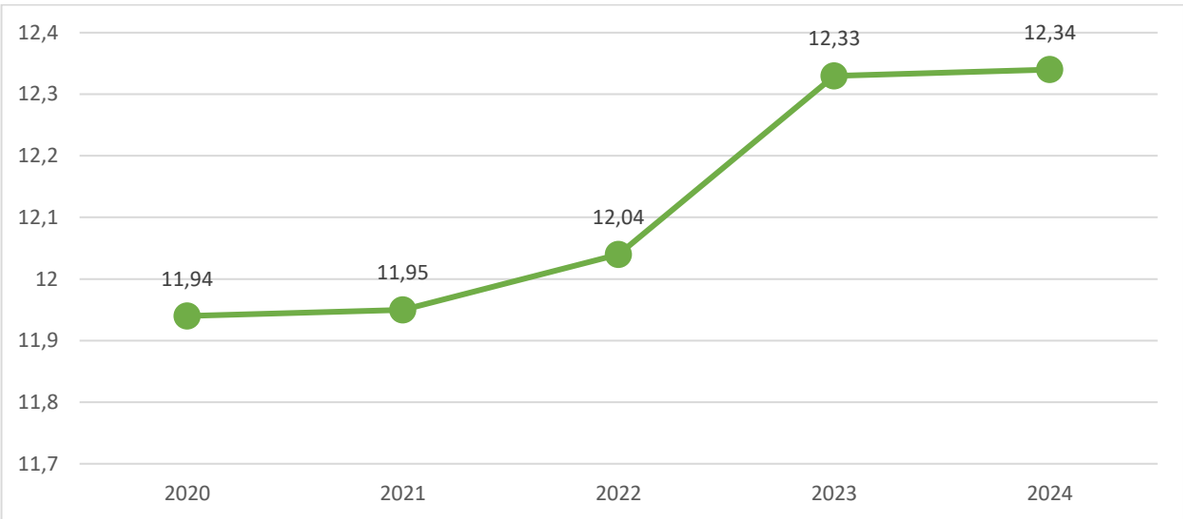

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

c. Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

Tabel II.16
Indeks Pendidikan dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	Poin	59,03	59,09	59,94	61,08	61,44

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,76	7,77	7,95	8,05	8,15
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,94	11,95	12,04	12,33	12,34

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

Potret pendidikan di Kabupaten Tapin dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Kedua indikator ini selalu mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terlihat dari tabel bahwa Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2020 yaitu 7,76 tahun dan di tahun 2024 nilai rata-rata lama sekolah menjadi 8,15 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat Tapin yang berusia 25 tahun ke atas secara rata-rata mengenyam bangku pendidikan selama 8,15 tahun atau menduduki kelas 3 SMP. Sedangkan Harapan Lama Sekolah juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 sebesar 11,94 tahun dan di tahun 2024 nilai HLS meningkat kembali hingga 12,34 tahun. Capaian ini mengindikasikan adanya harapan bagi masyarakat Kabupaten Tapin yang memasuki usia sekolah pada tahun 2024 untuk menempuh pendidikan hingga 12,34 tahun atau memasuki pendidikan tinggi.

Indikator yang dianalisis berikutnya adalah indeks pendidikan yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Tapin meningkat seiring berjalannya program pendidikan oleh pemerintah daerah dimana capaian pada tahun 2024 mencapai 61,44. Masih belum optimalnya capaian pendidikan ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, khususnya stakeholder terkait, sehingga mampu mewujudkan akselerasi pembangunan SDM Kabupaten Tapin.

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat berperan penting dalam meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Literasi yang baik di masyarakat tidak hanya mencakup kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi juga literasi digital, numerasi, dan literasi fungsional yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan ekonomi modern. Nilai indeks pembangunan literasi masyarakat mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 79,60 persen. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2021 yang mencapai 27,15 persen dan tahun 2022 sebesar 42,29 persen. Angka literasi di tahun 2024 juga mengalami peningkatan hingga mencapai 81,11.

Tabel II.17
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	10	0	49,02	50,87	53.52
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	27,15	42,29	79,60	81,11

Sumber: *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025*

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mengalami kenaikan menjadi 49,02 persen pada tahun 2022 dan 50,87 persen di tahun 2023 dan meningkat di tahun 2024 hingga mencapai 53,52. Nilai ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki minat baca di tengah era digital yang menyediakan hiburan pada telepon genggam.

Dalam rangka mengukur kemampuan literasi digital di Kabupaten Tapin, dengan merujuk pada capaian indeks literasi digital Provinsi Kalimantan Selatan yang ditahun 2022 mencapai 3,48. Jika melihat capaian nasional sebesar 3,54 ditahun 2022, maka Provinsi Kalimantan Selatan capaian indeks literasi digital masih dibawah nasional. Dengan ini, nantinya Kabupaten Tapin akan mendukung dengan kebijakan yang selaras dengan pembangunan provinsi Kalimantan Selatan sehingga Kabupaten Tapin mampu berkontribusi maksimal dalam pencapaian indeks literasi digital.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

Salah satu cara untuk melihat efektivitas perlindungan sosial, khususnya bantuan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya adalah peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Tapin menyentuh angka Rp. 11.841,00,- ribu/kapita/tahun di tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan daya beli yang ditandai dengan pergerakan pengeluaran perkapita yang terus meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 13.163,00,- ribu/kapita/tahun.

Gambar II.16
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu/Kapita/Tahun)
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

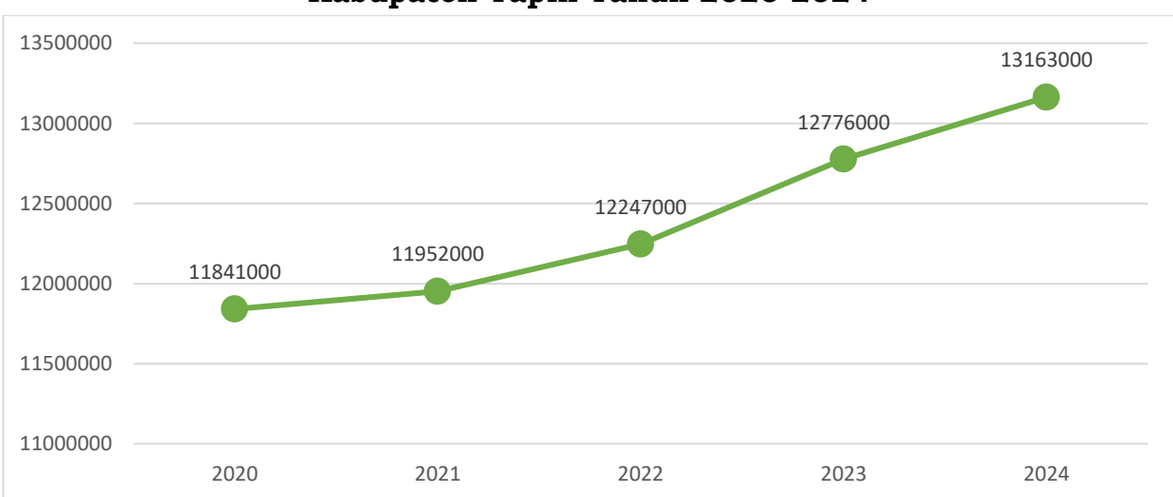

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita juga dapat mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif

tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Dalam data capaian lima tahun terakhir terlihat pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan dan bukan makanan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, pengeluaran penduduk untuk makanan dalam sebulan di Kabupaten Tapin mencapai Rp. 828.391,- atau setara dengan 52,61 persen dengan dominasi pengeluaran untuk makanan dan minuman yaitu sebesar 18,06 persen, sedangkan pengeluaran untuk kategori bukan makanan mencapai Rp. 746.065,- atau setara dengan 47,39 persen dan didominasi untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai 26,32 persen. Tingginya pengeluaran konsumsi bukan makanan ini mengindikasikan bahwa masyarakat berfokus pada kecukupan kebutuhan sekunder dan tersier daripada kebutuhan primer. Kemudian pada tahun 2024 pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat Kabupaten Tapin pada makanan mencapai 55 persen dan bukan makanan mencapai 45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Tapin masih memprioritaskan/mengutamakan bahan makanan sebagai pengeluaran utama. Sehingga secara ekonomi masyarakat Kabupaten Tapin masih pada level menengah.

Tabel II.18
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	721.745	731.093	712.819	828.391	912 127
Bukan Makanan	594.408	595.119	630.983	746.065	1.660.237
Proporsi (%)					
Makanan	54,84	55,13	53,04	52,61	55
Bukan Makanan	45,16	44,87	46,96	47,39	45

Sumber: *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin, 2025*

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan pemberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka menengah daerah tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan

pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

Arah pembangunan ini menjelaskan tentang penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Terkait beragama maslahat dapat diinterprestasikam dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama yang ditahun 2024 Kabupaten Tapin mencapai 81. Kemudian terkait dengan kebudayaan dapat digambarkan melalui indeks pembangunan kebudayaan yang capaian Kabupaten Tapin merujuk pada capaian Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 58,55 ditahun 2024.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pada arah pembangunan ini menjelaskan tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Data capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat peningkatan pada nilai Indeks Pembangunan Gender. Tahun 2019, nilai IPG Kabupaten Tapin berada di angka 84,44 dan menjadi 85,78 pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pembangunan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam hal kualitas hidup. Sedangkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IDG) yang menunjukkan sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 73,53, dimana nilai tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 (65,16). Hal tersebut juga merupakan perkembangan positif yang menunjukkan keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal keterlibatan perempuan pada sumbangan pendapatan, sebagai tenaga profesional dan keterlibatan dalam parlemen.

Tabel II.18
Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender	84,44	84,58	84,74	84,99	85,78

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pemberdayaan Gender	65,16	64,97	73,19	72,82	73,53
Indeks Ketimpangan Gender	0,61	0,605	0,586	0,581	0,563

Catatan: **Menurut UHH hasil Long Form SP2020*
Sumber: *BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024*

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek Pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, ketimpangan gender di Kabupaten Tapin mengalami penurunan capaian. Dimana pada tahun 2019 capaian IKG Kabupaten Tapin berada di angka 0,610 dan terus menurun hingga tahun 2023 menjadi 0,563. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Tapin semakin mengecil. Pembangunan dan partisipasi perempuan juga dapat dilihat pada tingkat partisipasi politik dan perempuan dilegislatif yang mana sejumlah 2 orang perempuan sebagai anggota DPRD, dengan total anggota DPRD tahun 2024 sebanyak 25. Sehingga tingkat partisipasi politik dan perempuan sebesar 8 persen.

Dalam dinamika pembangunan keluarga yang berkualitas, pembangunan anak menjadi hal yang cukup penting diperhatikan. Adapun beberapa capaian terkait dengan pembangunan dapat dilihat pada indeks perlindungan anak, indeks pemenuhan hak anak,dan indeks perlindungan khusus anak yang digunakan yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Indonesia. Sedangkan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan khusus anak. Jadi IPA merupakan indikator komposit yang mencakup IPHA dan IPKA. IPA Kabupaten Tapin tahun 2023 mencapai 64,15 kemudian pada IPHA Kabupaten Tapin mencapai 61,70 dan IPKA Kabupaten Tapin mencapai 79,47.

Kemudian terkait pembangunan kualitas keluarga untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak anak. Indeks Kualitas Keluarga yang dibahas dalam publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan keluarga guna mewujudkan kesetaraan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan kualitas keluarga. Pada saat ini Indeks kualitas keluarga Kabupaten Tapin merujuk pada Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian ditahun 2023 sebesar 79,23.

Selanjutnya pada pembangunan pemuda yang dilihat dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda, Kabupaten Tapin merujuk pada capaian Provinsi Kalimantan Selatan yang ditahun 2024 mencapai 54,67. Jika dibandingkan dengan capaian nasional ditahun 2024 mencapai 56,33, maka Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan masih dibawah capaian nasional.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2020 adalah 46,20 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 46-47 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Adapun tahun 2024 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 47,14 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 47-48 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Kenaikan rasio ketergantungan ini mengindikasikan beban penduduk usia produktif dalam menanggung kebutuhan usia non produktif semakin tinggi.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Tapin berada di bawah 50 yang menjadikan Kabupaten Tapin berada pada jendela bonus demografi. Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan kondisi bonus demografi seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk

meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, dan pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan, dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Tabel II.19
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk usia <15 tahun	50,83	51,24	51,55	51,75	51,78
Jumlah penduduk usia >64 tahun	8,86	9,57	10,32	11,11	11,94
Jumlah penduduk usia tidak produktif	59,69	60,81	61,87	62,86	63,72
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	129,21	130,71	132,14	133,62	135,17
Rasio ketergantungan	**46,20**	**46,52**	**46,82**	**47,04**	**47,14**

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2035 (data diolah)*

2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan Iptek dan inovasi di Kabupaten Tapin menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka menengah maupun panjang.

Dalam rangka perwujudan akselerasi pembangunan ekonomi di daerah adalah dengan menciptakan kinerja ekonomi berbasis hilirisasi, khususnya pada hilirisasi potensi unggulan daerah. Hilirisasi merupakan suatu proses pengolahan suatu barang untuk meningkatkan nilai tambah sehingga lebih bernilai jual. Tujuan akhir dari hilirisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja. Namun pada prosesnya, terjadi penurunan rasio PDRB industri pengolahan yang memperlihatkan adanya penurunan daya saing sektor tersebut dalam struktur ekonomi Kabupaten Tapin. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi tetap dijaga sehingga masih ada peluang untuk akselerasi sektor hilirasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

Selain hilirisasi, sektor kepariwisataan juga memiliki peluang tinggi dalam mengakselerasi kinerja perekonomian daerah. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan modal yang minim, kepariwisataan mampu memberi daya ungkit terhadap perekonomian tidak hanya pada sektor pariwisata, namun juga sektor penunjang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan wisatawan. Terlihat adanya peningkatan rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendukung utama kepariwisataan daerah dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 2,03 persen. Meskipun angka ini menurun dibandingkan tahun 2021, namun kenaikan pasca pandemi COVID-19 menjadikan kinerja ekonomi kepariwisataan kembali meningkat seiring pemulihan ekonomi daerah.

Tabel II.20
Capaian Produktivitas Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	6,65	6,57	5,13	4,71	4,80
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	2,44	2,38	1,90	1,94	2,03
3	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,63	4,84	4,76	4,72	N/A

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

Pengembangan perekonomian berbasis kewirausahaan harus menjadi perhatian pemerintah dimana rasio kewirausahaan di Kabupaten Tapin masih cukup rendah. Meskipun mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun rasio kewirausahaan daerah perlu diupayakan, khususnya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik dalam pendampingan, permodalan, proses hingga pemasaran.

Daya saing ekonomi Kabupaten Tapin dapat juga dilihat dari indikator seperti proporsi jumlah industri kecil dan menengah di level kabupaten yang mengalami peningkatan dari 0,96 persen pada tahun 2020 menjadi 1,26 persen di tahun 2023. Selain itu, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, cenderung stabil dengan nilai rendah, sekitar 0,05 persen hingga 0,08 persen selama lima tahun.

Dari sisi indikator *Return On Asset* (ROA) pada BUMD untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menunjukkan fluktuasi, dengan nilai tertinggi di tahun 2021 sebesar 12,27 persen namun kemudian turun hingga 0,55 persen di tahun 2023. Hal yang sama terjadi pada ROA BUMD untuk PDAM yang sempat negatif di tahun 2020, tetapi stabil di angka positif pada 2023 sebesar 1,14 persen. Data ini memberikan gambaran umum mengenai perkembangan dan tantangan daya saing ekonomi Kabupaten Tapin selama lima tahun terakhir.

Tabel II.21
Indikator Perkembangan IKM, Koperasi dan BUMD
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	0,96	1,31	1,16	1,26	N/A
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,06	0,04	0,05	0,05	N/A
3	Return on Aset (ROA) BUMD (%) (BPR)	-9,09	-12,27	0,58	0,55	N/A
4	Return on Aset (ROA) BUMD (%) (PDAM)	-5,34	1,53	1,20	1,14	N/A

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia

kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Gambar II.17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

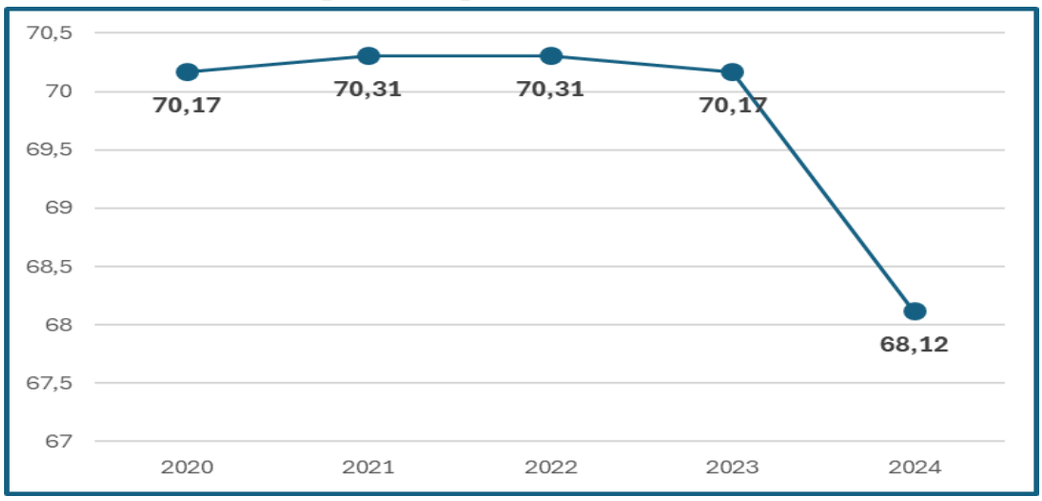

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai titik terendah di tahun 2024 dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68,12. Penurun ini tentu menurunkan produktivitas masyarakat dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam bekerja maupun mencari pekerjaan.

Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih baik, sehingga perlu adanya kebijakan stimulus dalam akselerasi peningkatan lapangan usaha maupun kewirausahaan. Meskipun begitu, penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun tahun-tahun sebelumnya harus diperhatikan dan dikaji agar tidak menjadi permasalahan pembangunan ketenagakerjaan di masa mendatang.

Kemudian kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja merupakan hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan daya serap dan daya saing tenaga kerja dengan adanya jaminan kepersetaan tenaga kerja. Para Pekerja diharapkan mampu bekerja lebih maksimal karena hak-hak sebagai tenaga kerja terpenuhi dengan baik. Memahami hal tersebut, capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2024 sebesar 85. Dengan capaian ini harapannya akan ditingkatkan kepesetan tenaga kerja, sehingga akan terpenuhi dan terlindungi hak-hak sebagai tenaga kerja.

Inovasi daerah merupakan salah satu kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat, inovasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adapun pencapaian inovasi di Kabupaten Tapin terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2024 memiliki capaian yang meningkat signifikan hingga mencapai 68,67 dengan kategori Sangat Inovatif. Beberapa tahun terakhir dibuat aplikasi sebagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga memberi peningkatan yang signifikan dalam kinerja inovasi daerah. Meskipun begitu, capaian ini masih bisa ditingkatkan untuk memeratakan pelayanan

terhadap masyarakat sehingga inovasi berbasis digitalisasi ini dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien hingga wilayah terdalam.

Gambar II.18
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2021-2024

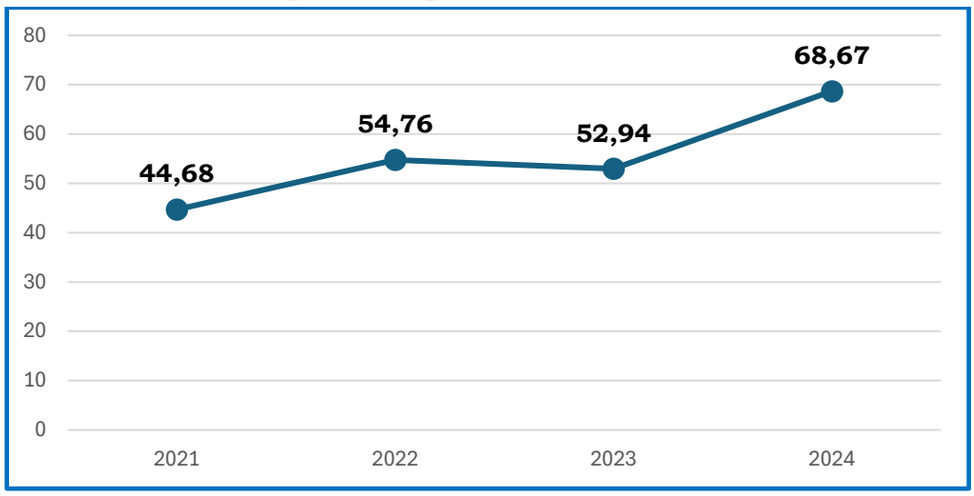

Sumber: *Kementerian Dalam Negeri, 2021-2025*

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Tapin terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dan biru ini relevan dengan indeks ekonomi hijau dan indeks ekonomi biru. Dengan ketersediaan data yang ada, Indeks ekonomi hijau dan biru diproxykan pada indikator Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta indikator Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%), dengan penjelasan dibawah ini.

Capaian kinerja pembangunan yang berkelanjutan terlihat dari aktivitas sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara umum, terkadi fluktuasi dalam pembangunan ekonomi berbasis lingkungan hidup berkelanjutan tersebut dimana sempat terjadi kontraksi ekonomi sektor pertanian pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dimana tahun 2020 mencapai -4,34 persen. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kembali positif dengan capaian 3,60 persen. Pada tahun 2024, kembali terjadi gejolak perekonomian sektor pertanian dimana pada tahun tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian menjadi sebesar 2,74 persen. Kondisi fluktuasi sektor pertanian ini juga menyebabkan labilnya kontribusi sektor pertanian pada struktur ekonomi Kabupaten Tapin dimana mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 14,46 persen, setelah pada tahun 2020 sempat mencapai angka 20,45 persen.

Tabel II.22
Capaian Perekonomian Sektor Pertanian
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	-4,34	-1,57	-0,36	3,6	2,74
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	20,45	18,25	13,89	14,26	14,46

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui e-*commerce, fintech*, dan inovasi teknologi lainnya. Infrastruktur digital yang kuat juga mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah, sehingga mempercepat distribusi informasi, barang, dan jasa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas, baik melalui platform pembelajaran daring maupun sistem *telemedicine*. Pembangunan yang berbasis digital juga mendorong keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta menciptakan solusi ramah lingkungan.

Adapun pencapaian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Tapin sebesar 6,07 pada tahun 2023. Angka ini pada dasarnya sudah melebihi dari capaian angka Nasional yang mencapai 5,90 pada tahun yang sama. Meskipun sudah melebihi capaian Nasional, namun pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Tapin masih memerlukan perbaikan dan pemerataan, khususnya pada daerah-daerah yang sulit akses komunikasi.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan derah akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok secara global. Hasil dari arah pembangunan ini dapat terlihat pada beberapa indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun ekspor barang dan jasa yang diindikasikan melalui net ekspor barang dan jasa dari PDRB menurut pengeluaran. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin, progress positif terlihat dari tingginya pencapaian ekspor dibandingkan impor yang diindikasikan dari tingginya Net Ekspor Barang dan Jasa yang memiliki kontribusi dalam struktur ekonomi Tapin hingga mencapai 30,92 persen di tahun 2024. Namun, kontribusi PMTB yang merupakan pembangunan barang modal seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan jembatan, serta mesin dan peralatan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir hingga mencapai 17,48 persen di tahun 2024.

Rendahnya pertumbuhan pada masa Pandemi COVID-19 pada pembangunan barang modal menjadi penentu penurunan tersebut, bahkan sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar -0,99 persen.

Tabel II.23
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,99	0,48	5,09	5,30	5,57
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,40	20,62	16,70	17,15	17,48
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	24,28	19,71	34,83	33,07	30,92

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah baik perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Tapin. Pembangunan perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang memiliki keunggulan pada potensi daerah perlu diperhatikan secara seksama dalam pembangunan periode saat ini. Salah satu indikator dalam melihat pembangunan perkotaan maupun perdesaan adalah dengan menganalisa persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Indikator ini akan melihat bagaimana kesejahteraan masyarakat dari sisi infrastruktur perumahan dan permukimannya sehingga dapat hidup dengan layak. Pencapaian indikator ini di Kabupaten Tapin juga masih cukup rendah, namun mengalami kenaikan di tahun 2023 dan 2024. Adapun pencapaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan pada tahun 2023 sebesar 63,03 persen dan tahun 2024 sebesar 65,90 persen.

Gambar II.19
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

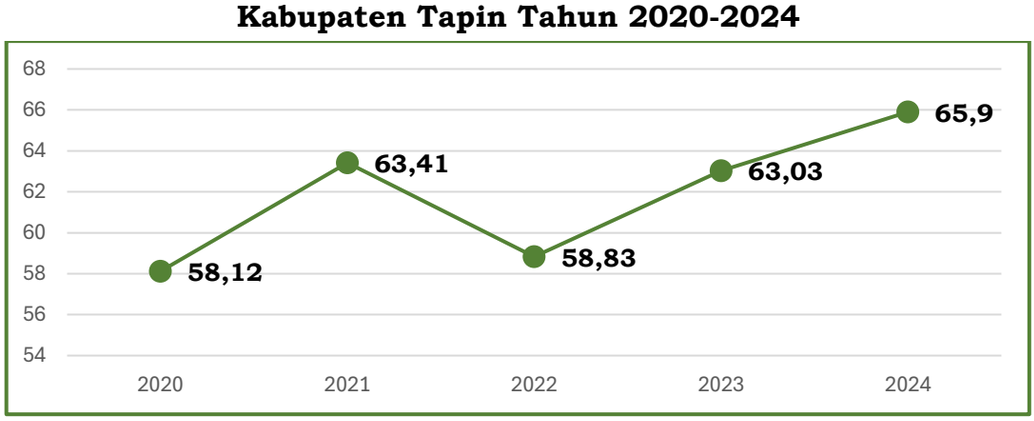

Sumber: *BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025*

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta

penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun di Kabupaten Tapin pada tahun 2023 memiliki 12 desa berstatus desa mandiri sehingga persentase desa mandiri di Kabupaten Tapin mencapai 9,52 persen. Kemudian pada tahun 2024 status desa mandiri di Kabupaten Tapin meningkat hingga menjadi 75 desa dari 126 desa, sehingga persentase desa mandiri di Kabupaten Tapin tahun 2024 menjadi 59,52 persen.

Infrastruktur pembangunan merupakan salah satu pelayanan publik yang dihadirkan pemerintah dalam meningkatkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat baik kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan yang baik akan menyediakan sarana prasarana fisik sehingga mampu mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Salah satunya terkait konektivitas wilayah. Panjang jalan di Kabupaten Tapin selama lima tahun terakhir adalah sepanjang 617,15 km. Apabila ditinjau dari jenis permukaan jalan pada tahun 2023, dapat dirinci permukaan jalan yang teraspal sepanjang 476,91 km atau sepanjang 77,28 persen dari total panjang jalan di Kabupaten Tapin. Sedangkan apabila ditinjau dari kondisi jalan, hanya terdapat 84,8 km jalan dengan kondisi baik di tahun 2023, terdapat 348,35 km jalan dengan kondisi jalan sedang, 94,3 km jalan dengan kondisi rusak dan terdapat 89,7 km jalan dengan kondisi rusak berat. Kemudian pada tahun 2024 jalan pada permukaan aspal mengalami peningkatan dan diiringi meningkatnya kondisi jalan baik di tahun 2024 yang mencapai 107,03 Km. Sedangkan pada jalan dengan kondisi rusak mencapai 82,44 Km dan rusak berat mencapai 171,44 Km.

Tabel II.24
Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Keadaan Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis Permukaan Jalan					
Aspal	493,34	416,96	489,19	476,91	486,02
Kerikil	53,15	84,34	79,82	63,53	70,55
Tanah	29,2	80,46	16,04	34,27	31,37
Tidak Dirinci	41,5	35,39	32,1	42,44	3,17
Jumlah	**617,15**	**617,15**	**617,15**	**617,15**	591,11
Kondisi Jalan					
Baik	258,00	56,00	124,95	84,8	107,03
Sedang	155,47	376,72	317,01	348,35	230,2
Rusak	73,42	108,56	49,25	94,3	82,44
Rusak Berat	130,26	75,87	125,94	89,7	171,44
Jumlah	**617,15**	**617,15**	**617,15**	**617,15**	**591,11**

Sumber: *Kabupaten Tapin dalam Angka, 2020-2025*

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Stabilitas ekonomi makro juga merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta defisit

fiskal dan neraca perdagangan yang terkelola dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Stabilitas ini menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas penerimaan pajak daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak, khususnya pajak daerah Kabupaten Tapin, terhadap total nilai tambah yang dihasilkan di Kabupaten Tapin dalam periode tertentu. Semakin tinggi rasio pajak terhadap PDRB, semakin optimal pula kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Adapun capaian rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Tapin masih belum optimal dimana pada tahun 2024 hanya mencapai 0,24 persen. Capaian rasio tersebut juga masih bersifat fluktuatif dimana sempat terjadi kenaikan hingga 0,31 persen di tahun 2021 dan menurun kembali di tahun berikutnya menjadi 0,21 persen. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya kepatuhan pajak, lemahnya sistem administrasi perpajakan, atau tingginya tingkat ekonomi informal yang belum terjangkau oleh sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kebijakan perpajakan dengan cara memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor produktif agar tetap tumbuh tanpa terbebani pajak yang berlebihan.

Tabel II.25
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah (Milyar Rp)	PDRB adh Berlaku(Milyar)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2020	98,89	17,11	8.393,89	0,20
2021	121,44	29,44	9.387,41	0,31
2022	92,89	27,43	12.771,26	0,21
2023	100,13	28,40	13.694,18	0,21
2024	103,49	34,79	14.407,15	0,24

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, BKAD Kabupaten Tapin, Tahun 2025 (data diolah)*

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tapin dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Implementasi reformasi birokrasi pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan Kabupaten Tapin terus diupayakan dan ditingkatkan kualitasnya. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian 73,89 dan 76,27 dengan kategori BB. Hal ini juga dipicu dengan perkembangan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tapin dimana nilai SAKIP mengalami kenaikan. Nilai SAKIP pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 71,00 dengan kategori BB meningkat dari beberapa tahun sebelumnya yang berpredikat kategori B. Meskipun mengalami kenaikan, capaian ini masih memerlukan upaya dalam meningkatkan performa pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada pencapaian Indeks Reformasi Hukum yang merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana daerah telah melaksanakan reformasi hukum dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, serta keadilan dan transparansi dalam sistem pemerintahan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Capaian Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2023 sebesar 57,82 dan meningkat menjadi 86,44 di tahun 2024.

Tabel II.26
Capaian Pembangunan Pemerintahan
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Reformasi Birokrasi	CC (53,12)	CC (53,94)	CC (55,00)	BB (73,89)	BB (76,27)
Nilai SAKIP	B (67,93)	B (69,69)	B (68,93)	B (69,02)	BB (71,00)
Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	57,82	86.44
Indeks SPBE	2,16	1,89	2,29	3,09	3,81
Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	4,29	4,54
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	82,55	83,42	83.48	86,90	85,96
Indeks Integritas Nasional	-	-	73,92	74,79	72.47
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: *esakip-ng.tapinkab.go.id, 2025; LHE Indeks Reformasi Birokrasi*

Digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan baik untuk pelayanan publik maupun pelayanan internal pemerintahan diwujudkan dengan baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2024 menjadi sebesar 3,81 dimana tahun sebelumnya mencapai 3,09. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa birokrasi pemerintahan yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif semakin terwujud serta kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif semakin meningkat. Kondisi ini sejalan dengan adanya peningkatan Indeks Pelayanan Publik atau cukup tingginya capaian Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten Tapin.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tapin pada kurun waktu 2020-2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun begitu, dari hasil Survei Penilaian

Integritas, memperlihatkan bahwa catatan kewaspadaan harus dilakukan oleh segenap stakeholder pembangunan integritas Kabupaten Tapin karena capaian sebesar 74,79 dianggap belum optimal. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Tapin sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Berkaitan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial beberapa indikator yang relevan menggambarkan ketercapainnya antara lain Persentase Capaian Aksi HAM pada tahun 2024 Kabupaten Tapin mencapai 95,48 persen, kemudian Indeks Demokrasi Indonesia mencapai 80,34. Selanjutnya Indeks Rasa Aman, Indeks Ketentraman dan Ketertiban yang diproxykan dengan indikator Jumlah Kasus Kriminalitas, Crime Rate, Persentase Penegakan Perda yang dijabarkan dalam narasi sebagai berikut.

Dalam upaya peningkatan serta menciptakan kondisi pembangunan yang nyaman dan tertib, maka perlu adanya perwujudan stabilitas keamanan daerah. Di Kabupaten Tapin, kasus kriminalitas yang terjadi semakin menurun di setiap tahunnya. Selain terlihat dari jumlah kasus kriminalitas, angka kriminalitas (*crime rate*) juga mengalami penurunan. Terlihat pada tahun 2020, angka kriminalitas menunjukkan terdapat 145-146 kasus kriminalitas diantara 100.000 penduduk. Angka ini menurun cukup signifikan pada tahun 2024 dimana hanya terdapat 88 kasus kriminalitas diantara 100.000 penduduk. Kondisi ini juga didukung dengan adanya penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan hingga mencapai 100 persen di setiap tahunnya.

Tabel II.27
Kondisi Keamanan dan Ketertiban
di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus Kriminalitas	Kasus	276	223	117	195	178
2	*Crime Rate*	Per 100.000 Penduduk	145,67	116,27	60,11	98,54	88,09
3	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100

Sumber: *Kabupaten Tapin Dalam Angka 2019-2024*

2.1.4.3. Ketangguhan Pemerintah Daerah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Tabel II.28
Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya
Kabupaten Tapin Tahun 2023-2024

Nilai Indeks	2023	2024
Pilar Institusi	4,26	4,57
Pilar Infrastruktur	2,38	3,93
Pilar Adopsi TIK	4,47	4,56
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	3,44	3,99
Pilar Kesehatan	3,91	3,85
Pilar Keterampilan	3,33	4,03
Pilar Pasar Produk	2,09	2,85
Pilar Pasar Tenaga Kerja	3,51	3,83
Pilar Sistem Keuangan	0,66	2,81
Pilar Ukuran Pasar	3,94	3,96
Pilar Dinamisme Bisnis	3,19	4,55
Pilar Kapabilitas Inovasi	0,71	1,35
Indeks Daya Saing Daerah	**2,99**	**3,69**

Sumber: *BRIN, 2025*

IDSD Kabupaten Tapin tahun 2024 sebesar 3,69, meningkat jika dibandingkan tahun 2023 yang hanya memiliki capaian 2,99. Pada tahun 2023, pilar dengan capaian tertinggi adalah indeks pilar adopsi TIK yang mencapai 4,57 dan diikuti oleh indeks pilar institusi sebesar 4,56. Kedua pilar ini sejak tahun 2023 juga memiliki capaian indeks terbesar.

Adapun pilar terendah adalah indeks pilar sistem keuangan sebesar 1,35 dan indeks pilar kapabilitas inovasi sebesar 2,81 dimana pada tahun sebelumnya juga menempati capaian pilar terendah. Merujuk hal tersebut, perlu adanya upaya dalam membangun inovasi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan dana pembangunan dan juga menguatkan kuantitas serta kualitas riset dan inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan, kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, serta sudut pandang yang berbeda agar mampu mewujudkan akselerasi pembangunan melalui riset dan inovasi.

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan

setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tapin dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.29
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
Pendidikan					
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,64	83,6	81,31	74,94
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,98	95,41	93,16	86,13
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	89,19	97,2	73,01	84,65
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	82,92	86,68	53,46	47,98
Kesehatan					
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,14	2,83	0,08	1,3
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	75	100	100	100
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	98,23	100	96,4
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	96,76	100	104,6
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	95,46	100	93,2
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	98,8	100	103,9
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,16	94,75	100	70,1
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	24,06	22,56	100	100
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88,71	100	100	100
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	121,6

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,99	100	100	92,5
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	137
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	61,32
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	82,34	100	75
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	22,76	73,17	NA	0,27
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	73,39	NA	0,4
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	68,12	70,14	74,66	75,21
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,87	88,08	89,39	88,83
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100,00	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	70,12	71,61	68,45	57,07
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	84,21	96,29	100
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	0	100,00	100
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi	100	0	100,00	100

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
	program pemerintah kabupaten/kota				
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	98,08	98,38	0,70	0,75
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	14,03	11,21	10,31	10,55
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	100	51,55	57,14
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	20
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	178506	100	100	100
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	178506	100	100	100
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100
1.e.7	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	11,14	11,52	10,61	11
Sosial					
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	95,81	95,7	100,00	100
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100,00	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
Tenaga Kerja					
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	94,31	87,48	92,47	65
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6754,24	6,88709	82.232.402	73.982.882,70
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	93,64	84,21	99,22	100
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	64,65	100	101	73,96
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	24,97	8,17	8,80	15,17
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,03	100	100,00	100
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0	6,19	3,05	3,9
Pangan					
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	184,21	185,48	0,74%(*	54,8
	(*: Adanya pergantian rumus di IKK				
Pertanahan					
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	0	0,00	100
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	86,27	100,00	100
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	0	0,00	100
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	0	42,67	36,93
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100,00	100,00*
Lingkungan Hidup					
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	63,58	65,25	65,96	66,11

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	72,19%	71,74%	73,99%	79,33
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	52,63	24	30,77	10
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	96,8	99,39	99,51	99,08
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	66,66	71,73	79,48	84,68
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	98,45	97,52	98,53	99
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	81,48	100	100,00	100
Pemberdayaan masyarakat dan desa					
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	0	100*	100
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	30,16	80,95	100*	100
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,26	1,96	1,8*	1,7
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	85,21	74,87	75,81	76,92
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,22	13,88	6,9	3,7
Perhubungan					
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0	0	0,416	0,416
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	17,19	22,55	V/C=0,40	V/C=0,40
Komunikasi dan Informatika					
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100,00	100
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100,00	100
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	75,35	100	100,00	100

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
Koperasi, usaha kecil dan menengah					
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	83,11	84,43	58	25,3
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	26,82	99,09	100	100
Penanaman Modal					
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-30,13	11,91	44,73	24,87
Kepemudaan dan Olahraga					
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	90,37	80,67	67,70	65,8
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50,82	72,07	21,88	20.47
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	12	294	121	4
Statistik					
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100,00	100
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100,00	100
Persandian					
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	61,76	68,22	64,81	65,89
Kebudayaan					
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	100	100	100
Perpustakaan					
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	49,02	50,8745	53,52
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	27,15	42,29	79,60	81,11
Kearsipan					
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1,73	75	75,04	75,09
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50,16	61,17	69,33	83,3
Urusan Pilihan					
Kelautan dan Perikanan					
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	4318,46	4.067.47	18.44,7	102.38

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
	kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)				
Pariwisata					
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-100	375	331,58	9,75
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	25,22	66,81	45,48	25,61
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	29,27	60,48	44,51	80,86
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,76	1,9	1,93	1,93
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,57	4,42	6,27	9,18
Pertanian					
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	503,93	505,52	512	514
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	0	100	100	-100
Perdagangan					
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	80,26	83,81	79,72
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	78,94	97,33	52,04	57,09
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	79,99	84,35	75,66	88,55
Perindustrian					
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	1,31	1,16	1,16	1,16
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	100	100	111,47
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	60
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	0	0	0
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	100	100	100	100

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
	Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota				
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	100
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
Perencanaan dan Keuangan					
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	8,89	9,85	23,99	7,97
4.a.2	Rasio PAD	1,21	4,49	6,3	4,48
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	2	3
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	53,35	55,28	74,65	55,34
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
Pengadaan					
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	46,64	48,89	57,06	73,21
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	37,06	39,68	39,22	27,58
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	50,61	18,23	49,90	33,53
Kepegawaian					
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	504,6	78,22	72,41	82,33
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,22	25,06	25,50	32,32
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	41,76	41,12	48,04	39,06
Manajemen Keuangan					
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	15,26	16,4	74,65	14,86

Urusan	Indikator	2021	2022	2023	2024
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	58,44	14,61	91,8	1,7
4.d.3	Manajemen Aset	4	4	4	4
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	30,48	7,47	7,47	0,86
Transparansi dan Partisipasi Publik					
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100	100	100	100
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	100	100	100	100

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tapin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.30
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDIDIKAN**						
1.01	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	85,22	69,57	74,54	81,31	74,94
1.02	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang SD/MI dan SMP/MTs	%	88,18	83,19	83,03	83,08	86,13
1.03	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	0,82	2,26	57,15	53,46	47,98
2	**KESEHATAN**						
2.01	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT						

No	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.01.01	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	86.57	90	87,1	100	96,40
2.01.02	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	74.68	77	79,7	100	104,6
2.01.03	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	95,81	98.93	95,4	100	93,20
2.01.04	Pelayanan Kesehatan Balita	%	80.93	92.02	98,8	100	103,20
2.01.05	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	70.31	87.16	35,9	100	70,10
2.01.06	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	24.81	48	48,4	100	106,30
2.02	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT						
2.02.01	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	19.93	24.76	23,1	100	89,50
2.02.02	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	10.78	16	16,4	100	121,60
2.02.03	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	60.12	74.73	78,5	100	92,50
2.02.04	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	81.74	139.14	143,	100	137,00
2.02.05	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	21.09	20.01	29,2	100	61,32
2.02.06	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV	%	58.08	77.49	74,3	100	75,00
3	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS**						
3.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						
03.01.01	PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	Penertiban dan penegakan perda	%	100	100	100	100	100
03.01.02	PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
3.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
3.02.01	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Dok	1	1	1	1	1
3.02.02	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Orang	89	160	180	50	60*
3.02.03	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Dok	1	1	1	0	1*
3.02.04	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	Dok	1	1	1	1	1*
3.02.05	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	2	40	40	70	75*
3.02.06	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	%	1	40	40	50	55*

No	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.02.07	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
3.02.08	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
3.02.09	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	%	100	100	100	100	100
3.02.10	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	%	100	100	100	100	100
3.02.11	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	%	100	100	100	100	100
3.02.12	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
4	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG & BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
4.01	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
4.01.01	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	81	68,11	70,14	74,66	79,11*
4.01.02	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	54	86,68	88,08	89,39	91,6*
4.02	**Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman**						
4.02.01	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
4.02.02	Persentase jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh Fasilitas penyediaan rumah layak huni	%	65,05	65,05	100	100	100
5	**BIDANG URUSAN SOSIAL**						
5.01	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	98	98	96,12	100	100
5.02	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	9,56	94	100	100	100
5.03	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	30,16	96	93,76	100	100
5.04	Persentase (%) gelandang pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100
5.05	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100

*data sementara

2.1.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki arti strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan agenda pembangunan nasional dan komitmen global. Hal ini penting untuk menjawab tantangan multidimensi pembangunan—mulai dari kemiskinan, kesenjangan sosial, hingga keberlanjutan lingkungan—dengan pendekatan yang terukur, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Dengan capaian data-data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.31
Capaian Indikator TPB/SDG's Tahun 2022-2024

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
1 TANPA KEMISKINAN Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun										
1.1		Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1.25 dolar amerika per hari.Amerika per hari.								
1.1	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BPS	%	3,6	3,6	3,19	3,33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.2		Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2	1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	BPS	persen	4,8	4,8	3,19	3,33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
1.3		Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja	Persen	89,3		95,43	100,00	DINAS TENAGA KERJA
1.3	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BPJS DAN DINAS KESEHATAN	%	85	85	100	100,00	DINAS KESEHATAN
1.3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja	Persen	98,83		95,43	100,00	DINAS TENAGA KERJA
1.5		Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
1.5	1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	dokumen	1	1	1	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.a		Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								
1.a	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	bpkad	%	0				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2 TANPA KELAPARAN Menghilangkan Kelaparan. Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik. serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan										

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
2.1		Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan BPS	skor	85	4,84	4,1	3,5	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.1	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peta Kerawanan Pangan	desa	2	2	2	2	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.1	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan Kab. Tapin	Persen	0,87				DINAS PERDAGANGAN
2.1	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan Kab. Tapin	Persen	0,87				DINAS PERDAGANGAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
2.2		Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	BPS, Susenas	skor	86,2	86,2	90,1	93,21	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan Kesehatan Keluarga dan Gizi	%	17	11,4	14,4		DINAS KESEHATAN
2.2	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Sigizi Terpadu EPPGBM	%	8	7,8	6,5		DINAS KESEHATAN
2.2	2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Laporan Program Ibu	%	33	19,62	18,11		DINAS KESEHATAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
			KESEHATAN MASYARAKAT							
2.3		Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.								
2.3	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan Kab. Tapin	Ton					DINAS PERIKANAN
2.3	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan Kab. Tapin	ton					DINAS PERIKANAN
2.3	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	SAKERNAS	Juta Rp/tenaga kerja	31,91		32,45		DINAS PERTANIAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
2.3	2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	BPS	Ton/Orang (Padi)	11,22		6,33		DINAS PERTANIAN
2.3	2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	Rupiah	31910000		32450000		DINAS PERTANIAN
2.a		Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.								
2.a	2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	rupiah	4911627936		5616533696		DINAS PERTANIAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
2.c		Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.								
2.c	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pasar Induk Keraton	laporan	2	2	2	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia										
3.1		Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan Kesehatan Keluarga dan Gizi	per 100.000 KH	273	303	251		DINAS KESEHATAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
3.1	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Kesga dan Gizi	%	68	76,91	72,38		DINAS KESEHATAN
3.2		Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS DAN DINAS KESEHATAN	Per 1.000 Kelahiran hidup	13	4	19		DINAS KESEHATAN
3.2	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Kesga dan Gizi	per 1000 KH	50	13,5	21,6		DINAS KESEHATAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
3.3		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3	3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan dari penyakit menular	Kasus	300	59	108		DINAS KESEHATAN
3.3	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan dari Penyakit Menular	Kasus	15	6	12		DINAS KESEHATAN
3.3	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan dari penyakit menular	Jumlah Kasus (Kusta dan Filariasis)	30	21	9		DINAS KESEHATAN
3.3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan dari penyakit menular	kasus	40	4	7		DINAS KESEHATAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
3.3	3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan penyakit menular	Kasus	632	186	310		DINAS KESEHATAN
3.4		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4	3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	laporan penyakit tidak menular	%	8,9	7	6		DINAS KESEHATAN
3.4	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	laporan penyakit tidak menular	%	43,34	7,14	11,99		DINAS KESEHATAN
3.4	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >=18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	laporan penyakit tidak menular	%	21,8	2,81	5,45		DINAS KESEHATAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
3.5		Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5	3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	laporan penyakit tidak menular	%	100	100	100		DINAS KESEHATAN
3.7		Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DPPKB	%	85,21	75,1	79,28	75,20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.7	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DPPKB	%	85,21	75,1	79,28	75,20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
		kontrasepsi metode modern.								
3.7	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DPPKB	Anak	1,7	1,96	1,81	2,15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.7	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Kesga dan Gizi	%	35	39,1	58		DINAS KESEHATAN
3.8		Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	bpjs dan dinas kesehatan	%	85	85	100		DINAS KESEHATAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
3.a		Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur >=15 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	laporan penyakit tidak menular	%	15	6,93	10,51		DINAS KESEHATAN
3.b		Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
3.b	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	laporan imunisasi	%	85	85,8	98,5		DINAS KESEHATAN
3.b	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK	JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI 80% OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL	13	13	13		DINAS KESEHATAN
4 PENDIDIKAN BERKUALITAS Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua										
4.1		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
4.1	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rapor Mutu Pendidikan Disdik	%	52,88	52,2	63,97		DINAS PENDIDIKAN
4.1	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rapor Mutu Pendidikan Disdik	%	40,67		46,83		DINAS PENDIDIKAN
4.1	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rapor Mutu Pendidikan Disdik	%	61,98		71,06		DINAS PENDIDIKAN
4.1	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rapor Mutu Pendidikan Disdik	%	53,04		44,69		DINAS PENDIDIKAN
4.1	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	%	44,56		18,69		DINAS PENDIDIKAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
4.1	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	%	11,61		3,9		DINAS PENDIDIKAN
4.1	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdik	%	19,02		9,04		DINAS PENDIDIKAN
4.2		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rapor Mutu Pendidikan Disdik	%	69,33		69,33		DINAS PENDIDIKAN
4.3		Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BPS	%	14,03		28,1		DINAS PENDIDIKAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
4.5		Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5	4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	97,66		100,9		DINAS PENDIDIKAN
4.5	4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	91,22		92,55		DINAS PENDIDIKAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
4.5	4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	87,5		107,62		DINAS PENDIDIKAN
4.5	4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	70,14		76,77		DINAS PENDIDIKAN
4.6		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur >=15 tahun.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BPS	%	98,69		99,93		DINAS PENDIDIKAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
4.a		Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a	4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	BIDANG PPADI (DP3A)	persen	0,01	0,01	0,03	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.a	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	5680		83,9	100,00	DINAS PENDIDIKAN
4.a	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	95		70,37	100,00	DINAS PENDIDIKAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
		higienis bagi semua (WASH).								
4.a	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	100		38,54	100,00	DINAS PENDIDIKAN
4.a	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	100		81,71	100,00	DINAS PENDIDIKAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
4.a	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	100		38,54	100,00	DINAS PENDIDIKAN
4.a	4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	0,01		66,28		DINAS PENDIDIKAN
4.a	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	100		100	100	DINAS PENDIDIKAN
4.c		Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang,								

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
		dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	%	91,77		85	65,40	DINAS PENDIDIKAN
5 KESETARAAN GENDER Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan										
5.2		Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DP3A Tapin	Persen	0,03	0,03	0,004	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
5.5		Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat, (b) pemerintah daerah.	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DP3A Tapin	Persen	16	16	16	12,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DP3A	persen	0,17	0,17	0,43		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan										
6.1		Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1	6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR	Persen	70,14	70,14	74,66	74,66	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
6.2		Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUPR	Persen	87	88,08	89,39	89,39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.3		Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3	6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Aplikasi IKLH	poin	56,84	56,84	56,67	53,53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh. serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua										
8.1		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BPS	Juta	48,94	68,82	69,7	72,45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perdagangan Kab. Tapin	Persen	0				DINAS PERDAGANGAN
8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan Kab. Tapin	Persen	0				DINAS PERDAGANGAN
8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perdagangan Kab. Tapin	Produk	5				DINAS PERDAGANGAN
8.1	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN	Dinas Perdagangan Kab. Tapin	Persen	0				DINAS PERDAGANGAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
			PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
8.1	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan Kab. Tapin	Persen	0				DINAS PERDAGANGAN
8.1	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perdagangan Kab. Tapin	Produk	5				DINAS PERDAGANGAN
8.4		Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.								
8.4	8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan Kab. Tapin	Persen	28				DINAS PERDAGANGAN
8.4	8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan Kab. Tapin	Persen	100	100	100	100	DINAS PERDAGANGAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
8.4	8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan Kab. Tapin	Persen	100	100	100	100	DINAS PERDAGANGAN
8.5		Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja	Rupiah	2877,5	16,8	18,208	18976	DINAS TENAGA KERJA
8.5	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	Persen	3,97		3,93		DINAS TENAGA KERJA
8.6		Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah.								
8.6	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	Persen	70,28		70,17		DINAS TENAGA KERJA
8.9		Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan								

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
		budaya dan produk lokal.								
8.9	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DISBUDPAR	orang	19	19	82	90	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
8.9	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DISBUDPAR	orang	1727390	1727390	2513043	3.156.712	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
8.9	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	5,74	6,49	6,61	7,18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
9 INDUSTRI. INOVASI DAN INFRASTRUKTUR Membangun Infrastruktur yang Tangguh. Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan. serta Mendorong Inovasi										
9.1		Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1	9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB TAPIN/BPTD KALSEL	Buah	2	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
9.1	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB TAPIN	Unit	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
9.1	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR	Persen	71,77	71,77	57,05	70,19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.2		Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DISPERIN	%	2	2			DINAS PERINDUSTRIAN
9.2	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	BPS	%	5,13		5,7		DINAS PERINDUSTRIAN
9.2	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	BPS	%	2,69		1,24		DINAS PERINDUSTRIAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
9.4		Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Inventarisasi GRK oleh Bidang PPKLH Dinas LH Kab.Tapin	%	-	-	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10 BERKURANGNYA KESENJANGAN Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara										
10.1		Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1	10.1.1*	Rasio Gini.	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BPS	nilai	0,29	0,289	0,281	0,26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
10.1	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	BPS	Persen	3,6		3,33		DINAS SOSIAL
10.1	10.1.1.(b)	Jumlah Desa tertinggal	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD	Desa	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.1	10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD	Desa	3	3	12	75	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan										
11.1		Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								
11.1	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	%	89	89	89,97	90,63	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
11.5		Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	BPBD	Jiwa	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.6		Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Bidang PSLB3 Dinas LH Kab.Tapin	%	100	100	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.6	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SIPSN(Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)	%	62,63	71,76	62,13	79,29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
11.6	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	RENSTRA 2024-2026 DLH	poin	92,05	92,05	93,48	97,92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.7		Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7	11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	RTRW Kabupaten Tapin	%	29,91	29,91	6,67	6,67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.b		Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster								

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
		Risk Reduction 2015-2030.								
11.b	11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	BPBD	Dokumen	1	1	1	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan										
12.5		Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
12.5	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Bidang PSLB3 DLH Kab.Tapin	Ton	4621,47	4621,47	4905,86	4881,59	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.6		Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6	12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya (untuk 9 sektor utama)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Bidang P2KLH Dinas LH Kab.Tapin	Perusahaan	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.8		Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								
12.8	12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	RENSTRA 2024-2026 DLH	Entitas	40	41	41	41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi										

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
Perubahan Iklim dan Dampaknya										
13.2		Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.								
13.2	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Bidang PPKLH DLH Kab.Tapin	Gg CO2-eq	1974	1973	1974	5869,312	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.2	13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Bidang PPKLH Dinas LH Kab.Tapin	%	9	8,38	23,06	38,16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.3		Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.								
13.3	13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Bidang P2KLH Dinas LH Kab.Tapin	Entitas	40	41	41	41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
13.a		Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.								
13.a	13.a.1.(a)	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	RENSTRA DLH	Rupiah	222805200	222568100	160287300	161.890.173	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15 EKOSISTEM DARATAN Melindungi. Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan. Mengelola Hutan secara Lestari. Menghentikan Penggurunan. Memulihkan Degradasi Lahan. serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati										

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
15.1		Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Bidang PPKLH Dinas LH Kab.Tapin	%	4,32	40,36	39,42	20,33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15.1	15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Bidang PPKLH Dinas LH Kab.Tapin	Ha	74	74	74	74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16 PERDAMAIAN. KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan. Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua. dan Membangun Kelembagaan yang Efektif. Akuntabel. dan Inklusif di Semua Tingkatan										
16.1		Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
16.1	16.10.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	UPTD PPA (DP3A)	Kasus	5	5	3	8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.2		Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.								
16.2	16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	UPTD PPA (DP3A)	Kasus	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.6		Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) >= B	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KemenpanRB	Point	100	100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
16.6	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) >= B	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KemenpanRB	Point	100	0	100	100	SEKRETARIAT DAERAH

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
16.6	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ombudsman RI	Unit Layanan	1	1	1	1	SEKRETARIAT DAERAH
16.6	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Persen	100	100	100	100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
16.9		Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PDAK-Kemendagri RI	Persen	98,61	98,61	98,61	99,30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.9	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PDAK-Kemendagri RI	Persen	100	100	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.9	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PDAK-Kemendagri RI	Persen	97,52	97,5	98,53	99,03	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan										

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
17.1		Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPS	%	1,17	1,35	1,38	0,79	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPS	%	0,27	0,4	0,39	0,24	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPS	%	4,82	6,27	6,6	5,66	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.19		Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PDAK-Kemendagri RI	Persen	100	100	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode1	Kode2	Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	*Angka Dasar (baseline)*	realisasi 2022	realisasi 2023	realisasi 2024	Perangkat Daerah
17.19	17.19.2 .(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PDAK-Kemendagri RI	Persen	100	100	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1.7. Kerjasama Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan strategi penting dalam memperkuat pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Melalui kerja sama ini, daerah-daerah dapat saling melengkapi potensi dan sumber daya yang dimiliki, baik dalam bentuk kerja sama ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

Selain kerjasama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin juga menyelenggarakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor lain, seperti swasta, masyarakat sipil, maupun akademisi (perguruan tinggi). Kerjasama ini merupakan kunci dalam mempercepat pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Dalam menghadapi tantangan kompleks dan keterbatasan anggaran, kolaborasi lintas sektor memungkinkan pemanfaatan sumber daya, keahlian, dan inovasi secara lebih optimal. Sektor swasta, misalnya, dapat berperan dalam investasi infrastruktur, pengembangan kawasan industri, serta penciptaan lapangan kerja melalui skema kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership*). Sementara itu, keterlibatan lembaga pendidikan dan penelitian membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan berbasis data dan riset, sehingga program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Tabel II.32
Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
1	Kejaksaan Negeri Tapin	100.3.7.1/02/PKS/2024 B-03/O.3.17/Gs/01/ 2024	Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin Dengan Kejaksaan Negeri Tapin Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. **Manfaat :** Untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Lingkungan Hidup (16/01/2024)
2	PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Banjarmasin	JAN-002/C.1.8/ 012024 100.3.7.1/04/KSB/ BAGPEM/2024	KSB Antara PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Tapin Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesejahteraan dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tapin. **Manfaat :** Sinergitas program jaminan kesejahteraan dan jaminan kematian bagi ASN di Kabupaten Tapin.	Kesepakatan Bersama	BKPSDM (29/01/2024)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
3	Pemerintah Kabupaten Bantul	100.3.7.1/05/KSB/ 2024 01/MoU.Bt/2024	KSB Antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Kabupaten Bantul Tentang Pengembangan Potensi Daerah, Pengembangan SDM dan Peningkatan Pelayanan Publik. **Manfaat :** Mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah serta terus menerus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Kesepakatan Bersama	Bagian Pemerintahan (07/02/2024)
4	Pemerintah Kabupaten Bantul (Bagian Organisasi Kabupaten Bantul)	100.3.7.1/06/PKS/ 2024 03/PK/Bt/2024	PKS Antara Pemerintah Kabupaten Tapin Dan Pemerintah Kabupaten Bantul Tentang Pendampingan Penyusunan Kebijakan Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasca Penyederhanaan Birokrasi Berdasarkan Kinerja Dan Pengembangan Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara **Manfaat :** Mengoptimalkan penyusunan kebijakan mekanisme pemberian TPP ASN.	Perjanjian Kerja Sama	Bagian Organisasi (07/02/2023)
5	Pemerintah Kabupaten Bantul (BKPSDM Kab. Bantul)	100.3.7.1/07/PKS/ 2024 04/PK/Bt/2024	PKS Antara Pemerintah Kabupaten Tapin Dan Pemerintah Kabupaten Bantul Tentang Pendampingan Pelaksanaan Manajemen Talenta Dan Sistem Aplikasi Kepegawaian. **Manfaat :** Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Talenta dan Sistem Aplikasi Kepegawaian.	Perjanjian Kerja Sama	BKPSDM (07/02/2024)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
6	PT. Asuransi Jiwa Taspen	PERJ-027/TL/032024 100.3.7.1/08/PKS/ BAGPEM/2024	PKS Antara PT. Asuransi Jiwa Taspen Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tentang Pengelolaaan Asuransi Jiwa Kumpulan. **Manfaat :** Pembayaran Santunan Asuransi Bagi ASN	Perjanjian Kerja Sama	BKPSDM (14/03/2024)
7	RSJ Sambang Lihum	100.3.7.1/09/PKS/ BAGPEM/2024	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin dan RSJ Sambang Lihum Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu Melalui Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024	Perjanjian Kerja Sama	DINKES (14/03/2024)
8	Universitas Lambung Mangkurat	100.3.7.1/010/PKS/ BAGPEM/2024 747/UN8/KS.02/2024	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dan Unit Penunjang Akademik (UPA) Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat Tentang Kerja Sama Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin. **Manfaat :** Sinergi guna menghasilkan data kajian bidang lingkungan hidup sebagai pedoman pengambilan kebijakan.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Lingkungan Hidup (16/04/2024)
9	BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan	100.3.7.1/011/PKS/ BAGPEM/2024	Perjanjian Kerja Sama Antara Kabupaten Tapin dan BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan melalui Riset dan	Perjanjian Kerja Sama	BAPPELITBANG (24/04/2024)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
			Pengembangan Inovasi Daerah		
10	Universitas Lambung Mangkurat	100.3.7.1/011.a/PKS/ BAGPEM/2024 786/UN8/KS.02/2024	PKS Antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin dan Unit Penunjang Akademik (UPA) Lingkungan Lahan Basah Universitas Lambung Mangkurat tentang Kerja Sama Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin **Manfaat :** Sinergi guna menghasilkan data kajian bidang lingkungan hidup sebagai pedoman pengambilan kebijakan.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Lingkungan Hidup (08/05/2023)
11	Pemerintah Provinsi Kalsel	100.3.7.1/012/PKS/ 2024 100.3.7.1/123/PKS-A/PEM.OTDA/2024	PKS Antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dengan Pola Fasilitasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024. Manfaat : Terselenggaranya Orientasi PPPK dengan pola fasilitasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.	Perjanjian Kerja Sama	BKPSDM (02/05/2023)
12	PT. PLN (Persero)	100.3.7.1/013/KSB/ BAGPEM/2024 0083.Pj/AGA.04.01/ F13020000/2024	KSB Antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan PT. PLN (Persero) Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik di Kabupaten Tapin. **Manfaat :** Sebagai pedoman dalam	Kesepakatan Bersama	Bapenda (04/07/2024)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
			pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBJT.		
13	PT. PLN (Persero)	100.3.7.1/014/KSB/ BAGPEM/2024 0084.Pj/AGA.04.01/ F13020000/2024	PKS Antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan PT. PLN (Persero) Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik di Kabupaten Tapin. **Manfaat :** Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBJT	Perjanjian Kerja Sama	BAPENDA (04/07/2024)
14	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	100.3.7.1/015/PKS/ BAGPEM/2024 100.3.7.1/34/ PKS-A/PEM.OTDA/ 2024	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Dengan Pola Fasilitasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 **Manfaat :** Terselenggaranya PKA dengan Pola Fasilitasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin TA. 2024	Perjanjian Kerja Sama	BKPSDM (19/08/2024)
15	Plt. Kepala BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan	100.3.7.1/16/PKS/ BAGPEM/2024 100.3.7.1/36/PKS-A/PEM.OTDA/2024	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tapin Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapin Tahun 2024 **Manfaat :** sebagai pedoman dalam rangka Penyelenggaraan Orientasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024.	Perjanjian Kerja Sama	DPRD (21/08/2024)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
16	Kepala Cabang Rantau PT. BPD	100.3.7.1/017/PKS/ BAGPEM/2024	PKS Tentang Penerbitan Kartu kredit Indonesia (KKI)	Perjanjian Kerja Sama	BKAD
17	KA. PT. Bank Mandiri Banjarmasin	100.3.7.1/018/KSB/ BAGPEM/2024	KSB Tentang Layanan Penerimaan Pembangunan Tagihan Pajak Daerah secara Host To Host **Manfaat :** Untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kab. Tapin berupa penerimaan secara non-tunai/ *host to host*	Kesepakatan Bersama	BAPENDA (2/09/2024)
18	KA. PT. Bank Mandiri Banjarmasin	100.3.7.1/019/PKS/ BAGPEM/2024	PKS Tentang Layanan Penerimaan Pembangunan Tagihan Pajak Daerah secara *Host To Host* **Manfaat :** Untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kab. Tapin berupa penerimaan secara non-tunai/ *Host To Host*	Perjanjian Kerja Sama	BAPENDA (2/09/2024)
19	Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Kalsel (PERSERODA)	100.3.7.1/020/KSB/ BAGPEM/2024	KSB Tentang Layanan Perbankan dan sebagai Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah	Kesepakatan Bersama	BKAD (23/09/2024)
20	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	100.3.7.1/020.a/PKS/ BAGPEM/2024	PKS Tentang Sinergi dan Optimalisasi Pengelolaan Opsen Pajak Daerah	Perjanjian Kerja Sama	BAPENDA (30/10/2024)
21	Plt. Kepala LAN RI	100.3.7.1/021/NKRK/ BAGPEM/2024	NKRK Tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Penyelenggaraan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan	Nota Kesepakatan	BAGOR (18/11/2024)
22	Kepala BPTS Cabang Barabai	100.3.7.1/022/NKRK/ BAGPEM/2024	NKRK Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kab. Tapin	Nota Kesepakatan	Dinas Kesehatan (29/11/2024)
23	Direktur PT. BMT	100.3.7.1/023/KSB/ BAGPEM/2024	KSB Tentang Pemungutan Retribusi Daerah Manfaat : Untuk Mensinergikan Kegiatan guna Meningkatkan	Kesepakatan Bersama	Dinas Lingkungan Hidup (29/11/2024)

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
			Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi		
24	Direktur PT. BMT	100.3.7.1/024/PKS/ BAGPEM/2024	PKS Tentang Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan **Manfaat :** Untuk mensinergikan kegiatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Lingkungan Hidup (29/11/2024)
25	Dandim 1010 Rantau	100.3.7.1/025/NKRK/ BAGPEM/2024	NKRK Tentang Sinergi Penyelenggaraan Penanggulanagan Bencana **Manfaat :** Untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, dan pengawasan guna pengelenggaraan penanggulangan bencana	Nota Kesepakatan	BPBD (2/12/2024)
26	Polres Tapin	100.3.7.1/026/NKRK/ BAGPEM/2024	NKRK Tentang Sinergi Penyelenggaraan Penanggulanagan Bencana **Manfaat :** Untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian , dan pengawasan guna pengelenggaraan penanggulangan bencana	Nota Kesepakatan	BPBD (2/12/2024)
27	PT KPP	100.3.7.1/027/KSB/ BAGPEM/2024	KSB Tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan di Kab. Tapin Manfaat : Untuk melestarikan lingkungan di wilayah operasi dalam rangka membantu mencapai tujuan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki secara optimal sesuai dengan	Kesepakatan Bersama	BAPPELITBANG

No	Mitra Kerjasama	Nomor Dokumen Perjanjian	Urusan Pemerintahan Yang Dikerjasamakan/Manfaat	Jenis Dokumen Perjanjian	Ket
			tugas dan fungsi masing-masing		
28	PT BMB 2	100.3.7.1/028/KSB/ BAGPEM/2024	KSB Tentang Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Kesepakatan Bersama	Bagian Hukum BAPPELITBANG (24/12/2024)

sumber: Bagian Tata Pemerintahan, 2024

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran kondisi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah menjadi dasar fundamental dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan memahami kondisi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, serta menilai keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak the Great Depression 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di berbagai negara untuk melawan inflasi yang tinggi menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4 persen. Lebih parah lagi dalam laporan WEO edisi Januari 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1 persen pada 2023 dan 2024. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4 persen di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Namun, beberapa negara masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif, seperti India, Indonesia, dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Hal ini ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan permintaan internal yang terus meningkat.

Di tengah ekonomi global di tahun 2024 diwarnai dengan pertumbuhan yang melambat dan ketidakpastian yang tinggi. Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dengan baik. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2% di tahun 2024, ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi

yang meningkat. Konsumsi masyarakat maupun konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV-2023 akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan 2024. Sementara itu, inflasi di Indonesia diperkirakan masih tinggi di awal tahun, namun akan secara bertahap menurun dan stabil seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang kondusif.

Adapun suku bunga Bank Indonesia diperkirakan akan naik secara bertahap untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing di tengah melambatnya ekonomi global. Meskipun begitu Indonesia perlu mewaspadai risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.

Dalam lingkup lokal ekonomi Kabupaten Tapin masih bergantung pada sektor pertambangan dan pertanian. Pada sektor pertambangan Batubara merupakan sektor utama penyumbang terbesarnya dan pada sektor pertanian dengan tanaman padi, karet, dan tanaman hortikultura sebagai komoditas utama, serta hasil hutan seperti kayu dan rotan juga berkontribusi pada perekonomian. Oleh karena itu tantangan ekonomi Kabupaten Tapin adalah diversifikasi ekonomi sebagai kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor khususnya ekstraktif. Untuk itu membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan pelabuhan, dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong investasi.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan Daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai metrik keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan

finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.32.
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: *Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001*

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tapin berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi yang ditandai dengan tren naik dari tahun 2020 (8,33%) sampai tahun 2021 (10,10%) hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi koreksi yang cukup dalam sampai menyentuh pada 5,41%. kemudian pada tahun 2023 mulai ada kenaikan kembali menjadi 6,38% lalu ada penurunan cukup signifikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 4,48%. Secara rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) DOFD Kabupaten Tapin berada di 6,47% masih masuk di kategori 'Sangat Kurang'.

Fluktuasi DOFD tersebut dipengaruhi oleh belum konsistennya kekuatan/capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa meningkat maka Pemerintah Kabupaten Tapin perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali dan optimalisasi sumber-sumber PAD dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Tapin periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.33.
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	98.887.171.700	1.187.334.462.929	8,33
2	2021	121.443.140.790	1.202.139.964.278	10,10
3	2022	92.886.377.407	1.717.931.600.071	5,41
4	2023	100.127.498.754	1.568.178.825.031	6,38
5	2024	103.494.094.858	2.310.107.796.570	4,48
	Rata-Rata	**103.367.656.702**	**1.597.138.529.776**	**6,47**

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik.

Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tapin akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
(2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Tapin mengalami fluktuasi tetapi masih dalam tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,17% pertahun di mana Pendapatan tahun 2019 mencapai Rp. 1,439 triliun menjadi Rp. 1,568 triliun di tahun 2023 yang terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Transfer. Adapun capaian Pendapatan Daerah tertinggi di tahun 2022 sebesar Rp. 1,717 triliun didorong oleh

meningkatnya dana transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA dan ditahun 2024 meningkat menjadi 2,310 triliun yang didorong dari pendapatan transfer yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak dan SDA. Adapun perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Tapin tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.20
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)

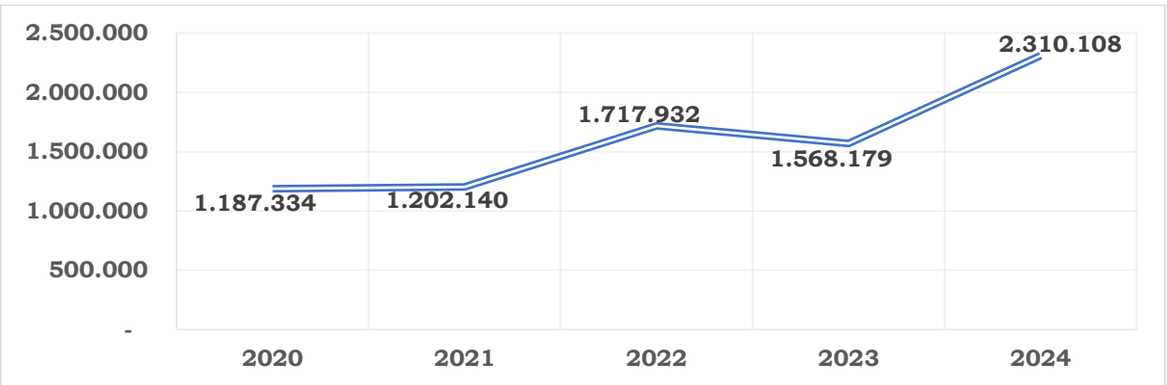

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dengan pertumbuhan sebesar 19,96% dari 1,061 triliun (2020) menjadi 2,197 triliun (2024). Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami rata-rata pertumbuhan secara berurutan sebesar 1,14% dan -24,68%.

Gambar II.21
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah

Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perkembangan pajak Kabupaten Tapin mengalami tren kenaikan cukup signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 19,42% dari Rp. 17,108 miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 34,793 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya pendapatan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk meningkatkan PAD dari Pajak Daerah ke depan selain melalui menggenjot kembali perolehan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), juga perlu dilakukan penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak restoran, dan sebagainya.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Tapin mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,91% per tahun dari Rp. 2,593 miliar (2020) menjadi Rp. 5,186 miliar (2024). Peningkatan tren tersebut didorong oleh semakin efektifnya retribusi jasa usaha yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan retribusi jasa umum dari retribusi layanan kesehatan dan layanan kebersihan/persampahan. Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi bisa berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren positif yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,04% dari Rp. 3,698 miliar (2020) menjadi Rp. 5,827 miliar (2024). Pertumbuhan ini berasal dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tapin pada lembaga keuangan (Bank BPR dan Bank Kalsel), aneka usaha dan bidang air minum.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar -6,50% dari Rp. 75,487 miliar (2020) menjadi Rp. 57,688 miliar (2024). Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 84,964 miliar karena tingginya Pendapatan BLUD dibandingkan tahun-tahun lainnya kibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu bisa dikatakan Pendapatan BLUD merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi tinggi rendahnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah maka kinerja BLUD perlu ditingkatkan.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.22
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (%)

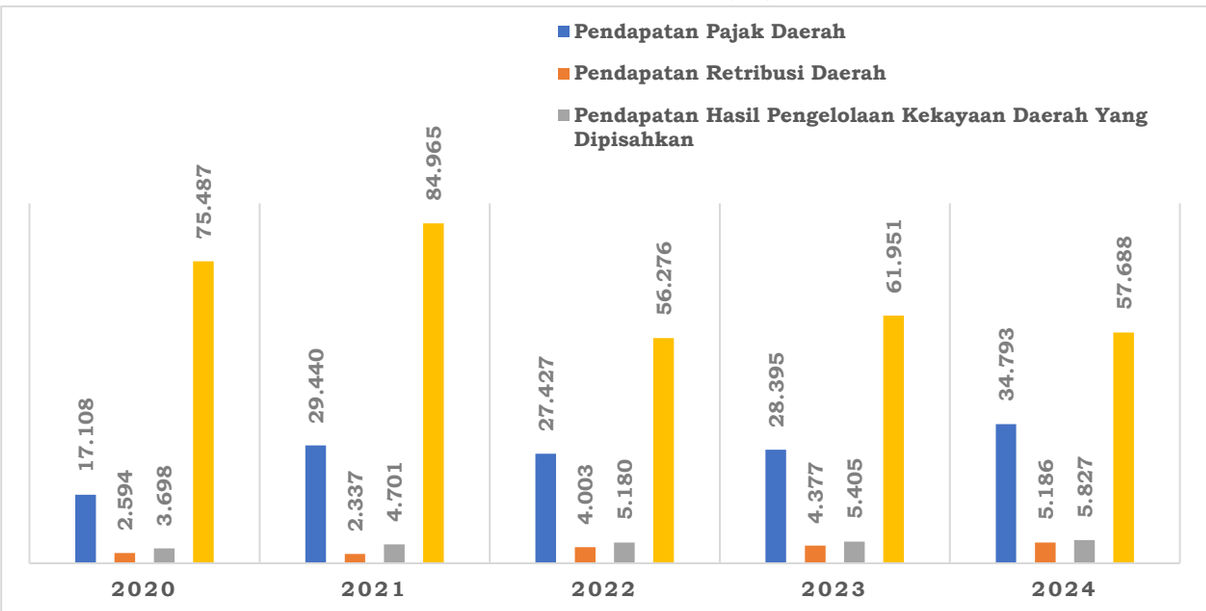

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Tapin. Secara rata-rata kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 64,90% per tahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 26,61% per tahun, berikutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 4,84% pertahun, dan terakhir Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 3,65% pertahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi penggalian sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang kontribusinya masih sangat rendah.

Gambar II.23
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 (%)

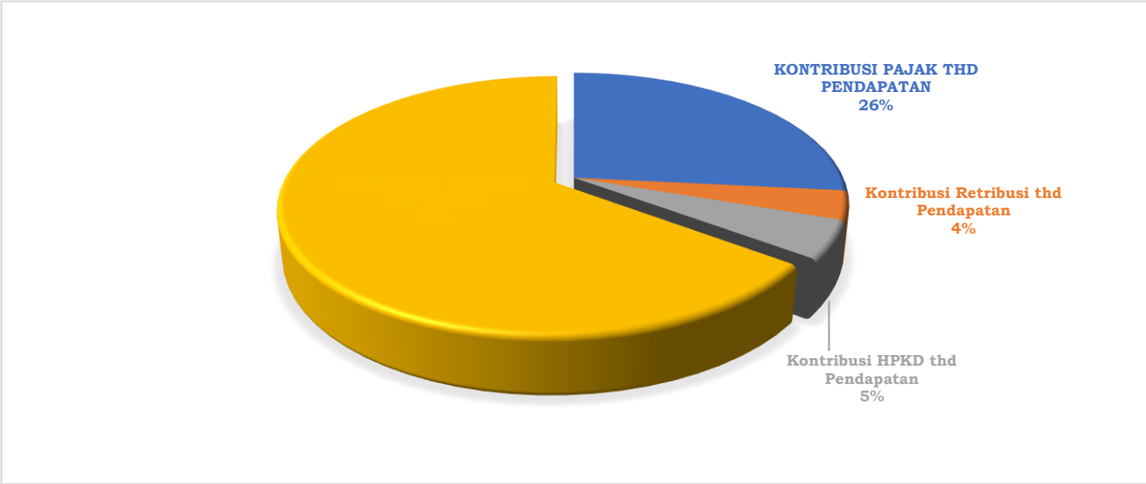

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Gambar II.24
Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

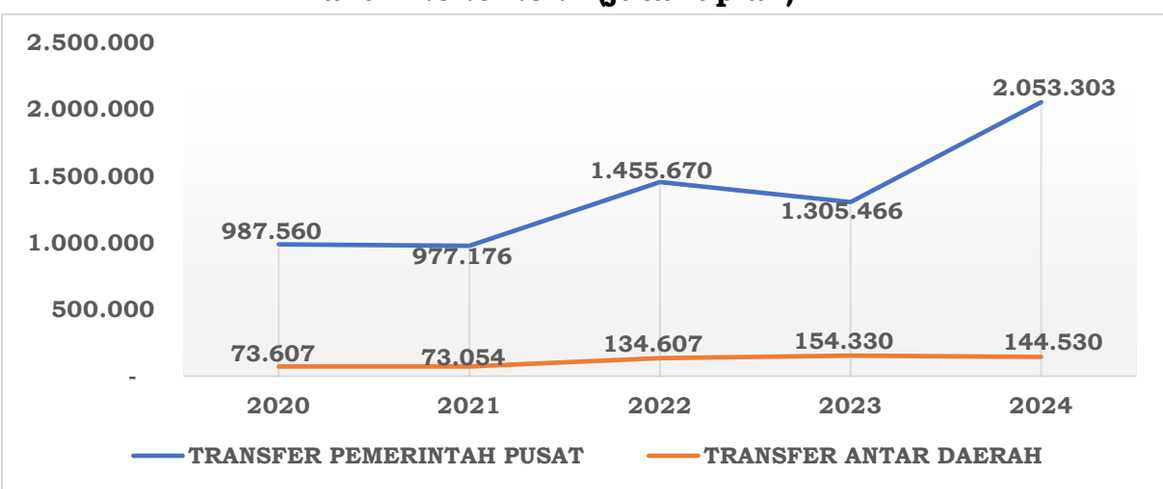

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Berdasarkan grafik pada Gambar diatas, terlihat bahwa komponen pendapatan transfer Kabupaten Tapin tahun 2020–2024 didominasi oleh transfer dari Pemerintah Pusat dengan tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sebesar Rp987,56 miliar sedikit menurun di 2021 menjadi Rp977,17 miliar, kemudian meningkat signifikan pada 2022 mencapai Rp1,45 triliun, menurun kembali di 2023 menjadi Rp1,30 triliun, dan melonjak tajam pada 2024 hingga Rp2,05 triliun. Sementara itu, transfer antar daerah relatif jauh lebih kecil dan stabil, dengan kisaran Rp73,05 miliar pada 2020–2021, meningkat pada 2022–2023 di angka

Rp134,61–154,33 miliar, lalu sedikit menurun di 2024 sebesar Rp144,53 miliar. Pola ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Kabupaten Tapin masih sangat tinggi terhadap transfer pusat, sedangkan kontribusi transfer antar daerah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Gambar II.25
Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

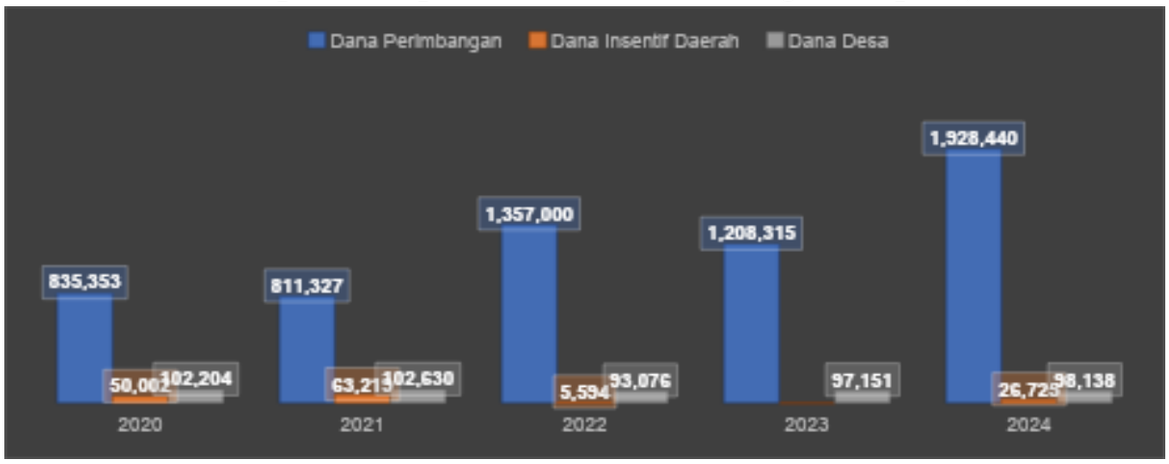

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,26% dari Rp. 835,3 miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 1.928 miliar di tahun 2024. Sedang kan untuk dana insentif daerah dan dana desa mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan ditahun 2022 dan kembali meningkat ditahun 2023 dan 2024 yang mencapai 26,72 miliar untuk Dana insentif daerah dan 98,138 miliar untuk dana desa.

Gambar II.26
Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 (%)

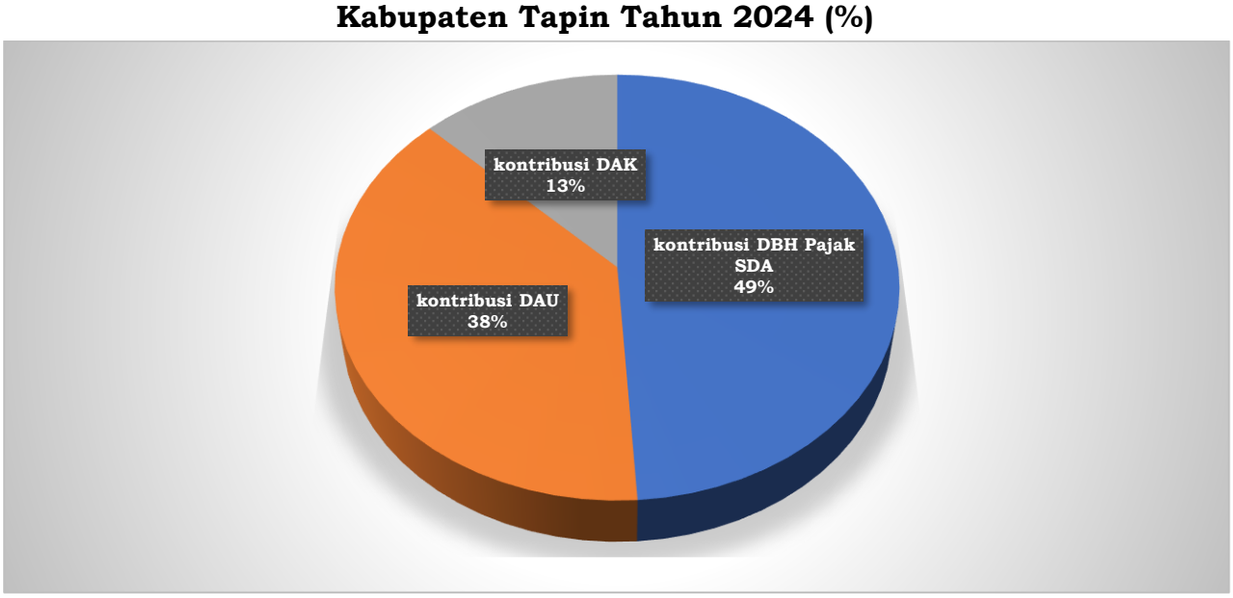

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu sendiri tren Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami tren relatif fluktuatif dimana secara berturut-turut tren penurunannya sebesar 2,24% dan

-3,52%. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) justru mengalami rata-rata tren peningkatan cukup signifikan sebesar 49,16% dari Rp. 271,608 miliar (2020) menjadi Rp. 1,344 triliun (2024). Meskipun mengalami penurunan namun DAU masih menjadi salah satu kontributor terbesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2024 sebesar 38% kemudian DAK sebesar 13% dan Sementara DBH Pajak dan SDA menjadi kontributor terbesarnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 49%.

Gambar II.27
Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

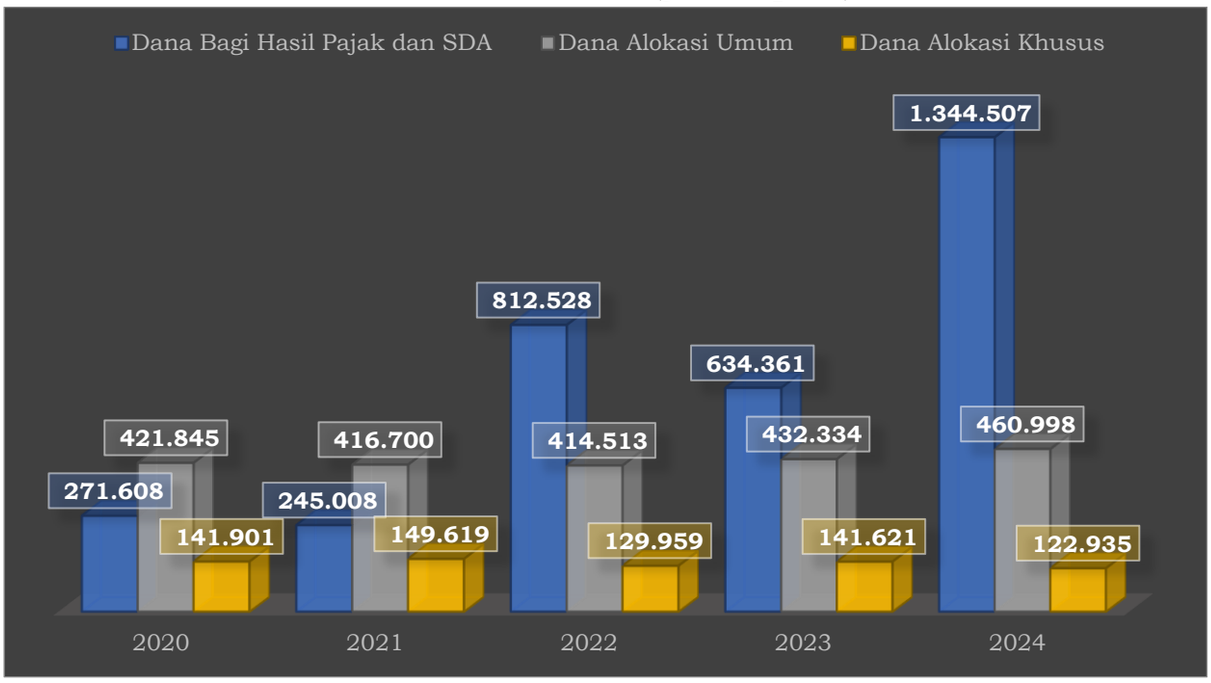

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan nilai yang terus menurun dari Rp. 27,281 miliar (2020) menjadi Rp. 8,781 miliar (2024) atau rata-rata menurun -24,68% pertahun. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh pada tahun 2022 yang sebesar Rp. 34,768 miliar. Jika dilihat lebih dalam dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagian besar sumber Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari pendapatan hibah yang nilainya menurun drastis dari Rp. 27,281 miliar (2020) menjadi Rp. 370 juta (2024) dan dari Pendapatan Lainnya yang secara rata-rata mengalami kontraksi sebesar -26,60% dari Rp. 21,357 miliar (2021) menjadi 8,411miliar (2024). Oleh karena itu dapat dikatakan telah terjadi transisi dari pendapatan hibah menjadi Pendapatan Lainnya yang menjadi penyumbang terbesar dan yang paling mempengaruhi baik turunnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar II.28
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Jika dilihat dari perkembangan Pendapatan Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

a. Mendorong investasi: Pemerintah daera perlu membuat regulasi ramah lingkungan, membangun Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, dapat mendukung kelancaran kegiatan investasi.
b. Memberikan insentif bagi investor: Pemerintah daerah dapat memberikan insentif, seperti keringanan pajak atau subsidi, untuk menarik investor.
c. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
d. Peningkatan pengelolaan aset daerah: Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan pengelolaan aset daerah secara optimal. Aset-aset daerah yang tidak terpakai dapat dialihkan menjadi sumber pendapatan melalui sewa, kerjasama, atau penjualan.
e. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
f. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
g. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
h. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

i. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah: Mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi di daerahnya, seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan. Hal ini dapat meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah..
j. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.

Dengan penjabaran diatas, maka dapat dianalisa bahwa pertumbuhan keuangan daerah, Kabupaten Tapin pada prinsipnya memiliki kemampuan untuk membiayai target pembangunan ke depan asalkan disiplin fiskal, kualitas belanja, dan penguatan basis pendapatan dikelola secara konsisten. Belanja daerah perlu terus diarahkan pada belanja produktif—terutama infrastruktur dasar, layanan publik prioritas, dan penguatan ekonomi lokal—serta dikawal melalui penganggaran berbasis kinerja, pengadaan yang transparan, dan evaluasi hasil (*value for money*). Mengingat ketergantungan pada transfer pusat (DAU/DAK/DBH) berpotensi fluktuatif, penting bagi Tapin mengoptimalkan perencanaan pengeluaran jangka menengah (MTEF), pengelolaan kas yang pruden, dan manajemen risiko fiskal (termasuk belanja wajib layanan dasar), agar ruang fiskal tetap terjaga untuk program prioritas RPJMD/RKPD.

Memahami dinamika tersebut maka, perlu adanya upaya akselerasi PAD menjadi kunci kemandirian fiskal. Strateginya mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah (PBB-P2, BPHTB, pajak mineral bukan logam dan batuan/galian C, pajak parkir, pajak restoran/hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak PJU, pajak sarang walet) dengan pembaruan NJOP, pemutakhiran basis data objek/subjek pajak, dan integrasi data OSS-RBA, dukcapil, serta perizinan. Retribusi ditata ulang berbasis *cost of service* dan *service level agreement* agar wajar dan berdaya saing, disertai digitalisasi layanan (e-billing, e-payment, e-ticketing) untuk menekan *leakage*. Optimalisasi aset daerah dilakukan melalui penertiban aset tidur, skema kerja sama pemanfaatan (KSP/BGS/BSG), land *value capture* di kawasan pertumbuhan, serta revitalisasi BUMD dengan *business plan* yang terukur pada sektor potensial (air minum, pasar daerah, logistik hasil pertanian/pertambangan rakyat, pariwisata berbasis alam/budaya). Selain itu, peningkatan pendapatan daerah dapat dipercepat dengan peningkatan iklim investasi—kepastian tata ruang, *single submission, service level commitment*, dan promosi potensi unggulan—akan memperluas basis pajak/retribusi secara berkelanjutan. Dengan kebijakan tersebut, ruang fiskal Tapin dapat tumbuh lebih mandiri, stabil, dan cukup kuat untuk mendanai agenda pembangunan prioritas secara inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.34.

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	1.187.334.462.929	1.202.139.964.278	1.717.931.600.071	1.568.178.825.031	2.310.107.796.570	18,10
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.887.171.700	121.443.140.790	92.886.377.407	100.127.498.754	103.494.094.858	1,14
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.108.196.843	29.439.686.762	27.427.262.028	28.394.827.563	34.792.585.421	19,42
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.594.001.024	2.337.412.375	4.003.044.421	4.376.818.354	5.186.454.495	18,91
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.698.384.878	4.701.395.003	5.179.875.915	5.404.791.545	5.826.887.513	12,04
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.486.588.955	84.964.646.649	56.276.195.042	61.951.061.292	57.688.167.429	-6,50
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.061.166.426.882	1.050.230.494.367	1.590.277.432.228	1.459.796.209.532	2.197.832.945.920	19,96
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	987.559.906.109	977.176.119.595	1.455.670.208.493	1.305.466.218.145	2.053.302.893.245	20,08
1.2.1.1	Dana Perimbangan	835.353.328.109	811.326.553.141	1.357.000.364.733	1.208.315.231.559	1.928.440.488.245	23,26
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	271.607.654.107	245.007.552.390	812.527.669.430	634.360.966.841	1.344.507.437.666	49,16
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA					-	
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	421.844.570.000	416.699.835.000	414.513.383.682	432.333.645.608	460.997.729.527	2,24
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	141.901.104.002	149.619.165.751	129.959.311.621	141.620.619.110	122.935.321.052	-3,52
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	50.002.203.000	63.219.134.000	5.594.207.000		26.724.509.000	-24,95
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus						
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian						
1.2.1.4	Dana Desa	102.204.375.000	102.630.432.454	93.075.636.760	97.150.986.586	98.137.896.000	-1,01

NO	URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	73.606.520.773	73.054.374.772	134.607.223.735	154.329.991.387	144.530.052.675	18,38
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	73.606.520.773	73.054.374.772	134.607.223.735	154.329.991.387	144.530.052.675	18,38
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi						
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota						
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	27.280.864.347	30.466.329.121	34.767.790.436	8.255.116.745	8.780.755.792	-24,68
1.3.1	Pendapatan Hibah	27.280.864.347	9.109.587.121	9.882.398.701	34.400.000	369.701.820	-65,88
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat						
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	21.356.742.000	24.885.391.735	8.220.716.745	8.411.053.972	-26,70

***Sumber**: BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah).*

2. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja operasi
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2) Belanja modal
   Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3) Belanja tidak terduga
   Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4) Belanja transfer
   Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) secara konsisten meningkat cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,95% per tahun dari 1,506 triliun (2020) menjadi 2,240 triliun (2024). Belanja daerah Kabupaten Tapin secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.35.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	1.239.680.432.985	1.506.125.212.042	1.645.505.852.094	1.717.847.616.256	2.240.921.852.355	15,95
2.1	BELANJA OPERASI	744.099.463.334	873.848.686.477	983.129.650.879	1.177.535.380.629	1.415.461.029.155	17,44
2.1.1	Belanja Pegawai	405.398.178.921	422.170.852.450	448.969.728.637	462.501.391.423	513.146.735.996	6,07
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	301.614.588.523	381.394.334.514	460.650.110.998	589.859.979.604	728.277.945.194	24,66
2.1.2	Belanja Bunga	1.337.918.090	1.948.221.349	7.578.695.680	7.252.202.772	3.404.363.388	20,45
2.1.4	Belanja Subsidi						
2.1.5	Belanja Hibah	25.069.689.500	63.673.128.164	56.698.494.864	98.754.806.830	135.296.059.577	52,42
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.679.088.300	4.662.150.000	9.232.620.700	19.167.000.000	35.335.925.000	34,87
2.1.7	Belanja keuangan						
2.2	BELANJA MODAL	314.884.915.821	442.233.855.608	483.199.477.506	331.009.561.591	565.980.422.940	15,79
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	30.334.280.380	13.781.914.000	3.450.800.000		5.366.469.312	-35,15
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.586.631.509	54.642.456.139	70.914.035.623	55.122.728.380	129.732.783.079	30,61
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	105.530.913.638	228.023.651.539	154.432.756.722	94.152.883.521	110.127.312.728	1,07
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.073.896.647	143.322.591.761	252.793.986.263	179.002.281.237	320.094.184.977	27,78
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.513.021.997	2.463.242.169	1.607.898.898	2.731.668.454	599.672.844	-39,62
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	9.846.171.650				60.000.000	-72,06
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	13.420.690.337	14.008.130.387	14.038.372.812	8.943.655.185	247.857.000	-63,14

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	13.420.690.337	14.008.130.387	14.038.372.812	8.943.655.185	247.857.000	-63,14
2.4	BELANJA TRANSFER	167.275.363.493	176.034.539.570	165.138.350.897	200.359.018.851	259.232.543.260	11,57
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.457.738.583	2.039.312.404	2.519.839.551	2.830.448.193	3.895.707.908	27,86
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.297.939.188	2.039.312.404	2.519.839.551	2.830.448.193	3.895.707.908	31,62
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi						
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	159.799.395					-100,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	165.817.624.910	173.995.227.166	162.618.511.346	197.528.570.658	255.336.835.352	11,40
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi						
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya						
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	164.724.854.910	173.995.227.166	162.618.511.346	197.528.570.658	255.336.835.352	11,58
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (PARPOL)	1.092.770.000					-100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.345.970.056)	(303.985.247.764)	72.425.747.977	(149.668.791.225)	69.185.944.215	

Jika dilihat lebih rinci, Semua jenis belanja daerah mengalami tren meningkat yaitu Belanja Operasi (17,44%), Belanja Modal (15,79%), dan Belanja Transfer (11,57%). Hanya satu komponen yang mengalami penurunan tren yaitu Belanja Tak Terduga (-63,14%). Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 62% Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, kemudian 25% digunakan untuk Belanja Modal, 12% digunakan untuk belanja transfer dan sisanya 1% digunakan untuk belanja tidak terduga.

Gambar II.29
Perkembangan Belanja Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

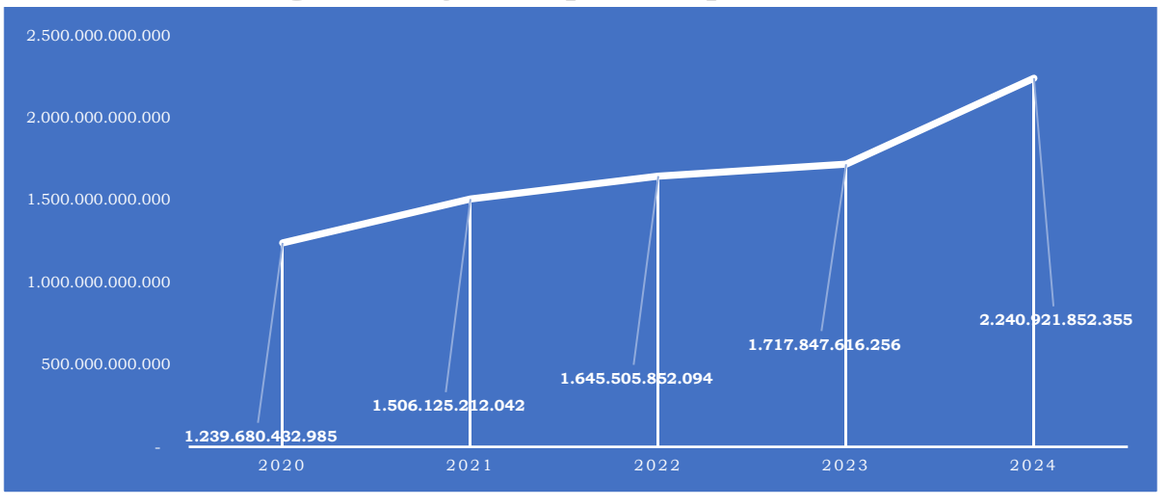

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Gambar II.30
Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024

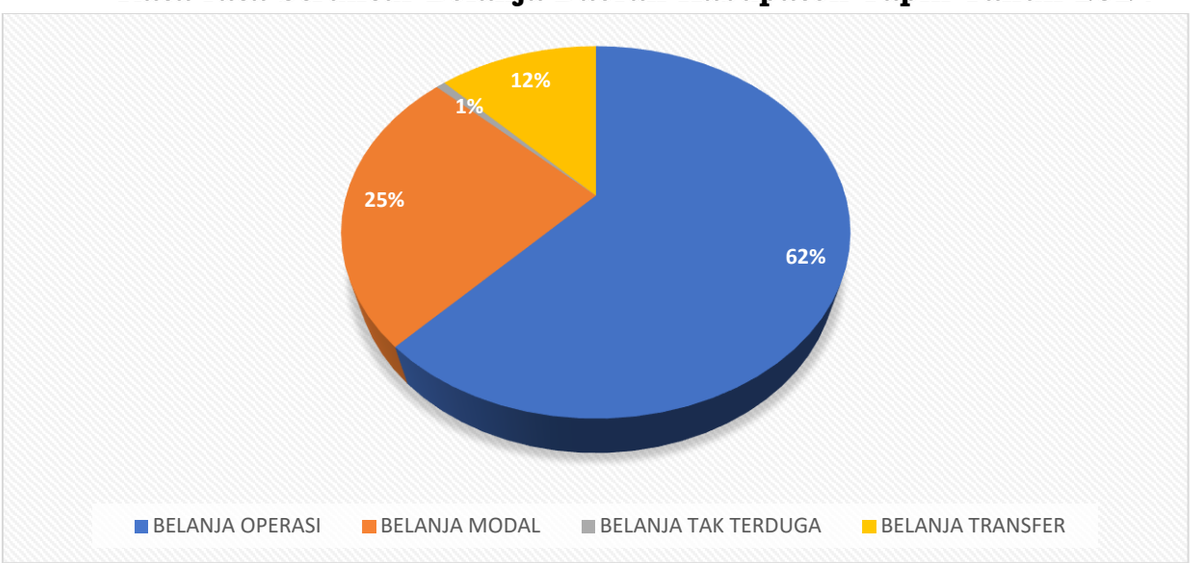

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

a. Belanja Operasi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Tapin telah tumbuh 17,44% per tahun dari Rp. 744,099 miliar (2020) menjadi Rp. 1,415 triliun (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 54,48% dari total belanja operasi yang ada, dan kemudian terus ditekan hingga

mencapai 36,25% di tahun 2024. Lalu proporsi belanja barang dan jasa proporsinya relatif terus meningkat setiap tahun dari 40,53% (2020) menjadi 51,45% (2024). Sementara belanja operasi lainnya (belanja bunga, hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 13% dan tertinggi terjadi di tahun 2024 yang mencapai 12,30%.

Gambar II.31
Perkembangan Kontribusi Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

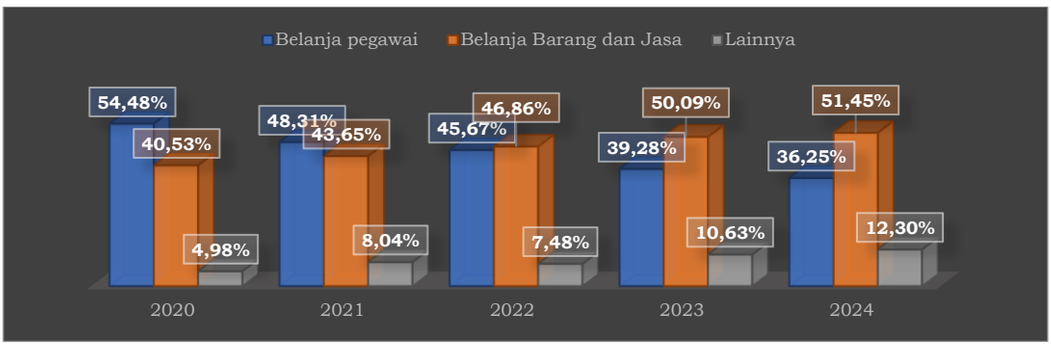

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Meskipun secara proporsi belanja pegawai terus menurun namun secara nominal nilainya terus mengalami peningkatan dari Rp. 405,398 miliar (2020) menjadi Rp. 513,146 miliar (2024). Peningkatan nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian agar kedepan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

b. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Tapin mengalami fluktuatif namun masih dalam tren naik sebesar 15,79% pertahun dari Rp. 314,884 miliar (2020) menjadi Rp. 565,980 miliar (2024). Dalam 5 (lima) tahun (2020-2024) terakhir mengalami tren naik meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari 483,199 miliar (2022) menjadi 331,009 miliar (2023) dan meningkat lagi menjadi Rp 565,980 miliar pada tahun 2024. Jika dilihat lebih detail maka beberapa belanja yang mengalami tren menurun yaitu Belanja Tanah (-35,15%), Belanja Aset Tetap Lainnya (-39,82%) dan Belanja Aset Lainnya (-72,06%).

Dalam struktur belanja modal disini Belanja Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan secara konsisten yaitu dari Rp 44,586 miliar (2020) menjadi Rp 129,732 miliar (2024), kemudian ada Belanja Bangunan dan Gedung yang mengalami fluktuasi namun masih dalam tren positif dengan pertumbuhan sebesar 1,07% pertahun, terakhir jumlah belanja untuk jalan, irigasi dan jaringan mengalami peningkatan dari Rp. 120,073 miliar (2020) menjadi Rp. 320,094 miliar (2024) atau meningkat sebesar 27,78% rata-rata per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang

dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

c. Belanja Tak Terduga

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Tapin dalam tren negatif dengan rata-rata penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 63,14% dari Rp. 13,43 miliar (2020) menjadi 247,86 juta (2024). Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.

d. Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Tapin relative naik sekitar 11,57% pertahun dari Rp. 167,275 miliar (2020) menjadi Rp. 259,232 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relatif meningkatnya Belanja transfer bagi hasil yaitu sebesar 27,86% pertahun dari 1,457 miliar (2020) menjadi 3,895 miliar (2024) serta didukung juga oleh meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan sebesar 11,40% pertahun dari Rp. 165,817 miliar (2020) menjadi Rp. 255,336 miliar (2024).

Jika dilihat dari proporsinya maka rata-rata lebih dari 99% alokasi belanja transfer adalah untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa, dan sisanya untuk Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Gambar II.32
Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (juta rupiah)

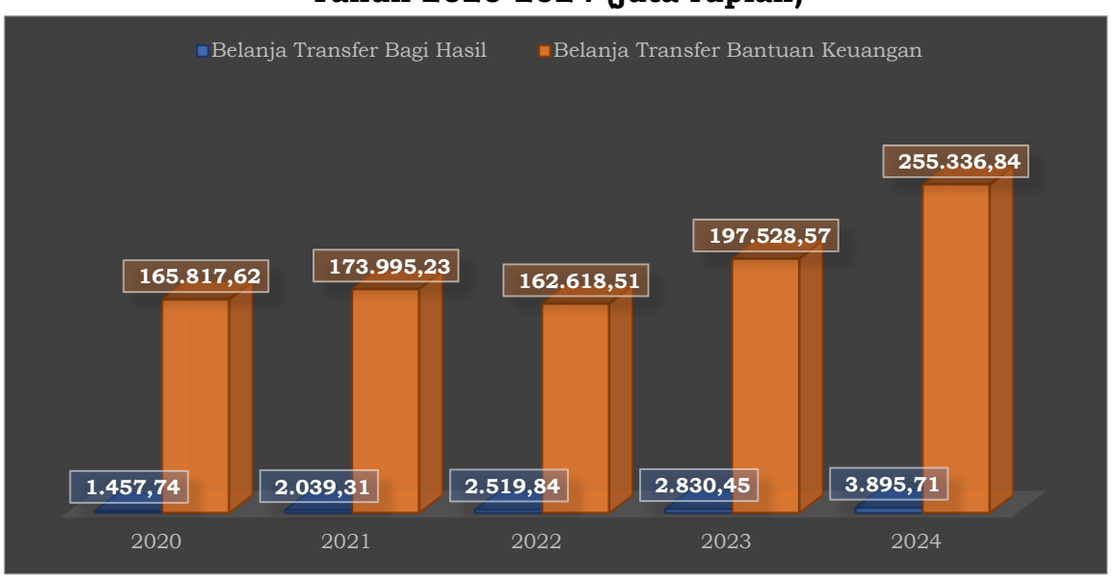

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir defisit belanja terjadi di tahun 2020, 2021 dan 2023 yang nilai defisitnya secara berturut-turut sebesar - Rp. 52,345 miliar, - Rp. 303,985 miliar dan Rp. 149,688 miliar. Meskipun terjadi defisit belanja namun besaran defisit tersebut masih dapat ditutup SiLPA yang dapat digunakan di tahun 2020,2021 dan 2023 yang secara berturut-turut sebesar Rp. 397,156 miliar, Rp. 3326,836 miliar dan 227,687 miliar. Adapun tahun 2022 dab 2024 terjadi surplus anggaran belanja.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

1) Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
4) Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
5) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
6) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
7) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Pertumbuhan belanja modal yang tinggi di Kabupaten Tapin mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Alokasi anggaran yang signifikan pada belanja modal memungkinkan percepatan pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, jaringan air bersih, serta fasilitas publik lainnya yang secara langsung berdampak pada konektivitas wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang memadai bukan hanya menjadi penopang aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar.

Dampaknya terhadap sektor riil pun cukup signifikan, karena pembangunan infrastruktur mampu menurunkan biaya logistik, memperluas akses ke sentra produksi, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai kecamatan. Di sektor pertanian—sebagai tulang punggung ekonomi Tapin—tersedianya irigasi yang lebih baik dan akses jalan yang lancar meningkatkan produktivitas dan memperluas peluang pemasaran hasil panen. Pada saat yang sama, proyek belanja modal juga menyerap tenaga kerja lokal, sehingga menambah daya beli masyarakat. Dengan demikian, tren belanja modal yang tinggi tidak hanya memperkuat infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan sektor riil yang inklusif, mendorong perputaran ekonomi, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin.

3. Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir relative mengalami penurunan sangat signifikan yang dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA dari khususnya dari tahun 2023 ke tahun 2024. Sebenarnya jika dilihat lebih mendalam terlihat bahwa SiLPA dari tahun 2020-2023 relatif mengalami penurunan yang signifikan sebesar -21,23% dari 397,182 miliar manjadi 152,877 miliar. Hal itu menunjukkan adanya penurunan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024, dengan menggunakan SiLPA pada tahun 2023 terdapat sisa anggaran di tahun 2024 senilai 13,5 miliar yang nantinya akan digunakan dalam anggaran tahun 2025.

Tabel II.35
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	PEMBIAYAAN	397.182.279.288	436.777.764.925	155.262.062.552	152.877.428.457	(55.607.525.781)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	397.182.279.288	436.777.764.925	168.117.818.946	227.707.810.530	3.223.637.231
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	397.156.550.370	326.836.309.232	132.792.517.161	227.687.810.530	3.208.637.231
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;					

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	109.921.012.750	35.304.861.744		15.000.000
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	25.728.918	20.442.943	20.440.041	20.000.000	
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	12.855.756.394	74.830.382.073	58.831.163.012
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo			12.855.756.394	58.831.163.012	58.831.163.012
3.2.2	Penyertaan modal daerah;		-		15.999.219.061	-
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;		-			-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan					
	PEMBIAYAAN NETTO	397.182.279.288	436.777.764.925	155.262.062.552	152.877.428.457	(55.607.525.781)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	344.836.309.232	132.792.517.161	227.687.810.529	3.208.637.231	13.578.418.434

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tapin tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.36
Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	1.187.334.462.929	1.202.139.964.278	1.717.931.600.071	1.568.178.825.031	2.310.107.796.570	18,10
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.887.171.700	121.443.140.790	92.886.377.407	100.127.498.754	103.494.094.858	1,14
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.108.196.843	29.439.686.762	27.427.262.028	28.394.827.563	34.792.585.421	19,42
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.594.001.024	2.337.412.375	4.003.044.421	4.376.818.354	5.186.454.495	18,91
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.698.384.878	4.701.395.003	5.179.875.915	5.404.791.545	5.826.887.513	12,04
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.486.588.955	84.964.646.649	56.276.195.042	61.951.061.292	57.688.167.429	-6,50
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.061.166.426.882	1.050.230.494.367	1.590.277.432.228	1.459.796.209.532	2.197.832.945.920	19,96
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	987.559.906.109	977.176.119.595	1.455.670.208.493	1.305.466.218.145	2.053.302.893.245	20,08
1.2.1.1	Dana Perimbangan	835.353.328.109	811.326.553.141	1.357.000.364.733	1.208.315.231.559	1.928.440.488.245	23,26
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	271.607.654.107	245.007.552.390	812.527.669.430	634.360.966.841	1.344.507.437.666	49,16
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA					-	
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	421.844.570.000	416.699.835.000	414.513.383.682	432.333.645.608	460.997.729.527	2,24
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	141.901.104.002	149.619.165.751	129.959.311.621	141.620.619.110	122.935.321.052	-3,52
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	50.002.203.000	63.219.134.000	5.594.207.000		26.724.509.000	-24,95
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus						

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian						
1.2.1.4	Dana Desa	102.204.375.000	102.630.432.454	93.075.636.760	97.150.986.586	98.137.896.000	-1,01
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	73.606.520.773	73.054.374.772	134.607.223.735	154.329.991.387	144.530.052.675	18,38
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	73.606.520.773	73.054.374.772	134.607.223.735	154.329.991.387	144.530.052.675	18,38
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi						
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota						
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	27.280.864.347	30.466.329.121	34.767.790.436	8.255.116.745	8.780.755.792	-24,68
1.3.1	Pendapatan Hibah	27.280.864.347	9.109.587.121	9.882.398.701	34.400.000	369.701.820	-65,88
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat						
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	21.356.742.000	24.885.391.735	8.220.716.745	8.411.053.972	-26,70
2	BELANJA	1.239.680.432.985	1.506.125.212.042	1.645.505.852.094	1.717.847.616.256	2.240.921.852.355	15,95
2.1	BELANJA OPERASI	744.099.463.334	873.848.686.477	983.129.650.879	1.177.535.380.629	1.415.461.029.155	17,44
2.1.1	Belanja Pegawai	405.398.178.921	422.170.852.450	448.969.728.637	462.501.391.423	513.146.735.996	6,07
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	301.614.588.523	381.394.334.514	460.650.110.998	589.859.979.604	728.277.945.194	24,66
2.1.2	Belanja Bunga	1.337.918.090	1.948.221.349	7.578.695.680	7.252.202.772	3.404.363.388	20,45
2.1.4	Belanja Subsidi						
2.1.5	Belanja Hibah	25.069.689.500	63.673.128.164	56.698.494.864	98.754.806.830	135.296.059.577	52,42
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.679.088.300	4.662.150.000	9.232.620.700	19.167.000.000	35.335.925.000	34,87

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.7	Belanja keuangan						
2.2	BELANJA MODAL	314.884.915.821	442.233.855.608	483.199.477.506	331.009.561.591	565.980.422.940	15,79
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	30.334.280.380	13.781.914.000	3.450.800.000		5.366.469.312	-35,15
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	44.586.631.509	54.642.456.139	70.914.035.623	55.122.728.380	129.732.783.079	30,61
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	105.530.913.638	228.023.651.539	154.432.756.722	94.152.883.521	110.127.312.728	1,07
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.073.896.647	143.322.591.761	252.793.986.263	179.002.281.237	320.094.184.977	27,78
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.513.021.997	2.463.242.169	1.607.898.898	2.731.668.454	599.672.844	-39,62
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	9.846.171.650				60.000.000	-72,06
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	13.420.690.337	14.008.130.387	14.038.372.812	8.943.655.185	247.857.000	-63,14
2.3.1	Belanja Tak Terduga	13.420.690.337	14.008.130.387	14.038.372.812	8.943.655.185	247.857.000	-63,14
2.4	BELANJA TRANSFER	167.275.363.493	176.034.539.570	165.138.350.897	200.359.018.851	259.232.543.260	11,57
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	1.457.738.583	2.039.312.404	2.519.839.551	2.830.448.193	3.895.707.908	27,86
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.297.939.188	2.039.312.404	2.519.839.551	2.830.448.193	3.895.707.908	31,62
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi						
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	159.799.395					-100,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	165.817.624.910	173.995.227.166	162.618.511.346	197.528.570.658	255.336.835.352	11,40
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi						
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya						

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	164.724.854.910	173.995.227.166	162.618.511.346	197.528.570.658	255.336.835.352	11,58
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (PARPOL)	1.092.770.000					-100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.345.970.056)	(303.985.247.764)	72.425.747.977	(149.668.791.225)	69.185.944.215	
3	PEMBIAYAAN	397.182.279.288	436.777.764.925	155.262.062.552	152.877.428.457	(55.607.525.781)	#NUM!
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	397.182.279.288	436.777.764.925	168.117.818.946	227.707.810.530	3.223.637.231	-69,98
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	397.156.550.370	326.836.309.232	132.792.517.161	227.687.810.530	3.208.637.231	-70,02
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;						
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	109.921.012.750	35.304.861.744		15.000.000	-92,48
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	25.728.918	20.442.943	20.440.041	20.000.000		-100,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.						
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	12.855.756.394	74.830.382.073	58.831.163.012	113,92
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo			12.855.756.394	58.831.163.012	58.831.163.012	0,00
3.2.2	Penyertaan modal daerah;		-		15.999.219.061	-	-100,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;						
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;		-			-	

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan						
	PEMBIAYAAN NETTO	397.182.279.288	436.777.764.925	155.262.062.552	152.877.428.457	(55.607.525.781)	#NUM!
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	344.836.309.232	132.792.517.161	227.687.810.529	3.208.637.231	13.578.418.434	-55,45

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Tapin dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 8,39% pertahun dari Rp. 2,341 triliun (2019) menjadi Rp. 3,231 triliun (2023). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah investasi jangka panjang (3,62% pertahun), aset tetap (11,84% pertahun) dan Aset Lainnya (133 % Pertahun). Adapun jenis aset lancar mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar -36,36% pertahun. Jika dilihat proporsinya maka rata-rata lebih dari 80% nilai total aset yang ada berasal dari jenis aset tetap.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin dalam kurun waktu tahun 2019-2023 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut mengalami tren meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 51,10% pertahun dari Rp. 75,901 miliar (2019) menjadi Rp. 395,665 miliar (2023). Jika dilihat lebih dalam maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang beban dan utang jangka pendek lainnya yang trennya meningkat yang ditampilkan secara berturut-turut sebagai berikut

280,31% pertahun dari Rp. 682,354 juta (2019) menjadi Rp. 142,750 miliar (2023), 184,17% pertahun dari Rp.2,973 miliar (2019) menjadi Rp. 193,891 miliar.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Tapin berfluktuasi dari tahun ke tahun namun secara agregat mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,64% pertahun dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,265 Triliun menjadi Rp. 2,821 Triliun di tahun 2023. Berdasarkan data pada tabel, ekuitas Kabupaten Tapin menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif positif selama periode 2020–2024 meskipun sempat mengalami penurunan di awal. Pada tahun 2020 ekuitas tercatat sebesar Rp2,36 triliun, turun menjadi Rp2,25 triliun pada 2021, yang mengindikasikan adanya tekanan fiskal atau beban kewajiban yang cukup tinggi pada periode tersebut. Namun, mulai 2022 ekuitas kembali meningkat signifikan menjadi Rp2,73 triliun, berlanjut ke Rp2,82 triliun di 2023, dan melonjak tajam hingga Rp3,93 triliun pada 2024. Pertumbuhan rata-rata ekuitas sebesar 4,49% selama lima tahun mencerminkan adanya perbaikan kinerja keuangan daerah, dengan kecenderungan peningkatan aset bersih setelah dikurangi kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tapin mampu memperkuat posisi keuangannya, terutama setelah 2021, meskipun tetap perlu diantisipasi faktor fluktuasi kewajiban jangka panjang yang cukup signifikan. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional dimana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Tapin disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II.37
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	301.932.715.847	97.948.848.794	208.402.861.002	362.218.868	3.395.174.379,49	(81,39)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-		
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000	143.148.682				
Kas di BLUD	20.517.843.640	32.694.317.624	18.779.154.444	391.374.385		(62,84)
Kas di Bendahara FKTP	917.121.076	550.316.951	319.824.928	2.194.838.259		24,38
Kas di Bendahara BOS	3.468.568.669	1.455.885.109	185.970.156	260.205.719		(47,67)
Kas dana BOK Puskesmas						
Kas Lainnya						
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek	-	-				
Piutang Pendapatan						
Piutang Pajak	18.354.801.466	19.012.201.286	16.596.951.247	12.767.480.363	13.987.739.904	(8,68)
Penyisihan Piutang Pajak	(12.532.393.976)	(13.342.643.156)				
Piutang Retribusi	3.006.310.168	3.527.439.668	4.442.091.510	5.513.104.069	6.605.405.165	16,37
Penyisihan Piutang Retribusi	(2.334.825.424)	(3.008.412.918)				
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.918.851.281	1.692.455.643	3.124.024.698	3.923.605.152	5.888.476.098	(5,49)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(24.594.256)	(8.462.278)				
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	71.614.409.886		37.241.117.750		526.293.500.000	
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat						
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	27.238.615.381	37.615.171.397	46.683.411.735	48.081.304.904	55.450.238.415	15,27

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			(15.211.873.738)	(12.516.040.387)		
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya			571.169.553	551.169.553		
Beban Dibayar Dimuka						
Persediaan	14.683.124.176	17.784.971.980	16.158.627.929	14.475.414.173	16.044.018.681,31	(0,36)
Piutang Lainnya	612.052.537	825.550.494		1.172.315.448	55.450.238.415	17,64
Penyisihan Piuantang Lainnya	(438.217.537)	(495.034.594)			-14.705.040.473,9	(100,00)
Jumlah Aset Lancar	451.934.442.934	196.395.754.684	337.293.331.213	77.176.990.506	614.052.019.310,5	(35,72)
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya	44.850.000	44.850.000	44.850.000	44.850.000	44.850.000	0,00
Dana Bergulir						
Penyisihan Investasi Jangka Panjang						
Jumlah Investasi Non Permanen	44.850.000	44.850.000	44.850.000	44.850.000	44.850.000	0,00
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	132.525.239.349	124.322.505.885	146.994.566.139	164.376.023.884	164.216.108.162,22	5,53
Jumlah Investasi Permanen	132.525.239.349	124.322.505.885	146.994.566.139	164.376.023.884	164.216.108.162,22	5,53
Jumlah Investasi Jangka Panjang	132.525.239.349	124.322.505.885	146.994.566.139	164.376.023.884	164.216.108.162,22	5,53
ASET TETAP						
Tanah	446.957.018.258	459.531.680.583	468.912.824.583	474.133.911.283	478.459.750.344,68	1,49
Peralatan dan Mesin	337.821.273.598	384.302.483.962	444.426.507.204	496.416.977.598	614.388.031.285,16	10,10
Gedung dan Bangunan	1.050.524.168.062	1.115.184.145.990	1.238.106.251.300	1.640.587.841.126	2.037.195.455.950,71	11,79
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	1.634.351.241.518	1.806.019.963.295	2.093.793.901.247	2.444.122.117.137	2.621.400.152.622,66	10,58
Aset Tetap Lainnya	16.293.148.714	22.713.071.083	23.910.976.872	25.856.194.942	25.959.882.442,00	12,24
Konstruksi dalam Pengerjaan	72.712.563.295	254,795,701,634	298,905,404,112	62,245,190,027	253.874.779.114,90	(3,81)
Akumulasi Penyusutan	(1.729.599.058.994)	(1.957.757.460.932)	(2.195.173.688.694)	(2.455.303.117.224)	-2.659.387.837.280,20	9,15
Jumlah Aset Tetap	1.829.060.354.451	2.084.789.585.615	2.372.882.176.623	2.688.059.114.888	3.371.890.214.479,91	10,10
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-		

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-		
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	2.225.392.206	2.225.392.206			2.225.392.206,00	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			2.225.392.206,00	2.225.392.206		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			54.375.846.440			
Aset Tak Berwujud	8.187.932.228	8.483.715.228,00	7.222.332.973	7.916.427.932	8.902.221.959,40	(0,84)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.964.991.494)	(6.728.088.233)	(5.617.094.280)	(5.617.094.280)	-6.710.094.477,78	(1,49)
Aset Lain-Lain	31.294.840.454	35.189.657.735	30.291.601.844	42.203.432.625	43.447.971.988,47	7,76
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(26.470.757.896)	(25.890.781.328)	(23.433.501.436)	(32.294.194.202)	-31.198.111.814,36	5,10
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				287.681.239.000	180.256.997.014	
Jumlah Aset Lainnya	9.272.415.498	13.279.895.608	65.064.577.748	302.115.203.282	196.924.376.875,73	138,92
JUMLAH ASET	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	3.231.772.182.559	4.347.127.568.828,36	7,47
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					0	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			58.831.163.012	58.831.163.012	14.707.792.076,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	178.906.104	181.439.856	176.151.232	192.471.428	202.464.359,62	1,84
Utang Beban	203.800.027	380.498.201	663.627.766	142.750.502.318	202.043.875.590,05	414,45
Utang Jangka Pendek Lainnya	55.379.248.934	58,888,884,550	53.090.534.478	193.891.457.623	191.491.294.095,54	36,79
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Utang Lebih Salur Dana Transfer						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	408.445.426.121,21	63,21
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-		
JUMLAH KEWAJIBAN	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	408.445.426.121,21	63,21
EKUITAS						
EKUITAS						
Ekuitas	2.367.075.347.167	2.249.460.756.434	2.735.979.070.147	2.821.354.524.723	3.938.682.142.707,15	4,49
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	2.367.075.347.167	2.249.460.756.434	2.735.979.070.147	2.821.354.524.723	3.938.682.142.707,15	4,49
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.422.837.302.233	2.308.911.579.041	2.848.740.546.635	3.217.020.119.103	4.347.127.568.828,36	7,35

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Tapin periode tahun 2019-2023 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun disini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (current ratio). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio acid-test. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Berdasarkan rasio lancar Kabupaten Tapin pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dan cenderung menurun sebelum sedikit membaik pada 2024. Pada 2020, rasio lancar mencapai 8,10 yang menandakan posisi likuiditas sangat kuat, namun menurun drastis menjadi 3,30 di 2021 dan semakin turun ke 2,99 di 2022. Kondisi memburuk pada 2023 dengan rasio hanya 0,20, menunjukkan bahwa aset lancar tidak mampu menutup kewajiban lancar, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas dan risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun demikian, pada 2024 terjadi perbaikan dengan rasio meningkat ke 1,503, meskipun masih relatif rendah jika dibandingkan dengan awal periode. Indikasi terhadap keuangan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Tapin sempat mengalami keterbatasan likuiditas yang serius pada 2023, yang dapat menghambat kemampuan pendanaan pembangunan daerah. Namun, perbaikan pada 2024 menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah mulai mampu mengelola aset lancar secara lebih baik untuk menutupi kewajiban jangka pendek, meski tetap diperlukan strategi pengelolaan kas dan efisiensi belanja agar keberlanjutan pembangunan tidak terganggu. Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024.

Tabel II.38
Rasio Lancar Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	451.934.442.934	196.395.754.684	337.293.331.213	77.176.990.506	614052019310,5
KEWAJIBAN LANCAR	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	408445426121,21
RASIO LANCAR	8,10	3,30	2,99	0,20	1,503

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh hutang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Tapin dari tahun 2020-2023 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,024 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 0,1224 dan ditahun 2024 menurun menjadi 1,037. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2020 dimana nilai kewajiban yang ada jumlahnya sekitar 2,36% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2023 dimana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya sekitar 14,02% dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2020-2024 nilainya masih lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Tapin cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih baik namun jika melihat data di tahun 2023 yang nilainya sudah mulai tinggi dan di tahun 2024 menurun maka pemerintah Kabupaten Tapin perlu berhati-hati dalam menambah kewajibannya di masa yang akan datang.

Tabel II.39
Rasio Hutang Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	408.445.426.121,21
EKUITAS	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	231.772.182.559	393.868.214.2707,15
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,0230	0,0246	0,0386	0,1224	1,037

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

b) *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Tapin dari tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif dimana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2023 dengan nilai rasio 0,1224 dan ditahun 2024 menjadi 0,665 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2020 dengan nilai rasio 0,0230. Oleh karena itu secara keseluruhan Kabupaten Tapin tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Tapin namun demikian data pada tahun 2023 harus menjadi catatan khusus karena nilainya sudah cukup tinggi.

Tabel II.40
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tapin
Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	408.445.426.121,21
AKTIVA	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	3.231.772.182.559	614.052.019.310,5
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,0230	0,0246	0,0386	0,1224	0,665

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)*

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapin menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 2020-2023 memiliki tren cukup berfluktuasi namun terus menurun. Rasio tahun 2020 mencapai 0,041 hingga 2024 mencapai 0,030 terlihat menurun. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin dalam

memanfaatkan aset tetapnya semakin kurang dimana pada tahun 2020 dari Rp. 2,4 triliun nilai aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 98,99 miliar. Pada tahun 2024 kinerjanya semakin menurun lagi dimana dengan aset senilai Rp. 3,371 triliun hanya mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 103,494 miliar. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel II.41
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	98.887.171.700	121.443.140.790	92.886.377.407	100.127.498.754	103.494.094.858
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	3.231.772.182.559	3.371.890.214.479,91
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,041	0,050	0,032	0,031	0,030

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 2020-2023 mengalami perkembangan negatif dimana rasio dari nilai rasio 0,041 tahun 2020 menjadi 0,0238 di tahun 2024 hal ini menunjukkan kinerja pemanfaatan total aset di tahun 2024 semakin tidak optimal. Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin tidak optimal ke depan masih sangat perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah

daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.

d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.

e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.

f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.

g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.

h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel II.42
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	98.887.171.700	121.443.140.790	92.886.377.407	100.127.498.754	103.494.094.858
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	3.231.772.182.559	4.347.127.568.828,36
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,041	0,050	0,032	0,031	0,0238

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah**.**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapin 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja

aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 29%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2020 yang mencapai 32,70% sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 22,31%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 35% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.43
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	405.398,18	1.239.680,43	32,70%
2	2021	422.170,85	1.506.125,21	28,03%
3	2022	448.969,73	1.658.361,61	27,07%
4	2023	462.501,39	1.792.678,00	25,80%
5	2024	513.146,74	2.299753,02	22,31%
Rata-Rata		**426.387,85**	**1.470.224,13**	**29,00%**

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,70% per tahun dari Rp. 623,180 miliar (2020) menjadi Rp. 1,005 triliun (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dari Rp. 405,398 miliar (2020) menjadi Rp. 513,146 miliar (2024), Belanja Transfer Bantuan Keuangan dari Rp. 165,817 miliar (2020) menjadi Rp. 255,366 miliar (2024) dan belanja hibah dari Rp. 25,069 miliar (2020) menjadi Rp. 135,296 miliar (2024). Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

1) Evaluasi Kebutuhan Pegawai: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
2) Optimalisasi Produktivitas: Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
3) Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru: Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
4) Peningkatan Efisiensi Administrasi: Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
5) Pengendalian Tunjangan dan Insentif: Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan

kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.

6) Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.44

Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Belanja Operasi Wajib dan Mengikat	442.484.874.811,00	492.454.351.963,00	522.479.539.881,00	587.675.401.025,00	687.183.083.961,00	11,63
Belanja Pegawai	405.398.178.921	422.170.852.450	448.969.728.637	462.501.391.423	513.146.735.996	6,07
Belanja Bunga	1.337.918.090	1.948.221.349	7.578.695.680	7.252.202.772	3.404.363.388	20,45
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	25.069.689.500	63.673.128.164	56.698.494.864	98.754.806.830	135.296.059.577	52,42
Belanja Bantuan Sosial	10.679.088.300	4.662.150.000	9.232.620.700	19.167.000.000	35.335.925.000	34,87
Belanja keuangan	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	167.275.363.493,00	176.034.539.570,00	165.138.350.897,00	200.359.018.851,00	259.232.543.260,00	13,77
Belanja Transfer Bagi Hasil	1.457.738.583	2.039.312.404	2.519.839.551	2.830.448.193	3.895.707.908	27,86
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	165.817.624.910	173.995.227.166	162.618.511.346	197.528.570.658	255.336.835.352	11,4
Belanja Tak Terduga	13.420.690.337	14.008.130.387	14.038.372.812	8.943.655.185	247.857.000	-63,14
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	12.855.756.394	74.830.382.073	58.831.163.012	113,92
Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	12.855.756.394	58.831.163.012	58.831.163.012	0
penyertaan modal daerah;	-	-		15.999.219.061	-	-100
Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah;		-	-	-	-	-
pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	-
Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	623.180.928.641,00	682.497.021.920,00	714.512.019.984,00	871.808.457.134,00	1.005.494.647.233,00	12,7

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2020, 2021, dan 2023 dimana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 52,345 miliar, Rp. 303,985 miliar dan Rp. 224,499 miliar. Sementara pada tahun 2022 dan 2024 terjadi surplus anggaran.

Tabel II.45
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.187.334.462.929	1.202.139.964.278	1.717.931.600.071	1.568.178.825.031	2.310.107.796.570
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.239.680.432.985	1.506.125.212.042	1.645.505.852.094	1.717.847.616.256	2.240.921.852.355
3	Pengeluaran Pembiayaan			12.855.756.394	74.830.382.073	58.831.163.012
	(Defisit Riil)	**-52.345.970.056,00**	**-303.985.247.764,00**	**59.569.991.583,00**	**-224.499.173.298,00**	**10.354.781.203,00**

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi dapat ditutup semua oleh SiLPA pada tahun yang berkenaan yaitu sebesar Rp 397,156 miliar (2020), Rp. 326,836 miliar (2021) dan Rp. 227,687 miliar (2023) dan 2024 menjadi 3,2 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkah masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan

Tabel II.46
Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	344.836.309.232	132.792.517.161	227.687.810.529	3.208.637.231	13.578.418.434
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	
Total Komposisi Penutup Defisit	344.836.309.232	132.792.517.161	227.687.810.529	3.208.637.231	13.578.418.434

Sumber: *BKAD Kabupaten Tapin, 2025 (diolah)*

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Tapin dari tahun 2019-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Tapin.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2030. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga 2030.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2030. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang

dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak,, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2024 dan/atau target (APBD) tahun 2025.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Tapin masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Tapin masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam

memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah kabupaten Tapin tahun 2026-2030 diproyeksikan meningkat dengan proyeksi pertumbuhan ± 4,06 % pertahun dari Rp. 1,820 triliun (2026) menjadi Rp. 2,133 triliun (2030). Dengan proyeksi PAD sebesar Rp. 170 miliar ditahun 2026 dan 2030 mencapai Rp. 216,86 miliar. Kemudian pada pendapatan transfer sebesar Rp. 1,639 triliun ditahun 2026 menjadi Rp. 1,904 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan meningkat 5%. Proyeksi pertumbuhan pajak daerah akan dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
3) Diversifikasi Sumber Pajak: Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Tapin. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
4) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
5) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
6) Peninjauan Kembali Insentif Pajak: Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.

7) Evaluasi Kebijakan Pajak: Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
8) Peningkatan Pengawasan dan Transparansi: Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

Pada umumnya ruang Pendapatan Retribusi Daerah relatif terbatas yang merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dimana terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan oleh Daerah. Untuk itu diperlukan strategi untuk memaksimalkan kembali pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.
2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.

8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2026-2030 diproyeksikan tumbuh ± 5% pertahun dari Rp. 10,5 miliar (2026) menjadi Rp. 12,76 miliar (2030). Target ini juga mempertimbangan pertumbuhan masa lalu yang pertumbuhannya mencapai 14% pertahun. Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD dan Swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:

1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan

memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.

8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2026-2030 ditargetkan naik pertahun dari Rp. 10,13 miliar (2026) menjadi Rp. 12,33 miliar (2030). Target ini cukup optimis namun masih realistis jika mempertimbangkan capaian rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2019-2024) yang sebesar -6,50% pertahun. Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan kinerja BLUD serta meningkatkan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Tapin tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.47

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030

No	Uraian	Realisasi	Target	Proyeksi				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	2.310.107.796.570	2.043.042.956.700	1.820.050.247.454	1.893.118.344.965	1.969.638.143.381	2.049.784.358.612	2.133.741.154.854
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.494.094.858	136.903.455.182	170.277.660.348	180.842.954.615	192.096.832.846	204.086.394.522	216.862.109.007
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34.792.585.421	53.678.955.182	82.891.935.348	87.036.532.115	91.388.358.721	95.957.776.657	100.755.665.490
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.186.454.495	4.924.500.000	5.170.725.000	5.687.797.500	6.256.577.250	6.882.234.975	7.570.458.473
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.826.887.513	10.000.000.000	10.500.000.000	11.025.000.000	11.576.250.000	12.155.062.500	12.762.815.625
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.688.167.429	68.300.000.000	71.715.000.000	77.093.625.000	82.875.646.875	89.091.320.391	95.773.169.420
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.197.832.945.920	1.896.484.553.810	1.639.634.892.013	1.701.630.810.502	1.766.364.501.695	1.833.962.314.807	1.904.556.614.100
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.053.302.893.245	1.771.737.356.000	1.515.054.950.939	1.570.821.872.374	1.629.015.116.660	1.689.745.460.521	1.753.128.917.099
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	144.530.052.675	124.747.197.810	124.579.941.074	130.808.938.128	137.349.385.035	144.216.854.286	151.427.697.001
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.780.755.792	9.654.947.708	10.137.695.093	10.644.579.848	11.176.808.840	11.735.649.282	12.322.431.747
1.3.1	Pendapatan Hibah	369.701.820		-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat							
1.3.3	Pendapatan Lainnya	8.411.053.972	9.654.947.708	10.137.695.093	10.644.579.848	11.176.808.840	11.735.649.282	12.322.431.747

Sumber: *Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2025 (diolah)*

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapin yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
   a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
   b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin

5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Tapin, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Kemudian pada Belanja Daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar ± 4,77% pertahun dari Rp. 1,825 triliun (2026) meningkat hingga mencapai Rp. 2,200 triliun (2030). Pada proyeksi 2026 terjadi penyesuaian/normalisasi target di tahun 2026, dikarenakan realisasi dana bagi hasil (DBH) tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga hal ini berdampak pada proyeksi pada tahun-tahun berikutnya yang diasumsikan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Dengan melihat potensi semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

1) Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.

4) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
5) Kebijakan Penghematan Biaya: Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
6) Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.48

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030

No	Uraian	Realisasi	Target	Proyeksi				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	BELANJA	2.240.921.852.355	2.407.434.604.524	1.825.852.891.609	1.904.745.204.615	2.000.700.212.715	2.101.573.998.438	2.200.051.554.764
2.1	BELANJA OPERASI	1.415.461.029.155	1.599.799.338.061	927.887.071.609	973.407.704.615	1.023.917.962.715	1.072.121.528.438	1.123.619.054.764
2.1.1	Belanja Pegawai	513.146.735.996	697.738.867.638	545.564.844.013	571.296.984.911	600.196.914.829	630.472.199.531	658.915.440.652
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	728.277.945.194	767.077.888.481	269.320.357.596	310.723.539.704	341.541.947.886	367.297.088.907	397.004.214.112
2.1.2	Belanja Bunga	3.404.363.388	2.000.000.000					
2.1.4	Belanja Subsidi							
2.1.5	Belanja Hibah	135.296.059.577	84.648.256.942	72.220.210.000	61.387.180.000	52.179.100.000	44.352.240.000	37.699.400.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	35.335.925.000	48.334.325.000	40.781.660.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
2.1.7	Belanja keuangan						-	
2.2	BELANJA MODAL	565.980.422.940	465.800.814.208	670.341.160.000	701.898.090.000	740.280.090.000	780.629.600.000	820.020.620.000
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	5.366.469.312	57.696.020.200	8.693.470.000	10.551.820.000	11.812.480.000	13.050.080.000	14.302.900.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	129.732.783.079	52.343.455.866	74.583.820.000	59.400.180.000	66.496.950.000	73.463.880.000	80.516.460.000
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	110.127.312.728	108.090.847.440	184.200.170.000	195.027.850.000	156.098.050.000	124.947.400.000	136.942.430.000
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	320.094.184.977	244.716.236.702	402.115.060.000	436.009.570.000	504.855.370.000	568.044.430.000	587.027.140.000
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	599.672.844	2.754.254.000	548.640.000	665.920.000	745.480.000	823.580.000	902.640.000
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	60.000.000	200.000.000	200.000.000	242.750.000	271.760.000	300.230.000	329.050.000
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	247.857.000	25.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
2.3.1	Belanja Tak Terduga	247.857.000	25.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	259.232.543.260	316.834.452.255	212.624.660.000	219.439.410.000	226.502.160.000	233.822.870.000	241.411.880.000
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	3.895.707.908	8.986.920.034	6.138.340.000	6.138.340.000	6.138.340.000	6.138.340.000	6.138.340.000
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	255.336.835.352	307.847.532.221	206.486.320.000	213.301.070.000	220.363.820.000	227.684.530.000	235.273.540.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	69.185.944.215	(364.391.647.824)	(5.802.644.155)	(11.626.859.650)	(31.062.069.334)	(51.789.639.826)	(66.310.399.910)

Sumber: *Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2025 (diolah)*

2.2.3.2 Proyeksi Pembiayaan

Dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten Tapin dapat melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait untuk mempercepat pembangunan. Beberapa alternatif pembiayaan antara lain sebagai berikut:

1. **Kerjasama dengan Pihak Ketiga (KPBU/PPP),** Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga atau skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) merupakan mekanisme pembiayaan alternatif di mana pemerintah daerah menggandeng pihak swasta untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik dengan prinsip berbagi risiko, manfaat, dan tanggung jawab. Melalui KPBU, pemerintah daerah dapat mempercepat penyediaan fasilitas publik seperti jalan, air bersih, pasar, rumah sakit, dan sistem pengelolaan sampah tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Skema ini mendorong efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan proyek dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.
2. **Kerjasama dengan Pihak Swasta (CSR),** Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya kolaboratif untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang sosial, pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan koordinator agar program CSR perusahaan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga kontribusi swasta menjadi lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan sinergi ini, CSR tidak hanya menjadi kewajiban perusahaan, tetapi juga instrumen pembangunan berkelanjutan yang melibatkan sektor non-pemerintah secara aktif.

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Tapin tahun 2026-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan neto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada. Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2) Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit.

Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Tapin tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.49
Proyeksi APBD Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030

No	Uraian	Realisasi	Target	Proyeksi				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	2.310.107.796.570	2.043.042.956.700	1.820.050.247.454	1.893.118.344.965	1.969.638.143.381	2.049.784.358.612	2.133.741.154.854
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.494.094.858	136.903.455.182	170.277.660.348	180.842.954.615	192.096.832.846	204.086.394.522	216.862.109.007
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34.792.585.421	53.678.955.182	82.891.935.348	87.036.532.115	91.388.358.721	95.957.776.657	100.755.665.490
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.186.454.495	4.924.500.000	5.170.725.000	5.687.797.500	6.256.577.250	6.882.234.975	7.570.458.473
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.826.887.513	10.000.000.000	10.500.000.000	11.025.000.000	11.576.250.000	12.155.062.500	12.762.815.625
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.688.167.429	68.300.000.000	71.715.000.000	77.093.625.000	82.875.646.875	89.091.320.391	95.773.169.420
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.197.832.945.920	1.896.484.553.810	1.639.634.892.013	1.701.630.810.502	1.766.364.501.695	1.833.962.314.807	1.904.556.614.100
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.053.302.893.245	1.771.737.356.000	1.515.054.950.939	1.570.821.872.374	1.629.015.116.660	1.689.745.460.521	1.753.128.917.099
1.2.2	Transfer Antar Daerah	144.530.052.675	124.747.197.810	124.579.941.074	130.808.938.128	137.349.385.035	144.216.854.286	151.427.697.001
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	8.780.755.792	9.654.947.708	10.137.695.093	10.644.579.848	11.176.808.840	11.735.649.282	12.322.431.747
1.3.1	Pendapatan Hibah	369.701.820		-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat							
1.3.3	Pendapatan Lainnya	8.411.053.972	9.654.947.708	10.137.695.093	10.644.579.848	11.176.808.840	11.735.649.282	12.322.431.747
2	BELANJA	2.240.921.852.355	2.407.434.604.524	1.825.852.891.609	1.904.745.204.615	2.000.700.212.715	2.101.573.998.438	2.200.051.554.764
2.1	BELANJA OPERASI	1.415.461.029.155	1.599.799.338.061	927.887.071.609	973.407.704.615	1.023.917.962.715	1.072.121.528.438	1.123.619.054.764
2.1.1	Belanja Pegawai	513.146.735.996	697.738.867.638	545.564.844.013	571.296.984.911	600.196.914.829	630.472.199.531	658.915.440.652
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	728.277.945.194	767.077.888.481	269.320.357.596	310.723.539.704	341.541.947.886	367.297.088.907	397.004.214.112
2.1.2	Belanja Bunga	3.404.363.388	2.000.000.000					
2.1.4	Belanja Subsidi		-					
2.1.5	Belanja Hibah	135.296.059.577	84.648.256.942	72.220.210.000	61.387.180.000	52.179.100.000	44.352.240.000	37.699.400.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	35.335.925.000	48.334.325.000	40.781.660.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
2.1.7	Belanja keuangan						-	
2.2	BELANJA MODAL	565.980.422.940	465.800.814.208	670.341.160.000	701.898.090.000	740.280.090.000	780.629.600.000	820.020.620.000
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	5.366.469.312	57.696.020.200	8.693.470.000	10.551.820.000	11.812.480.000	13.050.080.000	14.302.900.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	129.732.783.079	52.343.455.866	74.583.820.000	59.400.180.000	66.496.950.000	73.463.880.000	80.516.460.000
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	110.127.312.728	108.090.847.440	184.200.170.000	195.027.850.000	156.098.050.000	124.947.400.000	136.942.430.000
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	320.094.184.977	244.716.236.702	402.115.060.000	436.009.570.000	504.855.370.000	568.044.430.000	587.027.140.000
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	599.672.844	2.754.254.000	548.640.000	665.920.000	745.480.000	823.580.000	902.640.000
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	60.000.000	200.000.000	200.000.000	242.750.000	271.760.000	300.230.000	329.050.000
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	247.857.000	25.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
2.3.1	Belanja Tak Terduga	247.857.000	25.000.000.000	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000

No	Uraian	Realisasi	Target	Proyeksi				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.4	BELANJA TRANSFER	259.232.543.260	316.834.452.255	212.624.660.000	219.439.410.000	226.502.160.000	233.822.870.000	241.411.880.000
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	3.895.707.908	8.986.920.034	6.138.340.000	6.138.340.000	6.138.340.000	6.138.340.000	6.138.340.000
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	255.336.835.352	307.847.532.221	206.486.320.000	213.301.070.000	220.363.820.000	227.684.530.000	235.273.540.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	69.185.944.215	(364.391.647.824)	(5.802.644.155)	(11.626.859.650)	(31.062.069.334)	(51.789.639.826)	(66.310.399.910)
3	PEMBIAYAAN	(55.607.525.781)	212.461.529.628	5.802.644.155	11.626.859.650	31.062.069.334	51.789.639.826	66.310.399.910
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.223.637.231	248.961.529.628	27.302.644.155	26.626.859.650	46.062.069.334	66.789.639.826	81.310.399.910
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	3.208.637.231	247.461.529.628	25.802.644.155	25.126.859.650	44.562.069.334	65.289.639.826	79.810.399.910
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;							
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	15.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.							
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	58.831.163.012	36.500.000.000	21.500.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	58.831.163.012	15.000.000.000					
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	-	20.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;							
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	1.500.000.000	1.500.000.000				
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan							
	PEMBIAYAAN NETTO	(55.607.525.781)	212.461.529.628	5.802.644.155	11.626.859.650	31.062.069.334	51.789.639.826	66.310.399.910
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	13.578.418.434	(151.930.118.196)	-	-	-	-	-

Sumber: *Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2025 (diolah)*

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan kesenjangan antara rencana dan realisasi, permasalahan dapat diartikan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan akan mampu memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindak lanjut, diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Memahami dinamika permasalahan dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Tapin, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu global, nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah, maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih Perlunya Optimalisasi Pada Penguatan Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat yang Inklusif

Belum optimalnya penguatan sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif di Kabupaten Tapin mencerminkan tantangan struktural yang kompleks. Salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan ini adalah dominasi sektor pertambangan yang besar. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi signifikan, kurang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan merata. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor ini menyebabkan volatilitas ekonomi, mengingat sifat sektor pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan risiko lingkungan. Di sisi lain, sektor pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian daerah mengalami pertumbuhan yang melambat, tidak mampu mengikuti

dinamika kebutuhan dan perkembangan teknologi. Hal ini mengakibatkan rendahnya diversifikasi ekonomi yang sangat diperlukan untuk stabilitas ekonomi daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin, kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap PDRB selama 3 tahun terakhir sebesar 45,41% pada tahun 2022 yang meningkat 44,50% pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kontraksi menjadi 43,12%. Sedangkan kontribusi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tapin pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian kontribusi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2022 sebesar 13,89%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 14,26% serta pada tahun 2024 capaian kontribusi tersebut sebesar 14,46%. Memahami hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Tapin terhadap sektor pertambangan. Sehingga sektor-sektor unggulan daerah non pertambangan masih belum optimal pengembangannya.

Gambar II.33
Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

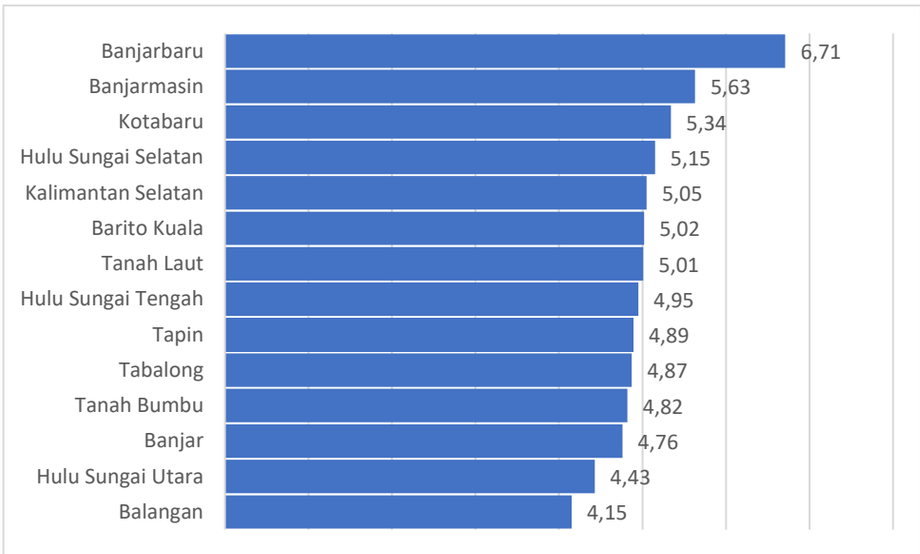

Melalui permasalahan ini, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu untuk direalisasikan. Kabupaten Tapin perlu mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan peningkatan produktivitas pertanian dengan diversifikasi ekonomi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan dan pemasaran yang lebih baik. Diversifikasi ekonomi juga harus mencakup pengembangan sektor-sektor potensial lainnya seperti pariwisata dan industri kreatif, yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, penguatan sektor unggulan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

2. Masih Perlunya Optimalisasi Pada Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan

Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur Pembangunan merupakan permasalahan sekaligus tantangan yang signifikan bagi Kabupaten Tapin. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar yang penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin tahun 2024, terdapat kondisi jalan dengan kategori "Rusak Berat" sebesar 171,44 Km kondisi jalan dengan kategori "Rusak" sebesar 82,44 Km; kondisi jalan dengan kategori "Sedang" sebesar 230,2 Km dan kondisi jalan dengan kategori "Baik" sebesar 107,03 Km. Dengan memahami kondisi jalan yang masih ada dalam kondisi rusak dan rusak berat maka mengindikasikan Perlunya Optimalisasi Pada Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan. Dengan ini, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun dan memperbaiki fasilitas infrastruktur. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya peningkatan terkait pembangunan rumah layak huni. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh Masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dengan demikian diharapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan, sehingga nantinya diharapkan masyarakat Kabupaten Tapin dapat meningkatkan kualitas taraf hidupnya.

3. Masih Perlunya Optimalisasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan tantangan mendasar. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan prasyarat penting untuk mencapai kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, hingga saat ini, implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik di Kabupaten Tapin masih belum optimal. Salah satu indikator yang mampu menilai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2024 sebesar 76,27 dengan kategori BB (Sangat Baik) yang masih belum optimal dan perlu ditingkatkan hingga mencapai predikat AA. Selain itu, SAKIP Kabupaten Tapin tahun 2024 masih berada dalam kategori BB sebesar 71,00 dengan capaian ini menunjukkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal. Kemudian capaian Indeks SPBE Kabupaten Tapin sebesar 3,81 yang masih belum maksimal karena belum mencapai nilai standar maksimal 5.

Dengan penjabaran permasalahan dalam tata kelola pemerintahan, perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah. Sehingga diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi dan efektif. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan publik juga perlu diakselerasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi. Implementasi *e-government* yang komprehensif dapat memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik, serta mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, diharapkan capaian indeks reformasi birokrasi dan nilai SAKIP

dapat meningkat secara signifikan, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya akan meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

4. Masih perlunya optimalisasi pada pembangunan SDM yang unggul, kompetitif, dan religius

Transformasi berkelanjutan di Kabupaten Tapin menghadapi tantangan substansial terkait belum optimalnya daya saing masyarakat yang unggul dan kompetitif. Meskipun daerah ini memiliki potensi besar dalam sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan industri, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat menjadi hambatan utama. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan mengakibatkan masyarakat sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Salah satu indikator yang mampu mengukur daya saing Masyarakat Kabupaten Tapin yang belum optimal adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digambarkan pada IPM tiap Kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan sebagai berikut.

Gambar II.34
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

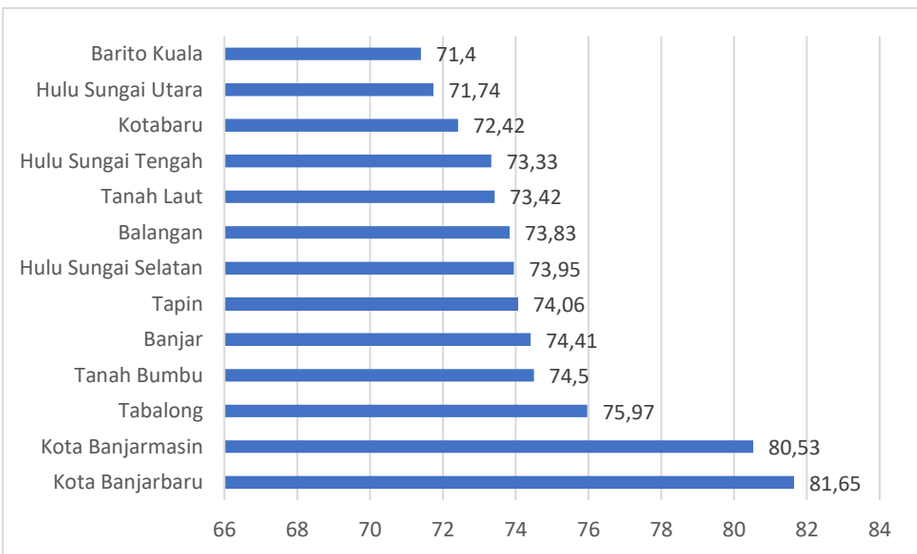

Sumber: *BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025*

Berdasarkan gambar di atas, capaian IPM Kabupaten Tapin berada di bawah capaian Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru Melalui permasalahan tersebut, Kabupaten Tapin harus difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan dan menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Kemudian jika dilihat pada kondisi kualitas Angkatan kerja, masih memiliki kompetensi yang rendah. Hal ini terlihat pada angkatan kerja berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Tapin pada pendidikan SD, termasuk tidak lulus SD dan juga tidak pernah sekolah sebesar 43.933 orang angkatan kerja (44,18%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Tapin bekerja pada sektor yang masih rendah pendapatannya. Sehingga hal ini berdampak pada

kualitas kompetensi masyarakat Kabupaten Tapin yang masih sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan belum optimalnya Tingkat produktivitas masyarakat Kabupaten Tapin yang dapat dilihat dari tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Kabupaten Tapin tahun 2024 yang mencapai 3,86 seperti yang tersaji pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.35
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

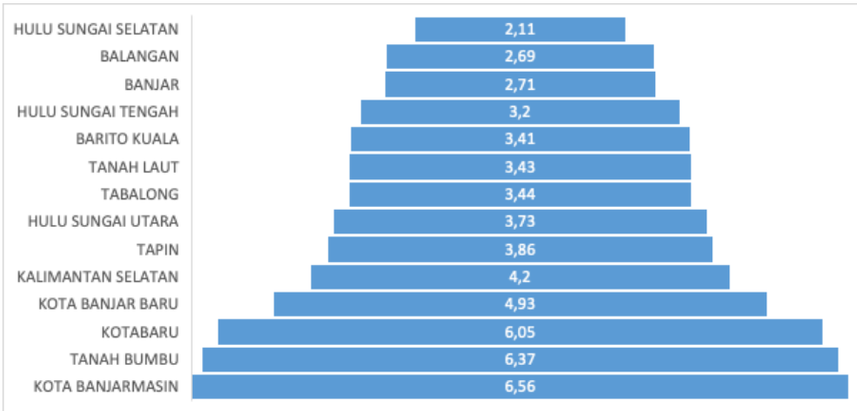

Sumber : *BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025*

Dengan penjabaran permasalahan diatas, maka terlihat kualitas daya saing SDM dari sisi Pendidikan masih perlu ditingkatkan dan kualitas skill/kompetensi perlu dikembangkan sesuai dengan ketersediaan kesempatan/lapangan kerja yang tersedia. Masyarakat terdapat permasalahan pokok Dengan ini dapat disimpulkan adanya permasalahan belum optimalnya daya saing masyarakat yang unggul dan kompetitif.. Dengan demikian nantinya diharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia mampu menciptakan masyarakat yang unggul dan kompetitif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

5. Masih perlunya optimalisasi pada pengentasan Kemiskinan dalam menyejahterakan Masyarakat

Permasalahan transformasi berkelanjutan di Kabupaten Tapin terkait masih belum optimalnya pengentasan kemiskinan mencerminkan tantangan signifikan dalam menyejahterakan masyarakat. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, hasil yang dicapai belum memadai. Banyak program yang terhenti pada tahap perencanaan atau tidak terimplementasi dengan efektif karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas menjadi salah satu faktor utama yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Banyak anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat kendala biaya dan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kemiskinan Kabupaten Tapin berada di nomor 2 dengan capaian tingkat kemiskinan terendah dibandingkan dengan

Kabupaten/Kota sekitar Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian dari tingkat kemiskinan Kabupaten Tapin dari tahun 2024 tersaji dalam gambar berikut.

Gambar II.36
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

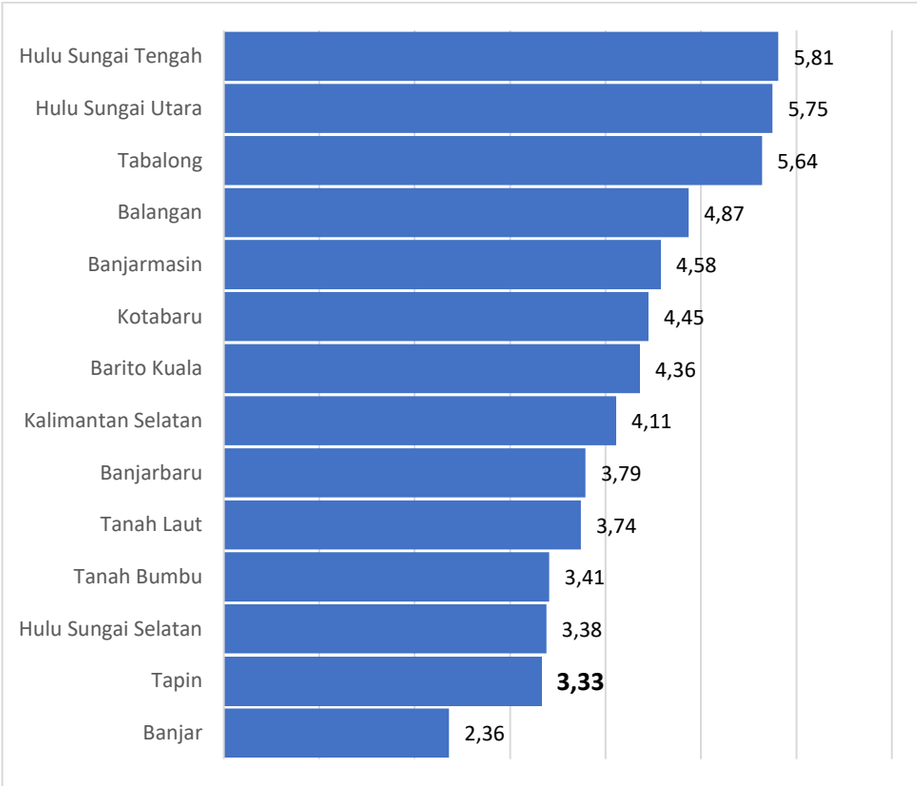

Sumber: *BPS Kabupaten Tapin, 2025*

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat bahwa kisaran capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin berada pada angka 3,33, dengan capaian ini tergolong rendah yang mengindikasikan Sebagian besar Masyarakat Kabupaten Tapin memiliki pekerjaan, namun jika melihat lebih dalam kualitas pekerjaan Masyarakat masih memiliki pendapatan yang masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat pada pengeluaran bahan non makanan pada tahun 2024 mencapai 45,06 persen, yang mana data ini menunjukkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Tapin masih memenuhi Sebagian besar kebutuhan pada produk-produk makanan.

Gambar II.37
Pengeluaran Perkapita sebulan bukan makanan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

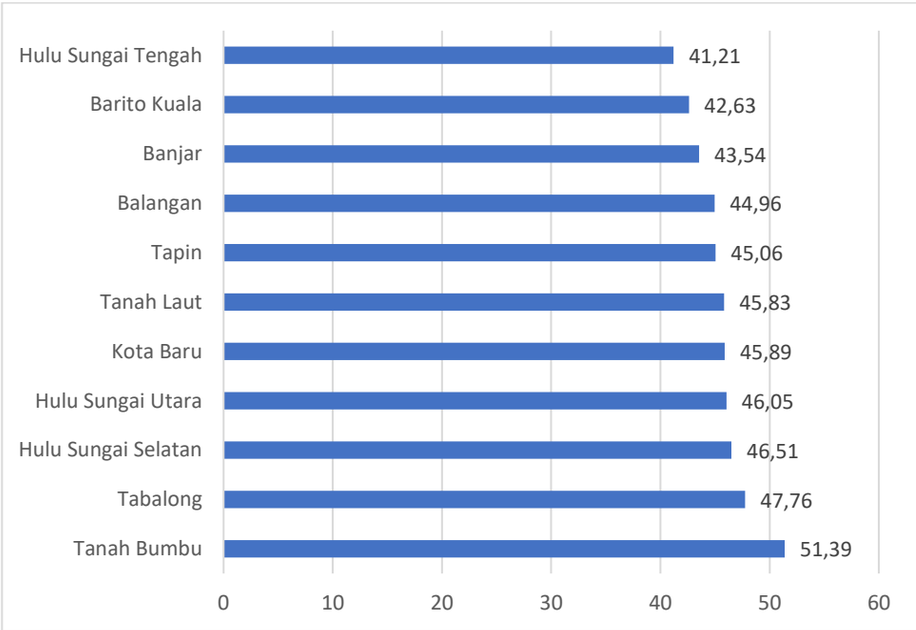

Masyarakat Kabupaten Tapin memiliki Penyebab dari permasalahan tersebut diasumsikan dari adanya kemiskinan kultural. Kemiskinan jenis ini bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh pola pikir, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang kurang mendukung perubahan sosial dan ekonomi. Misalnya, rendahnya motivasi untuk meningkatkan keterampilan atau pendidikan, ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional dengan produktivitas rendah, serta minimnya keberanian dalam mengambil peluang usaha yang lebih inovatif. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat tertentu sulit keluar dari lingkaran kemiskinan meskipun tersedia berbagai program bantuan dan fasilitasi dari pemerintah. Pola konsumsi yang tidak produktif dan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan turut memperkuat kemiskinan kultural di Tapin. Banyak keluarga masih lebih memilih pekerjaan sektor informal dengan pendapatan tidak stabil dibandingkan mengembangkan keterampilan untuk memasuki sektor ekonomi yang lebih kompetitif. Kurangnya akses informasi serta terbatasnya peran komunitas dalam mendorong perubahan perilaku juga memperlambat upaya perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Gambar II.38
PDRB Perkapita Masyarakat Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

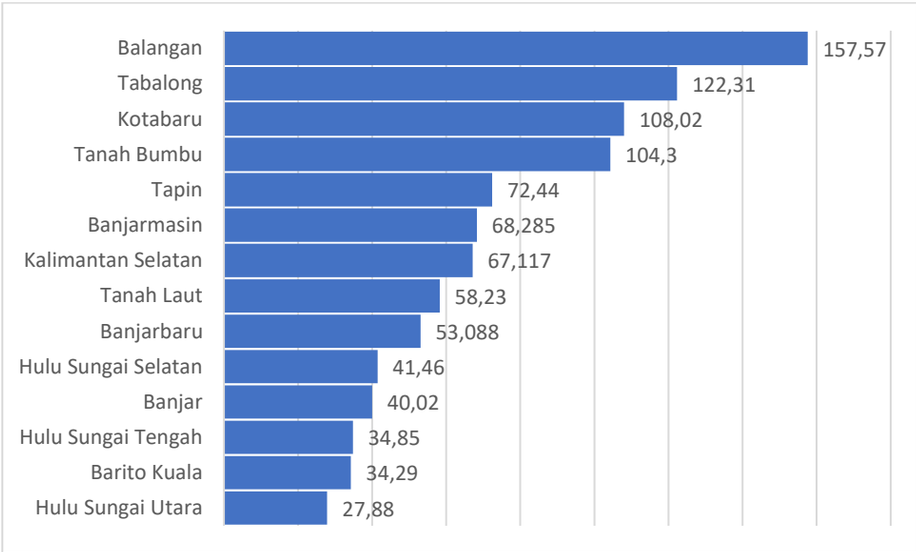

Sumber : *BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025*

Salah satu yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah tingginya ketimpangan pendapatan di suatu wilayah yang dapat dilihat dengan indeks gini. Berdasarkan data pada tahun 2024, capaian indeks gini Kabupaten Tapin mencapai 0,26 berada di kategori rendah. Meskipun demikian, masih ada nilai ketimpangan yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Daerah. Perkembangan indeks gini Kabupaten Tapin menunjukkan adanya kesenjangan di Kabupaten Tapin, yang jika dibandingkan dengan beberapa Kab/Kota Se-Kalimantan Selatan terlihat indeks gini Kabupaten Tapin masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut, seperti yang tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar II.39
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

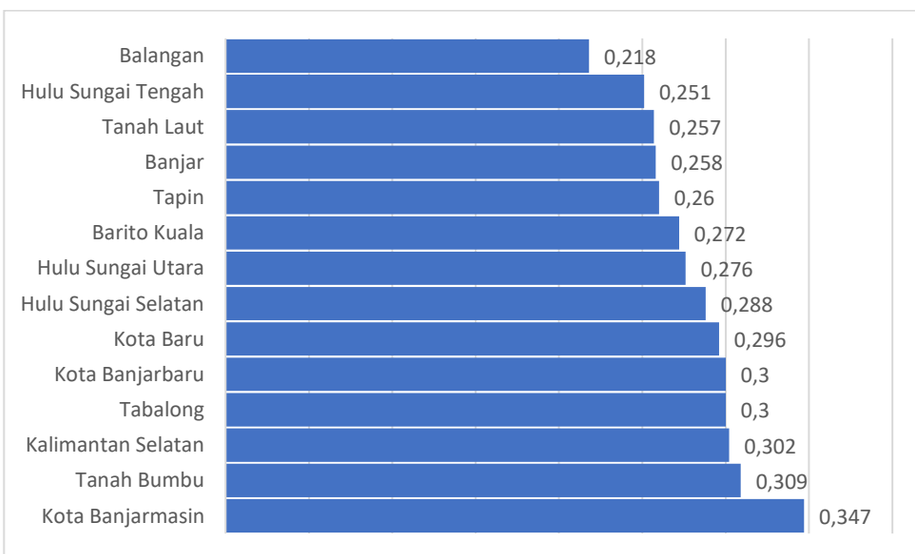

Sumber : *BPS Kalimantan Selatan Tahun 2025*

Dengan memahami kondisi kesejahteraan Masyarakat dari beberapa permasalahan yang diatas, maka dapat disimpulkan adanya permasalahan belum

optimalnya pengentasan kemiskinan dalam menyejahterakan Masyarakat. Dengan ini diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, diharapkan masyarakat dapat memiliki sumber pendapatan yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhannya secara layak.

6. Meningkatnya Intensitas Kerusakan Lingkungan Hidup

Permasalahan transformasi berkelanjutan di Kabupaten Tapin terkait meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup mencerminkan tantangan besar dalam upaya pembangunan daerah. Aktivitas pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal tetapi sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran air. Kondisi ini mengancam keberlanjutan ekosistem lokal dan berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Ketidakmampuan dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.Meningkatnya kerusakan lingkungan dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 IKLH mencapai 65,96 dan 2024 mencapai 66,11. Namun jika melihat lebih dalam terkait capaian komponen dalam IKLH terjadi penurunan pada Indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan di tahun 2024 ini. Berdasarkan data capaian Indeks kualitas air pada tahun 2023 mencapai 56,67 dan di tahun 2024 menjadi 53,53. Kemudian pada indeks tutupan lahan pada tahun 2023 mencapai 31,02 dan di tahun 2024 menurun menjadi 28,90. Dengan capaian ini perlu adanya perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ini perlu memperkuat kebijakan dan praktik pertambangan yang berkelanjutan sebagai strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tapin. Pemerintah daerah harus memperketat regulasi terkait pengelolaan lingkungan dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, sistem pengawasan dan pemantauan yang komprehensif perlu diimplementasikan untuk menilai dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan secara berkala. Kolaborasi dengan akademisi dan lembaga penelitian dapat membantu dalam mengembangkan teknologi dan metode yang lebih ramah lingkungan. Program rehabilitasi dan restorasi lahan pasca-pertambangan harus menjadi prioritas untuk memulihkan fungsi ekosistem yang telah rusak dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Dengan penjabaran permasalahan pokok diatas, dijabarkan dalam permasalahan perurusan yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.55
Permasalahan Perurusan Kabupaten Tapin

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR		
1	Pendidikan	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana
		Belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
2	Kesehatan	Belum optimalnya peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan bayi
		Belum meratanya fasilitas dan pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat
		Kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan belum optimal
		Belum optimalnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya kualitas prasarana jalan dan jembatan jalan
		Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir
		Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan pengelolaan air limbah
		Belum terlaksananya rencana pembangunan infrastruktur sesuai RTRW
4	Perumahan dan Permukiman	Penanganan permukiman kumuh belum optimal
		Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni
		Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum	Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran
6	Sosial	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Belum optimalnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS/PPKS
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON- DASAR		
7	Tenaga Kerja	Masih kurangnya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan (kesempatan kerja)
		Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah
		Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
9	Pangan	Belum optimalnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
		Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
10	Pertanahan	Belum optimalnya kelengkapan administrasi pertanahan, khususnya daerah yang jauh dari pusat pemerintahan
11	Lingkungan Hidup	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil
		Belum termanfaatkannya data kependudukan secara optimal baik oleh pemerintahan maupun masyarakat luas
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
		Belum optimalnya upaya kemandirian desa melalui kegiatan ekonomi yang produktif
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
15	Perhubungan	Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas
		Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraaan urusan perhubungan kurang memadai
16	Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik
		Aplikasi *e-government* belum optimal penggunaan dan pemanfaatannya
17	Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Masih kurangnya permodalan, kapasitas usaha, hingga pemasaran UMKM
		Belum produktifnya pelaku koperasi dan UMKM
18	Penanaman Modal	Belum efektifnya promosi investasi
		Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha berbasis IT
		Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menarik investor
19	Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi dan kegiatan kepemudaan
		Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan keolahragaan
20	Statistik	Belum optimalnya kualitas data dari segi update dan validitas
		Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia
21	Persandian	Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
22	Kebudayaan	Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur
		Mulai terkikisnya nilai luhur kebudayaan daerah terutama daerah perkotaan
23	Perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan daerah
24	Kearsipan	Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah
		Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah
C. URUSAN PILIHAN		
25	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya belum optimal
26	Pariwisata	Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata
		Belum optimalnya promosi wisata Tapin
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif pada potensi produk unggulan daerah
27	Pertanian	Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan
		Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam mengelola sektor pertanian
28	Perdagangan	Belum optimalnya pemasaran berbagai produk unggulan daerah
29	Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri
		Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah
D. URUSAN PENUNJANG		
30	Penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah
31	Perencanaan	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan
32	Keuangan Daerah	Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan
		Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran, pengelolaan anggaran hingga evaluasi secara efektif dan efisien
33	Kepegawaian	Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan kompetensi fungsional dan manajerial ASN
		Pengembangan karir ASN belum sepenuhnya menggunakan penilaian kinerja
34	Pengawasan	Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
		Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
35	Sekretariat Dewan	Belum optimalnya fasilitasi terhadap Anggota DPRD

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
36	Sekretaris Daerah	Belum optimalnya pengoordinasian upaya pencapaian target pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
37	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	Masih rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan
		Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perizinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingginya potensi penurunan kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
		Belum optimalnya pendidikan politik yang baik di masyarakat

2.3.2 Isu Strategis

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.3.2.1 Isu Global

Isu global yang penting dalam pembangunan daerah pada jangka menengah yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Tapin. Isu strategis akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Geopolitik dan Geoekonomi

Kabupaten Tapin, sebagai bagian dari Kalimantan Selatan, tidak terlepas dari dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Posisi strategis Kalimantan sebagai pintu gerbang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang merupakan jalur perdagangan internasional penting, memberikan implikasi signifikan terhadap pembangunan Tapin. Peningkatan aktivitas perdagangan global dan persaingan antarnegara besar dapat memengaruhi arus investasi, perdagangan komoditas unggulan Tapin seperti batu bara dan karet, serta stabilitas ekonomi regional. Selain itu, isu perubahan iklim global juga menjadi perhatian, mengingat Tapin memiliki lahan gambut yang rentan terhadap kebakaran dan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Dari sisi geoekonomi, Tapin berpotensi menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pertanian. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan akan diversifikasi ekonomi menjadi isu krusial. Upaya hilirisasi industri, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi penting untuk meningkatkan daya saing Tapin di tengah persaingan ekonomi global. Selain itu, integrasi Tapin dalam rantai pasok regional dan global, serta pemanfaatan teknologi digital, dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2) Dampak Perubahan Iklim Global

Kabupaten Tapin, seperti halnya wilayah lain di Indonesia, tidak luput dari dampak perubahan iklim global. Peningkatan frekuensi dan intensitas curah hujan ekstrem telah menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga, merusak infrastruktur, dan mengganggu aktivitas ekonomi. Kondisi ini mengancam keberlanjutan pembangunan daerah, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian. Selain itu, perubahan iklim juga memicu pergeseran pola cuaca yang tidak menentu, mempengaruhi musim tanam, dan berpotensi menurunkan produktivitas hasil pertanian.

Menyadari kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Tapin perlu mengambil langkah-langkah adaptasi dan mitigasi yang komprehensif. Upaya adaptasi dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap banjir, penerapan sistem drainase yang baik, dan pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi iklim ekstrem. Sementara itu, mitigasi dapat dilakukan dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi dan industri, serta menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut sebagai penyerap karbon alami.

3) Perkembangan Teknologi

Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, tengah berbenah diri dengan memanfaatkan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan. Salah satu fokus utama adalah penerapan konsep Smart City yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi pemerintahan, dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur jaringan internet yang merata, pembuatan platform e-commerce untuk mendukung UMKM lokal, serta aplikasi pelaporan masalah infrastruktur seperti AksiSijantan. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong literasi digital di kalangan aparat desa melalui pelatihan dan sosialisasi, agar pemanfaatan teknologi dapat optimal dalam tata kelola pemerintahan. Di sektor pertanian, teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pembangunan Bendungan Tapin yang dilengkapi dengan jaringan irigasi modern diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pendataan dan pengelolaan koperasi juga terus dikembangkan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Kabupaten Tapin dalam memanfaatkan teknologi sebagai pendorong utama pembangunan daerah

4) Industri 5.0

Kabupaten Tapin, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, memiliki peluang besar untuk menerapkan konsep Industri 5.0 dalam pembangunannya. Fokus pada integrasi teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data dapat meningkatkan efisiensi sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah kabupaten menjadi kunci untuk mendukung transformasi industri ini. Penerapan Industri 5.0 di Tapin juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan digital perlu digalakkan untuk mempersiapkan

tenaga kerja lokal menghadapi perubahan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi juga penting untuk menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif dalam mendukung pembangunan daerah.

5) Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Tapin, termasuk dalam hal budaya. Akses mudah terhadap informasi dan komunikasi global melalui internet dan media sosial telah memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan mengonsumsi budaya. Budaya asing yang mudah diakses dapat memengaruhi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Tapin. Di sisi lain, teknologi informasi juga memberikan peluang untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Platform digital dapat digunakan untuk mendokumentasikan, mempublikasikan, dan menyebarluaskan informasi tentang seni, tradisi, dan sejarah Kabupaten Tapin. Dengan demikian, teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga keberlangsungan budaya di tengah arus globalisasi. Penting bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tapin untuk bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi agar dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positifnya dalam pembangunan daerah.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN digambarkan dan dijabarkan sebagai berikut.

1. Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif

Kabupaten Tapin menunjukkan resiliensi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Diversifikasi sektor ekonomi, terutama melalui pengembangan sektor pertanian dan UMKM, menjadi kunci utama. Investasi pada infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga turut mendukung stabilitas ekonomi daerah. Kebijakan pemerintah daerah yang proaktif dalam menarik investasi dan memfasilitasi pertumbuhan usaha lokal memberikan dampak positif pada daya tahan ekonomi Tapin.Prospek perekonomian Kabupaten Tapin di masa depan terlihat cerah. Potensi sumber daya alam yang melimpah, ditambah dengan upaya berkelanjutan dalam pengembangan sektor-sektor unggulan, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Fokus pada pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan peningkatan akses pasar bagi produk-produk lokal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat posisi Tapin sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di Kalimantan Selatan.

2. Keanekaragaman Hayati Dan Potensi Lingkungan

Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama dengan adanya habitat bekantan di hutan rawa gelam. Potensi lingkungan ini sangat penting untuk dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Upaya konservasi bekantan dan ekosistemnya dapat menjadi daya tarik ekowisata, yang berpotensi meningkatkan perekonomian daerah. Pembangunan Kabupaten Tapin perlu memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Pengembangan ekowisata berbasis konservasi dapat menjadi salah satu strategi pembangunan yang berkelanjutan, yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian alam.

3. Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia

Kabupaten Tapin memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang besar, terutama di sektor pertanian dan pertambangan. Namun, kualitas SDM perlu ditingkatkan agar dapat bersaing di era globalisasi. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk meningkatkan modal manusia di Tapin. Modal manusia yang kuat akan menjadi pendorong utama pembangunan di Kabupaten Tapin. Dengan SDM yang terampil dan berdaya saing, sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata dapat berkembang pesat. Selain itu, peningkatan modal manusia juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapin secara keseluruhan.

4. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pembangunan di Kabupaten Tapin yang semakin maju akan berpotensi pada pergeseran struktur kelas masyarakat. Peningkatan infrastruktur, investasi, dan sektor industri telah menciptakan peluang ekonomi baru, yang mengarah pada munculnya kelas menengah baru. Di sisi lain, modernisasi dan perubahan pola ekonomi dapat menyebabkan marginalisasi kelompok masyarakat tertentu, terutama yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja yang kompetitif. Pergeseran ini menimbulkan tantangan dan peluang. Di satu sisi, munculnya kelas menengah dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, di sisi lain, kesenjangan sosial dapat melebar jika pembangunan tidak inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Tapin untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan dirancang untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan.

5. Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah

Pada saat ini Kabupaten Tapin menghadapi tantangan dalam tata kelola dan akuntabilitas pemerintahannya. Isu-isu seperti transparansi anggaran, efisiensi birokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi fokus perhatian. Upaya peningkatan akuntabilitas melalui sistem pelaporan kinerja dan pengawasan yang lebih ketat terus diupayakan. Di sisi lain, terdapat

langkah-langkah positif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam meningkatkan tata kelola. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan menjadi bagian dari upaya tersebut. Namun, masih diperlukan penguatan dalam implementasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

6. Rendahnya Produktivitas

Rendahnya produktivitas dalam pembangunan Kabupaten Tapin menjadi isu krusial yang perlu segera diatasi. Berbagai faktor berkontribusi terhadap kondisi ini, di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada. Selain itu, belum optimalnya sistem birokrasi dan regulasi yang ada juga menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan produktivitas pembangunan di Kabupaten Tapin. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Peningkatan infrastruktur, terutama di sektor pertanian dan industri, juga menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong investasi dan inovasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Diperlukan juga adanya perbaikan sistem birokrasi dan regulasi agar lebih efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan.

2.3.2.3 Arahan Pembangunan Kewilayahan RPJMN pada Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 memberikan arahan kebijakan kewilayahan pada tiap Provinsi di Indonesia, khususnya pada Provinsi Kalimantan Selatan beberapa hal yang menjadi intervensi dalam pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Gambar II.40
Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan

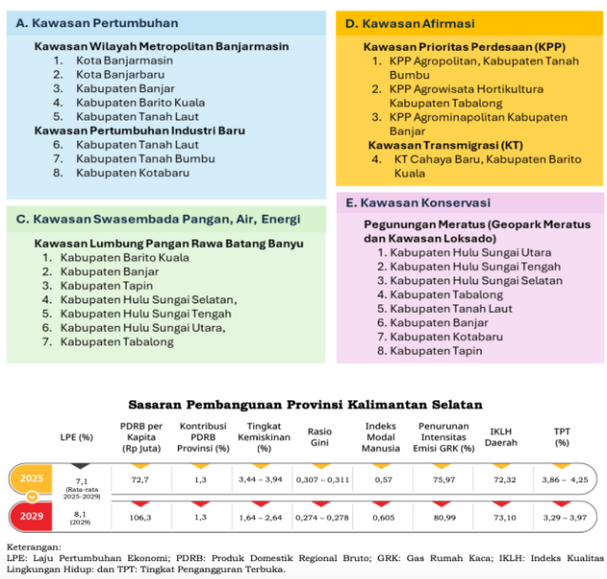

A. Dengan Lokasi Kabupaten Tapin masuk dalam Kawasan lumbung pangan Rawa Batang Banyu, maka highlight dan intervensi kebijakan Nasional.

Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan Perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim melalui:

1. Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dengan output: sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara; Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output: Kawasan Karet
2. Penguatan pasca panen pangan nabati, dengan output: sarana pascapanen tanaman Perkebunan
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul;

B. Dengan Lokasi Kabupaten Tapin masuk dalam Kawasan Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado), maka highlight dan intervensi kebijakan Nasional, Pengembangan ekowisata kelas dunia di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial, melalui:adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
2. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

2.3.2.4 Isu Strategis Regional

2.3.2.4.1 Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan yang dijelaskan sebagai berikut:

"KALSEL BEKERJA"
BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA
Menuju Gerbang Logistik Kalimantan

Dengan penjelasan pokok visi sebagai berikut:

BEKERJA, ikhtiar melakukan sesuatu yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya.

BERKELANJUTAN, melanjutkan pembangunan periode sebelumnya; pembangunan yang seimbang antara sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.

BERBUDAYA, Masyarakat yang memiliki warisan budaya, norma, dan nilai-nilai yang membentuk identitas dan memiliki pikiran dan akal yang maju

RELIGI, Masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada adanya tuhan dan memiliki nilai moral serta etika.

SEJAHTERA, Kebutuhan jasmani, Rohani, dan rasa aman yang terpenuhi bagi Masyarakat.

GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN, Pintu keluar untuk distribusi barang dan jasa ke seluruh Kalimantan, mulai dari pusat produksi - pengolahan - pergudangan - pengiriman ke konsumen.

2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan yang dijelaskan sebagai berikut:
   MISI 1. Pembangunan Manusia Yang Unggul, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia
   MISI 2. Pembangunan Infrastruktur Yang Handal
   MISI 3. Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata Dan Syariah
   MISI 4. Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
   MISI 5. Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah Dan Cepat

3. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, terdapat 5 prioritas sebagai berikut:
   1) Memperkuat Pembangunan Manusia Yang Unggul, Berbudaya, Dan Berakhlak Mulia
   2) Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Yang Handal
   3) Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata Dan Syariah
   4) Memantapkan Pembangunan Rendah Karbon Dan Memperkuat Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Iklim Dan Bencana
   5) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Dengan tema pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, yang digambarkan pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.41
Tema Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

2.3.2.4.2 Telaah RPJPD

Memahami bahwa RPJMD merupakan bagian dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tahap Pertama (2025-2029) maka beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam telaahan RPJPD adalah sebagai berikut.

A. Permasalahan RPJPD

Permasalahan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut.

a) Pemenuhan dan Pemerataan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
b) Ketahanan Pangan Sebagai Dampak Meningkatnya Populasi Dan Perubahan Iklim
c) Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
d) Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah
e) Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan

B. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tapin

Isu Strategis pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut.

a) Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
b) Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan
c) Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur
d) Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah
e) Ketahanan Pangan Sebagai Dampak Meningkatnya Populasi Dan Perubahan Iklim
f) Pemenuhan dan Pemerataan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana dalam peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
g) Optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan

C. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tapin

- **Visi RPJPD Kabupaten Tapin**

Dengan mempertimbangkan sinergitas terhadap capaian Pembangunan jangka Panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin juga memerhatikan kondisi Pembangunan dua puluh tahun sebelumnya, permasalahan yang diselesaikan, isu yang diantisipasi serta harapan Masyarakat Kabupaten Tapin untuk dua puluh tahun kedepan, maka Visi Kabupaten Tapin 2045:

"TAPIN MAJU DAN JUARA: TAPIN SEBAGAI PUSAT AGROPOLITAN YANG MAJU, BERKELANJUTAN, AGAMIS DAN SEJAHTERA"

Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kabupaten Tapin. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tapin Sebagai Pusat Agropolitan yang Maju, Berkelanjutan, Agamis dan Sejahtera. Dengan penjelasan makna visi Kabupaten Tapin tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. Pusat Agropolitan Maju

Pengembangan pusat agropolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan Kabupaten Tapin di mana kawasan agropolitan itu diwujudkan dengan penguatan sentra-sentra produksi pertanian/perikanan yang berbasiskan kekuatan internal yang mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi. Pusat agropolitan Kabupaten Tapin dicerminkan dalam kawasan ekonomi berbasis pertanian dan dicirikan komoditas unggulan. Sasaran dalam pengembangan pusat agropolitan ini adalah mewujudkan kawasan agropolitan dan berkembangnya ekonomi lokal yang berbasis produk unggulan daerah yang efektif, efisien, transparan dan berkelanjutan. Agroindustri pertanian sesuai kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan didukung dengan pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana kegiatan industri untuk meningkatkan produktivitas agroindustri wilayah Tapin.

Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Tapin seperti kawasan pertanian terpadu yang terbagi dalam berbagai kawasan, yaitu kawasan pertanian, kawasan hortikultura, kawasan perikanan, kawasan peternakan, dan kawasan perkebunan serta berbagai jenis tanaman seperti padi gunung, padi sawah, tanaman durian, sawo, sawit, dan berbagai tanaman lainnya maka pembangunan diarahkan pada pengembangan agroindustri. Kabupaten Tapin selain menjadi salah satu daerah penghasil tambang batu bara yang besar, daerah dengan gelar Serambi Madinah tersebut juga salah satu daerah lumbung pangan Nasional dengan hasil padi yang melimpah, juga keberhasilan pengembangan Cabai Hiyung yang terkenal kepedasannya, bawang merah yang terus mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pertanian, dan perkebunan jeruk varietas Siam Banjar yang dikembangkan di Margasari, menjadi jeruk termanis nomor dua tingkat nasional oleh Kementerian Pertanian RI. Sesuai arahan tata ruang Kabupaten Tapin yang dihubungkan dengan pengembangan agroindustri yaitu peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui strategi pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan, agrowisata, agroindustri dan perluasan areal pertanian.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Tapin diharapkan dapat menjadikan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tapin diwujudkan dengan mengembangkan satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) diwujudkan dengan pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada secara utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, terdesentralisasi, digerakkan oleh masyarakat, dan difasilitasi oleh pemerintah. Kawasan perdesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara

desa-kota (urban rural linkages) dan menyeluruh hubungan yang bersifat interdependensi/timbal balik yang dinamis.

Pusat agropolitan yang maju mengacu pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkembang pesat di Kabupaten Tapin menuju tahun 2045. Fokusnya termasuk mengembangkan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur, serta mendorong investasi dan inovasi. Dengan ekonomi yang maju, diharapkan akan tercipta lapangan kerja yang luas, pendapatan per kapita yang meningkat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju dan infrastruktur teknologi yang canggih relatif dibandingkan daerah yang kurang maju lainnya. Perwujudan maju dalam hal pembangunan ekonomi adalah di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Tapin.

Kemajuan daerah merupakan indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi. Dalam mewujudkan Kabupaten yang Maju pemerintah Kabupaten Tapin harus meningkatkan perbaikan dalam berbagai sektor yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatkan PAD diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

b. Agamis

Visi agamis menekankan pentingnya mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai agama dan spiritualitas di tengah masyarakat Kabupaten Tapin. Hal ini dapat mencakup upaya untuk mendukung institusi keagamaan, mempromosikan toleransi antar agama, serta mengembangkan program-program pendidikan dan kesejahteraan yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Dengan mengutamakan aspek keagamaan, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan kedamaian.

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik antara lain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efisien dan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan hukum. Pelayanan Prima merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah yang mandiri juga harus dapat memberikan pelayanan publik yang

berkualitas yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari 5 dimensi kualitas pelayanan publik yang menjadi tolak ukur dalam memberikan kepuasan pada masyarakat yaitu, *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tangkap), *assurance* (jaminan kepastian), *empathy* (empati), dan *tangibles* (Bukti nyata/bukti fisik). Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

c. Berkelanjutan

Berkelanjutan memiliki persamaan arti dengan berkesinambungan yang artinya adalah berlangsung secara terus-menerus. Dalam penerapan konsep visi berkelanjutan, fokus ditujukan pada kemajuan ekonomi inklusif yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, konsep berkelanjutan terfokus pada pelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Tapin yang tidak hanya ekonomi yang berkelanjutan namun juga perhatian lebih pada pelestarian lingkungan.

Infrastruktur menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan perekonomian suatu daerah. Karena itu arti penting pembangunan infrastruktur harus tertuang pada kebijakan jangka panjang daerah. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tapin diharapkan dapat tercipta konektivitas yang kuat antar desa dan kampung/kecamatan, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Tapin, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai Kabupaten yang maju. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Tapin juga diharapkan dapat mendorong pengembangan bidang sosial dan budaya. Di Kabupaten Tapin banyak terdapat objek wisata, baik objek wisata alam, wisata kota, dan wisata budaya, harus dikembangkan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pengembangan sosial dan budaya menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

d. Sejahtera

Bermaksud untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Tapin. Ini mencakup aspek kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dengan memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial, visi ini berupaya menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, dan berkualitas.

Kesejahteraan juga tercermin dari kualitas Sumber daya Manusia (SDM) yang handal, yaitu SDM yang dapat dipercaya atau diandalkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan

daerah. SDM yang handal dalam hal ini adalah SDM yang pembangunan kualitasnya sejalan dengan visi misi jangka panjang daerah dan mampu memanfaatkan sains dan teknologi sebagai kunci penting keberhasilan ekonomi masyarakat Kabupaten Tapin.

- **Misi RPJPD Kabupaten Tapin**

Dengan penjelasan visi diatas, dalam rangka mencapai visi RPJPD maka misi RPJPD Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tatanan Pemerintahan yang Baik
3. Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera

D. Tema dan Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Kabupaten Tapin

Sesuai dengan penjabaran dalam RPJPD Kabupaten Tapin pada tahap I memiliki tema pembangunan **"Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Masyarakat Unggul"**, dengan arah kebijakan sebagai berikut.

a) pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih
b) pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik
c) implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur
d) meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis
e) pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
f) peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten
g) peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan

2.3.2.4.3 Telaah RTRW

Menurut UU No. 26 Tahun 2007, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor 1 Tahun 2018, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki fungsi yang meliputi:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota.
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

A. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Arah perencanaan wilayah Kabupaten Tapin dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043. Perda tersebut dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi dokumen perencanan pembangunan spasial dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam praktiknya, RTRW memiliki peran penting sebagai dokumen perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian terhadap penataan ruang.

Dalam konteks sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapin. Adapun tujuan dari penataan ruang Kabupaten Tapin yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tapin, dapat dijabarkan sebagai berikut:

"Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan"

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya arahan pengembangan kewilayahan Kabupaten Tapin terfokus ke arah pengembangan sektor agropolitan yang diperkuat dengan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

Gambar II.42
Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Sumber: *Diolah dan Dianalisis berdasarkan Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043*

Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Tapin, sebagai kerangka kebijakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dokumen rencana pembangunan Kabupaten Tapin, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhierarki dengan strategi:
   a. menetapkan fungsi pusat kegiatan sesuai dengan pelayanannya;
   b. menetapkan kegiatan utama pada pusat kegiatan agar dapat berkembang sesuai potensinya;
   c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial;
   d. meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal;
   e. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan,dan antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
   f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih mampu untuk bersaing dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
   g. menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata;
   h. membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi wilayah belakang; dan
   i. meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah dengan strategi:
   a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
   b. melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis;
   c. mengembangkan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten;
   d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang belum terlayani;
   e. memperluas dan prasarana jaringan listrik di seluruh wilayah kabupaten terutama ke desa terpencil untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan;
   f. memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru;
   g. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumberdaya air;
   h. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah; dan
   i. meningkatkan kualitas jaringan persampahan melalui teknologi ramah lingkungan.
3. Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan strategi:

a. menumbuhkembangkan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan potensi wilayah dan prospek pemasaran melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi;
b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
c. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian;
f. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
g. meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
h. mengembangkan budidaya peternakan dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, kesehatan dan permukiman; dan
i. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

4. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung dengan strategi:
   a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
   b. memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
   c. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
   d. mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
   e. melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
   f. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan berbasis masyarakat dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;
   g. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
   h. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
   i. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
   j. mewujudkan RTH dalam satu wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
   k. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
   l. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
   m. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dan
   n. memanfaatkan ruang wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melalui prosedur dan mekanisme perizinan.
5. Pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus pertambangan rakyat dengan strategi:

a. memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah;
b. memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
c. menyediakan fasilitas fisik yang tersedia pada lokasi kawasan pertambangan meliputi jalan, pelabuhan, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran limbah;
d. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja eksplorasi pertambangan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan pada areal kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/pertambangan rakyat;
e. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja pasca penutupan tambang; dan
f. memperbaiki kualitas lingkungan kawasan pertambangan pasca tambang.

6. Pengembangan wisata berbasis lingkungan dengan strategi:
   a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas
   b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata
   c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
   d. keterkaitan antar kawasan pariwisata dan antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
   e. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
   f. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal;
   g. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan
   h. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal.
7. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dengan strategi:
   a. menata dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis kabupaten;
   b. menetapkan kawasan strategis Kabupaten (KSK) yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah; dan
   c. mengembangkan prasarana dan sarana bagi kawasan strategis.
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi:
   a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
   b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
   c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang

memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan

d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan keamanan.

9. Pengembangan wilayah daerah aliran Sungai dan pertanian pasang surut

Berikutnya, perlu dilakukan identifikasi terhadap keselarasan Pola Ruang Kabupaten Tapin untuk memastikan bahwa tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin dalam mewujudkan penataan ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan dapat tercakup dalam kesiapan pola ruang Kabupaten Tapin.

B. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tapin

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapin, sesuai dengan ketentuan regulasi, memuat skala informasi yang digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000. Hal ini berdampak pada Tingkat kedetailan informasi yang dapat direflksikan oleh dokumen RTRW Kabupaten Tapin.

Berikut merupakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapin.

Tabel II.56

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	**Kawasan badan air**	**2.312**
2	**Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya**	**40.763**
	Kawasan Hutan Lindung	10.151
	Kawasan lindung gambut	30.612
3	**Kawasan perlindungan setempat**	**938**

Sumber: *Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043*

Gambar II.43
Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin

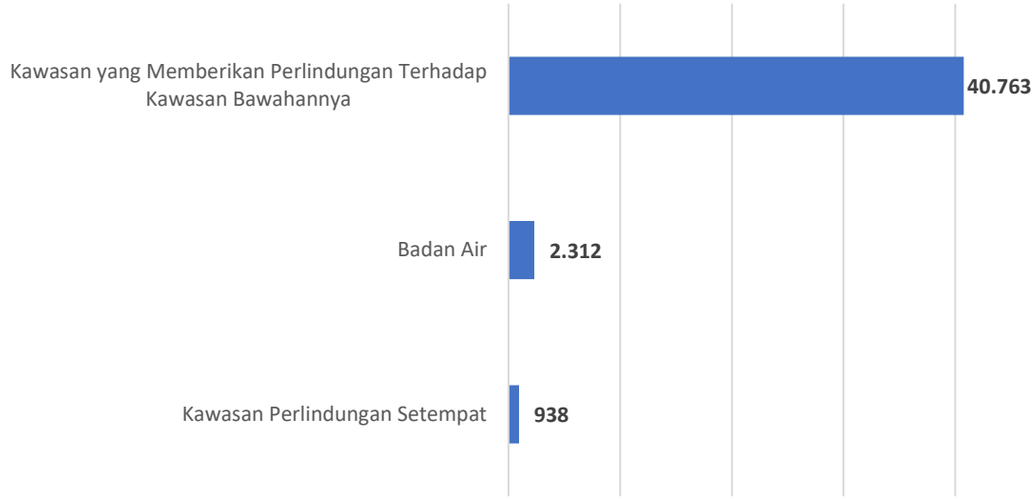

Sumber: *Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043*

Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Tapin, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu seluas 40.763 Ha dan kemudian disusul oleh badan air seluas 2.312 Ha dan kawasan perlindungan setempat seluas 938 Ha.

Adapun sebaran kawasan Lindung di Kabupaten Tapin antara lain sebagai berikut :

1. Peta sebaran alokasi ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B (Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan)

Gambar II.44
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan KP2B

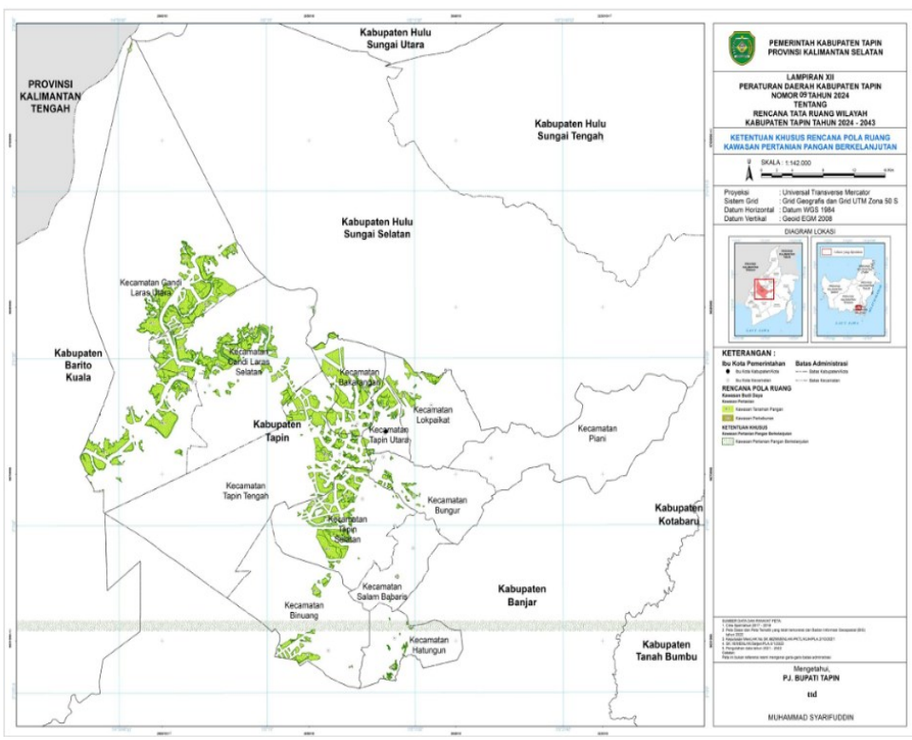

Sumber: *Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043*

2. Peta sebaran alokasi ruang rawan bencana banjir dengan ancaman tinggi sebagai bagian dari kawasan lindung

Gambar II.45
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir

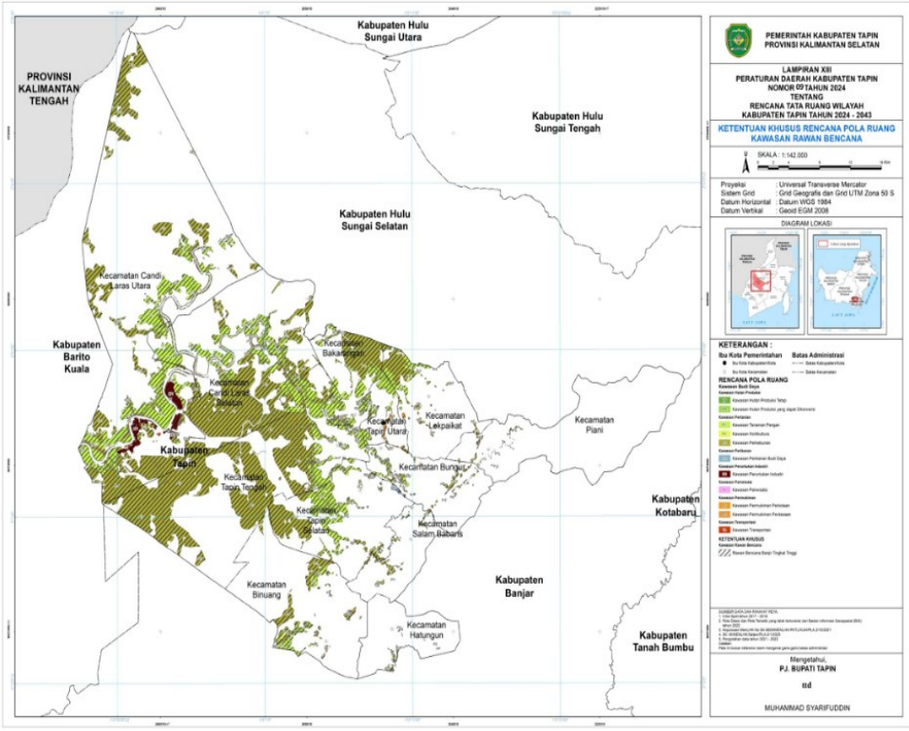

Sumber: *Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043*

3. Peta sebaran alokasi ruang kawasan resapan air

Gambar II.46
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air

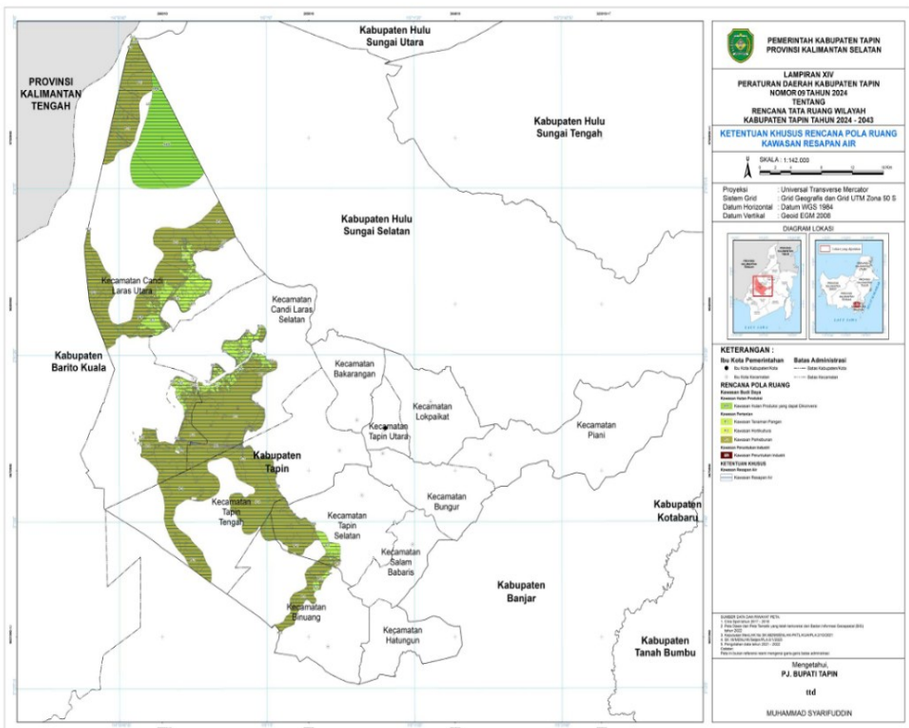

Sumber: *Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043*

Telaah lebih lanjut pada pola ruang Kabupaten Tapin adalah telaah mengenai rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya di Kabupaten Tapin berupa (1) perumahan yang meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah; (2) perdagangan dan jasa, yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; (3) perkantoran yang meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; (4) industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil (5) pariwisata, yang meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; (6) peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Berikut merupakan alokasi luasan kawasan budidaya di Kabupaten Tapin berdasarkan arahan Peraturan Daerah RTRW.

Tabel II.57

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	**Kawasan Hutan Produksi**	**13.416**
	Kawasan hutan produksi tetap	6.682
	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	6.735
2	**Kawasan Pertanian**	**143.726**
	Kawasan tanaman pangan	30.825
	Kawasan hortikultura	1.072
	Kawasan perkebunan	111.829
3	**Kawasan Perikanan Budi Daya**	**170**
4	**Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik**	**27**
5	**Kawasan Peruntukan Industri**	**1.238**
6	**Kawasan Pariwisata**	**13**
7	**Kawasan Permukiman**	**12.802**
	Kawasan permukiman perkotaan	5.672
	Kawasan permukiman perdesaan	7.130
8	**Kawasan Transportasi**	**188**
9	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**	**2**

Sumber: *Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043*

Gambar II.47
Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin

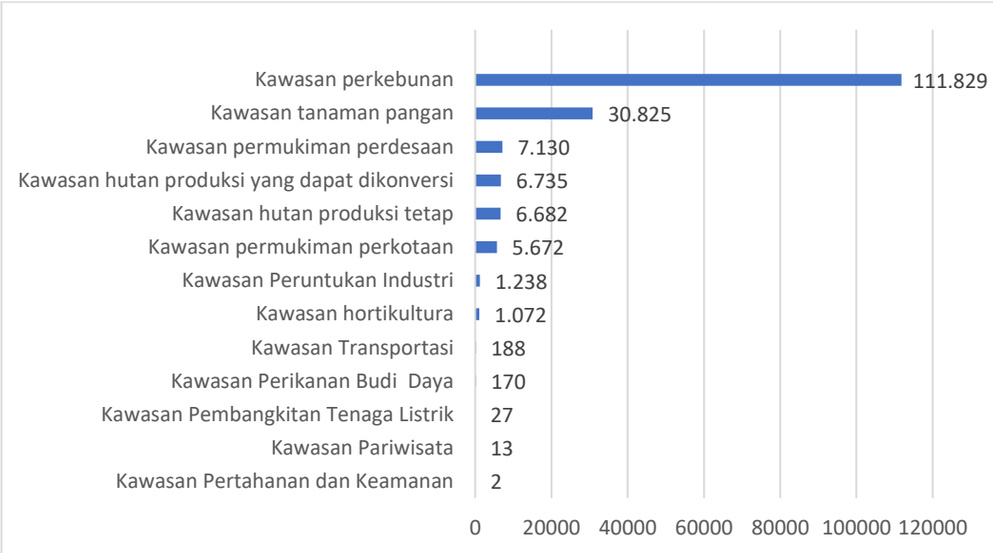

Sumber: *Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043*

Ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya persentase terbesar terletak pada:

1. Kawasan perkebunan dengan luas 111.529 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
2. Kawasan tanaman pangan dengan luas 30.825 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Kawasan permukiman perdesaan dengan luas 10.592 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tapin tentang RTRW, secara khusus, berikut merupakan peta alokasi ruang bagi pertambangan dan energi:

Gambar II.48
Peta Rencana Pola Ruang Pertambangan

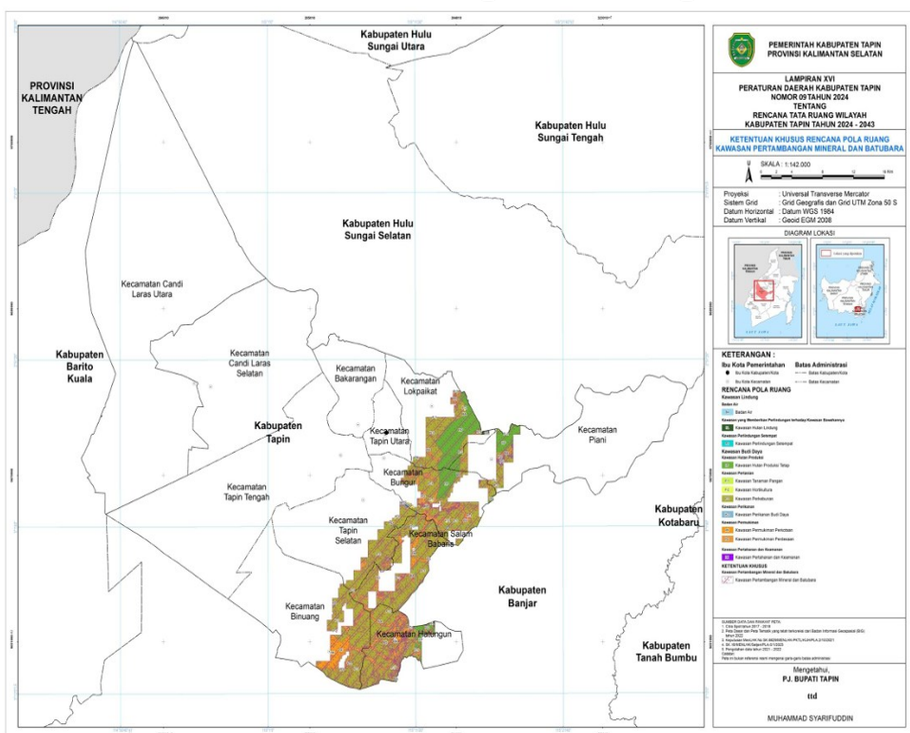

Sumber: *Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043*

Sementara, peta lokasi pola ruang secara keseluruhan baik berdasarkan fungsi lindung maupun fungsi budidaya. dapat ditinjau pada gambar berikut ini.

Gambar II.49 .
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin

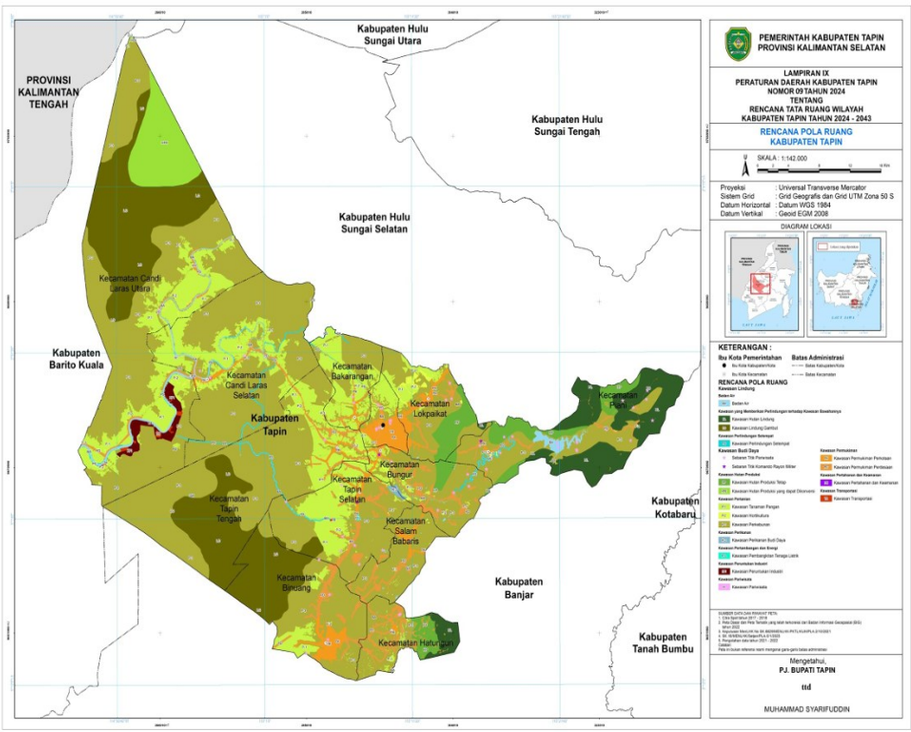

Sumber: *Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043*

Dari analisis di atas, berdasarkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapin, maka fokus pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043, adalah pengembangan **sektor agropolitan** didukung dengan luas kawasan perkebunan yang paling luas di wilayah kabupaten. Pengembangan wilayah juga akan didukung dengan alokasi lahan untuk sektor **pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata** yang diharapkan bisa mendukung dan menyokong pengembangan sektor agropolitan di Kabupaten Tapin. Namun demikian perlu menjadi perhatian dalam sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan bahwa Kabupaten Tapin telah mengalokasikan ruang spasial bagi **pertambangan dan energi** yang tersebar di beberapa wilayah sebagaimana terlihat pada peta di atas.

2.3.2.4.4 Telaah KLHS-RPJMD

Berdasarkan hasil Kajian KLHS-RPJMD pada tahapan pra validasi, Indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten terdapat 197 yang relevan, ditambah 1 indikator khas kabupaten (penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan) yang terdiri. Dari 96 indikator TPB pilar sosial, 50 indikator TPB pilar ekonomi, 31 indikator pilar lingkungan dan 21 indikator TPB pilar hukum dan tata kelola. Berdasarkan data tahun 2012-2023 diketahui bahwa dari 198 indikator TPB terdapat 100 indikator TPB (50,51%) yang mencapai target, 58 indikator TPB (29,29%) belum mencapai target, dan 40 indikator yang belum ada/tidak tersedia datanya.

A. Dengan berdasarkan data yang diperoleh maka hasil identifikasi dan perumusan isu adalah sebagai berikut:
   a. Tata kelola pemerintah
   b. Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia
   c. Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan Iklim
   d. Alih fungsi lahan
   e. Pengelolaan sampah
   f. Pertumbuhan ekonomi/Ekonomi Hijau
B. Dengan rekomendasi strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut:
   1) Peningkatan tata kelola pemerintahan
   2) Peningkatan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar
   3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
   4) Peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan Iklim
   5) Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder
   6) Pengelolaan sampah
   7) Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau

2.3.2.4.5 Telaah Kajian Strategi Pengembangan Pariwisata Kawasan Geopark Meratus di Kecamatan Piani

Berdasarkan analisis potensi dalam pengembangan pariwisata Kawasan Geopark Meratus di Kabupaten Tapin maka pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Piani Masyarakat sangat mendukung terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan Geopark Meratus khususnya di Kecamatan Piani. Dengan adanya kajian ini ditemukan 9 lokasi wisata baru yang berpotensi untuk dijadikan sebagai DTW dalam Kawasan geopark meratus. Lokasi ini akan berkembang bilamana pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana wisata yang memadai untuk pengunjung. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah hendaknya dapat memperbaiki program dan kegiatan yang selama ini masih belum memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Piani. Untuk mewujudkan itu, Pemerintah Daerah harus memprioritaskan pembangunan akses jalan menuju tempat wisata, menumbuhkan UMKM dan menciptakan produk khas lokal, serta meningkatkan Kerjasama pariwisata dengan CSR. Dengan diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi terhadap pariwisata dan harapan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai. Hal Ini penting karena akan berdampak bagi perkembangan wilayah terutama untuk percepatan pengembangan geopark meratus yang mana Kecamatan Piani sebagai jalur penghubung antar wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Tapin, Aset Strategis Nasional Bendungan Tapin dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Loksado.

2.3.2.4.6 Telaah Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik 2024

Dengan berdasarkan hasil analisis pada kajian persepsi Masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Kabupaten Tapin dapat disimpulkan dan direkomendasikan tindak lanjut sebagai berikut:

Secara kumulatif persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Tapin untuk semua sektor (SKPD)

mencapai nilai sebesar 72,42. Hal ini bermakna bahwa pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Tapin kepada masyarakat meningkat secara keseluruhan. Walaupun terjadi peningkatan pelayanan dari semua sektor (SKPD), namun belum memuaskan masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai harapan masyarakat Kabupaten Tapin terhadap rekomendasi peningkatan kinerja sektoral, sebagai berikut:

Dinas Pendidikan agar meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dalam bentuk:

a. Bantuan/beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin dan/atau berprestasi, sampai jenjang perguruan tinggi;
b. Pengembangan dan perbaikan/pemeliharaan fasilitas pendidikan;
c. Pengembangan karir para guru;
d. Peningkatan insentif guru honorer;
e. Peningkatan kapasitas manajemen sekolah; dan
f. Peningkatan kesadaran siswa dalam bersekolah.

Dinas Kesehatan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Pengembangan dan perbaikan/pemeliharaan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Poskesdes, dan Posyandu;
b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir;
c. Jaminan kesehatan/berobat gratis; dan
d. Edukasi mengenai gaya hidup sehat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Pengembangan dan pemeliharaan jalan/jembatan;
b. Pengembangan jaringan irigasi; dan
c. Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas dan jaringan air bersih.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Perbaikan/peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
b. Penataan kawasan kumuh.

Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Pemberdayaan karang taruna (pemuda desa);
b. Penanganan balapan liar;
c. Mitigasi bencana;
d. Pembangunan dan pemeliharaan posko keamanan; dan
e. Edukasi tentang kerawanan bencana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
b. Pelatihan dan sosialisasi bagi generasi muda tentang bahaya narkoba;

c. Penanaman nilai-nilai ideologi kebangsaan; dan
d. Penguatan forum kerukunan umat beragama.

Dinas Tenaga Kerja agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:
a. Perluasan kesempatan kerja;
b. Informasi untuk kemudahan mendapatkan pekerjaan
c. Pelatihan berusaha; dan
d. Pembinaan karakter bagi siswa.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:
a. Pemberdayaan ekonomi perempuan untuk industri rumah tangga;
b. Edukasi tentang kualitas hidup keluarga; dan
c. Penguatan peran organisasi perempuan dalam pembangunan.

Dinas Ketahanan Pangan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:
a. Bantuan pangan pokok dalam rangka stabilisasi harga (pasar murah);
b. Informasi penyediaan pangan daerah;
c. Pemberdayaan pangan bagi petani lokal;
d. Pelatihan pengelolaan pangan lokal; dan
e. Penyediaan lahan berbasis sumberdaya lokal untuk petani.

Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:
a. Penguatan kearifan lokal;
b. Penambahan ruang terbuka hijau pada setiap kecamatan;
c. Penguatan perlindungan hukum untuk masyarakat adat;
d. Penanganan pengaduan terkait lingkungan hidup;
e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
f. Penambahan fasilitas tempat sampah (pembuangan akhir).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:
a. Penyuluhan data administrasi kependudukan;
b. Edukasi tentang identitas kependudukan digital;
c. Ketersediaan produk layanan KTP EL;
d. Layanan jemput bola; dan
e. Edukasi kartu identitas anak (KIA).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:
a. Pelatihan kompetensi ketepatan usaha desa (pembinaan pemerintah desa dari Perguruan Tinggi);
b. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
c. Pelatihan hukum pendirian badan usaha milik desa;
d. Penguatan kapasitas kelembagaan badan usaha milik desa; dan
e. Memberikan penghargaan atas inovasi badan usaha milik desa.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Distribusi obat dan alat kontrasepsi;
b. Ketersediaan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana;
c. Edukasi pentingnya keluarga berencana serta pembinaan keluarga berencana.

Dinas Perhubungan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Pengawasan penyelenggaraan izin parkir;
b. Parkir gratis di tempat umum (publik);
c. Penyediaan kelengkapan jalan untuk keamanan lalu lintas; dan
d. Penataan kawasan terminal.

Dinas Komunikasi dan Informatika agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Pembinaan dan pemberdayaan informasi publik;
b. Kerjasama pemerintah daerah dengan Tapin TV;
c. Ketersediaan pengaduan *online* publik: dan
d. Pemberdayaan para pelaku usaha media *online.*

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Promosi pariwisata melalui media cetak dan media sosial;
b. Pembinaan karakter generasi muda terkait warisan budaya daerah;
c. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan objek wisata;
d. Pelatihan sumber daya manusia pengelola desa wisata (pokdarwis);
e. Bantuan modal ekonomi kreatif; dan
f. Kerjasama pariwisata antar daerah.

Dinas Perikanan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Ketersediaan sarana usaha ikan tangkap;
b. Penguatan kelembagaan (kelompok) nelayan dan pembudidaya ikan lokal;
c. Penyebaran benih ikan di sungai umum;
d. Bantuan benih ikan;
e. Pemberdayaan/peningkatan kapasitas nelayan; dan
f. Pengawasan dalam kegiatan perikanan.

Dinas Pertanian agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Penguatan mitigasi bencana pertanian;
b. Bantuan bibit/benih tanaman dan ternak;
c. Penambahan sumberdaya manusia penyuluh pertanian;
d. Kemudahan petani menjual hasil pertanian; dan
e. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

Dinas Perdagangan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:

a. Stabilisasi harga kebutuhan pokok di pasar tradisional;
b. Perlindungan usaha bagi pedagang tradisional;
c. Bantuan modal bagi pelaku UMKM;
d. Pembinaan dan pelatihan UMKM;

e. Pengawasan dan pengendalian harga; dan
f. Pembatasan gerai toko modern

Kecamatan agar meningkatkan pelayanan dalam bentuk:
a. Perbaikan kantor kecamatan;
b. Pelayanan berbasis *online;*
c. Peningkatan kemudahan urusan perizinan;
d. Peningkatan keramahan para petugas layanan; dan
e. Peningkatan kompetensi aparatur.

2.3.2.4.7 Telaah Kajian Masterplan Kawasan Pendidikan Tapin

Pengembangan kawasan pendidikan di Tapin dirancang untuk menjadi model kawasan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di Kalimantan Selatan. Dengan pendekatan berbasis masterplan yang menyeluruh, kawasan ini memprioritaskan fungsi pendidikan, riset, dan inovasi sekaligus mendukung keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi. Kawasan ini mencakup berbagai elemen utama sebagai berikut:

a. **Zona Inti Pendidikan** sebagai pusat kegiatan akademik yang dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan coworking space
b. **Zona Pendukung** menyediakan fasilitas perdagangan, jasa, dan akomodasi yang menunjang kehidupan penghuni Kawasan
c. **Infrastruktur Umum** seperti embung, sistem drainase, jalur pedestrian, dan jaringan internet nirkabel yang memastikan kenyamanan dan efisiensi operasional
d. **Zona Olahraga dan Rekreasi** untuk mendukung kesehatan fisik dan mental penghuni melalui fasilitas seperti jogging track, taman, dan area rekreasi
e. **Ruang Terbuka Hijau (RTH)** sebagai elemen utama keberlanjutan lingkungan yang berfungsi sebagai resapan air, pengatur suhu mikroklimat, dan habitat ekologis.

Tahapan pembangunan kawasan pendidikan ini dilakukan secara strategis, mulai dari perencanaan awal, pembebasan lahan, pengembangan infrastruktur dasar, pembangunan fasilitas utama, hingga monitoring dan evaluasi. Pendekatan bertahap ini memastikan bahwa setiap tahap memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Pembiayaan kawasan juga dirancang secara kolaboratif melalui kombinasi pendanaan dari pemerintah, sektor swasta, CSR, dan pendapatan kawasan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan. Dengan desain yang mengutamakan integrasi teknologi, kawasan ini akan menjadi smart campus berbasis IoT yang ramah lingkungan, memadukan efisiensi energi, pengelolaan data modern, dan desain bangunan berkelanjutan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka beberapa rekomendasi dalam pengembangan masterplan Kawasan Pendidikan Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut:

1. **Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi**
    - Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, dalam setiap tahap pembangunan.

- Membentuk tim pengelola proyek yang berfungsi sebagai pengawas, evaluator, dan mediator antara berbagai pihak yang terlibat.

2. **Prioritas Infrastruktur Dasar**
   - Memastikan pengembangan infrastruktur dasar seperti embung, sistem drainase, jaringan listrik, dan jalur pedestrian menjadi prioritas awal untuk mendukung aktivitas kawasan sejak tahap awal pembangunan.
3. **Pengembangan Model Pembiayaan Inovatif**
   - Mengadopsi pendekatan publik-Private Partnership (PPP) untuk menarik investasi dari sektor swasta dalam pengembangan fasilitas utama.
   - Memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan lokal untuk mendanai fasilitas umum seperti taman, jalur pedestrian, dan fasilitas olahraga.
4. **Fokus pada Keberlanjutan Lingkungan**
   - Mengintegrasikan ruang terbuka hijau (RTH) ke dalam semua zona untuk memastikan keseimbangan ekologis dan mendukung keberlanjutan kawasan.
   - Menggunakan material ramah lingkungan, seperti paving blok permeabel dan vegetasi lokal, dalam semua pembangunan infrastruktur.
5. **Optimalisasi Teknologi Modern**
   - Menerapkan konsep smart campus dengan jaringan internet nirkabel yang tersebar luas, sistem pengelolaan energi berbasis IoT, dan fasilitas berbasis teknologi untuk mendukung inovasi akademik.
   - Memastikan teknologi yang diterapkan memiliki efisiensi energi tinggi dan meminimalkan dampak lingkungan.
6. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**
   - Melakukan evaluasi berkala pada setiap tahap pembangunan untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi yang tepat waktu.
   - Membangun sistem monitoring berbasis teknologi untuk memantau kualitas infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan tingkat kepuasan pengguna Kawasan.
7. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal**
   - Melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pembangunan dan operasional kawasan melalui pelatihan kerja, penyediaan lapangan kerja, dan pengelolaan fasilitas pendukung.
   - Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kawasan, seperti pengelolaan pasar hasil produksi atau program rekreasi lokal.
8. **Strategi Promosi dan Daya Tarik Investasi**
   - Memanfaatkan branding kawasan sebagai pusat pendidikan dan inovasi unggulan di Kalimantan Selatan untuk menarik lebih banyak mitra strategis dan dukungan finansial.
   - Mengadakan event akademik dan pelatihan vokasi yang melibatkan institusi nasional maupun internasional.

Kawasan pendidikan Tapin berpotensi menjadi pusat pendidikan vokasi dan inovasi unggulan yang tidak hanya mendukung pengembangan sumber daya

manusia berkualitas tetapi juga menjadi contoh pembangunan kawasan yang berkelanjutan, modern, dan berbasis teknologi di Kalimantan Selatan. Keberhasilan kawasan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang, baik secara lokal maupun regional, dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

2.3.2.4.8 Telaah Kajian Rencana Induk Kawasan Industri Tapin Integrated Industrial and port estate (TIIPE)

Dalam pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan memiliki pandangan dalam menetapkan kawasan industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tergambar pada gambar sebagai berikut.

Gambar II.50 .
Kawasan industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

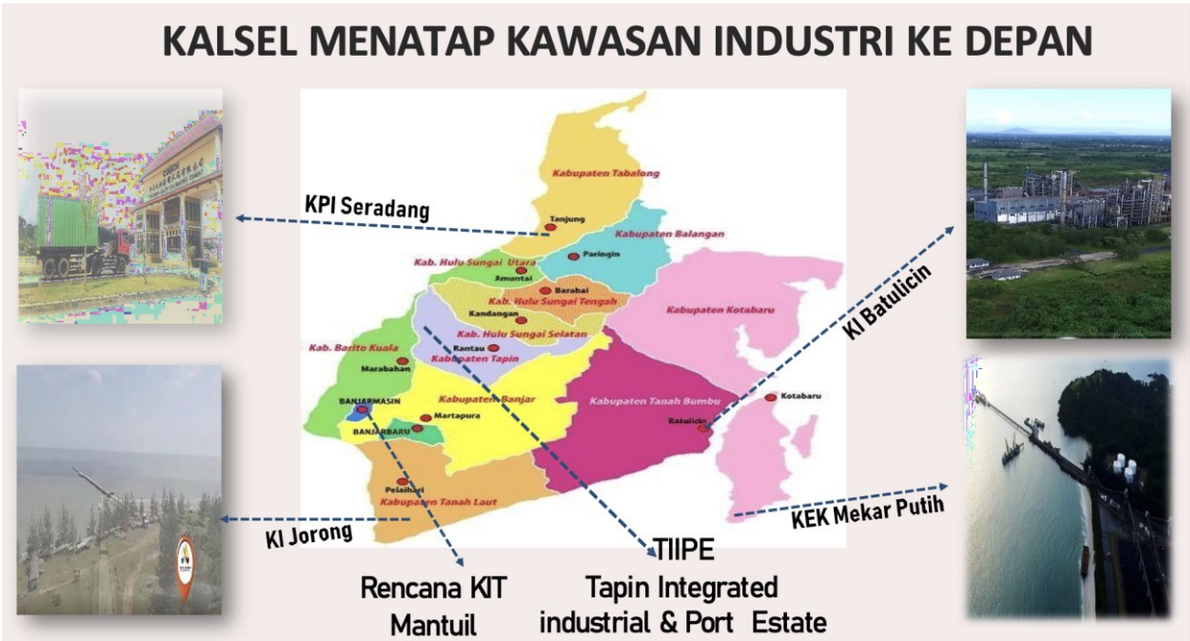

Dengan ini terlihat bahwa salah satu pandangan dari Provinsi Kalimantan Selatan mengenai industri di Kabupaten Tapin adalah terkait adanya *TAPIN INTEGRATED INDUSTRIAL AND PORT ESTATE* (TIIPE). TIIPE ini akan dibangun dengan luas kurang lebih 1.000 ha dengan sungai puting ke dalam bagian lokasinya. Dengan mempertimbangkan lokasi kawasan industri dari Kota Banjarmasin, Desa Sungai Puting dan Kota Rantau ini memenuhi syarat Permen Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016. Pelabuhan Margasari Baru merupakan bagian integral dari Tapin Integrated Industrial and Port Estate (TIIPE), sebuah kawasan industri terpadu yang direncanakan di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Pelabuhan ini dirancang untuk mendukung program "Tol Laut" dengan memperkuat layanan sub-koridor Kalimantan dan mengurangi biaya logistik melalui fasilitasi transportasi tongkang untuk kontainer dan kargo.

Keberadaan Pelabuhan Margasari Baru diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, integrasi pelabuhan dengan kawasan industri TIIPE akan menciptakan sinergi dalam pengembangan industri pasca-batu bara, mendukung diversifikasi ekonomi daerah, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Pada 3 Agustus 2023, Menteri Perhubungan Republik Indonesia

menetapkan lokasi Pelabuhan Margasari Baru di Desa Margasari Ilir dan Desa Sungai Puting, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Penetapan ini didasarkan pada kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, serta pemenuhan persyaratan aspek kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran. Dengan adanya Pelabuhan Margasari Baru sebagai bagian dari TIIPE, diharapkan Kabupaten Tapin dapat meningkatkan daya saingnya dalam sektor industri dan logistik, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

2.3.2.4.9 Telaah Kajian Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Tapin 2025-2044 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah memiliki maksud dan tujuan sebagai payung hukum pelaksanaan RIPS yang berisi panduan pemrograman dan pembiayaan sektor pengelolaan sampah Kabupaten Tapin serta rencana pengembangan sesuai tahapan pelaksanaan Tahun 2025-2044.
2) Dalam perumusan program didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan penanganan sampah eksisting di wilayah Kabupaten Tapin. Kemudian
3) dirumuskan isu-isu strategis, serta dirumuskan tujuan pengembangan dan
4) sasaran kebijakan. Kebijakan pengembangan pengelolaan menjadi dasar perumusan strategi dan penetapan program. Program pengembangan sistem pengelolaan sampah Kabupaten Tapin disusun menurut tahapan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam kurun waktu perencanaan 2025-2044.
5) Pengembangan pengelolaan sampah (mulai dari sub sistem pewadahan hingga subsistem pemrosesan akhir) pada jangka pendek difokuskan pada wilayah pelayanan WPP 1 dan WPP 2. Pendekatan pengelolaan sampah untuk 126 kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan cara melakukan 126 komposting dengan biopori atau takakura untuk sampah organik, sampah anorganik dikelola dengan bank sampah, sedangkan untuk residu dapat ditimbun.
6) Selain aspek teknis teknologis, pengembangan aspek peraturan, kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Pada jangka pendek, pengembangan juga difokuskan untuk melakukan kaji ulang terhadap pengaturan, kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat/swasta/perguruan tinggi, dan pengembangan alternatif pembiayaan. terdiri dari kebutuhan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya kegiatan non teknis (pengembangan aspek pengaturan, kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat/perguruan tinggi/swasta). Kebutuhan biaya operasional semakin meningkat setiap tahunnya karena peningkatan jumlah sarana dan prasarana. Kebutuhan biaya operasional untuk Jangka Pendek (2025-2026) mencapai Rp 139,776 Milyar/Tahun. Sedangkan untuk total biaya investasi pada jangka pendek adalah Rp 467,432 Milyar/Tahun.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi terkait rencana pengembangan dalam sistem pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. Untuk penanganan sampah dengan cara perkotaan sebaiknya diprioritaskan untuk WPP 1. Sedangkan untuk daerah lainnya dapat ditangani dengan cara pedesaan.
2. Dalam pengembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Tapin agar dapat mengembangkan upaya-upaya reduksi sampah melalui upaya reduksi sampah di sumber maupun antara.
3. Dalam pengembangan pengelolaan persampahan dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit sehingga perlu digali sumber pendanaan lainnya yang berasal dari CSR, mengingat di Kabupaten Tapin terdapat banyak perusahaan-perusahaan tambang untuk retribusi sampah sebagaimana sudah disampaikan, agar menurut struktur tarif yang diusulkan secara bertahap naik setiap 5 tahun sekali. Didukung oleh peningkatan efektifitas penagihan.

2.3.2.4.10 Telaah Kajian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan: Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Sesuai dengan hasil kesepakatan bahwa disepakati Kawasan perdesaan di Kabupaten Tapin terdiri atas 29 (dua puluh Sembilan) desa. Rencana bisnis Kawasan perdesaan untuk tahap 1 kawasan perdesaan utama yang terdiri dari 12 desa di Kecamatan Tapin Tengah dan 4 desa di Kecamatan Bungur untuk tahap 2 kawasan perdesaan pendukung yang terdiri dari 5 desa di Kecamatan Tapin Tengah dan 8 desa di Kecamatan Bungur, secara detail terlihat pada gambar peta dibawah ini.

Gambar II.51
Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Utama Pertanian Kabupaten Tapin

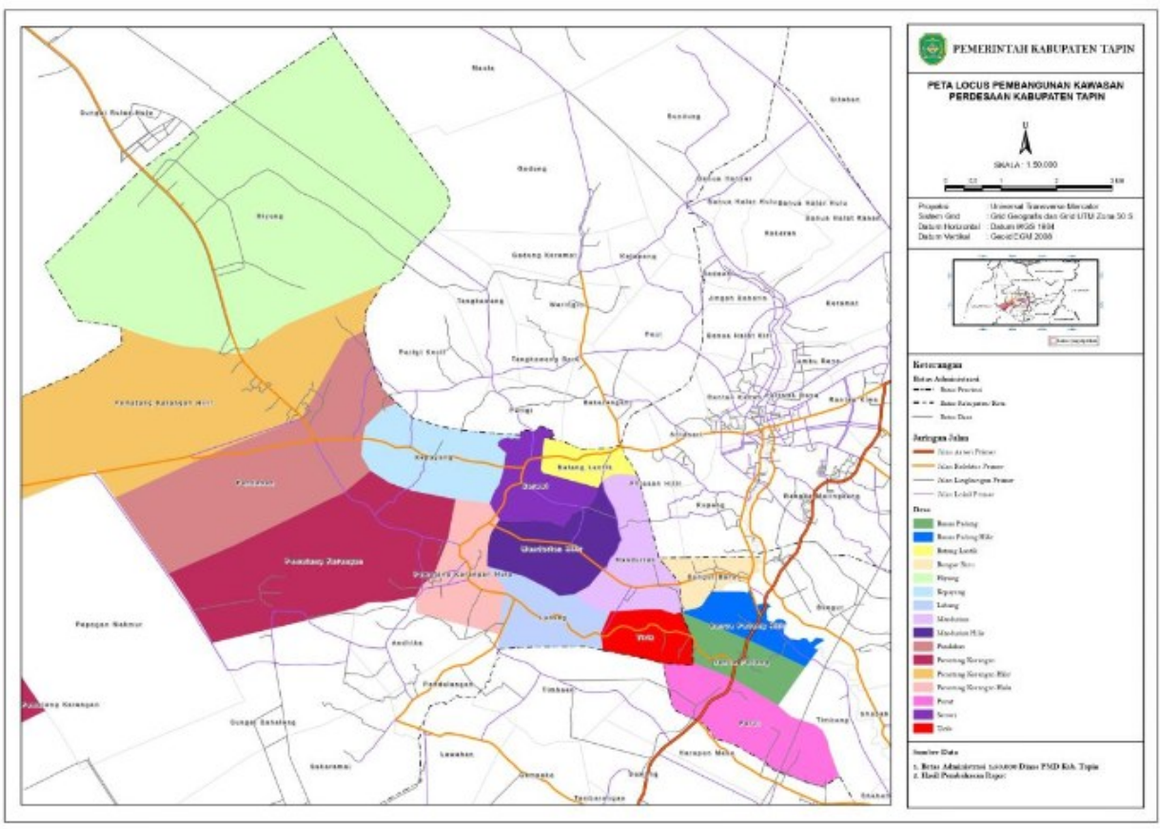

Sumber: *Dinas PUPR Kabupaten Tapin,2025*

Berdasarkan hasil analisis dokumen RPKP untuk 5 (lima) tahun ke depan merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari tujuan, sasaran dan strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan dinamika pembangunan saat ini

maka isu rencana pembangunan Kawasan perdesaan pertanian Kabupaten Tapin yaitu:

1) Minimnya penyediaan sistem prasarana pertanian irigasi, jalan usaha tani, jembatan, dan sumber air bersih
2) Terbatasnya produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian
3) Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan Lembaga dalam pengelolaan produksi pertanian hulu ke hilir

Gambar II.52
Saluran Irigasi (kiri) dan Jalan Usaha Tani (kanan) Kawasan Perdesaan Pertanian Kabupaten Tapin

Dengan adanya isu diatas, menindaklanjuti hal tersebut maka arah kebijakan dan program terkait RPKP adalah sebagai berikut

1. Mengembangkan dan Mengelola Prasarana Irigasi
2. Mengembangkan Infrastruktur Jalan
3. Meningkatkan Produksi Pertanian
4. Meningkatkan Diversifikasi Pertanian
5. Meningkatkan nilai jual komoditas pertanian melalui pendampingan dan pengelolaan pertanian
6. Membentuk badan kelembagaan Masyarakat

Arah kebijakan diatas, dilaksanakan dengan program pembangunan sebagai berikut:

a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
b. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
c. Program peningkatan produksi pertanian
d. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian melalui diversifikasi komoditas
e. Peningkatan nilai jual komoditas pertanian melalui pendampingan mengenai sistem pengelolaan pertanian hulu-hilir
f. Pembentukan kelembagaan pertanian Masyarakat

2.3.2.4.11 Telaah Kajian Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup

Dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup diperlukan adanya kerja sama antara semua pihak baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam

proses pembuatan keputusan (decision making) dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dapat mencegah atau menyelesaikan konflik melalui komunikasi dua arah yang terus menerus, dan menguntungkan berbagai pihak yang terlibat. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak memberikan keuntungan, di antaranya penelaahan kebutuhan dan masalah lingkungan yang lebih akurat, meningkatkan kredibilitas perencanaan lingkungan hidup, teridentifikasinya solusi-solusi alternatif yang dapat diterima secara sosial, dan menciptakan rasa memiliki atas rencana pengelolaan yang ditetapkan. Kemitraan juga memiliki beberapa elemen kunci, di antaranya saling percaya dan menghargai (compatibility), memberi manfaat bagi semua pihak, wewenang dan keterwakilan yang sederajat, komunikasi, adaptabilitas, dan integritas. Keterlibatan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat akan lebih membantu dalam pengembangan kemitraan. Perguruan Tinggi berperan membantu upaya memahami permasalahan, pemecahan masalah, dan perumusan kemitraan yang dapat dikembangkan, sedangkan LSM membantu pelaksanaan kemitraan dengan menjadi fasilitator atau pendamping. Hal yang penting adalah keterlibatan masyarakat sejak awal secara utuh mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tapin. Berdasarkan hasil analisa dari potensi dan kondisi lingkungan hidup, bencana, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan pertimbangan tren data 5 tahun terakhir maka terdapat longlist isu potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Tapin, maka dihasilkan 6 isu pokok yaitu:

1) Meningkatnya alih fungsi lahan
2) Penurunan kuantitas air
3) Meningkatnya pencemaran air
4) Meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, terutama banjir, longsor dan kebakaran hutan/lahan
5) Belum optimalnya pengelolaan sampah
6) Pencemaran udara.

Dengan berdasarkan hasil analisis maka ditetapkan tujuan kebijakan dan strategi Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.58
Arah kebijakan dan strategi Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup berdasarkan isu pokok

Jenis Isu Pokok	Arahan Kebijakan PPLH	Strategi
3	Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan	Menurunkan beban pencemaran dari sumber pencemar yang berasal dari kegiatan industri dan domestik
1,2,4,6	Mempertahankan fungsi hutan sebagai wilayah pengatur air dan penyedia air dengan luasan yang cukup dan proporsional	Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah

Jenis Isu Pokok	Arahan Kebijakan PPLH	Strategi
		yang berfungsi memberikan jasa pengatur air dan jasa penyedia air
1,4	Memperbaiki sistem pengelolaan dan pemulihan ekosistem bernilai penting (karst dan gambut)	Melaksanakan rehabilitasi dan membatasi pemberian izin di kawasan hidrologis gambut (terutama lahan gambut bekas kebakaran) dan daerah karst
2,4	Menjaga, meningkatkan, dan memulihkan fungsi Daerah Aliran Sungai prioritas lintas kabupaten dan Ekosistemnya.	Pembatasan perizinan kegiatan / usaha di DAS prioritas
		Penanaman / Rehabilitasi Hutan dan Lahan terutama di lahan kritis
3,5,6	Penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Pemberian penghargaan bagi usaha/kegiatan yang dapat mengelola lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan atau inovasi dalam pengelolaan lingkungan
		Pengurangan pajak bagi pelaku usaha/kegiatan yang bisa mengurangi beban pencemaran lingkungan
		Pemberian sanksi bagi pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan
1,4	Pemulihan kawasan bekas tambang, lahan kritis, dan bekas kebakaran hutan dan lahan	Reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang
		Rehabilitasi lahan kritis
		Rehabilitasi areal bekas kebakaran
5	Memulihkan daerah- daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3	Rehabilitasi dan pembersihan (*clean up*) daerah yang terkontaminasi Limbah B3

2.3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Tapin

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Tapin yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sektor Pertanian

Transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis sektor pertanian diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Tapin. Salah satu dampak utama adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui adopsi praktik pertanian berkelanjutan yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Dengan penerapan teknologi pertanian modern, dan ramah lingkungan, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, seperti air dan tanah, sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik dan lebih

berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani tetapi juga membantu menjaga kestabilan ekosistem lokal dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, transformasi ekonomi berbasis pertanian berkelanjutan dapat mendorong diversifikasi ekonomi di Kabupaten Tapin. Dengan mengembangkan berbagai produk pertanian unggulan dan menciptakan rantai nilai yang lebih panjang, wilayah ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Diversifikasi ini dapat mencakup pengolahan hasil pertanian menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan pengembangan sektor pertanian diarahkan pada pengembangan industri hijau. Dengan pengembangan industri hijau, diharapkan pembangunan industri pengolahan produk pertanian, yang akan memberikan nilai tambah produk. Dengan adanya industri hijau ini nantinya akan terbuka peluang baru bagi usaha kecil dan menengah, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri terkait. Transformasi ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, Pendidikan SDM yang sesuai dengan kesempatan kerja, dan pelatihan bagi petani dan pelaku usaha. Dengan demikian keberlanjutan ekonomi dapat terjamin dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah.

b) Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Transformasi Tata Kelola

Reformasi birokrasi yang efektif akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan tata kelola yang lebih baik, proses administrasi dan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan responsif. Hal ini akan mengurangi hambatan birokrasi yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi yang meningkat akan mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor publik. Reformasi birokrasi berbasis transformasi tata kelola biasanya melibatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Dengan ASN yang lebih kompeten dan berintegritas, pelayanan publik akan semakin baik dan inovatif. Selain itu, penerapan sistem rekrutmen dan promosi pegawai yang sesuai dengan kompetensi akan memastikan bahwa posisi strategis di pemerintahan diisi oleh individu-individu yang benar-benar berkualitas. Dengan ini diharapkan Kabupaten Tapin mampu mempercepat implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi tata kelola pemerintahan, agar menjadi fondasi pembangunan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga hal ini akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tapin secara keseluruhan.

c) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Pondasi Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tapin menjadi urgensi pembangunan yang memiliki dampak signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang lebih terampil dan berwawasan luas, pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Dengan akses pendidikan yang lebih baik, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter dan moral masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Di sisi lain, layanan kesehatan yang berkualitas sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup sehat dan produktif. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik memungkinkan deteksi dini dan penanganan penyakit, yang mengurangi angka kematian dan meningkatkan harapan hidup. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih fokus pada kegiatan ekonomi dan sosial tanpa terbebani oleh masalah kesehatan. Kualitas kesehatan yang baik juga berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, karena keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan. Kombinasi dari pendidikan dan kesehatan yang baik ini menjadi pondasi yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin, mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

d) Pengentasan Kemiskinan yang Terstruktur dengan Pendekatan Kultural

Pengentasan kemiskinan yang terstruktur dengan pendekatan kultural di Kabupaten Tapin menjadi urgensi dalam pembangunan daerah. Pendekatan kultural berfokus pada pengintegrasian budaya dan tradisi lokal dalam pengentasan kemiskinan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dan produktif dalam proses perubahan kehidupannya. Dengan melibatkan adat istiadat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, seperti usaha mikro berbasis komunitas atau kerajinan tangan tradisional, masyarakat dapat memanfaatkan keterampilan lokal dan mengembangkan produk yang memiliki nilai jual tinggi, sekaligus melestarikan budaya. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi tidak hanya relevan secara ekonomi tetapi juga menghormati dan melibatkan identitas budaya masyarakat. Di samping itu, pendekatan kultural dalam pengentasan kemiskinan juga berpotensi memperkuat kohesi sosial dan dukungan komunitas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kultural dalam inisiatif sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, masyarakat merasa lebih terhubung dan berkomitmen terhadap peningkatan kualitas hidupnya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi aktif dan keberlanjutan dari program-program yang dilaksanakan. Ketika masyarakat melihat bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan tradisi dan cara hidup, maka Masyarakat akan cenderung mendukung dan terlibat dalam upaya-upaya pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, pendekatan kultural tidak hanya memperkuat efektivitas program, tetapi juga mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

e) Penerapan Ekonomi Hijau Guna Antisipasi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Tapin berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengantisipasi degradasi kualitas lingkungan hidup. Ekonomi hijau fokus pada penggunaan sumber daya yang

efisien, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan pembangunan ramah lingkungan seperti pertanian organik, energi terbarukan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, Kabupaten Tapin dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan penurunan kualitas tanah. Hal ini tidak hanya melindungi ekosistem lokal tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup, karena lingkungan yang bersih dan sehat berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Selain manfaat lingkungan, penerapan ekonomi hijau juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Tapin. Dengan mengadopsi teknologi hijau dan praktik bisnis yang ramah lingkungan, daerah ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor-sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan ekowisata. Ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga menarik investasi dan mempromosikan daya saing regional. Dengan integrasi prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan dan program pembangunan, Kabupaten Tapin dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lingkungan global.

f) Perwujudan Kabupaten Tapin sebagai Penyangga Pangan Nasional

Kabupaten Tapin memiliki potensi yang tinggi terhadap kontribusi pertanian terutama pada produk pertanian pangan. Sehingga Kabupaten Tapin diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan ini Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah penyangga pangan nasional. Nantinya, dengan peningkatan kapasitas produksi pangan, Kabupaten Tapin dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memajukan ekonomi lokal. Investasi dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi, sistem penyimpanan, dan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di tingkat regional dan nasional tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk pertanian Kabupaten Tapin, meningkatkan pendapatan petani, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor agribisnis. Selain itu, peran sebagai penyangga pangan nasional mendorong pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin. Pemerintah daerah akan lebih fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara efektif, perlindungan lingkungan, dan penyediaan dukungan bagi petani, seperti pelatihan dan akses ke kredit. Hal ini berpotensi memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan membangun reputasi sebagai pusat produksi pangan yang andal, Kabupaten Tapin tidak hanya ekonomi yang positif, mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab RPJMD ini berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi pembangunan daerah yang aspiratif dan berorientasi pada masa depan, mencerminkan cita-cita luhur untuk mewujudkan Kabupaten Tapin yang maju dan beriman. Dalam rangka mencapai visi pembangunan, dirumuskan misi strategis yang akan menjadi panduan dalam setiap langkah pembangunan. Selanjutnya, untuk memastikan visi dan misi dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur, akan ditetapkan Program Prioritas Pembangunan daerah.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang ada, visi dan misi RPJMD disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pembangunan daerah. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Tapin.

Untuk memastikan pencapaian visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran secara lebih spesifik sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan selama 5 tahun. Sasaran ini menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan dan program kerja yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

3.1.1 Visi

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tapin, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

"TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN
(BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)"

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2029. Rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam

5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Tapin dijelaskan sebagai berikut.

1. **Sejahtera dan Agamis**, terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Tapin yang berkualitas dan sejahtera serta saling berdampingan antar umat beragama.
2. **Maju,** tercapainya pertumbuhan ekonomi secara konsisten dan kemandirian ekonomi daerah serta pemenuhan pembangunan infrastruktur yang handal.
3. **Berkelanjutan,** terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta ketahanan bencana yang responsif.
4. **Berintegritas dan inovatif,** terwujudnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin.

Dengan Visi "Terwujudnya Tapin Maju dan Beriman (Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis, dan Berkelanjutan)" selaras dengan peran strategis Kabupaten Tapin dalam mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan. Posisi geografis Tapin yang berada pada jalur penghubung utama antara wilayah hulu dan hilir Kalimantan Selatan menjadikannya simpul penting dalam arus distribusi barang, terutama komoditas unggulan seperti hasil pertanian, perkebunan, pertambangan rakyat, dan produk industri olahan. Infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang melintasi Tapin, ditambah potensi pengembangan kawasan logistik terpadu, memberi peluang besar bagi daerah ini untuk menjadi *feeder dan consolidation point* bagi pergerakan logistik menuju pelabuhan utama di Banjarmasin maupun jalur distribusi ke provinsi lain di Kalimantan.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Tapin berperan menyediakan dukungan infrastruktur logistik yang handal, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, pengembangan sentra distribusi hasil pertanian dan peternakan, gudang penyimpanan modern, serta fasilitas bongkar muat yang efisien. Peningkatan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Tapin akan mempersingkat waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Selain itu, penguatan tata kelola perizinan, integrasi sistem informasi logistik daerah, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan pelaku usaha lintas daerah akan memperkuat posisi Tapin sebagai simpul distribusi yang mendukung kelancaran arus barang di Kalimantan Selatan. Dengan strategi ini, Kabupaten Tapin tidak hanya menjadi bagian dari jaringan logistik regional, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang berkontribusi nyata terhadap keberhasilan Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.

3.1.2 Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan

memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1) **MISI 1: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi**, Pelaksanaan misi ini diimplementasikan dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas Pendidikan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan Gender, Disabilitas, dan inklusi sosial.
2) **MISI 2: Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif,** terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM serta optimalisasi pembangunan pariwisata.
3) **MISI 3: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang,** Membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar, dll), terutama pada wilayah kantong- kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kawasan perdesaan, dan pembangunan daerah Tangguh Bencana melalui pelestarian lingkungan.
4) **MISI 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana,** pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan serta peningkatan pengelolaan ketahanan bencana.
5) **MISI 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat,** mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan *merit system* serta memperkuat partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik.

Penyelarasan antara RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan misi RPJMD Kabupaten Tapin merupakan langkah strategis untuk memastikan sinergi vertikal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional hingga tingkat lokal. Dengan menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, Kabupaten Tapin dapat lebih efektif mengakses dukungan program dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi, sekaligus memastikan bahwa pembangunan di tingkat kabupaten memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Asta Cita nasional dan agenda pembangunan jangka menengah provinsi. Harmonisasi ini juga memperkuat kesinambungan perencanaan, menghindari tumpang tindih program, dan mendorong efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel III.1
Keterkaitan Misi RPJMN, Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan Misi RPJMD Kabupaten Tapin

MISI RPJMN	MISI RPJMD PROV.KALSEL	MISI RPJMD KAB.TAPIN
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) , Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	Pembangunan Manusia Yang Unggul, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industry Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industry Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Yang Handal	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang
Memantapkan System Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata Dan Syariah	Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif,
Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industry Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri		
Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan		

MISI RPJMN	MISI RPJMD PROV.KALSEL	MISI RPJMD KAB.TAPIN
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan	Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah Dan Cepat	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		

3.1.3 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan

memenuhi kriteria *SMART-C*. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel III.2
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025–2030

Visi: "TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)"						
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Satuan**	**Baseline (2024)**	**2025**	**2030**
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,06	74,29-74,4	78,52-80,22
Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif	Meningkatnya kemandirian ekonomi yang maju, tumbuh dan produktif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,3-5,6	6,17-8,00
		PDRB perkapita	Rp/juta	72,45	74,32	111,06
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan penataan wilayah dan pemerataan layanan infrastruktur dasar pelayanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	72,8	73,53	80,08
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana	Meningkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Poin	106,7	100	95
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,11	69,74	71,45
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	76,27	76,90	80,75

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Tapin dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berikut dijabarkan target indikator Makro dan rumusan tujuan, sasaran sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.3
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,06	74,29-74,4	74,5 -75,2	75,21-76,71	76,82-77,22	77,42-78,72	78,52-80,22
2	Gini Ratio	Nilai	0,26	0,259-0,257	0,258-0,255	0,257-0,252	0,257 - 0,247	0,252 - 0,242	0,245 - 0,237
3	Tingkat Kemiskinan	%	3,33	3,25-2,50	3,16 - 2,49	3,02-2,47	2,89-2,43	2,75-2,29	2,61-2,15
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,71 - 3,16	3,67 - 3,09	3,63 - 3,00	3,57 - 2,91	3,50 - 2,81	3,40 - 2,71
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,3-5,6	5,5 - 5,97	5,57-6,04	5,63-6,1	5,7-6,17	6,17-8,00
6	PDRB Perkapita	(Rp Juta)	72,45	74,32	81,67	89,02	96,36	103,71	111,06
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,11	69,74	70,08	70,42	70,76	71,11	71,45
8	Penurunan Emisi GRK	TonCO_2	NA	64.330,25	111.769,89	194.028,09	186.851,01	155.859,87	231.336,78
9	Kontribusi PDRB Kabupaten Tapin ke Provinsi	%	5,07	5,30	5,39	5,47	5,56	5,64	5,73

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.4
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2030

Visi: "TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)"												
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline	Target						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,06	74,29-74,4	74,5-75,2	75,21-76,71	76,82-77,22	77,42-78,72	78,52-80,22
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0,615	0,628	0,636	0,644	0,659	0,700	0,706
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,842	0,843	0,844	0,845	0,846	0,9	0,905

Visi: "TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)"												
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Satuan**	**Baseline**	**Target**						
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi		Menurunnya Kemiskinan Dan Ketimpangan	Rasio Gini	Indeks	0,26	0,259-0,257	0,258-0,255	0,257-0,252	0,257-0,247	0,252-0,242	0,245-0,237
			Tingkat Kemiskinan	%	3,33	3,25-2,50	3,16-2,49	3,02-2,47	2,89-2,43	2,75-2,29	2,61-2,15
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,71-3,16	3,67-3,09	3,63-3,00	3,57-2,91	3,50-2,81	3,40-2,71
		Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Yang Toleran Dan Religius	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	%	81	81,05	82	82,5	83	83,5	84
Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Yang Maju, Tumbuh, Produktif, Dan Berdaya Saing		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,3-5,6	5,5-5,97	5,57-6,04	5,63-6,1	5,7-6,17	6,17-8,00
			Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,69	3,73	3,80	3,87	3,95	4,02	4,10
			PDRB Perkapita	Rp. Juta Per Tahun	72,45	74,32	81,67	89,02	96,36	103,71	111,06
		Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,74	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
			LPE Kategori Industri Pengolahan	%	4,23	5,1	5,16	5,22	5,28	5,34	5,4
			LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,56	7,91	8,01	8,1	8,19	8,28	8,37
			LPE Kategori Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	7,18	7,35	7,52	7,85	8,16	8,25	8,5
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Penataan Wilayah Dan Pemerataan Layanan		Indeks Kepuasan Layanan	Indeks	72,8	73,53	74,26	75,71	77,17	78,62	80,08

Visi: "TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)"												
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Satuan**	**Baseline**	**Target**						
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang	Infrastruktur Dasar Pelayanan Publik		Infrastruktur (IKLI)								
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan	Indeks Infrastruktur	Angka	72,8	73,53	74,26	75,71	77,17	78,62	80,08
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berkelanjutan Dan Ketahanan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana	Indeks	106,7	100	99	98	97	96	95
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,11	69,74	70,08	70,42	70,76	71,11	71,45
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Perubahan Lingkungan	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	1,7	1,67	1,56	1,45	1,34	1,21
		Meningkatnya Kualitas Antisipasi Dan Penanganan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Inovatif Dan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,27	76,90	77,51	78,14	78,77	79,93	80,75
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Poin	71	72,95	74,9	76,85	78,8	80,75	82,7
			Nilai LPPD	Poin	-	3,10	3,25	3,30	3,50	3,55	3,60
			Nilai RB General	Poin	66,98	67,53	68,07	68,62	69,18	70,26	71,00
			Nilai RB Tematik	Poin	9,29	9,37	9,44	9,52	9,59	9,67	9,75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif Dan Berorientasi Pada Peningkatan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,03	87,41	87,79	88,17	88,55	88,93	89,31
			Indeks inovasi daerah	Angka	68,67	73,13	75,51	77,96	80,5	81,81	83,14
		Meningkatnya Birokrasi Yang Berintegritas	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP KPK	Indeks	89	90	91,01	92,03	93,07	94,11	95,17

Visi: "TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)"												
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Satuan**	**Baseline**	**Target**						
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	66,98	68,31	69,65	70,99	72,32	73,66	75
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,15	3,25	3,34	3,42	3,51	3,6	3,69
			Survey Penilaian Integritas	poin	72,47	73,78	75,09	76,4	77,71	79,02	80,34

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun secara matang memungkinkan adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi unggulan daerah.

Perencanaan strategis RPJMD bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja pembangunan lima tahunan. Visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029 adalah "Terwujudnya Tapin Maju Dan Beriman (Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis, dan Berkelanjutan)". Untuk mewujudkan visi tersebut, misi kepala daerah dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah.

Sedangkan arah kebijakan RPJMD 2025–2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, program prioritas disusun melalui proses cascading kinerja, dimulai dari visi hingga capaian outcome, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD

a. Strategi

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika

lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Tapin.

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tapin, terdapat tema per tahun yang menjadi fokus dalam pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penguatan landasan transformasi serta mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan per tahun pada Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Gambar III.1.
Tema Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2026-2030

Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adapun penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029

Tema I - 2026	Tema II - 2027	Tema III - 2028	Tema IV - 2029	Tema V - 2030
Penguatan SDM yang Unggul berlandaskan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	**Penguatan tata kelola kelembagaan pemerintah menuju ASN yang profesional, regulasi yang efektif, kinerja yang akuntabel dan digitalisasi pelayanan publik**	**Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar berbasis kewilayahan**	**Pengembangan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) unggulan**	**Perwujudan TAPIN Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis, Maju dan Berkelanjutan**
Strategi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Strategi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Strategi 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT	Strategi 1. Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya	Strategi 1. Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya
Strategi 2. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan	Strategi 2. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan	Strategi 2. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan	Strategi 2. Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan industri kreatif	Strategi 2. Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan industri kreatif
Strategi 3. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan	Strategi 3. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan	Strategi 3. Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan industri kreatif	Strategi 3. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi yang layak bagi masyarakat	Strategi 3. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi yang layak bagi masyarakat
Strategi 4. Peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya pengusaha lokal	Strategi 4. Peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya pengusaha lokal	Strategi 4. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi yang layak bagi masyarakat	Strategi 4. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Strategi 4. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah
Strategi 5. Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur	Strategi 5. Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan	Strategi 5. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Strategi 5. Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis	Strategi 5. Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis

Tema I - 2026	Tema II - 2027	Tema III - 2028	Tema IV - 2029	Tema V - 2030
pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas	publik berbasis penataan ruang yang berkualitas			
Strategi 6. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Strategi 6. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Strategi 6. Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan		
Strategi 7. Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan	Strategi 7. Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan			

b. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tapin 2025–2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tapin. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut.

Tabel III.5
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029

Misi RPJMD	Arah Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang lengkap dan modern serta pengembangan kawasan pendidikan di Tapin Selatan
	Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
	Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
	Penguatan kualitas Jaminan Kesehatan Gratis bagi masyarakat Tapin
	Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM tenaga kesehatan
	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
	Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat kurang mampu dan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial
Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif	Pengembangan Perusahaan Daerah dalam mendukung kemandirian pembangunan daerah
	Peningkatan kapasitas dan kualitas wirausaha muda dan pengusaha lokal serta pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
	Pengembangan produktivitas sektor pertanian peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri kreatif serta pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan
	Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang	Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur perhubungan
	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan
	Peningkatan diversifikasi pangan, pemenuhan air minum layak dan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana	Perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dan peningkatan upaya menjaga dan melestarikan geosites di Kawasan Pegunungan Meratus
	Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim

Misi RPJMD	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Peningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) maupun tenaga kemasyarakatan
	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat
	Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah serta penguatan wawasan kebangsaan masyarakat

c. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapin 2025–2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Tapin tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menguasai teknologi dan informasi, sebagai berikut:

a) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, kompeten dan mampu menguasai IT

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, kompeten, dan mampu menguasai teknologi informasi (IT) menjadi keharusan dalam menghadapi tantangan global. Dalam konteks ini, kecerdasan SDM tidak hanya merujuk pada kemampuan intelektual, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial yang berakar pada nilai-nilai luhur seperti iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengembangan SDM yang cerdas tidak bisa dilepaskan dari pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, karakter, dan akhlak mulia sebagai fondasi utama.

Kemampuan menguasai teknologi informasi menjadi elemen krusial dalam era digitalisasi. SDM yang kompeten harus mampu memanfaatkan IT untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Namun, penguasaan IT tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan jasmani dan rohani, serta integritas moral. Dalam upaya ini, pendidikan dan pelatihan berbasis IT harus dirancang sedemikian rupa agar membangun kesadaran etis, kemampuan kritis, dan semangat inovasi. Hal ini juga harus diimbangi

dengan penguatan karakter, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Masalahnya seringkali program peningkatan SDM hanya terfokus pada penguasaan teknis IT, sementara pengembangan aspek spiritual dan moral kurang mendapat perhatian serius. Padahal, tanpa akhlak mulia dan landasan iman yang kokoh, penguasaan teknologi dapat disalahgunakan atau menjadi destruktif. Oleh karena itu, visi peningkatan kualitas SDM yang mencakup kecerdasan, akhlak mulia, kesehatan, iman, dan penguasaan teknologi harus diwujudkan secara seimbang. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa strategi ini tidak hanya retorika, tetapi terealisasi melalui kebijakan yang terarah, implementasi program yang konsisten, dan pengukuran keberhasilan yang terintegrasi.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang lengkap dan modern serta pengembangan kawasan pendidikan di Tapin Selatan
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif

b) Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya

Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya merupakan strategi penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Di Kabupaten Tapin, pendekatan ini dapat menjadi landasan bagi upaya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas, berakhlak mulia, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui revitalisasi tradisi lokal, penguatan institusi sosial, serta pelestarian kearifan lokal, masyarakat dapat diarahkan untuk mempertahankan identitas budayanya sambil beradaptasi dengan tuntutan zaman. Hal ini bukan hanya menjaga keberlanjutan budaya, tetapi juga memperkuat modal sosial yang diperlukan dalam membangun SDM berkualitas.

Namun, penguatan budaya tidak cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguasaan teknologi. Kabupaten Tapin harus menjadikan pendidikan berbasis karakter sebagai prioritas, mengintegrasikan nilai-nilai religius dan moral dalam kurikulum formal maupun non-formal. Dengan ini, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga integritas moral yang kuat. Di sisi lain, akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai menjadi prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Sumber daya manusia yang sehat, baik secara fisik maupun mental, akan lebih siap menghadapi tantangan global.

Integrasi nilai budaya dengan teknologi modern menjadi tantangan utama. Di era digital, kemampuan menguasai teknologi dan informasi sangat krusial, namun harus tetap diarahkan untuk mendukung pengembangan identitas lokal. Kabupaten Tapin perlu mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan budaya lokal, meningkatkan daya saing ekonomi berbasis komunitas, serta memperluas akses pendidikan berbasis digital. Dengan demikian, kombinasi antara budaya, agama, pendidikan, kesehatan, dan teknologi dapat mewujudkan SDM yang tangguh dan berkarakter,

menjadikan Kabupaten Tapin sebagai daerah yang maju tanpa kehilangan jati dirinya.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda

c) Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan

Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Tapin. Tanpa akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sulit membangun generasi yang sehat jasmani dan rohani. Upaya ini tidak hanya melibatkan peningkatan infrastruktur kesehatan, seperti fasilitas puskesmas dan rumah sakit, tetapi juga mencakup ketersediaan tenaga kesehatan yang profesional di seluruh pelosok daerah. Langkah ini harus diprioritaskan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang sering kali mengalami kesenjangan akses layanan kesehatan. Dengan pendekatan yang inklusif, Kabupaten Tapin dapat memastikan bahwa setiap warganya memiliki dasar kesehatan yang kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Pelayanan kesehatan yang merata dapat mencegah stunting, gizi buruk, dan penyakit kronis, yang semuanya berpengaruh langsung terhadap kapasitas intelektual dan produktivitas individu. Dalam konteks ini, investasi pada pendidikan kesehatan sejak dini menjadi penting. Edukasi mengenai pola hidup sehat, nilai-nilai moral, dan spiritualitas perlu ditekankan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga memiliki kepribadian yang berakhlak mulia dan beriman. Dengan demikian, kualitas SDM dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

Selain itu, penguasaan teknologi dan informasi harus dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi seperti *telemedicine*, aplikasi kesehatan, dan rekam medis digital dapat menjadi solusi inovatif untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Namun, teknologi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan didukung oleh literasi digital yang memadai di kalangan masyarakat dan tenaga kesehatan. Dengan integrasi layanan kesehatan yang merata, pendidikan yang berbasis nilai, dan teknologi yang adaptif, Kabupaten Tapin dapat mewujudkan SDM yang unggul, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga siap bersaing di era global.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas Jaminan Kesehatan Gratis bagi masyarakat Tapin
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM tenaga kesehatan

d) Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan

Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan merupakan langkah strategis yang krusial bagi Kabupaten Tapin untuk menciptakan masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menghambat pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tanpa akses terhadap

pendidikan, kesehatan, dan peluang perbaikan ekonomi rumah tangga, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan struktural. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal maupun global.

Lebih jauh, pengentasan kemiskinan harus dilandasi pada pendekatan yang berorientasi pada pembangunan manusia secara utuh. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas SDM yang cerdas, berakhlak mulia, dan beriman menjadi prioritas utama. Program pengentasan kemiskinan harus mencakup peningkatan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta pendidikan berbasis karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral. Selain itu, upaya ini perlu didukung oleh peningkatan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan gratis atau terjangkau bagi keluarga miskin, sehingga mereka memiliki fondasi fisik dan mental yang kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Selanjutnya, pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan ketepatan sasaran program, baik dalam perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan akses layanan dasar. Dengan DTSEN, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi rumah tangga miskin dan rentan secara lebih akurat, sehingga intervensi yang diberikan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, peningkatan keterampilan kerja, dan akses pembiayaan mikro, benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Pendekatan berbasis data ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga mengurangi potensi tumpang tindih serta memastikan prinsip inklusivitas dan keadilan dalam pembangunan.

Integrasi teknologi dan informasi juga berperan penting dalam upaya ini. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat miskin, misalnya melalui pelatihan keterampilan digital, akses ke platform pemasaran online untuk usaha kecil, atau pengembangan aplikasi layanan sosial yang memudahkan distribusi bantuan. Namun, penguasaan teknologi ini harus disertai dengan penguatan literasi digital, agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dan tidak hanya menjadi konsumen pasif. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan pengentasan kemiskinan, pengembangan SDM, dan pemanfaatan teknologi, Kabupaten Tapin dapat mewujudkan masyarakat yang hidup layak, berkecukupan, dan berdaya saing.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
2. Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat kurang mampu dan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial

Misi 2. Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian pengelolaan perekonomian daerah berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan industri kreatif, sebagai berikut:

a) **Peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya pengusaha lokal**

Peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi elemen strategis dalam mendukung pengembangan UMKM, khususnya pengusaha lokal, di Kabupaten Tapin. Sebagai entitas bisnis yang dikelola pemerintah daerah, Perusda memiliki peran vital dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan UMKM berbasis sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Namun, untuk berfungsi secara optimal, Perusda perlu memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengembangkan model bisnis yang adaptif terhadap kebutuhan UMKM lokal. Tanpa reformasi struktural ini, Perusda berisiko menjadi entitas pasif yang hanya mengelola aset tanpa memberikan dampak signifikan pada perekonomian daerah.

Lebih jauh, Perusda harus memfasilitasi pengusaha lokal dengan akses ke pasar, modal, dan teknologi. Dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, misalnya, Perusda dapat berperan sebagai aggregator yang menghubungkan petani dan nelayan lokal dengan pasar nasional maupun internasional. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur pascapanen, seperti fasilitas penyimpanan dingin atau pusat distribusi, yang memungkinkan produk lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi. Di sektor pariwisata dan industri kreatif, Perusda dapat mendukung promosi destinasi lokal, pengembangan produk khas, serta kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan berdaya saing.

Namun, keberhasilan strategi ini tidak hanya tergantung pada Perusda, tetapi juga pada sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM itu sendiri. Perusda perlu menjalin kemitraan strategis dengan institusi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengusaha lokal, terutama dalam penguasaan teknologi dan inovasi. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Perusda dapat menjadi katalisator kemandirian perekonomian daerah, mendorong UMKM lokal agar tidak hanya bertahan tetapi berkembang menjadi pelaku ekonomi yang kompetitif. Melalui pengelolaan yang profesional dan kolaboratif, Kabupaten Tapin dapat menjadikan sektor unggulan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis lokal.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Perusahaan Daerah dalam mendukung kemandirian pembangunan daerah
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas wirausaha muda dan pengusaha lokal serta pengusaha kecil dan menengah (UMKM)

b) Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih berbasis pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan industri kreatif

Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan kebutuhan Kabupaten Tapin dalam mewujudkan kemandirian pengelolaan perekonomian daerah. Inovasi hijau tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, tetapi juga bagaimana sektor-sektor utama seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif dapat berkembang dengan prinsip keberlanjutan. Misalnya, dalam sektor pertanian, penggunaan teknologi pertanian presisi yang memanfaatkan data dan sensor untuk meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menjadi pilihan yang sangat tepat. Begitu pula dalam sektor peternakan, teknologi hijau dapat digunakan untuk mengelola limbah ternak secara efisien, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kualitas produk peternakan yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, pengembangan sektor perikanan dan pariwisata dengan pendekatan inovasi hijau dapat memperkuat daya saing Kabupaten Tapin dalam pasar global. Dalam perikanan, penerapan teknologi bersih untuk budidaya ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat meningkatkan hasil tangkapan tanpa merusak ekosistem laut. Sementara di sektor pariwisata, pengembangan destinasi wisata berbasis ekowisata yang mengedepankan pelestarian alam dan budaya lokal menjadi sangat relevan dengan tren wisata global yang semakin menghargai keberlanjutan. Pariwisata yang berbasis pada prinsip hijau akan menarik wisatawan yang peduli dengan lingkungan, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Industri kreatif, terutama yang berfokus pada produk-produk ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal, juga dapat menjadi sektor unggulan yang mendukung perekonomian daerah.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih, Kabupaten Tapin perlu mengembangkan infrastruktur yang mendukung serta mengedukasi masyarakat dan pelaku ekonomi tentang pentingnya keberlanjutan. Ini termasuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang teknologi hijau, memberi insentif bagi pelaku usaha yang mengadopsi prinsip ramah lingkungan, dan membangun kerjasama dengan lembaga riset serta sektor swasta untuk mendorong inovasi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan strategi ini, Kabupaten Tapin dapat membangun ekonomi daerah yang tangguh, mandiri, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologis.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan produktivitas sektor pertanian peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri kreatif serta pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan
2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan

Misi 3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas dan pengembangan wilayah dengan memperhatikan pemanfaatan ruang, sebagai berikut:

a) **Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas**

Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas adalah aspek penting untuk memastikan pemerataan pembangunan di Kabupaten Tapin. Tanpa konektivitas yang memadai antara desa, kecamatan, dan pusat kota, pengembangan ekonomi dan pelayanan publik akan terhambat. Koneksi transportasi yang baik, menjadi tulang punggung mobilitas barang dan orang, yang mendukung aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, serta memudahkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang layak sangat krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan memberikan akses kepada perumahan yang sehat dan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik.

Pembangunan infrastruktur tersebut tidak dapat terlepas dari penataan ruang yang berkualitas. Penataan ruang yang baik harus mempertimbangkan potensi dan karakteristik lokal, serta memastikan penggunaan ruang yang efisien dan berkelanjutan. Kabupaten Tapin perlu memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Misalnya, kawasan yang akan dibangun untuk pemukiman atau kawasan industri harus memiliki akses yang mudah tanpa merusak lahan pertanian produktif atau area ekosistem vital. Penataan ruang yang berbasis prinsip keberlanjutan akan menghindarkan terjadinya pertumbuhan permukiman yang tidak terkontrol, yang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan di masa depan.

Pengembangan infrastruktur pelayanan publik yang berkualitas harus mencakup pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemerintah Kabupaten Tapin perlu memastikan bahwa layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi dapat diakses oleh semua warga, tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, pemanfaatan ruang juga harus mendukung pembangunan fasilitas pelayanan publik yang tersebar merata, baik di pusat kota maupun di desa-desa. Pembangunan infrastruktur harus diselaraskan dengan perencanaan wilayah yang inklusif, di mana setiap kawasan memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar yang berkualitas. Dengan strategi pembangunan

infrastruktur yang terpadu, berbasis penataan ruang yang cerdas dan berkelanjutan, Kabupaten Tapin dapat mencapai pemerataan pembangunan yang mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur perhubungan
2. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan

b) Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi yang layak bagi masyarakat

Peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi yang layak bagi masyarakat Kabupaten Tapin sangat terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas. Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah, mengingat pentingnya akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, seperti irigasi yang efisien, jaringan distribusi pangan yang baik, dan akses pasar yang lebih luas, sangat diperlukan. Ketahanan pangan juga harus didorong melalui teknologi pertanian yang ramah lingkungan, yang dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus mempertahankan kualitas lingkungan. Hal ini juga mencakup perbaikan sistem distribusi pangan agar tidak ada daerah yang kesulitan dalam memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan air bersih juga merupakan tantangan besar, terutama di wilayah yang terletak di daerah yang rentan terhadap perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur pengelolaan air, seperti waduk, sistem penyediaan air bersih, dan sanitasi yang efisien, harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah. Kabupaten Tapin perlu memastikan bahwa akses air bersih tidak hanya tersedia di pusat kota, tetapi juga di wilayah pedesaan, yang selama ini sering terpinggirkan dalam distribusi sumber daya ini. Di sinilah peran penataan ruang yang berkualitas menjadi sangat penting, di mana daerah resapan air dan sumber daya alam lainnya harus dilindungi dan dikelola dengan bijak, agar kebutuhan air bagi masyarakat dapat terjaga dalam jangka panjang.

Peningkatan ketahanan energi juga harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tapin, dengan mengintegrasikan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur energi harus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan ruang yang bijaksana, seperti pengembangan pembangkit energi berbasis biomassa atau tenaga surya yang dapat diakses masyarakat pedesaan, dapat menjadi solusi untuk menghadapi krisis energi. Pemerataan pembangunan infrastruktur energi yang melibatkan energi terbarukan ini, bersama dengan peningkatan efisiensi penggunaan energi, akan menciptakan kemandirian energi bagi masyarakat, sekaligus mendukung upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, Kabupaten Tapin dapat mencapai ketahanan pangan, air, dan energi yang

layak, sambil mendorong pembangunan wilayah yang merata dan berbasis pada prinsip keberlanjutan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan diversifikasi pangan, pemenuhan air minum layak dan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat

Misi 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan responsif terhadap ketahanan bencana, sebagai berikut:

a) Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah inti dari upaya mewujudkan ketahanan daerah yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Di Kabupaten Tapin, pembangunan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, yang mencakup penggunaan sumber daya alam secara bijak dan pemeliharaan ekosistem yang ada. Pengelolaan lahan pertanian, peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut tidak merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam yang terbatas. Penataan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan, serta pengurangan konversi lahan secara tidak terkendali, dapat mencegah kerusakan ekosistem yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan potensi bencana.

Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan juga harus diimbangi dengan responsivitas terhadap ketahanan bencana. Kabupaten Tapin berada dalam kondisi geografis yang mungkin rentan terhadap berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus mencakup sistem peringatan dini, infrastruktur yang tahan bencana, serta pemulihan ekosistem yang dapat mengurangi risiko bencana alam. Misalnya, perlindungan terhadap daerah resapan air dan vegetasi hutan yang berfungsi sebagai penahan erosi dapat mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, perencanaan pembangunan yang memperhitungkan potensi bencana akan memastikan bahwa wilayah-wilayah rawan bencana tidak berkembang secara sembarangan, tetapi memiliki mitigasi yang memadai.

Sistem pengelolaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan ketahanan bencana ini harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tapin perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan berbasis ramah lingkungan, seperti insentif untuk usaha yang mengadopsi teknologi bersih, pengelolaan sampah yang efisien, dan perencanaan tata ruang yang mengutamakan perlindungan lingkungan. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya keberlanjutan dan mitigasi bencana harus diperkuat, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kualitas

lingkungan hidup dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dengan cara ini, Kabupaten Tapin tidak hanya menciptakan pembangunan yang menguntungkan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dan sosial terhadap bencana yang tak terduga.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dan peningkatan upaya menjaga dan melestarikan geosites di Kawasan Pegunungan Meratus

b) Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah

Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menghadapi potensi ancaman bencana di Kabupaten Tapin. Ketangguhan ini tidak hanya mencakup kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, tetapi juga membangun sistem yang dapat mengurangi dampak bencana melalui perencanaan yang baik dan pengelolaan risiko yang efektif. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah memperkuat infrastruktur dan sistem peringatan dini yang dapat mengantisipasi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang sering kali terjadi di wilayah tersebut. Infrastruktur yang tahan terhadap bencana seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum harus dibangun dengan standar yang memperhatikan potensi ancaman bencana, sehingga dapat meminimalkan kerusakan dan mempercepat pemulihan setelah bencana terjadi.

Ketangguhan daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, konversi lahan yang tidak terkendali, dan pencemaran, meningkatkan kerentanannya terhadap bencana. Misalnya, konversi hutan menjadi lahan pertanian tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat mengurangi kemampuan alam dalam menahan erosi, yang berujung pada banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, pembangunan yang berfokus pada ketangguhan bencana harus disertai dengan upaya untuk menjaga keseimbangan ekologis. Kabupaten Tapin perlu mengintegrasikan kebijakan perlindungan lingkungan dalam rencana pembangunan, seperti pemeliharaan hutan, pengelolaan daerah resapan air, dan konservasi sumber daya alam yang mendukung ketahanan terhadap bencana alam.

Lebih lanjut, respons terhadap bencana juga harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kerentanannya dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal untuk menghadapi bencana menjadi kunci utama. Pendidikan dan pelatihan mengenai mitigasi bencana, serta penguatan jaringan komunitas untuk saling membantu, harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Infrastruktur dan sistem peringatan dini harus dibarengi dengan penguatan kapasitas sosial dan kesadaran masyarakat akan pentingnya persiapan menghadapi bencana. Dengan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan responsif, serta mengintegrasikan perlindungan lingkungan dalam kebijakan pembangunan, Kabupaten Tapin dapat mengurangi dampak bencana dan memastikan ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim

Misi 5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagai berikut:

a) **Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan**

Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif di Kabupaten Tapin menjadi suatu langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi yang dilakukan harus mencakup aspek struktural, kultural, dan prosedural yang dapat mengubah cara kerja birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih baik. Struktur organisasi yang jelas, tata kelola yang efisien, serta sistem informasi yang terintegrasi dapat mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat proses pelayanan. Pembenahan ini harus melibatkan perubahan budaya kerja aparatur yang berfokus pada kepentingan publik, bukan sekadar tugas administratif, dan meminimalisir praktik-praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah menciptakan pelayanan publik yang prima, yang berarti pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai pelayanan prima, Kabupaten Tapin harus mengintegrasikan sistem pelayanan berbasis teknologi yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Ini termasuk memperkenalkan sistem online untuk pengajuan perizinan, pengurusan dokumen, dan permintaan layanan lainnya yang sebelumnya memerlukan waktu dan biaya tinggi. Di samping itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah juga menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Aparatur yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, pengetahuan yang memadai, dan sikap profesional akan memberikan pelayanan yang lebih memadai dan memenuhi harapan masyarakat.

Keberhasilan implementasi reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada sistem yang ada, tetapi juga pada komitmen dan integritas pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Kabupaten Tapin perlu membangun mekanisme evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa reformasi yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif pada pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan juga sangat penting. Dengan demikian, reformasi birokrasi di Kabupaten Tapin akan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga

dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) maupun tenaga kemasyarakatan
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat
3. Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital

b) Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai dan demokratis

Meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis di Kabupaten Tapin sangat bergantung pada kualitas pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aparatur negara berfungsi secara efisien, adil, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang lebih terbuka dan responsif akan mengurangi potensi ketegangan sosial yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang buruk. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, reformasi birokrasi dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan demokratis, serta mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul.

Di sisi lain, kondusivitas wilayah yang aman dan damai juga sangat dipengaruhi oleh adanya sistem pelayanan publik yang prima dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara adil. Pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat rasa keadilan. Dalam hal ini, reformasi birokrasi harus memastikan bahwa semua kebijakan dan program pemerintah menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Proses pelayanan yang tidak rumit, tanpa praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta penguatan sistem pengaduan publik dapat mendorong masyarakat untuk lebih percaya dan merasa aman dalam berinteraksi dengan aparat pemerintah. Dengan demikian, setiap warga negara akan merasa terakomodasi, dan ketidakadilan yang menjadi potensi gangguan sosial dapat diminimalisir.

Reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima juga harus menciptakan ruang yang cukup bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Pemerintah Kabupaten Tapin perlu menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau bahkan kritik terhadap kebijakan atau pelayanan yang diberikan. Melalui mekanisme ini, masyarakat akan merasa dihargai, dan ikatan sosial yang positif antara pemerintah dan warga akan semakin kuat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya tidak hanya meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga memperkuat kondisi sosial yang damai dan harmonis. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pemerintahan, Kabupaten Tapin dapat

menciptakan suasana yang lebih stabil dan demokratis, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kondusivitas wilayah secara keseluruhan.

Dari sisi keamanan dan ketertiban wilayah, peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah merupakan fondasi penting bagi terwujudnya stabilitas sosial dan keberlangsungan pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pencegahan konflik sosial sejak dini. Dengan situasi yang aman dan tertib, masyarakat dapat melaksanakan aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya secara lebih produktif tanpa rasa khawatir.

Penguatan wawasan kebangsaan masyarakat juga menjadi kunci dalam menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman. Melalui pendidikan karakter, kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, serta partisipasi aktif masyarakat dalam forum kebangsaan, diharapkan tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah serta penguatan wawasan kebangsaan masyarakat

3.2.2 Program - program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029

Program prioritas disusun melalui cascading kinerja yang dimulai dari visi hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Tapin. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah. Program atau proyek strategis yang dapat disusun adalah sebagai berikut.

Tabel III.6
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
20252029 - Terwujudnya Tapin Maju dan BERIMAN (Berintegritas, sejahtERa, Inovatif, agaMis, dan berkelanjutAN) - Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi - Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif - Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang - Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana - Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang unggul			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		
		meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Indeks Pendidikan (poin)		
			Meningkatnya Angka Melanjutkan Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SD) (Kali)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Angka Melanjutkan Pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan (PAUD)	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan pada satuan pendidikan PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualifikasi guru PAUD	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase Pendidik yang bersertifikat Profesi Guru PAUD (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualifikasi guru PNF	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1/D4 PNF (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualifikasi guru SD	Persentase Pendidik yang bersertifikat Profesi Guru SD (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualifikasi guru SMP	Persentase Pendidik yang bersertifikat Profesi Guru SMP (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas pendidik pada satuan pendidikan SD	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1/D4 SD (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas pendidik pada satuan pendidikan SMP	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1/D4 SMP (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan di Taman Makam Pahlawan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan dan Kondisi TMP (Indeks)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Meningkatnya Kualitas Proses pelaksanaan Pembelajaran SD yang sesuai standar	Persentase satuan pendidikan SD yang melaksanakan proses pembelajaran sesuai standar (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas Proses pelaksanaan Pembelajaran SMP yang sesuai standar	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang melaksanakan proses Pembelajaran yang sesuai standar (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SD)	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar yang dikembangkan (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persentase Perpustakaan Yang Terakreditasi (%)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP),	Persentase Perpustakaan Yang Terakreditasi (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Satuan Pendidikan PAUD yang memiliki Sarana Prasarana Sesuai Standar	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dengan Sarana Prasarana yang memenuhi standar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Satuan Pendidikan PNF yang memiliki Sarana Prasarana Sesuai Standar	Persentase Satuan Pendidikan PNF dengan Sarana Prasarana yang memenuhi standar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Satuan Pendidikan SD yang memiliki Sarana Prasarana Sesuai Standar	Persentase Satuan Pendidikan SD dengan Sarana Prasarana yang memenuhi standar (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Satuan Pendidikan SMP yang memiliki Sarana Prasarana Sesuai Standar	Persentase Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SMP) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Supervisi Standar Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pembiayaan pada satuan pendidikan PAUD yang sesuai standar ketentuan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Supervisi Standar Pembiayaan Pendidikan SMP	Persentase Pembiayaan pada satuan pendidikan SMP yang sesuai standar ketentuan (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Supervisi Standar Pembiayaan Pendidikan Non Formal	Persentase Pembiayaan pada satuan pendidikan PNF yang sesuai standar ketentuan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Supervisi Standar Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pembiayaan pada satuan pendidikan SD yang sesuai standar ketentuan (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Menurunnya angka putus Sekolah Dasar	angka putus sekolah SD (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				angka melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Menurunnya angka putus Sekolah Menengah Pertama	Angka putus sekolah SMP (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan (poin)		
			Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit - Meningkatnya Pemenuhan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit - Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik Rumah Sakit - Meningkatnya Kinerja Pelayanan Rumah Sakit - Meningkatnya Kinerja BLUD - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Indeks Kinerja Keuangan Operasional Mutu Pelayanan dan Pemanfaatan bagi masyarakat (Indeks)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar (Dengan Satuan:persen) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Pengaduan yang Terselesaikan (Dengan Satuan:%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pemenuhan SDM sesuai kualifikasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan yang Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Alat Kesehatan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya upaya preventif dan Promotif	Persentase upaya Preventif dan Promotif yang telah dilaksanakan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Menurunnya penyakit tidak menular	Angka Penyakit Tidak Menular (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		menurunnya kemiskinan dan ketimpangan		Rasio Gini (Indeks)		
				Tingkat Kemiskinan ((%))		
			Meningkatnya diversifikasi pangan	Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / terigu (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi masyarakat rentan	Persentase masyarakat rentan penerima layanan rehabilitasi yang menyatakan kebutuhan rehabilitasinya terpenuhi (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya pengawasan keamanan pangan daerah	Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menjangkau dan memfasilitasi layanan sosial kepada masyarakat	Persentase kasus pengajuan masyarakat yang ditindaklanjuti PSKS sesuai SOP (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase kasus sasaran yang berhasil mengakses layanan sosial melalui fasilitasi PSKS (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang kebutuhan dasarnya terpenuhi melalui bantuan tanggap darurat dan pasca bencana (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya perlindungan sosial dasar bagi keluarga miskin, Meningkatnya pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan bagi keluarga miskin dan rentan	Persentase keluarga miskin penerima bantuan sosial yang menyatakan kebutuhan dasarnya terpenuhi (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase keluarga penerima UEP yang memenuhi kriteria keberlanjutan 12 bulan pasca-penyaluran (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase Stok Cadangan Pangan pemerintah (CPP) (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase Stok Cadangan Pangan pemerintah (CPP) (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
		meningkatnya penyerapan tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya Pencari Kerja Lokal yang Terampil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelatihan (Laporan)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Persentase Pencari Kerja Lokal yang Lulus Pelatihan dengan Nilai Baik (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Pencari Kerja yang Berkualitas	Persentase Pencari Kerja yang bersertifikat (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Penerapan Tata Kelola Kerja yang Layak		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		meningkatnya pembangunan masyarakat yang toleran dan religius		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
			Meningkatnya atlit yang mengikuti kejuaraan olahraga prestasi	Persentase Atlit yang mengikuti kejuaraan olahraga prestasi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Atlit yang mengikuti kejuaraan olahraga prestasi	Persentase Atlit yang mengikuti kejuaraan olahraga prestasi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	Persentase peningkatan atlet yang mengikuti	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			olahraga prestasi tingkat kabupaten	kejuaraan olahraga prestasi tingkat kabupaten (%)	KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kwartir Ranting Kepramukaan yang memperoleh pembinaan (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya Kemitraan pemanfaatan sarana prasarana olahraga	Persentase Kerjasama kemitraan terkait sarana prasarana olahraga yang dimanfaatkan (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Kualitas organisasi olahraga Masyarakat, Tradisional & Rekreasi	Persentase organisasi olahraga Masyarakat, tradisional dan rekreasi Penerima hibah yang memenuhi kualifikasi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Kualitas organisasi olahraga Prestasi	Persentase organisasi olahraga prestasi penerima hibah yang memenuhi kualifikasi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan di Taman Makam Pahlawan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan dan Kondisi TMP (Indeks)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Meningkatnya Kualitas SDM tenaga keolahragaan	Persentase Pelatih yang Berkompeten (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Persentase Juri yang Berkompeten (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Persentase Wasit yang Berkompeten (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Pegiat yang mengikuti kejuaraan olahraga Masyarakat, Tradisional dan Rekreasi	Persentase Pegiat yang mengikuti kejuaraan olahraga Masyarakat, Tradisional dan Rekreasi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya Pegiat yang mengikuti kejuaraan olahraga Masyarakat, Tradisional dan Rekreasi dan Meningkatnya Jumlah Event Olahraga rekreasi dan tradisional	Persentase Pegiat yang mengikuti kejuaraan olahraga Masyarakat, Tradisional dan Rekreasi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Peningkatan Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga rekreasi dan tradisional (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berorganisasi terdaftar (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Persentase Pemuda yang Aktif di Masyarakat (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya wirausaha muda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
	Meningkatnya kemandirian ekonomi yang maju, tumbuh, produktif dan berdaya saing			Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				Indeks Daya Saing Daerah(Angka)		
				PDRB Per Kapita(Rp. Juta Per Tahun)		
		meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah		LPE Kategori Industri Pengolahan (%)		
				LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)		
				LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (%)		
				LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		
			Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peminat Potensi Investasi Daerah yang Sesuai Ketentuan (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kebijakan penanaman modal yang terbarukan	Jumlah naskah akademik yang terselesaikan (Angka)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan Penanaman	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Modal di Kabupaten Tapin (%)		
				Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disetujui (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM promosi investasi daerah	Persentase SDM promosi investasi daerah yang bersertifikat (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Peluang Kemitraan Bagi UMKM Dengan Perusahaan	Jumlah UMKM yang Bermitra dengan Perusahaan (Angka)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan	Persentase Potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
	Meningkatnya penataan wilayah dan pemerataan layanan infrastruktur dasar pelayanan publik			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)(Indeks)		
		meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan		Indeks Infrastruktur (Angka)		
			Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase Sambungan Rumah yang terlayani akses air minum layak (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air limbah (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	Persentase kemantapan jalan kabupaten (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pembuangan sampah	Persentase ketersediaan tempat pembuangan sampah yang berkualitas sesuai standar (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Rumah layak huni (RLH) (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung yang berfungsi baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase Bangunan Lingkungan yang berfungsi baik (%)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Terpenuhinya pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	Meningkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana daerah			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)(poin)		
				Indeks Risiko Bencana(Indeks)		
		meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan		Penurunan intensitas emisi GRK ((%))		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		hidup akibat perubahan lingkungan				
			Meningkatknya pengetahuan masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kearifan lokal tentang pengelolaan ladang berpindah	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya (%)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
				Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas (%)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat	Persentase Perda/Perkada memuat sanksi yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, serta Satlinmas	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Satlinmas yang berkompetensi (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase SDM Aparatur yang lulus pengembangan kapasitas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Anggota Satlinmas yang mengikuti pengembangan kapasitas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya luasan RTH di Perkotaan	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya pengelolaan Limbah B3	Persentase Timbulan Limbah B3 yang terkelola (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya pengelolaan limbah cair kegiatan usaha yang memenuhi baku mutu air	persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air (%) (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan	Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Sekolah dengan Kategori Adiwiyata	Persentase Sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya status mutu air pada setiap titik pantau	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Terselesaikanya pengaduan kasus lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
		meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, serta Satlinmas	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Satlinmas yang berkompetensi (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase SDM Aparatur yang lulus pengembangan kapasitas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Anggota Satlinmas yang mengikuti pengembangan kapasitas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Layanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan bencanan pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibum Linmas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Pencegahan Gangguan Trantibum	Persentase Kegiatan/Event/Wilayah berpotensi konflik yang berhasil dicegah (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		
		meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai RB General (poin)		
				Nilai SAKIP (poin)		
				Nilai LPPD (poin)		
				Nilai RB Tematik (poin)		
			Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan - Terlaksananya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil	Persentase Hasil Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			koordinasi - Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan			
				Persentase Hasil Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuaiÂ rekomendasi (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDMr yang ditindaklanjuti sesuaiÂ rekomendasi (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Administrasi kewilayahan	Persentase kesesuaian titik koordinat/batas wilayah sesuai peraturan Dokumen Kewilayahan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya tindak lanjut atas hasilmonitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Persentase Implementasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Implementasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Bidang Ekonomi danÂ Infrastruktur (%)		
			Terlaksananya Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan - Terlaksananya Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase Hasil Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuaiÂ rekomendasi (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Hasil Reviu Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Hasil Reviu Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuaiÂ rekomendasi (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Sesuai dengan ketentuan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan Renja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif) (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan Renja Bidang Sosial dan SDM terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja danÂ PaguÂ Indikatif) (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Hasil Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Terpenuhinya pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berorientasi pada peningkatan kepuasan masyarakat		Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Melakukan integrasi pada seluruh aplikasi layanan administrasi perangkat daerah	Persentase Aplikasi yang sudah terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Memastikan Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Menuju Satu Data Indonesia	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	Persentase permohonan aktivasi identitas kependudukan digital yang diverifikasi (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan	Tingkat Akurasi Data (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya jaringan intra antar perangkat daerah yang dikelola oleh diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra yang dikelola oleh Diskominfo (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya ketersediaan data informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Kompetensi SDM Keamanan Informasi	Persentase SDM yang memiliki sertifikat keamanan informasi (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya Pelayanan Akta Kelahiran secara kolektif	Persentase Permohonan Akta Kelahiran secara kolektif yang diselesaikan standar pelayanan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya pelayanan akta kematian secara kolektif melalui Petugas Desa dan Rukun Kematian	Persentase permohonan akta kematian secara kolektif melalui Petugas Desa dan Rukun Kematian yang diselesaikan tepat waktu (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan perizinan daerah	Persentase sinkronisasi perizinan daerah (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Optimalnya pelayanan penerbitan perizinan berbasis elektronik	Persentase penerbitan perizinan yang berbasis elektronik sesuai ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Penyajian Data Kependudukan yang Tepat Waktu	Persentase Laporan Kependudukan yang Disajikan Tepat Waktu (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Tercapaianya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Terlaksananya Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk Pelayanan Keliling	Persentase Hasil Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk Pelayanan Keliling yang ditindaklanjuti (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Terlaksananya Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk Pelayanan Keliling	Persentase Hasil Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk Pelayanan Keliling yang ditindaklanjuti (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Terlaksananya Koordinasi dengan para stakeholder untuk pelayanan aktivasi Indentitas Kependudukan Digital	Persentase Koordinasi dengan para stakeholder untuk pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang ditindaklanjuti (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Terlaksananya Koordinasi dengan Pengadilan Negeri	Persentase Hasil Koordinasi dengan Pengadilan Negeri yang Ditindaklanjuti (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Sekolah (PAUD/TK/SD/SMP sederajat)	Persentase Hasil Koordinasi dengan pihak sekolah (PAUD/ TK/ SD/ SMP/ Sederajat) yang ditindaklanjuti (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Sekolah (SLTA sederajat)	Hasil Koordinasi dengan pihak sekolah (SLTA sederajat) yang ditindak lanjuti (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Terlaksananya Koordinasi ke Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan Sosialisasi	Persentase Hasil Koordinasi ke Desa/Kelurahan untuk kegiatan sosialisasi yang ditindaklanjuti (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Terlaksananya Koordinasi terkait Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil	Hasil Koordinasi terkait Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil yang ditindaklanjuti (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Terlaksananya Koordinasi terkait Pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil	Hasil Koordinasi terkait pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil yang ditindaklanjuti (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pencatatan Sipil	" Persentase hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti" (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	" Persentase hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang ditindaklanjuti" (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi petugas pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Petugas Pelayanan Pencatatan Sipil yang mendapatkan nilai >90	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai (Orang)		
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi petugas pelayanan pendaftaran penduduk		2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Terlaksananya tindak lanjut pengaduan	Persentase data pengaduan tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Terpenuhinya jasa publikasi berita daerah	Persentase peningkatan jasa publikasi daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Tersedianya data statistik sektoral tepat waktu	Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Permohonan Akta Kematian yang Diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Permohonan Akta Perceraian yang Diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Permohonan Akta Perkawinan yang Diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Permohonan Akta kelahiran yang Diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sesuai Standar Pelayanan	" Persentase Permohonan IKD yang diselesaikan sesuai tepat waktu" (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase pemohon KTP yang diselesaikan tepat waktu (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase pemohon KIA yang diselesaikan tepat waktu (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
		Meningkatnya birokrasi yang berintegritas		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevention (IPKD MCSP) (Indeks)		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
				Survey Penilaian Integritas (poin)		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)		
			Meningkatnya Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dan Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaaan Wajib Pajak yang Menggunakan Alat Perekam Transaksi (APT)	Persentase wajib pajak dan wajib retribusi yang patuh pajak dan retribusi Jumlah Kebijakan Pajak Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase Pengawasan Pajak yang menggunakan Alat Perekam Transaksi (APT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya kuantitas wajib pajak dan Optimalnya Penggunaan Alat Perekam Transaksi (APT)	Persentase Wajib Pajak yang terdaftar dan terverifikasi menggunakan Alat Perekam Transaksi (APT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase peningkatan wajib pajak (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Optimalnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak dan Meningkatnya Pemantauan Alat Perekam Transaksi yang Beroperasi dan Optimalnya pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Alat Perekam Transaksi (APT) yang beroperasi (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase realisasi pendapatan transfer terhadap pendapatan transfer (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Tersedianya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah (Angka)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

3.2.3 Program Strategis Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tapin 2025–2029

Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Tapin dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan Masyarakat.Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan. Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan Program Strategis KDH yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur.

Tabel III.7
Keterkaitan Program Prioritas RPJMD dengan Program Strategis KDH Kabupaten Tapin

No.	Program Strategis KDH	Program Prioritas
1	Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni 1.000 buah rumah dalam program kerja 100 hari dan berkelanjutan sampai dengan tahun 2029	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
2	Jaminan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Kabupaten Tapin ke Puskesmas dan RSUD Datu Sanggul dengan hanya menunjukkan KTP	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Mengupayakan peningkatkan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) Guru Pesantren dan Aparatur Desa (BPD dan Anggota, Kaur, RT & RW)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	Bea siswa bagi santri berprestasi untuk melanjutkan sekolah keluar negeri (Hadralmaut/Timur Tengah) serta bea siswa 1 Sarjana 1 Desa	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5	Santunan kematian bagi masyarakat kurang mampu	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6	Program bantuan untuk masjid sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- berkelanjutan dan santunan untuk Guru Mengaji/TKA/TPA Kaum (Marbot) tempat ibadah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7	Peningkatan jalan dan jembatan serta saluran drainase desa dan perkotaan, sumur air bersih di perdesaan	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No.	Program Strategis KDH	Program Prioritas
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8	Meningkatkan pertanian, Perkebunan, pariwisata, perikanan dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program perekonomian dan pembangunan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
9	Menjadikan Kawasan Terpadu Pusat Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10	Meningkatkan SDM Guru dan Tenaga Kesehatan serta Guru-guru Kemenag	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Program bantuan pelaksanaan kegiatan haul serta kegiatan keagamaan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12	Membina Generasi Muda atau milineal dan pengusaha lokal serta pengusaha kecil dan menengah (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
13	Program Listrik Gratis untuk Tempat Ibadah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Mekanisme implementasi janji program kerja Bupati Kabupaten Tapin yang telah diselaraskan dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, penjabaran visi, misi, dan janji kepala daerah ke dalam RPJMD dan RKPD, sehingga setiap program, kegiatan, dan subkegiatan memiliki indikator kinerja dan target yang terukur. Kedua, penyelarasan kodefikasi dan klasifikasi program/kegiatan sesuai tabel nomenklatur nasional agar memudahkan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Ketiga, penganggaran berbasis kinerja melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) untuk memastikan alokasi APBD tepat sasaran dan selaras dengan standar pelayanan minimal (SPM) serta prioritas daerah. Keempat, monitoring dan evaluasi berkala guna mengukur capaian kinerja dan menyesuaikan strategi bila ditemukan deviasi. Kemudian tantangan utamanya meliputi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, yang menyebabkan tidak semua janji program dapat didanai secara penuh pada tahun berjalan, sehingga memerlukan skala prioritas. Selain itu, sinkronisasi lintas perangkat daerah kadang terhambat oleh perbedaan pemahaman teknis terhadap nomenklatur baru, sehingga dibutuhkan pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM perencanaan dan penganggaran. Koordinasi lintas sektor dengan pemerintah provinsi dan pusat

juga menjadi tantangan, terutama untuk program yang memerlukan dukungan regulasi, pembiayaan, atau infrastruktur skala besar. Di sisi lain, faktor eksternal seperti perubahan regulasi, dinamika ekonomi, dan kondisi darurat (misalnya bencana atau inflasi tinggi) dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan capaian target program. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi adaptif dan fleksibilitas kebijakan agar janji program kepala daerah tetap dapat direalisasikan secara bertahap, konsisten, dan akuntabel.

3.2.4 Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapin terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan

Dukungan Kabupaten Tapin terhadap Program dan Kegiatan Prioritas Gubernur Kalimantan Selatan salah satunya diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam rencana pembangunan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, khususnya pada tahap awal pembangunan trase Banjar – Tapin. Proyek strategis ini memiliki arti penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Kalimantan, memperlancar arus barang dan jasa, serta menurunkan biaya logistik, sehingga mendukung peran Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan. Bagi Kabupaten Tapin, keberadaan ruas jalan lintas tengah ini akan meningkatkan aksesibilitas antar-kecamatan, membuka peluang pengembangan kawasan ekonomi baru, dan mempermudah distribusi hasil pertanian, perkebunan, serta komoditas unggulan daerah ke pasar regional maupun nasional.

Pada tahap awal, dukungan Pemerintah Kabupaten Tapin difokuskan pada sinkronisasi perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur pendukung agar trase jalan dapat terintegrasi dengan jaringan jalan daerah. Pemkab Tapin juga berperan dalam penyediaan data teknis, fasilitasi pembebasan lahan, dan koordinasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lokal untuk memastikan proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan sosial. Selain itu, program pendukung seperti penataan kawasan di sekitar jalur lintas tengah, pengembangan sentra logistik, rest area, dan fasilitas pendukung ekonomi lokal akan dipersiapkan untuk memaksimalkan manfaat jalan tersebut. Dengan dukungan penuh dan sinergi lintas sektor, pembangunan Jalan Lintas Tengah di trase Banjar – Tapin diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Tapin sekaligus memperkuat konektivitas strategis Kalimantan.

3.2.5 Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapin terhadap Program Strategis Nasional (RPJMN)

Dalam RPJMN memiliki delapan prioritas yang memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta proyek strategis nasional.

Pemerintah Kabupaten Tapin diharapkan mampu mendukung penuh implementasi Program Strategis Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), baik dalam hal *Quick Win* maupun program jangka panjang yang lebih strategis. Sebagai bagian integral

dari pembangunan nasional, Kabupaten Tapin berperan aktif dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui berbagai kebijakan dan langkah strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Memahami hal tersebut, berikut beberapa tabel penyelarasan antara Program Strategis nasional dan *Quick wins* yang dikaitkan dengan program pembangunan Kabupaten Tapin yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel III.8
***Quick Win* Nasional dan Dukungan Program Pemerintah Daerah**

	Quick Win Nasional	Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Tapin
1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.	
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.	Program Pengelolaan Pendidikan
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6	Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Jalan
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program pendiidikan dan latihan perkoperasian

Tabel III.9
Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Tapin terhadap Program Strategis nasional

NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN TAPIN
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		3. Sekolah Rakyat	Program Pengelolaan Pendidikan

NO	ProSN (Program Strategis Nasional)	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN TAPIN
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
2	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	Kesehatan untuk semua	1. Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis	
		3. Jaminan Kesehatan Nasional	
		4. Penuntasan TBC	
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	
		4. Makan Bergizi Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		3. Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah, Pro Kehati, Kali Bersih, Indonesia Hijau dan Langit Biru	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

3.2.6 Integrasi rekomendasi sasaran Strategis dan Program KLHS-RPJMD Kabupaten Tapin dengan sasaran RPJMD

Integrasi rekomendasi sasaran strategis dan program dalam KLHS-RPJMD Kabupaten Tapin dengan sasaran RPJMD merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya fokus pada pencapaian target ekonomi dan sosial, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui proses integrasi ini, setiap sasaran RPJMD diperkuat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, mitigasi risiko bencana, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta perlindungan ekosistem daerah. Dengan demikian, integrasi KLHS-RPJMD menjadi instrumen strategis yang menjembatani antara kebutuhan pembangunan jangka menengah dengan komitmen menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga visi pembangunan Kabupaten Tapin dapat terwujud secara inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berikut integrasi antara sasaran dan program rekomendasi KLHS yang tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.10
Keterkaitan Sasaran Strategis dan Program Rekomendasi KLHS

Sasaran Strategis KLHS	Program Rekomendasi KLHS
Meningkatkan Investasi dalam infrastruktur air minum;	Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
Memperkuat Perlindungan sumber daya air;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Meningkatkan infrastruktur dan sumber daya pendidikan;	Program Pengelolaan Pendidikan
Memperkuat pendidikan dasar dan program literasi;	
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga pengajar;	
Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan;	
Memperkuat manajemen sekolah;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan pelibatan orang tua dan komunitas;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Memperkuat infrastruktur & layanan kesehatan;	Program Upaya Kesehatan Perorangan & Masyarakat
Meningkatkan ketersediaan & kualitas pelayanan Kesehatan;	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
Memperkuat layanan kesehatan maternal dan neonatal;	
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan mental;	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran;	
Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi;	Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera
Meningkatkan Manajemen rantai pasokan;	
Memperkuat regulasi dan pengawasan;	Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera
Memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan;	
Memperkuat survey dan pemetaan epidemiologi;	Program Penanganan Kerawanan Pangan
Memperkuat pencegahan & penyuluhan penyakit Menular;	
Melaksanakan pencegahan, pengujian dan penyaringan penularan HIV;	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Memperkuat program pengendalian dan surveilans Kusta;	
Memperkuat program pencegahan & pengendalian Malaria;	

Sasaran Strategis KLHS	Program Rekomendasi KLHS
Memperkuat program pengendalian dan surveilans Malaria;	
Meningkatkan akses perawatan Malaria; Keberlanjutan dan pemantauan pasca-eliminasi;	
Keberlanjutan dan pemantauan pasca-eliminasi;	
Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan;	
Meningkatkan pengembangan karir & kesejahteraan tenaga kesehatan	
Meningkatkan produksi dan akses terhadap pangan bergizi;	
Meningkatkan suplementasi & pemantapan gizi;	
Meningkatkan promosi gaya hidup sehat;	
Meningkatkan layanan konseling upaya berhentiMerokok;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi Masyarakat;	
Memperkuat dukungan sosial dan komunitas;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi;	Program Pemberdayaan Sosial
Mengintegrasikan program pembangunan daerah;	Program Rehabilitasi Sosial
Menetapkan prioritas anggaran;	Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
Meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran;	
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan teknologi;	Program Penempatan Tenaga Kerja
Memperkuat ekonomi lokal dan inklusif;	Program Hubungan Industrial
Memperkuat kapasitas lembaga lokal;	Program Pendaftaran Penduduk
Memperkuat layanan kesehatan;	Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera
Meningkatkan lapangan pekerjaan;	
Meningkatkan pemberdayaan ekonomi & ketenagakerjaan;	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Meningkatkan edukasi pekerja;	
Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas	Program Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah
Memperkuat perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan;	
Meningkatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial;	
Meningkatkan pendidikan inklusif;	
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;	
Meningkatkan akses pelayanan pencatatan sipil;	
Meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	

Sasaran Strategis KLHS	Program Rekomendasi KLHS
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Mengembangkan infrastruktur keuangan;	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatkan edukasi dan literasi keuangan;	
Meningkatkan kerjasama dengan bank;	Program Penempatan Tenaga Kerja
Meningkatkan dukungan untuk kewirausahaan;	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Memperkuat kelembagaan dan jaringan;	
Meningkatkan infrastruktur pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
Mengembangkan destinasi pariwisata;	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Mengembangkan produk wisata;	
Meningkatkan pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif;	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Mengembangkan sumber daya manusia;	
Meningkatkan pendidikan dan pelatihan;	Program Pengembangan UMKM
Meningkatkan keterampilan dan pendidikan berkelanjutan;	Program Hubungan Industrial
Meningkatkan penciptaan lapangan kerja;	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Mengembangkan pasar tenaga kerja;	
Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;	
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas;	
Memperkuat pemasaran dan promosi;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Memperkuat kebijakan dan regulasi pendukung;	Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Perumahan
Meningkatkan infrastruktur dan akses TIK;	
Meningkatkan kualitas layanan;	
Meningkatkan ketersediaan & akses perangkat;	
Meningkatkan integrasi TIK dalam kurikulum pendidikan;	
Meningkatkan pendidikan dan pelatihan TIK untuk masy.;	
Mengembangan profesionalitas untuk guru;	
Meningkatkan literasi digital;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas,	Program Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan
Memperkuat kebijakan dan regulasi pendukung;	

Sasaran Strategis KLHS	Program Rekomendasi KLHS
Mengarusutamakan gender di setiap kebijakan;	Program Pencatatan Sipil
Meningkatkan data dan penelitian gender;	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Meningkatkan penyediaan data yang akurat;	
Meningkatkan literasi digital;	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Meningkatkan transparansi dan keterbukaan;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Memperkuat pencegahan konflik sosial;	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Memperkuat pencegahan kriminalitas;	
Memperkuat regulasi dan pengawasan;	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Memperkuat penegakan hukum;	
Meningkatkan keamanan dan pengawasan;	Program Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masy.;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan layanan konseling;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Memperkuat kebijakan infrastruktur	Program Penempatan Tenaga Kerja
Memperkuat sektor industri dan pertanian;	Program Hubungan Industrial
Mengembangkan ekonomi dan kewirausahaan;	Program Pembangunan Kampung dan Perkampungan
Meningkatkan akses ekonomi;	
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas;	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi;	
Meningkatkan investasi;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masy.;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;	
Meningkatkan pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif;	
Meningkatkan pemerataan pembangunan;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Integrasi program pembangunan daerah;	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi;	
Memperkuat pengawasan dan pengendalian;	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Menetapkan prioritas anggaran;	

Sasaran Strategis KLHS	Program Rekomendasi KLHS
Meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran;	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan & Asistensi
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan pemberian penghargaan dan dukungan teknis;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	
Memperkuat dukungan sosial dan komunitas;	Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan
Memperkuat kebijakan kuota gender;	
Memperkuat kerangka dan penegakan hukum;	Program Perlindungan Perempuan
Meningkatkan akses & kualitas layanan kesehatan reproduksi	Program Perlindungan Khusus Anak
Meningkatkan akses pendidikan & layanan kesehatan	Program Pengendalian Penduduk
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masy.;	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan layanan dukungan korban kekerasan;	Program Perlindungan Perempuan
Meningkatkan layanan korban kekerasan;	Program Peningkatan Peran Partai Politik
Mengembangkan kapasitas tenaga kesehatan;	
Mengembangkan kapasitas perempuan;	
Meningkatkan pelibatan tokoh masyarakat dan agama;	
Meningkatkan pemberdayaan perempuan;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan perlindungan anak perempuan;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi;	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Memperkuat kapasitas lembaga lokal;	
Pemberian insentif dan dukungan teknis;	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Memperkuat kebijakan pengurangan & pemilahan sampah;	
Meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah;	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Mengembangkan ekonomi sirkular;	
Mengembangkan infrastruktur & teknologi pengelolaan Limbah B3	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3
Mengembangkan infrastruktur sanitasi;	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	Program Pengelolaan Persampahan
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	

Sasaran Strategis KLHS	Program Rekomendasi KLHS
Memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi;	Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana
Melakukan pemetaan zonasi risiko;	
Memperkuat kapasitas lembaga lokal;	
Mengembangkan infrastruktur tahan bencana;	
Mengembangkan infrastruktur teknologi;	
Mengembangkan kurikulum dan kapasitas guru;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Menyediakan bantuan kebutuhan dasar;	
Menyediakan dukungan pelayanan kesehatan dan psikososial;	
Menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan khusus;	
Menyediakan pelayanan kesehatan dan psikososial;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Meningkatkan Investasi infrastruktur air minum;	Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM
Memperkuat perlindungan sumber daya air;	
Memperkuat ketahanan pangan;	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Meningkatkan produksi & akses terhadap pangan;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Memperkuat manajemen sekolah;	Program Pengelolaan Pendidikan
Meningkatkan akses, infrastruktur dan kualitas pendidikan;	
Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas sekolah;	
Meningkatkan infrastruktur pendidikan;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan kualitas dan kapasitas Lembaga	
Pendidikan Tenaga Kependidikan;	
Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan;	
Meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan;	
Meningkatkan pelibatan orang tua dan komunitas;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan program khusus untuk guru di daerah terpencil;	

Sasaran Strategis KLHS	Program Rekomendasi KLHS
Meningkatkan program khusus untuk kelompok rentan;	
Meningkatkan program sertifikasi guru;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Memperkuat infrastruktur dan layanan kesehatan;	Program Pemenuhan UKP dan UKM
Meningkatkan ketersediaan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Memperkuat sistem rujukan;	Program Penanganan Kerawanan Pangan
Meningkatkan akses dan ketersediaan nakes;	
Meningkatkan akses dan distribusi vaksin;	Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera
Memperkuat program pencegahan & pengendalian TB	
Meningkatkan akses perawatan TB;	
Memperkuat program layanan konseling upaya berhenti merokok;	
Memperkuat sistem dukungan sosial dan komunitas;	
Meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan pendaftaran;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan kualitas pelayanan imunisasi;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan produksi & akses pangan bergizi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Meningkatkan akses pelayanan pencatatan sipil;	Program Pencatatan Sipil
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan.	
Memperkuat kebijakan dan regulasi tenaga kerja;	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi;	
Memperkuat pemasaran dan promosi;	Program Penempatan Tenaga Kerja
Memperkuat pengawasan dan pengendalian;	Program Pemberdayaan UMKM
Memperkuat pengembangan inovasi dan penelitian;	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Memperkuat prioritas riset strategis;	
Memperkuat sektor industri dan pertanian;	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Meningkatkan akses ekonomi;	
Meningkatkan dukungan keuangan;	Program Pemasaran Pariwisata
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas;	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Meningkatkan infrastruktur ekonomi;	

Sasaran Strategis KLHS	Program Rekomendasi KLHS
Meningkatkan infrastruktur industri;	Program Penyuluhan Pertanian
Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi;	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata;	
Meningkatkan infrastruktur riset;	Program Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatkan investasi;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan;	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;	
Pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif;	
Pemberian penghargaan dan dukungan teknis;	
Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata;	
Meningkatkan pengembangan SDM;	
Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan perlindungan tenaga kerja;	
Meningkatkan produk wisata;	
Meningkatkan produktivitas dan daya saing;	
Meningkatkan program insentif penelitian dan riset;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;	
Memperkuat kebijakan dan regulasi pendukung;	Program Pengembangan Perumahan
Meningkatkan infrastruktur, akses dan kualitas layanan telekomunikasi;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas perangkat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan literasi digital;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Memperkuat penegakan hukum;	Program Pemenuhan UKP dan UKM
Memperkuat sistem dukungan sosial dan komunitas;	Program Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Sosekbud
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	

Sasaran Strategis KLHS	Program Rekomendasi KLHS
Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi;	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Meningkatkan akses ekonomi;	
Memperkuat sektor industri dan pertanian;	Program Pengembangan UMKM
Meningkatkan investasi;	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;	
Meningkatkan pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif;	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas;	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Memperkuat sistem dukungan sosial dan komunitas;	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Meningkatkan akses & layanan kesehatan reproduksi	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Meningkatkan akses terhadap pendidikan	
Meningkatkan akses, ketersediaan dan kualitas layanan KB;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan pelatihan dan pengembangan	
kapasitas tenaga kesehatan;	
Meningkatkan Pelibatan pria dalam KB;	
Meningkatkan pelibatan tokoh masyarakat dan agama	
Meningkatkan pemberdayaan perempuan;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Meningkatkan infrastruktur sanitasi;	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Memperkuat kapasitas lembaga lokal;	Program Penanggulangan Bencana
Memperkuat pengelolaan tata ruang berbasis ketahanan bencana;	
Memperkuat sistem tanggap darurat;	
Meningkatkan kapasitas dan kesiapan masyarakat;	
Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat;	
Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder;	
Meningkatkan pemetaan risiko dan zonasi wilayah;	
Meningkatkan pengembangan infrastruktur tahan bencana;	

Sasaran Strategis KLHS	Program Rekomendasi KLHS
Meningkatkan penggunaan teknologi informasi;	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	
Pendataan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pendataan persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	
Pendataan prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	
Pendataan unmeet need pelayanan kesehatan	
Pendataan pengeluaran untuk layanan pokok sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pendataan penduduk yang hidup dibawah 50% median pengeluaran per kapita	
Pendataan persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pendataan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang	
tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	
Pendataan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	
Pendataan nilai tambah industri kecil terhadap sektor industri	
Pendataan industri kecil dengan kredit	
Pendataan proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	
Koordinasi pembangunan jalur kereta api sebagaimana direncanakan dalam RTRWP Kalimantan Selatan 2023-2042	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pendataan institusi yang berperan dalam Forum Dialog	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	
Pendataan perempuan 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi,dan layanan kesehatan reproduksi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pendataan indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	
Pendataan jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi	
Rujukan Statistik (SIRuSa)	
Pendataan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersertifikat	
Pendataan angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pendataan konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	
Pendataan proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	
Pendataan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sasaran Strategis KLHS	Program Rekomendasi KLHS
Pendataan perempuan 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pendataan anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis	
Pendataan perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	
Pendataan rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan sabun dan air	
Pendataan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	
Pendataan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	
Pendataan insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri	
Pendataan jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	
Pendataan jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	
Pendataan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21	
Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Kehati	
Pendataan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21	
Pendataan jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pendataan penduduk dengan asupan kalori < 1400 kkal/kapita/hari	
Pendataan jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	
Pendataan prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pendataan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kerawanan Pangan	
Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	
Terpadu (RPDAST) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	
Membentuk jaringan informasi sumber daya air	
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	
Meningkatkan penataan kelembagaan sumber daya air	

3.2.7 Integrasi Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Tapin dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kabupaten Tapin, menjadi instrumen penting dalam memastikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong daya saing, inovasi, dan kemandirian ekonomi. Melalui integrasi antara kebijakan IPTEK dengan prioritas RPJMD, Kabupaten Tapin diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas sektor unggulan berbasis riset dan teknologi, memperluas digitalisasi pelayanan publik, serta memperkokoh ekosistem inovasi daerah yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, Rencana Induk dan Peta Jalan ini bukan hanya sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai jembatan strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di era transformasi global. Berikut beberapa rekomendasi sasaran strategis dan fokus pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tapin yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.11
Sasaran Strategis Bidang Pertanian dan Perkebunan Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
Kebijakan dan Infrastruktur pertanian	Pembuatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah	Implementasi kebijakan pengembangan riset dan inovasi di bidang pertanian dan Implementasi kebijakan pengembangan riset dan inovasi di bidang pertanian dan	Inisiasi pengusulan HKI produk unggulan daerah	Optimalisasi pelaksanaan kebijakan berbasis hasil evaluasi Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK.	Integrasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan global dalam daerah dengan kebijakan nasional dan global dalam mendukung pertanian berkelanjutan.
					Evaluasi akhir efektivitas

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
					infrastruktur dan kebijakan untuk perumusan kebijakan jangka panjang.
Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah	Terbentuknya Badan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	Penguatan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi melalui peningkatan SDM	Pengelolaan efisiensi anggaran dan pengembangan proyek pertanian dan perkebunan	Penataan ulang organisasi riset dan inovasi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.	Penilaian kinerja kelembagaan riset dan inovasi serta replikasi model kelembagaan yang berhasil.
				Sertifikasi SDM riset dan inovasi berbasis kompetensi bidang pertanian dan perkebunan.	Pembentukan pusat unggulan riset dan inovasi berbasis potensi lokal
Kemitraan Riset dan Inovasi	Membangun kemitraan riset dan inovasi yang mencakup pengembangan padi varietas unggul, Basis data riset	Pengembangan jaringan kemitraan dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan.	Membangun sistem informasi yang memungkinkan pertukaran data dan informasi antara lembaga riset, petani, dan pemangku kepentingan terkait	Pengembangan sistem integrasi data dan teknologi untuk smart farming terpadu antar sektor (pertanian	Pembentukan konsorsium riset daerah dalam bidang pangan dan ketahanan pangan

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
	pertanian, dan ketahanan pangan		membangun sistem smart farming dan integrasi pertanian dan perikanan	perikanan–peternakan)	
Budaya Riset dan Inovasi Daerah	Peningkatan kesadaran petani terkait dengan praktik pertanian berkelanjutan dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian	Percepatan teknologi dan inovasi kepada petani melalui pelatihan, demonstrasi lapangan, dan penyuluhan.	Adanya program penghargaan dan pengakuan terhadap kelompok tani/individu yang telah melakukan riset dan inovasi pertanian	Pembentukan komunitas petani inovator dan forum riset daerah tahunan	Integrasi budaya riset dalam pendidikan pertanian formal dan non-formal.
				Inovasi berbasis partisipasi masyarakat melalui inkubator inovasi lokal.	Apresiasi daerah terhadap inovator unggul melalui skema insentif dan publikasi ilmiah.
Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah	Pengembangan sistem informasi antara lembaga riset	Manfaatkan teknologi informasi untuk mendukung manajemen pengetahuan dan pengambilan keputusan.	Pengembangan kawasan Agroindustri terpadu	Penguatan kawasan Agroindustri berbasis komoditas unggulan lokal.	Penetapan sistem nasional integrasi riset daerah dan manajemen pengetahuan
Penyelarasan perkembangan global	Pembentukan unit pemantauan trend global	Tersedianya model riset dan inovasi daerah yang mendukung tujuan	1. Membangun kemitraan dan jaringan internasional	3. Pemanfaatan hasil pemantauan tren global	5. Penilaian kontribusi daerah dalam pencapaian

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
	dalam bidang pertanian khususnya dalam bidang Zero Hunger terutama pada sustainable agriculture (SDGs no. 2.4)	Zero Hunger (SDGs no. 2)	dengan lembaga riset/universitas, dan organisasi pertanian global	untuk adaptasi teknologi dan strategi lokal	Zero Hunger dan pertanian berkelanjutan.
			2. Melakukan adaptasi teknologi terkini dalam rangka peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan	4. Penyesuaian kebijakan daerah dengan indikator global seperti SDGs 2 dan Paris Agreement	6. Penyusunan kebijakan jangka panjang berbasis riset global dan kemitraan internasional
Kebijakan dan Infrastruktur peternakan	Pembuatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah bidang peternakan	1. Implementasi kebijakan pengembangan riset dan inovasi di bidang peternakan yang berfokus pada pengembangan pakan ternak unggas dan ruminansia.	Memastikan kebijakan mendukung insentif dan regulasi yang memfasilitasi pengembangan dan adopsi inovasi di tingkat daerah.	Kebijakan mendukung insentif dan adopsi inovasi.	Evaluasi kebijakan dan integrasi dengan kebijakan nasional.
		2. Membangun infrastruktur sumber daya air			

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
		dan sistem pengelolaan lahan yang mendukung produksi pakan ternak.			
Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah	Terbentuknya Badan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	Penguatan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi melalui peningkatan SDM dalam pengelolaan tanaman pakan yang efektif	Mendorong peternak untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ternak.	Penataan ulang organisasi riset.	Penguatan sistem evaluasi kelembagaan berbasis indikator.
Kemitraan Riset dan Inovasi	Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan balai riset/pusat studi peternakan untuk mendukung pengembangan dan distribusi pakan ternak	Memfasilitasi pertukaran informasi dan teknologi antara lembaga riset dan industri pakan dalam pelaksanaan integrasi pertanian-peternakan	Optimalisasi Riset dan pengembangan formula pakan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak unggas dan ruminansia	Penerapan hasil riset dalam produksi pakan massal.	Evaluasi kemitraan dan perluasan jaringan.

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
	yang inovatif dengan pemanfaatan pasokan hijauan dan jerami				
Budaya Riset dan Inovasi Daerah	Peningkatan kesadaran peternak terkait dengan praktik pertanian berkelanjutan dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas ternak	1. Melakukan Uji coba formula pakan secara lapangan dan mengamati dampaknya pada produksi ternak. 2. Melakukan riset pada pengembangan varietas tanaman pakan yang tahan terhadap kondisi lokal dan memiliki nilai gizi tinggi	Memfokuskan pada praktik-praktik inovatif dalam penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi pakan	Platform digital diseminasi inovasi.	Insentif untuk inovator daerah
Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah	Menyediakan program pendidikan dan pelatihan kepada	Pengembangan varietas tanaman pakan tahan kekeringan	Adanya implementasi praktik pertanian berkelanjutan yang dapat meningkatkan	Digitalisasi produksi dan distribusi pakan.	Model kawasan peternakan inovatif dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
	peternak tentang manajemen pakan yang baik		produktivitas dan kesejahteraan ternak		
Penyelarasan perkembangan global	Pembentukan unit pemantauan trend global dalam bidang peternakan dalam penanganan Resolution Consumption and Production khususnya pada bidang sustainable use of natural resources	Membangun kemitraan dengan lembaga riset, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mendukung pengembangan dan penerapan inovasi pakan	Melakukan adaptasi teknologi terkini dalam rangka peningkatan produktivitas dan ketahanan pakan ternak	Integrasi data tren global.	Partisipasi aktif dalam forum internasional.

Tabel III.12
Sasaran Strategis Bidang Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
Kebijakan dan Infrastruktur perikanan	1. Pembuatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Kabupaten Tapin	1. Implementasi kebijakan pengembangan riset dan inovasi di bidang Perikanan dan	1. Evaluasi kebijakan pengembangan riset dan inovasi perikanan dan evaluasi peraturan daerah tentang standarisasi harga komoditas perikanan dan kelautan.	Evaluasi kebijakan kampung perikanan.	Revisi perda untuk mendukung ekonomi biru.
	2. Menyusun peraturan daerah tentang standarisasi harga komoditas perikanan dan kelautan.	2. Implementasi peraturan daerah tentang standarisasi harga komoditas perikanan dan kelautan.	2. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor serta pembangunan kampung-kampung, kampung perikanan air tawar, air payau dan air laut berbasis kearifan lokal.		

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
	3. Pengelolaan dan peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap, dan perikanan budidaya				
Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah	1. Terbentuknya Badan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	Rencana pembangunan sistem logistik pengelolaan produksi ikan, pemasaran dan jasa logistik	Pengembangan sistem logistik ikan, mulai dari penanggung jawab, transparansi, standarisasi, sertifikasi, stabilisasi, dan inovasi.	Pengembangan SDM berbasis industri.	Sistem pelaporan dan evaluasi digital.
	2. Dukungan pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan ikan dan sistem logistik yang terintegrasi				

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
Kemitraan Riset dan Inovasi	Kerjasama Riset dan Inovasi dengan PT dan Badan/Lembaga/ Laboratorium Riset dan Pengujian yang Berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah di bidang perikanan dan kelautan	Kerjasama Riset dan Inovasi dengan PT dan Badan/Lembaga/ Laboratorium Riset dan Pengujian yang Berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah di bidang perikanan dan kelautan	Kerjasama Riset dan Inovasi dengan PT dan Badan/Lembaga/ Laboratorium Riset dan Pengujian yang Berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah di bidang perikanan dan kelautan	Implementasi IoT dan sensor di budidaya.	Kemitraan ekspor berbasis inovasi.
Budaya Riset dan Inovasi Daerah	1. Promosi dan pameran inovasi di bidang perikanan	1. Promosi dan pameran inovasi di bidang perikanan	1. Promosi dan pameran inovasi di bidang perikanan	Festival inovasi dan pelatihan rutin	Kurikulum inovasi di sekolah kejuruan.
	2. Pelatihan budidaya perikanan dengan menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	2. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	2. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam bentuk hasil olahan perikanan mencapai 2,5%		
		3. Pelatihan inovasi pengolahan dan			

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
		pemasaran hasil ikan			
		4. Pembuatan Basis Data Riset dan Inovasi Bidang Perikanan			
Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah	1. Pembangunan kawas an pelabuhan ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP TPI)	1. Pengembangan kawasan pelabuhan ikan dan Tempat	1. Pemanfaatan dan optimalisasi Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI)	Sistem data terpadu TPI dan pelaku usaha.	Kawasan ekonomi perikanan berbasis teknologi
	2. Pengembangan budidaya ikan tangkap dan ikan budidaya.	2. Pelelangan Ikan (PP-TPI) di	2. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.		
	3. Pengembangan inovasi teknologi perikanan budidaya untuk menghasilkan produk benih dan induk yang berkualitas dan unggul	3. Optimalisasi usaha pengolahan sumber daya perikanan melalui peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu,	3. Pengembangan pengemasan produk unggulan bidang perikanan		

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
		keamanan pangan teknologi, kebersihan, dan pengendalian limbah sehingga menghasilkan produk yang terjamin, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.			
			4. Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan metode RAS (Recirculating Aquaculture System) yang merupakan rangkaian teknologi yang diterapkan dalam sistem budidaya intensif dengan menggunakan infrastruktur yang		

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
			memungkinkan pemanfaatan air secara terus menerus (resirkulasi air).		
Penyelarasan perkembangan global	Pembentukan unit pemantauan tren global dalam bidang perikanan khususnya dalam bidang menghapus kemiskinan dan mengakhiri kelaparan (SDGs no. 1a resources for poverty programs dan 2.4 yaitu sustainable agriculture).	Membangun kemitraan dengan lembaga riset, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mendukung pengembangan dan penerapan inovasi di bidang perikanan.	Melakukan adaptasi teknologi terkini dalam rangka peningkatan produktivitas dan ketahanan di bidang perikanan.	Laporan kontribusi terhadap SDGs.	Kerja sama internasional untuk produk laut berkelanjutan.

Tabel III.13
Sasaran Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
Kebijakan dan Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dan Peta Jalan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tapin.	1. Implementasi RIPPARDA dan Peta Jalan Ekonomi Kreatif.	1. Evaluasi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.	Evaluasi dampak kebijakan terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata dan nilai tambah ekonomi kreatif.	Revisi kebijakan dan rencana induk untuk menyesuaikan tren pariwisata dan ekonomi kreatif global.
	2. Penyusunan peraturan daerah tentang standarisasi dan sertifikasi produk ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	2. Pengembangan fasilitas dasar di kawasan wisata prioritas.	2. Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung wisata (akomodasi, sanitasi, transportasi).	Perluasan kawasan wisata prioritas.	
	3. Identifikasi dan penataan kawasan wisata prioritas berbasis alam, budaya, dan agrowisata.	3. Peningkatan akses infrastruktur menuju destinasi wisata utama.			

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah	1. Pembentukan unit riset dan inovasi pariwisata serta ekonomi kreatif di bawah koordinasi BAPPERIDA.	Pengembangan sistem informasi terpadu pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis digital.	Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha melalui pelatihan manajemen destinasi dan desain produk kreatif.	Integrasi data pemasaran dan promosi berbasis big data analytics.	Sistem pelaporan dan evaluasi digital kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
	2. Pemutakhiran database potensi destinasi wisata dan pelaku ekonomi kreatif.				
Kemitraan Riset dan Inovasi	Kerja sama riset dan inovasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan asosiasi industri kreatif terkait pengembangan produk unggulan daerah.	Implementasi hasil riset untuk pengembangan atraksi wisata dan produk kreatif bernilai jual tinggi.	Penguatan kemitraan dengan platform digital dan marketplace nasional.	Ekspansi kemitraan ke level internasional untuk promosi wisata dan produk kreatif Tapin	Kemitraan berkelanjutan untuk ekspor produk kreatif dan paket wisata tematik.
Budaya Riset dan Inovasi Daerah	1. Festival Inovasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tapin.	1. Pameran dan promosi terpadu produk kreatif di tingkat provinsi dan nasional.	Festival budaya tahunan yang terintegrasi dengan pasar kreatif daerah.	Roadshow promosi wisata dan produk kreatif ke kota-	Partisipasi rutin pada pameran dan festival internasional.

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
				kota besar di Indonesia.	
	2. Pelatihan pengemasan dan branding produk kreatif sesuai SNI.	2. Workshop inovasi atraksi wisata berbasis kearifan lokal.			
Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah	1. Pengembangan kawasan wisata terpadu berbasis konsep eco-tourism.	Optimalisasi tata kelola desa wisata dan kawasan kreatif melalui pelatihan dan pendampingan.	Peningkatan kualitas layanan di destinasi wisata berbasis standar internasional.	Pengembangan paket wisata tematik berbasis inovasi (agrowisata, wisata budaya, wisata edukasi).	Evaluasi keterpaduan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah.
	2. Penciptaan desa wisata kreatif sebagai pusat ekonomi masyarakat.				

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	Tahun 2025-2029				
Penyelarasan Perkembangan Global	Pembentukan unit pemantauan tren global di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.	Adaptasi teknologi digital untuk pemasaran (virtual tour, VR/AR).	Penerapan green tourism sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs).	Kemitraan dengan organisasi internasional untuk promosi wisata berkelanjutan.	Laporan kontribusi terhadap pencapaian SDGs sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.2.8 Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapin terhadap Hight Light Intervensi Nasional (RPJMN)

Berdasarkan arah pengembangan kewilayahan dalam RPJMN Kabupaten Tapin masuk pada Lokasi prioritas untuk pengembangan Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu dan Kawasan Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado) yang secara rinci dukungan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar dan tabel sebagai berikut.

Gambar III.2.
***Hight Light* Intervensi RPJMN terhadap Pembangunan Kabupaten Tapin**

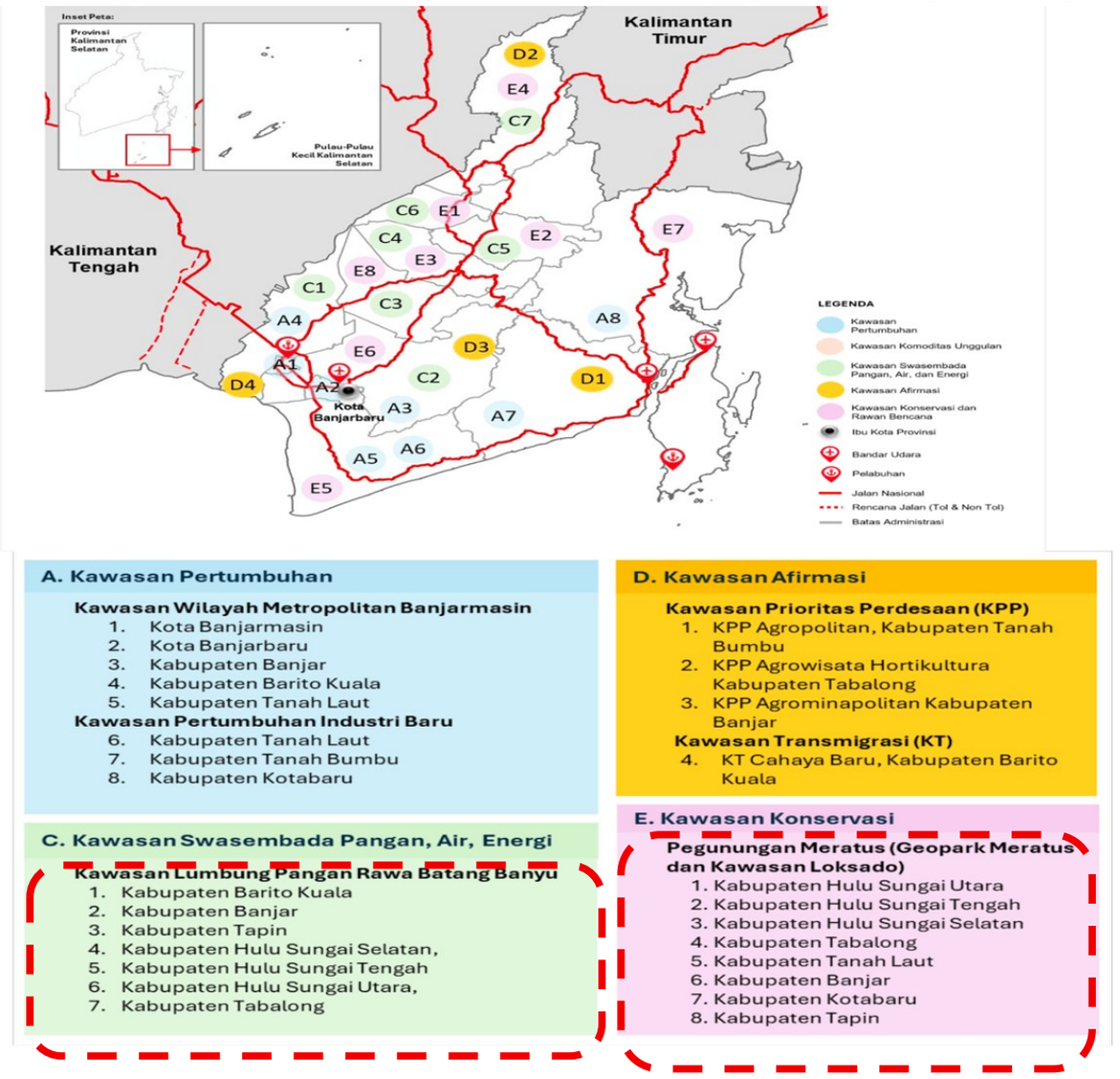

Tabel III.14
Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Tapin terhadap *Hight Light* Intervensi RPJMN

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Program Pemerintah Daerah
C3	Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu: Kabupaten Tapin	Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan yang memperhatikan ketahanan iklim, dengan output:	Kabupaten Tapin (Kec.Tapin Tengah, Piani, Binuang, Hatungun, Tapin Selatan, Salam Babaris, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur)	Program Penyuluhan Pertanian
		Penguatan kapasitas kelembagaan petani.		
		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat.		

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Program Pemerintah Daerah
		Peningkatan adopsi praktik pertanian berkelanjutan.		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Peningkatan adopsi teknologi dan modernisasi pertanian.		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi hulu hingga hilir mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan hewani.		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Penguatan kesehatan hewan mendukung produktivitas ternak		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Peningkatan kualitas input ternak melalui bibit ternak unggul dan pakan ternak		
		Ternak unggas		
		Peningkatan ketersediaan pangan.		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Kawasan lumbung pangan perikanan/sentra perikanan dengan komoditas nila dan kepiting.		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Pengembangan pengairan dan irigasi, dengan output:		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Persiapan peningkatan jaringan irigasi permukaan dan rawa di Kabupaten Tapin.		
E8	Kawasan Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado); E8: Kabupaten Tapin	Pengembangan ekowisata kelas dunia di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial, dengan output:	Kecamatan Piani, Hatungun, dan Tapin Utara.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		Pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado.		
		Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi.		
		Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat.		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

3.2.9 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

A. Pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Tapin

Dalam konteks dalam kebijakan pengembangan Wilayah oleh Pemerintah Daerah, penentuan pusat pertumbuhan juga dapat ditinjau berdasarkan pusat kegiatan yang ada di tingkat Kabupaten. Diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043 bahwa pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Tapin terdiri atas:

1. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** yang berupa Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara dengan fungsi utama untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. **Pusat Pelayanan Kawasan** yang terletak di:
   a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Bakarangan di Kecamatan Bakarangan
   b. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Binuang di Kecamatan Binuang
   c. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan
   d. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Hatungun di Kecamatan Hatungun
   e. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat
   f. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Piani di Kecamatan Piani
   g. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris
   h. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan
   i. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Tengah di Kecamatan Tapin Tengah

   Kawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
3. **Pusat Pelayanan Lingkungan** yang terdiri dari:
   a. Kecamatan Bakarangan
   b. Kecamatan Bungur
   c. Kecamatan Candi Laras Selatan;
   d. Kecamatan Candi Laras Utara
   e. Kecamatan Hatungun
   f. Kecamatan Piani
   g. Kecamatan Salam Babaris
   h. Kecamatan Tapin Selatan

   Kawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Rencana sistem pusat pelayanan Kabupaten Tapin yang tercantum dalam peta Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.3.
Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Tapin

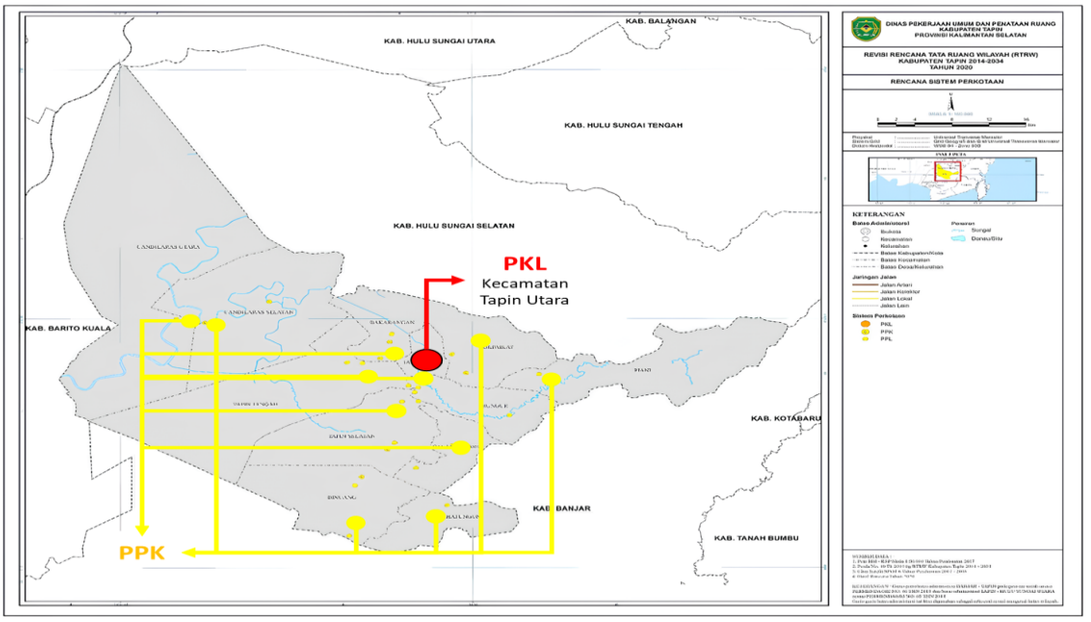

Selain berfokus pada wilayah yang terindentifikasi sebagai pusat kegiatan di atas dimana hal tersebut tercantum dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tapin, fokus pusat pertumbuhan wilayah juga dapat ditinjau berdasarkan pada keberadaan kawasan Strategis Kabupaten Tapin.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Penetapan Kawasan Strategis yang ada di wilayah Kabupaten Tapin meliputi:

1. **Kawasan Strategis Provinsi**
   a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu KSP Rawa Batang Banyu
   b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSP Kawasan Pegunungan Meratus

2. **Kawasan Strategis Kabupaten**
   a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:
      - KSK Rantau Baru
      - KSK Binuang Baru
      - KSK Kawasan Agropolitan Hiyung
      - KSK Kawasan Agropolitan Hatungun
      - KSK Perkotaan Margasari
      - KSK Tambarangan
   b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSK Waduk Tapin.

Berikut merupakan peta potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tapin.

Gambar III.4.
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapin

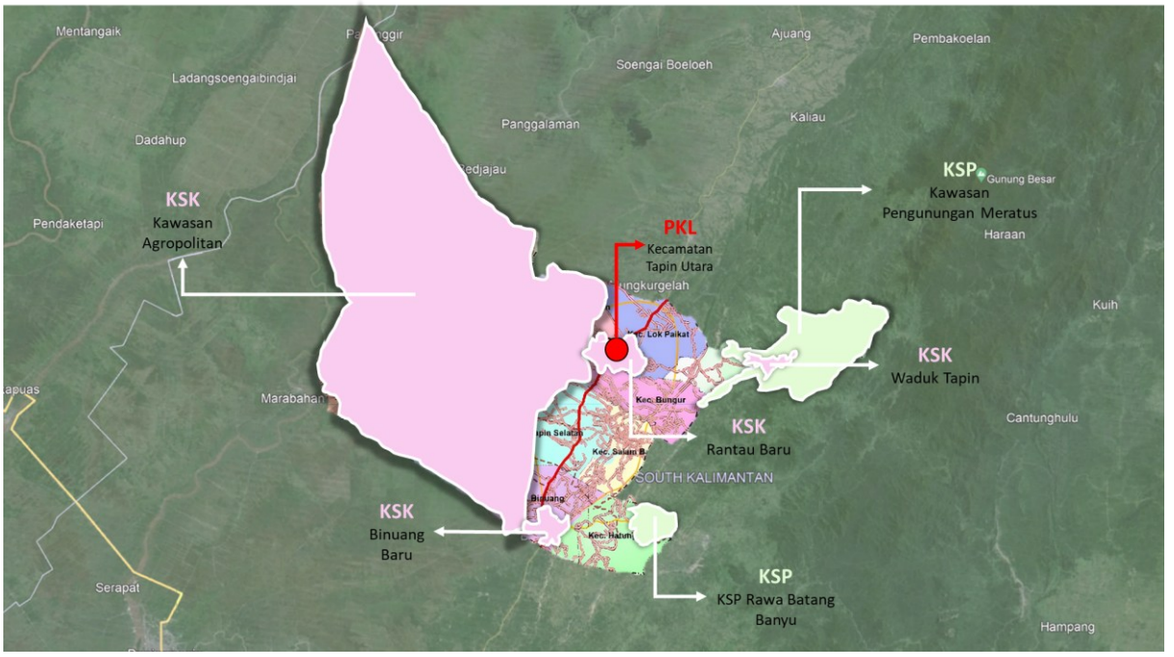

Adanya potensi pusat-pusat pertumbuhan di atas, secara indikatif memberikan arahan mengenai adanya area-area spesifik di Kabupaten Tapin yang dapat memberikan dampak propulsif bagi wilayah Kabupaten Tapin. Baik secara alami melalui dinamika pertumbuhan geografi ekonomi di Kabupaten Tapin, maupun melalui insentif (provinsi dan daerah) karena adanya *metode dedicated plan* berdasarkan kerangka normatif yang tertuang dalam regulasi perencanaan RTRW Kabupaten Tapin.

Ditinjau dari perspektif pusat pertumbuhan di atas, secara geografis, simpul utama pusat pertumbuhan wilayah terkonsentrasi di daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di Kecamatan Tapin Utara. PKL tersebut terfokus pada pelayanan kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara dari segi pusat pertumbuhan berdasarkan penetapan hirarki struktur ruang maupun penetapan simpul kawasan strategis, strategi pengembangan wilayah terfokus pada simpul sektor **agropolitan** yang didukung oleh **sektor industri** serta **perdagangan dan jasa**.

B. Pengembangan wilayah berdasarkan RPJMN 2025–2029

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan terdapat arah pengembangan kawasan pada Kabupaten Tapin sebagai berikut :

1. Kawasan Swasembada Pangan, Air, Energi
   Wilayah Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu meliputi Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, **Kabupaten Tapin**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong yakni dalam peningkatan ketersediaan pangan, dengan output nya yaitu intervensi cetak sawah
2. Kawasan Konservasi
   Wilayah Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado) meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tapin

Gambar III.5.
Pengembangan Kewilayahan di Kalimantan Selatan Pada RPJMN 2025–2029

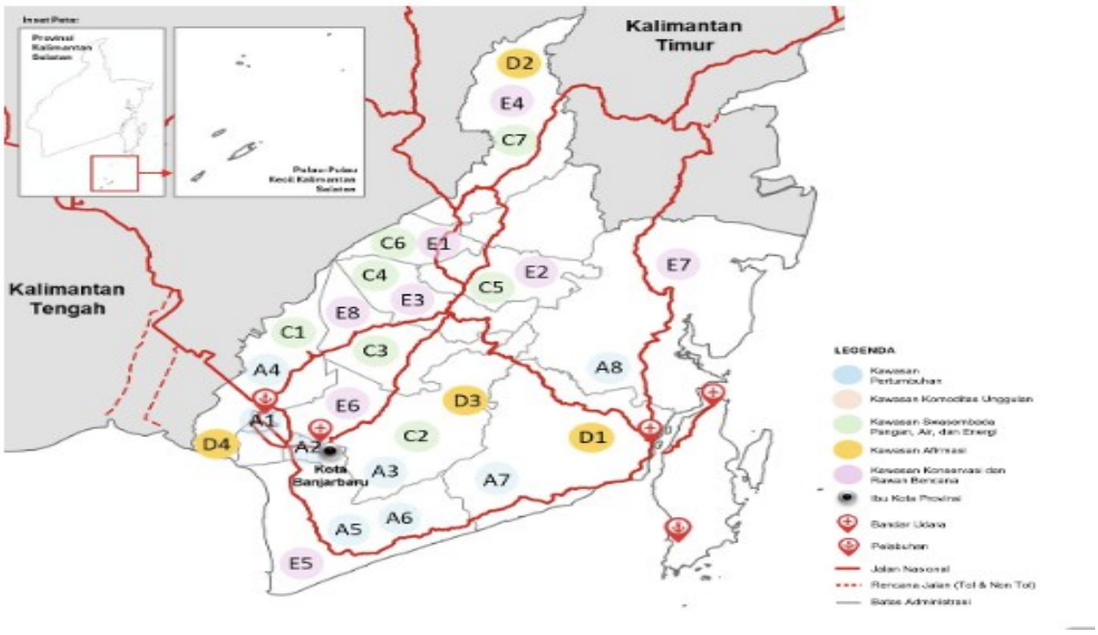

C. Pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam RPJMD 2025–2029

Berdasarkan Perda RTRW Pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah yang berbasis pada potensi lokal, daya dukung lingkungan, dan konektivitas antar kawasan. Strategi pengembangan ini bertujuan memperkuat struktur ekonomi daerah melalui penataan ruang yang terpadu, peningkatan aksesibilitas infrastruktur, serta pengembangan kawasan strategis seperti kawasan industri, kawasan pertanian pangan, kawasan pendidikan, dan kawasan pariwisata. Pendekatan wilayah menjadi landasan utama dalam mengoptimalkan fungsi ruang, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam kerangka ini, RPJMD 2025–2029 menetapkan arah pembangunan wilayah Tapin dengan memperhatikan diferensiasi fungsi kawasan, seperti pengembangan kawasan industri di wilayah utara, pembangunan kawasan pertanian pangan di wilayah barat, serta penguatan infrastruktur dasar dan layanan publik seperti jalan lingkar, sistem pengelolaan air dan sampah, serta pemenuhan energi dan air bersih. Selain itu, pengembangan kawasan pariwisata Geopark Meratus dan kawasan pendidikan di pusat kabupaten menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan sektor unggulan dan peningkatan kualitas SDM. Seluruh inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan wilayah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Gambar III.6.
Pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam RPJMD

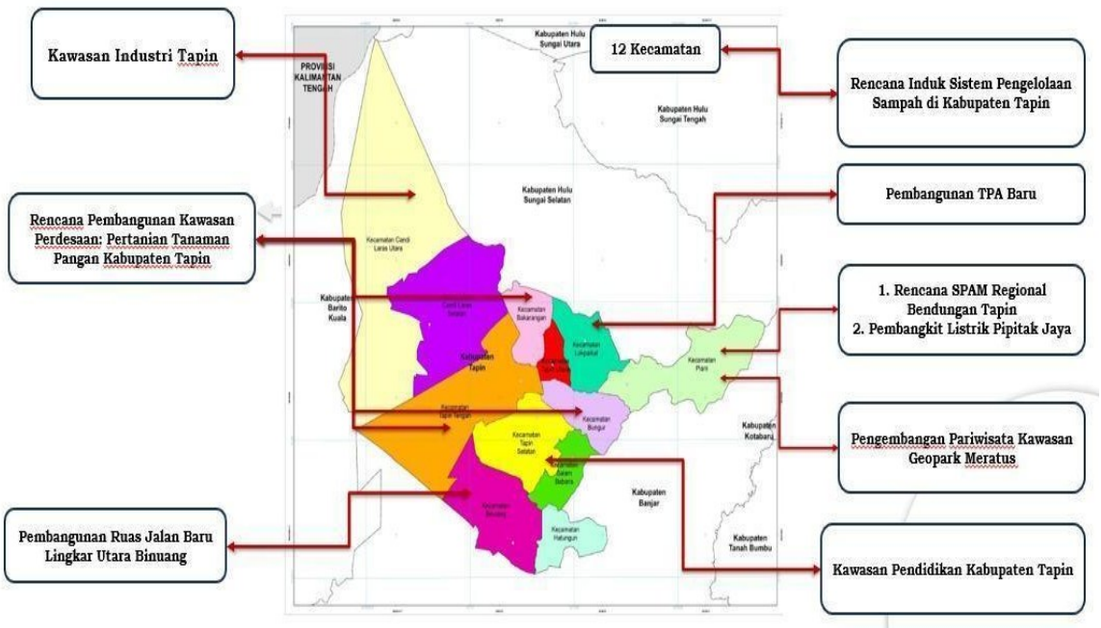

Berdasarkan gambar diatas, arah pengembangan wilayah Kabupaten Tapin berdasarkan potensi kawasan dan rencana infrastruktur strategis yang tersebar di 12 kecamatan. Di bagian utara, direncanakan pengembangan Kawasan Industri Tapin sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berfokus pada sektor manufaktur dan industri pengolahan. Sebelah barat menunjukkan rencana pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian tanaman pangan, yang mencerminkan penguatan sektor agrikultur lokal untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Sementara itu, di sisi barat daya, ditunjukkan adanya rencana pembangunan ruas jalan baru lingkar utara Binuang yang berfungsi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar arus logistik serta mobilitas masyarakat.

Selanjutnya Di bagian timur wilayah, terdapat rencana pembangunan Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi dan TPA baru, sebagai bagian dari peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, ditunjukkan pula pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, yaitu Rencana SPAM Regional Bendungan Tapin dan Pembangkit Listrik Pipitak Jaya, yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan air bersih dan energi di kawasan strategis. Pada bagian selatan, terdapat rencana pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Meratus, yang menonjolkan kekayaan geologis dan potensi ekowisata Tapin. Di area sekitar pusat pemerintahan, selain itu direncanakan pengembangan Kawasan Pendidikan Kabupaten Tapin untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan pelayanan pendidikan. Seluruh arah pengembangan ini disusun secara terintegrasi guna memperkuat pertumbuhan wilayah yang inklusif, berbasis potensi lokal, dan berkelanjutan.

Pengembangan Kawasan Industri Tapin diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan potensi unggulan daerah serta mendukung peran Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan. Kawasan ini akan dikembangkan dengan konsep industri berbasis sumber daya lokal yang berorientasi pada nilai

tambah, efisiensi produksi, dan ramah lingkungan. Fokus utamanya meliputi pengolahan hasil pertanian (beras, jagung, kedelai), perkebunan (karet, kelapa sawit, kelapa), hasil peternakan (sapi potong, unggas), serta potensi mineral dan bahan galian yang dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok (supply chain) dari hulu ke hilir, sehingga Tapin tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen barang jadi dan setengah jadi yang berdaya saing.

Dalam pengembangannya, kawasan industri akan dilengkapi dengan infrastruktur penunjang seperti jaringan listrik andal, ketersediaan air baku, sistem pengelolaan limbah terpadu, kawasan logistik dan pergudangan, akses jalan kolektor dan penghubung ke jalan nasional, serta fasilitas pelabuhan darat (dry port) yang memudahkan pengiriman barang ke pelabuhan laut utama di Banjarmasin maupun ke jalur distribusi antarprovinsi. Sistem distribusi akan dibangun berbasis multi moda transportasi yang menghubungkan jalur darat utama (Jalan Lintas Tengah Kalimantan, jalan provinsi, jalan kabupaten), akses ke jalur sungai, serta integrasi dengan pusat distribusi di Banjarbaru, Banjarmasin, dan wilayah perbatasan Kalimantan Tengah.

Dengan konsep tersebut, Kawasan Industri Tapin akan menjadi simpul ekonomi yang memadukan efisiensi produksi, kemudahan distribusi, dan daya saing produk. Keberadaannya diharapkan mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivitas industri dan perdagangan. Lebih jauh, kawasan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Tapin secara inklusif, memperkuat posisi daerah di jalur logistik regional, dan memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

Memahami bahwa Kabupaten Tapin berada dalam koridor pengembangan kawasan Geopark Meratus yang tepatnya di Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun yang mana «Goa Batu Hapu ini berupa goa karst yang tersusun atas batugamping formasi berai yang berumur 36,5-16 Juta Tahun lalu (Oligosen-Miosen Awal) dan terbentuk pada kondisi laut dangkal (<30 meter). Goa Batu Hapu yang memiliki ketinggian puncak sekitar 120 meter diatas permukaan laut dengan ruangan sangat beaar dan dilengkapi interior goa seperti stalaktit, stalagmit. Adapun goa Batu Hapu dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar III.7.
Geo Park «Goa Batu Hapu»

Sumber: Meratus Geopark Management Board

Geopark Desa Kalayang di Kabupaten Tapin merupakan salah satu aset geowisata yang menyimpan kekayaan alam dan potensi edukasi tinggi. Terletak di kawasan perbukitan dengan formasi batuan unik dan panorama alam yang asri, Desa Kalayang menawarkan kombinasi daya tarik geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya lokal yang masih terjaga. Keberadaan geopark ini tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran tentang sejarah geologi daerah, proses pembentukan bentang alam, serta pelestarian lingkungan. Potensi ini diperkuat oleh keaslian lanskap dan keramahtamahan masyarakat setempat, yang menjadi modal sosial penting untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

Pengembangan Geopark Desa Kalayang diarahkan pada konsep pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan konservasi alam, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal. Infrastruktur pendukung seperti jalur trekking, pusat informasi geologi, fasilitas wisata ramah lingkungan, dan area edukasi akan diprioritaskan untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik pengunjung. Sistem promosi yang terintegrasi dengan destinasi wisata lain di Kabupaten Tapin juga menjadi strategi untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan pengelolaan yang tepat, Geopark Desa Kalayang diharapkan mampu menjadi ikon wisata Tapin yang tidak hanya memperkuat identitas daerah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Gambar III.8.
Geo Park «Desa Kalayang»

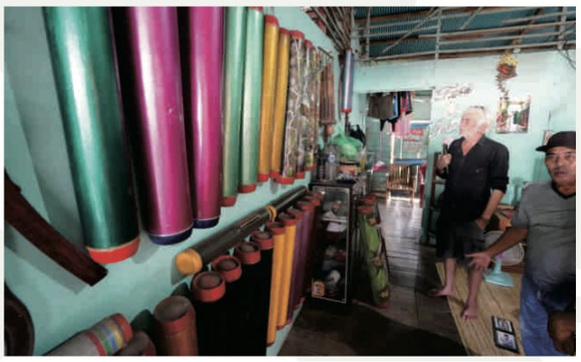

Sumber: Meratus Geopark Management Board

Geopark Masjid Keramat di Kabupaten Tapin merupakan salah satu potensi wisata geologi, sejarah, dan budaya yang unik di Kalimantan Selatan. Kawasan ini tidak hanya menyimpan nilai religius sebagai lokasi Masjid Keramat yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan ziarah, tetapi juga memiliki kekayaan bentang alam yang mencerminkan warisan geologi daerah. Lingkungan di sekitar masjid menyuguhkan panorama alam perbukitan dan formasi batuan yang khas, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus objek edukasi geologi. Keberadaan situs bersejarah ini menjadikan kawasan geopark sebagai perpaduan harmonis antara warisan alam, sejarah, dan spiritual, sehingga berpotensi besar dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan berbasis konservasi dan kearifan lokal. Pengembangan Geopark Masjid Keramat diarahkan untuk mendukung konsep geowisata berkelanjutan yang mengedepankan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan identitas daerah. Infrastruktur penunjang seperti jalur wisata, pusat informasi geologi, fasilitas ibadah, serta area edukasi akan dipadukan dengan paket wisata religi dan budaya. Sistem promosi akan mengangkat narasi sejarah Masjid Keramat, keunikan bentang alamnya, dan nilai-nilai budaya masyarakat Tapin, sehingga menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan pengelolaan yang terencana, Geopark Masjid Keramat tidak hanya menjadi ikon pariwisata Tapin, tetapi juga wahana pembelajaran, pelestarian alam, dan penggerak ekonomi kreatif masyarakat di sekitarnya.

Gambar III.9.
Geo Park «Desa Kalayang»

Sumber: Meratus Geopark Management Board

D. Pengembangan wilayah Kabupaten Tapin berdasarkan arahan Provinsi Kalimantan Selatan

a. Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian, yang dijabarkan secara rinci prioritas sebagai berikut:
   - Pengembangan "Sentra Pangan Lestari", dengan menjadikan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat produksi pertanian, intervensi cetak sawah, dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian dan alih fungsi lahan pertanian.
   - Perwujudan rencana Kawasan Industri Tapin dan mendorong hilirisasi produk pertanian dan perkebunan.
   - Penguatan pertanian berbasis klaster komoditas unggulan didukung pengembangan daerah irigasi rawa/permukaan, pembangunan jalan usaha tani, pasar desa dan gudang logistik hortikultura, serta pemanfaatan teknologi smart farming.
   - Penguatan sistem logistik melalui pembangunan pelabuhan yang terkoneksi dengan jalur distribusi/logistik.
   - Penguatan kelembagaan ekonomi lokal dengan prioritas penguatan koperasi tani, BUMDes, dan kemitraan agribisnis, serta fasilitasi akses pembiayaan KUR dan pembentukan pasar tani digital.
   - Pengembangan UNESCO Global Geopark Meratus melalui pengembangan situs rute utara dengan pelibatan masyarakat lokal, pengembangan amenitas, promosi paket wisata, penguatan UMKM berbasis potensi lokal.
   - Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi).

b. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:

- Penguatan SDM dan vokasi berbasis potensi lokal dengan prioritas pelatihan kerja dan vokasi di sektor pertanian, peternakan, tambang, dan pengolahan pangan.
- Penguatan BLK dan kerjasama dengan politeknik.

c. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana

- Revitalisasi Pertambangan Ramah Lingkungan dengan prioritas Penegakan tata kelola tambang berkelanjutan dan pemanfaatan lahan pascatambang. Reklamasi lahan bekas tambang untuk pertanian atau hutan rakyat.
- Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri
- Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif
- Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Program Perangkat Daerah (PD) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin merupakan penjabaran dari visi, misi, dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan untuk periode waktu tertentu. Setiap PD memiliki program-program spesifik yang dirancang untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Program-program ini biasanya disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Tapin. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Tapin tercermin dalam sejauh mana program-program PD tersebut berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Indikator kinerja yang terukur digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Evaluasi kinerja ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta area-area yang memerlukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin.

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan perencanaan pendanaan pembangunan daerah serta program kerja perangkat daerah di Kabupaten Tapin sebagai bagian dari upaya merealisasikan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas keuangan daerah yang tersedia dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu, belanja daerah merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung berbagai program strategis yang telah dirancang. Program-program tersebut berfokus pada sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta peningkatan layanan publik. Selain itu, pagu indikatif berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan besaran dana yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun dan melaksanakan program tahunan mereka.

Dalam menetapkan target kinerja program di berbagai sektor pemerintahan, pertimbangan utama meliputi kapasitas keuangan daerah serta pagu indikatif yang berasal dari APBD Kabupaten Tapin, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur dan berbasis data, pelaksanaan program pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, upaya pembangunan juga harus sejalan dengan strategi peningkatan daya saing daerah, mengingat Kabupaten Tapin memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketersediaan anggaran menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa setiap program dapat terlaksana dengan optimal.

Selain itu, sistem pendanaan yang terorganisir dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), tetapi juga memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan

dengan efektif. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mendukung implementasi berbagai program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan pendanaan, strategi pembangunan, dan pelaksanaan yang tepat, Kabupaten Tapin diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sesuai dengan perhitungan kerangka pendanaan maka berikut disajikan penjabaran program, indikator, target beserta pagu tiap OPD Tahun 2026 sampai 2030 yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.1.
Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					271.433.905.523		278.721.754.463		302.369.093.541		324.740.800.569		342.887.731.695	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					192.787.946.244		193.787.946.244		193.787.946.244		193.787.946.244		193.787.946.244	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP- Perencanaan KInerja (Nilai)	24,7	24,7	24,7	70.000.000	24,75	70.000.000	24,8	70.000.000	24,85	70.000.000	24,9	70.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	24	24,1	24,15		24,2		24,25		24,3		24,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12,35	12,35	12,4		12,45		12,5		12,55		12,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	15,55	15,55	15,55		15,6		15,65		15,7		15,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	185.238.746.244	100	186.238.746.244	100	186.238.746.244	100	186.238.746.244	100	186.238.746.244	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	232.500.000	100	232.500.000	100	232.500.000	100	232.500.000	100	232.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	100	100	100	7.246.700.000	100	7.246.700.000	100	7.246.700.000	100	7.246.700.000	100	7.246.700.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					75.327.770.779		81.615.619.719		105.262.958.797		127.634.665.825		145.781.596.951	
Meningkatnya Supervisi Standar Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pembiayaan pada satuan pendidikan PAUD yang sesuai standar ketentuan (%)	100	100	100	4.336.414.800	100	4.336.414.800	100	4.336.414.800	100	4.336.414.800	100	4.336.414.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Suvervisi Standar Pembiayaan Pendidikan Non Formal	Persentase Pembiayaan pada satuan pendidikan PNF yang sesuai standar ketentuan (%)	100	100	100	7.251.414.225	100	7.251.414.225	100	7.251.414.225	100	7.251.414.225	100	7.251.414.225	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Menurunnya angka putus Sekolah Menengah Pertama	Angka putus sekolah SMP (Persentase)	0,66	0,65	0,6	1.008.328.300	0,5	1.008.328.300	0,45	11.008.328.300	0,4	22.820.354.050	0,35	25.820.354.050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Angka Melanjutkan Pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (Persentase)	94,58	96	96	172.297.600	96,5	172.297.600	97	172.297.600	97,5	172.297.600	98	172.297.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Satuan Pendidikan SMP yang memiliki Sarana Prasarana Sesuai Standar	Persentase Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SMP) (Persentase)	100	100	100	6.746.806.200	100	6.746.806.200	100	20.194.145.278	100	34.490.377.022	100	43.490.377.022	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Supervisi Standar Pembiayaan Pendidikan SMP	Persentase Pembiayaan pada satuan pendidikan SMP yang sesuai standar ketentuan (Persentase)	100	100	100	5.227.858.300	100	5.227.858.300	100	5.227.858.300	100	5.227.858.300	100	5.227.858.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Proses pelaksanaan Pembelajaran SMP yang sesuai standar	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang melaksanakan proses Pembelajaran yang sesuai standar (Persentase)	100	100	100	2.165.421.550	100	2.165.421.550	100	2.165.421.550	100	2.063.651.150	100	2.063.651.150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Menurunnya angka putus Sekolah Dasar	angka putus sekolah SD (Persentase)	0,62	0,6	0,58	2.600.000.000	0,52	2.600.000.000	0,42	2.600.000.000	0,38	2.600.000.000	0,32	4.600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	angka melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts (Persentase)	92,13	93	93,5		94		94,5		95		95,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Angka Melanjutkan Pendidikan SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	1	2	2	70.660.660	2	70.660.660	2	70.660.660	2	70.660.660	2	70.660.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	di Bidang Pendidikan (SD) (Kali)													
Meningkatnya Satuan Pendidikan SD yang memiliki Sarana Prasarana Sesuai Standar	Persentase Satuan Pendidikan SD dengan Sarana Prasarana yang memenuhi standar (Persentase)	93,24	93,3	94	9.918.794.816	94,5	15.518.794.816	95	15.718.794.816	95,5	12.771.863.690	96	16.918.794.816	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (%)	100	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kesetaraan	Persentase Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kesetaraan (%)	100	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (%)	100	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Suvervisi Standar Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentasi Pembiayaan pada satuan pendididkan SD yang sesuai standar ketentuan (Persentase)	100	100	100	17.449.505.300	100	17.449.505.300	100	17.449.505.300	100	17.449.505.300	100	17.449.505.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SMP	Persentase Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SMP (%)	85	85	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Proses pelaksanaan Pembelajaran SD yang sesuai standar	Persentasi satuan pendididkan SD yang melaksanakan proses pembelajaran sesuai standar (Persentase)	100	100	100	2.347.537.580	100	3.035.386.520	100	3.035.386.520	100	2.347.537.580	100	2.347.537.580	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan (PAUD)	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan pada satuan pendidikan PAUD (%)	5	5	5	15.432.800	5	15.432.800	5	15.432.800	5	15.432.800	5	15.432.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Satuan Pendidikan PAUD yang memiliki Sarana Prasarana Sesuai Standar	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dengan Sarana Prasarana yang memenuhi standar (%)	50	55	60	1.800.000.000	65	1.800.000.000	70	1.800.000.000	75	1.800.000.000	80	1.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Satuan Pendidikan PNF yang memiliki Sarana Prasarana Sesuai Standar	Persentase Satuan Pendidikan PNF dengan Sarana Prasarana yang memenuhi standar (%)	50	85	90	4.202.508.065	92	4.202.508.065	94	4.202.508.065	96	4.202.508.065	98	4.202.508.065	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Proses pelaksanaan Pembelajaran PAUD yang sesuai standar	Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang melaksanakan proses Pembelajaran yang sesuai standar (%)	60	70	80	6.572.568.763	82	6.572.568.763	84	6.572.568.763	86	6.572.568.763	88	6.572.568.763	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Proses pelaksanaan Pembelajaran PNF yang sesuai standar	Persentase Satuan Pendidikan PNF (Kesetaraan) yang melaksanakan proses Pembelajaran yang sesuai standar (%)	50	60	70	3.406.789.020	72	3.406.789.020	74	3.406.789.020	76	3.406.789.020	78	3.406.789.020	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Pondok Pesantren yang bekerjasama dengan PKBM	Persentase Pondok Pesantren yang bekerjasama dengan PKBM (%)	35	36	37	15.432.800	39	15.432.800	41	15.432.800	43	15.432.800	45	15.432.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					561.000.000		561.000.000		561.000.000		561.000.000		561.000.000	
Meningkatnya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SD)	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar yang dikembangkan (%)	0	0	50	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SMP)	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (SMP) yang Dikembangkan (%)	0	100	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					2.547.188.500		2.547.188.500		2.547.188.500		2.547.188.500		2.547.188.500	
Meningkatnya Kualifikasi guru PAUD	Persentase Pendidik yang bersertifikat Profesi Guru PAUD (Persentase)	10,97	18,32	53,57	253.818.850	73,18	253.818.850	75,18	253.818.850	83,75	253.818.850	93,5	253.818.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	70,81	71,4	72		72,25		72,5		72,75		73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualifikasi guru SD	Persentase Pendidik yang bersertifikat Profesi Guru SD (Persentase)	28,96	70	73,15	253.818.850	82,23	253.818.850	86,23	253.818.850	90,18	253.818.850	95,25	253.818.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualifikasi guru SMP	Persentase Pendidik yang bersertifikat Profesi Guru SMP (Persentase)	43,41	70	70,62	253.818.850	80,1	253.818.850	85,75	253.818.850	91,35	253.818.850	98,18	253.818.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Kualifikasi guru PNF	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan	79,48	80	81,81	253.818.850	85,15	253.818.850	89,65	253.818.850	93,34	253.818.850	96,74	253.818.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	berkualifikasi S1/D4 PNF (Persentase)													
Meningkatnya kualitas pendidik pada satuan pendidikan SD	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1/D4 SD (Persentase)	81,36	81,5	84,55	253.818.850	88,23	253.818.850	92,25	253.818.850	95,37	253.818.850	98,12	253.818.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kualitas pendidik pada satuan pendidikan SMP	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1/D4 SMP (Persentase)	93	93,5	94,25	253.818.850	95	253.818.850	96,15	253.818.850	96,75	253.818.850	98,77	253.818.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Persentase)	8,16	33,24	60,13	253.818.850	64,36	253.818.850	69,23	253.818.850	72,24	253.818.850	77,52	253.818.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PNF (Persentase)	22,28	42,29	46,34	253.818.850	50,65	253.818.850	54,45	253.818.850	60,16	253.818.850	64,74	253.818.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SD (Persentase)	61,97	87,96	89,36	253.818.850	91,89	253.818.850	95,98	253.818.850	97,14	253.818.850	99,02	253.818.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP (Persentase)	49,43	79,16	80,1	253.818.850	84,87	253.818.850	88,66	253.818.850	91,02	253.818.850	95,87	253.818.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kualitas pendidik pada satuan pendidikan (PAUD)	Persentase pendidik yang bersertifikat (Profesional) PAUD (%)	10,97	18,32	53,57	9.000.000	73,18	9.000.000	75,18	9.000.000	83,75	9.000.000	93,5	9.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000		210.000.000	
Meningkatnya Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Satuan Pendidikan SMP	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan bahasa dan sastra daerah (%)	0	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Menerapkan Bahasa dan Sastra Daerah (%)	50	60	70	10.000.000	80	10.000.000	90	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					333.229.999.306		343.703.545.824		354.209.259.372		369.866.827.675		387.754.142.631	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					159.640.746.664		167.703.937.725		176.157.403.715		185.007.707.042		193.882.845.424	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	24,6	25	25,5	1.134.231.000	26	1.193.211.012	26,5	1.255.257.984	26,5	1.320.531.399	27	1.385.804.815	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	21,6	23	24		25		26		26,5		27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	10,8	11	11,5		12		12,5		13		13,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	17,75	19	20		20,5		21		22		22,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Tapin Utara - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD (%)	1.351.772.700	1.551.409.978	1.551.409.978	1.551.409.978	1.551.409.978	1.628.409.978	1.551.409.978	1.728.428.978	1.551.409.978	1.828.428.978	1.551.409.978	1.928.428.978	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,75	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	86,78	86,8	86,82	4.281.706.735	86,84	4.504.355.486	86,86	4.738.581.972	86,88	4.984.988.234	86,9	5.231.394.497	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Bakarangan - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,75	80	80	1.393.518.330	80	1.408.518.330	80	1.423.518.330	80	1.438.500.000	80	1.453.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Banua Padang - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,75	80	80	920.794.410	80	978.895.997	80	1.023.637.368	80	1.081.866.847	80	1.146.109.259	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Tambaruntung - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,75	80	80	878.749.062	80	933.259.448	80	976.864.284	80	1.022.448.786	80	1.068.126.663	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Pandahan - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74	80	80	546.743.300	80	579.387.200	80	594.650.250	80	602.821.550	80	615.669.650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)														
Puskesmas Lokpaikat - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,75	80	80	722.687.314	80	738.221.871	80	739.272.350	80	740.205.625	80	740.512.679	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Tambarangan - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,75	80	80	1.196.825.266	80	1.256.666.529	80	1.319.499.858	80	1.385.474.848	80	1.454.748.591	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Salam Babaris - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,75	80	80	791.914.672	80	794.123.240	80	806.000.000	80	816.474.173	80	828.634.804	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Piani - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,75	80	80	467.699.977	80	470.000.000	80	473.000.000	80	476.000.000	80	479.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Binuang - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,75	80	80	2.229.245.437	80	2.333.039.388	80	2.457.598.241	80	2.549.614.660	80	2.646.416.565	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Hatungun - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Meningkatnya Capaian LAKIP (Angka)	74,75	80	80	669.304.557	80	702.769.785	80	737.908.274	80	774.803.688	80	813.543.872	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Baringin - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,75	80	80	1.453.930.718	80	1.459.307.185	80	1.460.307.185	80	1.461.307.185	80	1.465.930.718	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Margasari - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,75	80	80	967.285.806	80	986.467.769	80	1.003.234.300	80	1.022.775.222	80	1.041.736.981	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	140.372.572.102	100	147.671.945.851	100	155.350.887.035	100	163.429.133.161	100	171.507.379.287	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	65,79	75	78	62.128.000	82	65.358.656	85	68.757.306	90	72.332.686	95	75.908.065	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN					154.920.547.552		157.264.554.346		159.249.588.730		165.989.244.318		174.932.705.003	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit - Meningkatnya Pemenuhan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit - Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik Rumah Sakit - Meningkatnya Kinerja Pelayanan Rumah Sakit - Meningkatnya Kinerja BLUD - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar (Dengan Satuan:persen) (%)	60	70	75	90.756.491.656	76	89.490.255.052	77	87.951.048.620	78	90.943.316.658	80	96.102.738.694	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pemenuhan SDM sesuai kualifikasi (%)	55	60	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pengaduan yang Terselesaikan (Dengan Satuan:%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rata-rata Waktu Tunggu Pelayanan yang Sesuai Standar (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Kinerja Keuangan Operasional Mutu Pelayanan dan Pemanfaatan bagi masyarakat (Indeks)	61	70	71		73		74		75		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Alat Kesehatan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar (%)	70	77	77,5		78		78,5		79		79,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	25,2	25,51	25,61		25,81		26,01		26,21		26,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	24,3	24,61	24,81		25,01		25,21		25,41		25,61		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12	12,31	12,51		12,71		12,91		13,11		13,31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	20,25	20,56	20,76		20,96		21,16		21,36		21,56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Tapin Utara - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	1.511.987.090	90	1.601.770.681	100	1.644.238.237	100	1.693.477.492	100	1.749.812.362	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Menurunnya penyakit tidak menular	Angka Penyakit Tidak Menular (Angka)	302	300	298	404.039.100	295	425.049.131	293	447.151.684	291	470.403.572	290	493.655.459	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	5.069.115.100	90	5.332.709.093	100	5.610.009.970	100	5.901.730.489	100	6.193.451.008	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya upaya preventif dan Promotif	Persentase upaya Preventif dan Promotif yang telah dilaksanakan (%)	-	85	87	2.013.141.648	89	2.117.825.010	91	2.227.951.909	93	2.343.805.407	95	2.459.658.906	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	9,23	93	94		95		96		97		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor Kepesertaan JKN	Persentase Hasil Koordinasi Lintas Sektor Kepesertaan JKN yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	42.000.000.000	100	44.184.000.000	100	46.481.568.000	100	48.898.609.536	100	51.315.651.072	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan bayi - Menurunnya Angka Kematian Neonatal	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	9	8,9	8,8	213.869.750	8,7	224.990.976	8,6	236.690.507	8,5	248.998.413	8,4	261.306.320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi(AKB) (Angka)	11	10,9	10,8		10,7		10,6		10,5		10,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Menurunnya Penyakit Menular	Angka Penyakit Menular (Angka)	176	175	172	379.515.150	170	399.249.937	168	420.010.933	165	441.851.502	163	463.692.070	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Bakarangan - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	767.651.200	90	869.263.249	100	953.674.924	100	1.042.863.629	100	1.137.034.354	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Banua Padang - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	1.333.968.836	90	1.400.841.936	100	1.460.732.136	100	1.512.107.136	100	1.562.694.636	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Tambaruntung - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	1.476.695.500	90	1.549.987.000	100	1.615.472.000	100	1.684.095.000	100	1.757.993.571	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Puskesmas Pandahan - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	979.075.700	90	1.028.967.700	100	1.084.262.750	100	1.150.203.850	100	1.214.755.950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Lokpaikat - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	834.543.763	90	878.695.048	100	920.832.461	100	964.981.888	100	1.011.402.360	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Tambarangan - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	1.427.465.277	90	1.510.409.145	100	1.569.559.992	100	1.631.350.241	100	1.695.916.364	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Salam Babaris - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	822.800.000	90	907.350.000	100	969.447.129	100	1.036.500.000	100	1.105.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Piani - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	1.119.254.778	90	1.203.032.150	100	1.273.496.940	100	1.347.467.062	100	1.425.120.518	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Binuang - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	694.000.000	90	744.700.000	100	755.400.000	100	805.100.000	100	856.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Hatungun - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditas	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	60	80	919.595.218	90	972.332.990	100	1.010.824.870	100	1.051.054.047	100	1.093.110.115	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Baringin - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	929.686.586	90	1.053.861.999	100	1.163.540.744	100	1.278.464.767	100	1.395.276.890	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Margasari - Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	1.267.651.200	90	1.369.263.249	100	1.453.674.924	100	1.542.863.629	100	1.637.034.354	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					17.760.000.000		17.773.520.000		17.787.743.040		17.802.705.678		17.817.668.316	
Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	9.260.000.000	90	9.273.520.000	100	9.287.743.040	100	9.302.705.678	100	9.317.668.316	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kuantitas SDM Non ASN Rumah Sakit	Persentase SDM Non ASN rumah sakit sesuai standar (%)	56	80	81	8.500.000.000	83	8.500.000.000	83	8.500.000.000	84	8.500.000.000	85	8.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					266.999.700		280.883.684		295.489.636		310.855.097		326.220.558	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (%)	60	70	80	266.999.700	90	280.883.684	100	295.489.636	100	310.855.097	100	326.220.558	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					641.705.390		680.650.069		719.034.251		756.315.540		794.703.330	
Meningkatnya upaya preventif dan Promotif	Persentase upaya Preventif dan Promotif yang telah dilaksanakan (%)	-	85	87	555.474.590	89	584.359.268	91	614.745.950	93	646.712.739	95	678.679.528	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	92	94		95		96		97		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Tapin Utara - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	9.140.500	95	9.140.500	96	9.140.500	97	9.140.500	98	9.140.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,31	93	94	4.000.000	95	4.000.001	96	4.000.001	97	4.000.001	98	4.000.002	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Bakarangan - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	4.078.000	95	5.000.000	96	6.000.000	97	7.000.000	98	8.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Banua Padang - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	5.650.000	95	5.800.000	96	6.100.000	97	6.400.000	98	6.700.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Tambaruntung - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	3.621.000	95	3.874.000	96	4.184.000	97	4.561.000	98	5.017.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Pandahan - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	923	93	94	5.000.000	95	5.560.000	96	5.972.500	97	6.235.000	98	6.725.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Lokpaikat - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	1.575.000	95	1.650.000	96	1.725.000	97	1.800.000	98	1.875.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Tambarangan - Meningkatnya Pemberdayaan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	6.140.000	95	6.140.000	96	6.140.000	97	6.140.000	98	6.140.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Masyarakat di desa atau kelurahan														
Puskesmas Salam Babaris - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	2.000.000	95	3.000.000	96	4.000.000	97	5.000.000	98	6.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Piani - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	8.000.000	95	8.500.000	96	9.000.000	97	9.500.000	98	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Binuang - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	15.000.000	95	20.000.000	96	21.000.000	97	22.000.000	98	23.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Hatungun - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	1.000.000	95	1.100.000	96	1.200.000	97	1.300.000	98	1.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Baringin - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	3.026.300	95	3.026.300	96	3.026.300	97	3.026.300	98	3.026.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Puskesmas Margasari - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) aktif (%)	92,3	93	94	18.000.000	95	19.500.000	96	22.800.000	97	23.500.000	98	25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					146.097.133.272		154.027.583.425		163.802.724.646		167.898.952.725		175.332.572.595	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.000.000.000		12.069.549.847		13.069.549.847		13.469.549.847		13.969.549.847	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Skor)	72,15	90	91	102.500.000	91	105.977.496	92	155.977.496	92	175.977.496	92	200.977.496	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	96	96	7.298.000.000	96	9.613.972.351	96	10.513.872.351	96	10.593.772.351	96	11.018.672.351	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Penataan Ruang
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	66,16	70	75	2.427.500.000	80	2.177.600.000	85	2.227.700.000	90	2.527.800.000	95	2.577.900.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	-	70	72	172.000.000	74	172.000.000	76	172.000.000	78	172.000.000	80	172.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					24.180.000.000		25.580.000.000		26.180.000.000		26.563.228.078		27.593.847.949	
Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	49	50	51	24.180.000.000	52	25.580.000.000	53	26.180.000.000	54	26.563.228.078	55	27.593.847.949	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur (%)	62	64	66		68		70		72		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					10.450.000.000		11.350.000.000		12.350.000.000		13.350.000.000		14.333.000.000	
Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase Sambungan Rumah yang terlayani akses air minum layak (%)	75,2	76	76,5	10.450.000.000	77	11.350.000.000	77,5	12.350.000.000	78	13.350.000.000	78,5	14.333.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					5.043.000.000		5.343.000.000		6.343.000.000		6.943.000.000		7.243.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan pembuangan sampah	Persentase ketersediaan tempat pembuangan sampah yang berkualitas sesuai standar (%)	100	100	100	5.043.000.000	100	5.343.000.000	100	6.343.000.000	100	6.943.000.000	100	7.243.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					5.421.000.000		5.621.000.000		6.496.141.221		6.996.141.222		7.596.141.221	
Meningkatnya Infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air limbah (%)	88,83	89	89,5	5.421.000.000	90	5.621.000.000	90,5	6.496.141.221	91	6.996.141.222	91,5	7.596.141.221	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					5.970.000.000		7.070.000.000		7.270.000.000		7.370.000.000		7.970.000.000	
Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	40	43	5.970.000.000	45	7.070.000.000	47	7.270.000.000	48	7.370.000.000	50	7.970.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					31.971.983.272		32.171.983.272		33.571.983.272		33.871.983.272		34.871.983.272	
Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung yang berfungsi baik (%)	65	65,5	66	31.971.983.272	66,5	32.171.983.272	67	33.571.983.272	67,5	33.871.983.272	68	34.871.983.272	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					5.825.500.000		6.025.500.000		6.825.500.000		7.225.500.000		8.225.500.000	
Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase Bangunan Lingkungan yang berfungsi baik (%)	22	22,5	23	5.825.500.000	23,5	6.025.500.000	24	6.825.500.000	24,5	7.225.500.000	25	8.225.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					40.887.650.000		42.248.550.306		44.048.550.306		44.228.550.306		45.028.550.306	
Meningkatnya jalan kabupaten dengan kondisi mantap	Persentase kemantapan jalan kabupaten (%)	57,05	67	68	40.887.650.000	69	42.248.550.306	70	44.048.550.306	72	44.228.550.306	73	45.028.550.306	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					478.000.000		498.000.000		578.000.000		611.000.000		731.000.000	
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	100	100	100	478.000.000	100	498.000.000	100	578.000.000	100	611.000.000	100	731.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					5.870.000.000		6.050.000.000		7.070.000.000		7.270.000.000		7.770.000.000	
Meningkatnya penyelengaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR (Rencana Tata Ruang) (%)	100	100	100	5.870.000.000	100	6.050.000.000	100	7.070.000.000	100	7.270.000.000	100	7.770.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					47.436.044.468		50.921.421.843		53.220.071.140		55.517.724.872		58.076.249.072	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.155.404.366		4.459.358.353		4.634.818.771		4.865.452.985		5.091.356.012	
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.106.866.128	100	3.169.314.137	100	3.251.007.279	100	3.333.017.351	100	3.365.347.525	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	80	90	95	883.538.238	100	1.005.044.216	100	1.073.811.492	100	1.152.435.634	100	1.301.008.487	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,3	80	82		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	100	100	100	165.000.000	100	285.000.000	100	310.000.000	100	380.000.000	100	425.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					433.506.349		465.215.894		486.650.245		507.581.110		531.148.105	
Terpenuhinya pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten (%)	100	100	100	433.506.349	100	465.215.894	100	486.650.245	100	507.581.110	100	531.148.105	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3.040.000.000		3.490.000.000		3.690.000.000		3.195.000.000		4.100.000.000	
Meningkatnya penataan kawasan kumuh dan luar kumuh	Persentase penataan kawasan kumuh di bawah 10 Ha dan luar kumuh yang sesuai standar (%)	0,26	2,89	1,25	3.040.000.000	1,5	3.490.000.000	1,75	3.690.000.000	2,25	3.195.000.000	2,5	4.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					24.460.000.000		24.460.000.000		24.920.000.000		24.920.000.000		24.920.000.000	
Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Rumah layak huni (RLH) (%)	90,63	95	95,5	24.460.000.000	96	24.460.000.000	96,5	24.920.000.000	97	24.920.000.000	97,5	24.920.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					15.347.133.753		18.046.847.596		19.488.602.124		22.029.690.777		23.433.744.955	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan	Persentase peningkatan kondisi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang memenuhi standar (%)	57,14	65	66	15.347.133.753	67	18.046.847.596	68	19.488.602.124	69	22.029.690.777	70	23.433.744.955	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					31.803.043.434		33.194.384.312		35.147.736.740		36.962.999.869		38.336.479.648	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.644.042.888		20.994.147.167		21.911.130.403		22.736.393.532		23.291.873.311	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	78,05	80	80	5.994.200	82	6.994.200	82	7.994.200	84	7.994.200	84	7.994.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kinerja TindakLanjut dari Hasil Temuan Pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.634.911.395	100	3.836.918.506	100	3.938.918.506	100	3.935.918.421	100	4.019.085.987	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	1.677.117.239	100	2.891.511.400	100	3.093.360.800	100	3.259.126.080	100	3.620.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	85	85	87	3.970.688.004	89	2.157.136.504	92	2.180.909.458	94	2.410.954.458	95	2.560.954.458	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai SAKIP (Angka)	73,8	81	82	62.000.000	82,5	63.500.000	82,75	65.000.000	83	66.500.000	83,25	68.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	9.053.345.872	100	9.154.673.473	100	9.318.652.457	100	9.378.876.543	100	9.440.689.234	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	1.083.986.178	100	1.141.413.084	100	1.284.794.982	100	1.363.023.830	100	1.434.149.432	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	85	90	92,5	2.156.000.000	95	1.742.000.000	97,5	2.021.500.000	100	2.314.000.000	100	2.141.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5.865.000.000		6.618.000.000		7.191.000.000		7.754.000.000		8.317.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat	Persentase Perda/Perkada memuat sanksi yang ditegakkan (%)	100	100	100	292.500.000	100	315.000.000	100	337.500.000	100	360.000.000	100	382.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, serta Satlinmas	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Satlinmas yang berkompetensi (%)	77	80	82,5	485.000.000	83	520.000.000	83,5	575.000.000	84	620.000.000	85	665.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase SDM Aparatur yang lulus pengembangan kapasitas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perlindungan Masyarakat
	Persentase Anggota Satlinmas yang mengikuti pengembangan kapasitas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	377.500.000	100	418.000.000	100	458.500.000	100	499.000.000	100	539.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penyelenggaraan Trantibum Linmas (%)	0	70	72,5		75		77,5		80		82,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pencegahan Gangguan Trantibum	Persentase Kegiatan/Event/Wilayah berpotensi konflik yang berhasil dicegah (%)	100	100	100	4.710.000.000	100	5.365.000.000	100	5.820.000.000	100	6.275.000.000	100	6.730.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					3.369.000.546		4.452.237.145		4.710.606.337		4.932.606.337		4.982.606.337	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	2.405.092.596	100	3.394.237.145	100	3.629.606.337	100	3.829.606.337	100	3.879.606.337	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	626.909.000	100	632.000.000	100	655.000.000	100	677.000.000	100	677.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencanan pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	336.998.950	100	426.000.000	100	426.000.000	100	426.000.000	100	426.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					925.000.000		1.130.000.000		1.335.000.000		1.540.000.000		1.745.000.000	
Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	Persentase Cakupan Edukasi dan Sosialisasi dalam Penanganan dan Pencegahan Kebakaran (%)	100	100	100	110.000.000	100	140.000.000	100	170.000.000	100	200.000.000	100	230.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Layanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani (%)	100	100	100	815.000.000	100	990.000.000	100	1.165.000.000	100	1.340.000.000	100	1.515.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	11	9	8		7		6		5		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					31.856.054.507		32.493.175.598		33.143.039.109		33.805.899.892		34.482.017.889	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.567.722.279		7.719.076.725		7.873.458.259		8.030.927.425		8.191.545.973	
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	92	92,5	93		93,5		94		94,5		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	93,33	93,5	94		94,5		95		95,5		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan,	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Meningkatnya Capaian LAKIP (Angka)	80	80	81	7.567.722.279	82	7.719.076.725	83	7.873.458.259	84	8.030.927.425	85	8.191.545.973	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.403.868.891		1.431.946.269		1.460.585.194		1.489.796.898		1.519.592.836	
Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menjangkau dan memfasilitasi layanan sosial kepada masyarakat	Persentase kasus pengajuan masyarakat yang ditindaklanjuti PSKS sesuai SOP (%)	100	100	100	1.403.868.891	100	1.431.946.269	100	1.460.585.194	100	1.489.796.898	100	1.519.592.836	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase kasus sasaran yang berhasil mengakses layanan sosial melalui fasilitasi PSKS (%)	-	30	40		50		60		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					5.762.497.599		5.877.747.551		5.995.302.502		6.115.208.552		6.237.512.723	
Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi masyarakat rentan	Persentase masyarakat rentan penerima layanan rehabilitasi yang menyatakan kebutuhan rehabilitasinya terpenuhi (%)	100	100	100	5.762.497.599	100	5.877.747.551	100	5.995.302.502	100	6.115.208.552	100	6.237.512.723	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					16.692.395.492		17.026.243.402		17.366.768.270		17.714.103.636		18.068.385.708	
Meningkatnya perlindungan sosial dasar bagi keluarga miskin, Meningkatnya pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan bagi keluarga miskin dan rentan	Persentase keluarga miskin penerima bantuan sosial yang menyatakan kebutuhan dasarnya terpenuhi (%)	-	90	91	16.692.395.492	92	17.026.243.402	93	17.366.768.270	94	17.714.103.636	95	18.068.385.708	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase keluarga penerima UEP yang memenuhi kriteria keberlanjutan 12 bulan pasca-penyaluran (%)	-	75	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					388.588.278		396.360.044		404.287.244		412.372.989		420.620.449	
Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang kebutuhan dasarnya terpenuhi melalui bantuan tanggap darurat dan pasca bencana (%)	100	100	100	388.588.278	100	396.360.044	100	404.287.244	100	412.372.989	100	420.620.449	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					40.981.968		41.801.607		42.637.640		43.490.392		44.360.200	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan di Taman Makam Pahlawan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan dan Kondisi TMP (Indeks)	100	100	100	40.981.968	100	41.801.607	100	42.637.640	100	43.490.392	100	44.360.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					10.841.634.169		11.430.140.168		11.932.912.542		12.459.512.257		13.011.149.277	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.736.805.414		7.780.140.168		7.952.912.542		8.059.512.257		8.191.149.277	
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	90	100	100	1.358.000.000	100	1.373.000.000	100	1.426.000.000	100	1.469.000.000	100	1.523.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	90	90	90	1.542.000.000	90	1.565.000.000	90	1.663.000.000	90	1.710.000.000	90	1.762.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	18	18	18,5	61.400.000	19	64.600.000	19,5	68.800.000	20	73.000.000	20,5	78.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	10,8	15	15		15		15		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	21,3	22	25		25		25		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Nilai Komponen AKIP- Perencanaan KInerja (Nilai)	23,1	25	25		25		25		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut dari Hasil Temuan Pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	90	100	100	4.775.405.414	100	4.777.540.168	100	4.795.112.542	100	4.807.512.257	100	4.827.949.277	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					30.000.000		50.000.000		80.000.000		150.000.000		120.000.000	
Meningkatnya Kualitas Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Persentase Perusahaan yang menyusun Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro (%)	0	0	10	30.000.000	12	50.000.000	13	80.000.000	14	150.000.000	15	120.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro (Dokumen)	1	0	0		0		0		1		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.192.387.200		1.350.000.000		1.450.000.000		1.650.000.000		1.800.000.000	
Meningkatnya Pencari Kerja Lokal yang Terampil	Persentase Pencari Kerja Lokal yang Lulus Pelatihan dengan Nilai Baik (%)	69	75	76	1.192.387.200	77	1.350.000.000	78	1.450.000.000	79	1.650.000.000	80	1.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelatihan (Laporan)	10	12	12		12		12		12		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.267.777.405		1.550.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.950.000.000	
Meningkatnya Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)	70	74	74,5	16.000.000	75	18.000.000	75,5	20.000.000	76	22.000.000	76,5	24.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang memanfaatkan informasi pasar kerja (%)	88,03	89	89,25	290.000.000	89,5	320.000.000	89,75	340.000.000	90	360.000.000	90,25	380.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Mendapatkan Pelindungan (%)	0	10	12	327.000.000	14	341.000.000	16	355.000.000	18	371.000.000	20	385.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pencari Kerja yang Berkualitas	Persentase Pencari Kerja yang bersertifikat (%)	80,2	82	82,5	584.777.405	83	808.500.000	83,5	920.000.000	84	980.000.000	84,5	1.091.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya Penyandang Disabilitas yang Bekerja	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja (%)	0	5	7	50.000.000	9	62.500.000	11	65.000.000	13	67.000.000	15	70.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					614.664.150		700.000.000		750.000.000		800.000.000		950.000.000	
Meningkatnya Penerapan Tata Kelola Kerja yang Layak														
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial	Persentase Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial (%)	87,5	100	100	331.028.100	100	331.311.350	100	331.594.600	100	331.877.850	100	332.161.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya Penerapan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	40,54	43,24	45,94	283.636.050	48,64	368.688.650	51,35	418.405.400	54,05	468.122.150	56,76	617.838.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					6.656.850.618		7.018.198.022		7.326.904.303		7.650.240.766		7.988.950.332	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.858.281.379		5.121.998.787		5.347.297.817		5.583.274.195		5.830.470.128	
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.386.986.624	100	3.570.839.159	100	3.727.908.036	100	3.892.420.707	100	4.064.755.171	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	80	81	82	1.248.563.581	83	1.316.338.151	84	1.374.239.319	85	1.434.884.531	86	1.498.413.135	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	85,77	85,82	85,84	210.233.872	85,86	221.645.794	85,88	231.395.226	86	241.606.703	86,05	252.303.688	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	27	27,05	27,06	12.497.302	27,08	13.175.683	27,09	13.755.236	27,1	14.362.254	27,11	14.998.134	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	24,3	24,35	24,37		24,4		24,47		24,5		24,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	13,5	13,55	13,56		13,58		13,59		14		14,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	18,25	18,25	18,31		18,34		18,35		18,4		18,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					500.261.660		527.416.880		550.616.127		574.914.830		600.368.819	
Tersedianya desa modeling Pengarusutamaan Gender	Jumlah desa yang menjadi model Pengarusutamaan Gender (Desa)	1	1	1	233.073.000	1	245.724.676	1	256.533.256	1	267.854.075	1	279.713.143	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam bidang Ekonomi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	52,67	52,87	53	267.188.660	53,1	281.692.204	53,15	294.082.871	53,2	307.060.755	53,25	320.655.676	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					124.996.850		131.781.933		137.578.565		143.649.911		150.009.920	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasaan terhadap Perempuan termasuk TPPO (Rasio)	0,12	0,12	0,11	124.996.850	0,1	131.781.933	0,09	137.578.565	0,08	143.649.911	0,05	150.009.920	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					497.896.880		524.923.737		548.013.318		572.197.160		597.530.827	
Menurunnya Angka Pernikahan Anak	Prosentase Pernikahan Anak (%)	8,74	8,73	7,5	162.648.660	6,75	171.477.561	5,5	179.020.266	4,75	186.920.435	3,5	195.196.219	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kualitas Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Puspaga (Indeks)	87,59	87,59	87,61	335.248.220	87,62	353.446.176	87,63	368.993.052	87,64	385.276.725	87,65	402.334.608	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Skor Standarisasi Layanan Puspaga (Skor)	274	275	277		279		281		283		285		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					92.740.900		97.775.065		102.075.852		106.580.462		111.299.244	
Meningkatnya Kualitas Data Gender dan Anak	Persentase data terpilah Anak yang sesuai dengan petunjuk teknis (%)	100	100	100	92.740.900	100	97.775.065	100	102.075.852	100	106.580.462	100	111.299.244	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase data terpilah gender yang sesuai dengan petunjuk teknis (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					394.984.649		416.425.220		434.742.326		453.927.517		474.024.868	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60	60	61	44.608.610	62	47.030.056	63	49.098.745	64	51.265.474	65	53.535.221	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tersedianya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI)	Persentase Perusahaan yang tergabung dalam APSAI (%)	30	30	34	12.781.000	36	13.474.779	38	14.067.488	40	14.688.287	42	15.338.601	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Tempat Penitipan Ramah Anak	Persentase Tempat Penitipan Anak yang Tersandard (%)	50	50	50	12.070.843	66	12.726.073	66	13.285.849	100	13.872.154	100	14.486.334	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Fasilitas Ibadah Ramah Anak	Persentase Fasilitas Ibadah yang Ramah Anak (%)	1,5	1,5	2,5	12.070.843	3	12.726.073	3,5	13.285.849	4	13.872.154	4,5	14.486.334	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Fasilitas Pendidikan Ramah Anak	Persentase Sekolah Ramah Anak (%)	32,06	40,12	48,18	179.764.510	56,25	189.522.493	64,31	197.858.932	72,37	206.590.452	80,44	215.737.114	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Layanan Informasi Layak Anak	Persentase Layanan Informasi Layak Anak (%)	10	10	12	12.070.843	13	12.726.073	14	13.285.849	15	13.872.154	16	14.486.334	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Partisipasi Anak dalam Pembangunan	Persentase forum anak yang aktif (%)	4,76	11,9	15,87	63.242.400	19,84	66.675.326	23,81	69.608.144	27,78	72.679.953	31,75	75.897.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Hak Sipil dan Kebebasan Anak	Persentase anak yang terlayani hak sipil dan kebebasannya (%)	50	53	58	58.375.600	63	61.544.347	68	64.251.470	72	67.086.889	74	70.057.118	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Hasil survey kebebasan anak dalam berpendapat (Laporan)	50	51	52		53		54		55		56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					187.688.300		197.876.400		206.580.298		215.696.691		225.246.526	
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	80	81	82	187.688.300	83	197.876.400	84	206.580.298	85	215.696.691	86	225.246.526	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.324.373.613		7.721.955.541		8.061.617.685		8.417.377.066		8.790.051.108	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.000.911.153		5.005.697.122		5.255.981.977		5.518.781.077		5.794.720.132	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	81,95	83	84	70.295.800	85	73.810.590	86	77.501.120	87	81.376.175	88	85.444.984	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.120.254.151	100	3.121.525.331	100	3.277.601.598	100	3.441.481.677	100	3.613.555.762	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	41	78	79	1.449.346.800	80	1.449.346.799	81	1.521.814.136	82	1.597.904.846	83	1.677.800.090	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	100	100	100	361.014.402	100	361.014.402	100	379.065.123	100	398.018.379	100	417.919.296	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					0		288.540.921		268.450.420		246.469.523		222.516.275	
Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase Stok Cadangan Pangan pemerintah (CPP) (%)	25	15	15	0	15	288.540.921	15	268.450.420	15	246.469.523	15	222.516.275	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.923.140.442		2.019.297.465		2.120.262.339		2.226.275.455		2.337.589.226	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya diversifikasi pangan	Persentase kenaikan konsumsi bahan pangan non beras / terigu (%)	10	10	10	921.786.142	10	967.875.449	10	1.016.269.222	10	1.067.082.683	10	1.120.436.816	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Persentase Stok Cadangan Pangan pemerintah (CPP) (%)	25	15	15	1.001.354.300	15	1.051.422.016	15	1.103.993.117	15	1.159.192.772	15	1.217.152.410	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					161.960.300		170.058.315		178.561.231		187.489.293		196.863.757	
Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani (%)	12,5	15	15	161.960.300	15	170.058.315	15	178.561.231	15	187.489.293	15	196.863.757	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					238.361.718		238.361.718		238.361.718		238.361.718		238.361.718	
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan daerah	Persentase pengawasan pangan daerah yang dilaksanakan sesuai aturan (%)	100	100	100	238.361.718	100	238.361.718	100	238.361.718	100	238.361.718	100	238.361.718	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					13.094.140.798		14.036.344.843		14.700.558.828		15.355.466.927		16.087.585.669	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					329.034.784		353.102.583		369.371.426		385.258.120		403.145.658	
Meningkatnya advokasi bidang pertanahan	Persentase laporan hasil mediasi dan fasilitasi persoalan pertanahan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	329.034.784	100	353.102.583	100	369.371.426	100	385.258.120	100	403.145.658	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					10.520.233.885		11.112.900.619		11.557.508.738		11.863.736.936		12.365.019.115	
Terlaksananya penyelenggaran pengadaan tanah sesuai kebutuhan dan peraturan	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan dan sesuai aturan (%)	100	100	100	10.520.233.885	100	11.112.900.619	100	11.557.508.738	100	11.863.736.936	100	12.365.019.115	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					1.059.116.489		1.313.440.663		1.441.363.627		1.694.217.932		1.822.431.721	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penataan, Penguasaan Dan Pemanfaatan Pertanahan	Persentase jumlah objek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang terealisasi tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan (%)	100	100	100	1.059.116.489	100	1.313.440.663	100	1.441.363.627	100	1.694.217.932	100	1.822.431.721	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					1.185.755.640		1.256.900.978		1.332.315.037		1.412.253.939		1.496.989.175	
Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dan data kepemilikan tanah pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase usulan pensertifikatan Aset tanahSKPD terverifikasi BPN (%)	100	100	100	1.185.755.640	100	1.256.900.978	100	1.332.315.037	100	1.412.253.939	100	1.496.989.175	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
	Persentase data kepemilikan tanah pada perumahan dan kawasan permukiman yang sudah mempunyai bukti kepemilikan (%)	37,5	50	51,5		52,5		53,5		54,5		56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					24.235.948.486		25.530.439.524		26.653.435.350		27.829.652.088		29.061.292.321	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.868.744.724		8.890.578.650		8.984.035.350		9.544.000.000		9.340.392.321	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	13,5	13,6	13,8	38.798.700	14	15.000.000	14,2	16.500.000	14,4	18.000.000	14,6	19.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai Komponen AKIP- Perencanaan KInerja (Nilai)	27	27,1	27,2		27,3		27,4		27,5		27,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	25,2	25,3	25,4		25,5		25,6		25,7		25,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	20,25	20,3	20,4		20,5		20,6		20,7		20,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	5	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Lingkungan Hidup
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5.487.639.549	100	5.575.000.000	100	5.675.500.000	100	5.776.000.000	100	5.876.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	2.974.873.119	100	2.880.578.650	100	2.872.035.350	100	3.330.000.000	100	3.024.892.321	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	5	5	5	367.433.356	5	420.000.000	5	420.000.000	5	420.000.000	5	420.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					735.000.000		1.160.400.000		1.060.400.000		1.060.400.000		360.400.000	
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan	Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan (%)	83,33	100	100	735.000.000	100	1.160.400.000	100	1.060.400.000	100	1.060.400.000	100	360.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.411.915.849		1.537.000.000		1.619.000.000		1.599.000.000		1.599.000.000	
Meningkatnya status mutu air pada setiap titik pantau	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air (%)	19,6	21,6	21,6	493.458.145	21,6	547.000.000	21,6	579.500.000	21,6	562.000.000	21,6	562.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya kategori desa program kampung iklim di Kabupaten	Persentase desa / kelurahan yang masuk kategori kampung iklim (%)	42,96	51,85	55,5	220.000.000	59,3	230.000.000	62,96	245.000.000	66,7	260.000.000	70,04	260.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas tanah untuk produksi biomasa	Persentase potensi kerusakan tanah yang berstatus rusak ringan (%)	100	100	100	204.999.560	100	213.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas udara pada setiap titik pantau	Persentase Titik Pantau Udara Yang Memenuhi Baku Mutu (%)	50	50	50	493.458.144	50	547.000.000	50	579.500.000	50	562.000.000	50	562.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.100.000.000		2.700.000.000		4.425.000.000		4.425.000.000		6.975.000.000	
Meningkatnya luasan RTH di Perkotaan	Persentase RTH (Persentase)	50	50	50	2.100.000.000	50	2.700.000.000	50	4.425.000.000	50	4.425.000.000	50	6.975.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					93.395.500		154.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000	
Meningkatnya pengelolaan Limbah B3	Persentase Timbulan Limbah B3 yang terkelola (%)	100	100	100	93.395.500	100	154.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					25.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000	
Meningkatnya pengelolaan limbah cair kegiatan usaha yang memenuhi baku mutu air	persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air (%) (%)	93,33	100	100	12.500.000	100	12.500.000	100	13.000.000	100	13.500.000	100	14.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya pengelolaan emisi udara kegiatan usaha yang memenuhi baku mutu udara	Persentase jumlah usaha/ kegiatan pemegang izin/ persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara (%)	96,67	100	100	12.500.000	100	12.500.000	100	13.000.000	100	13.500.000	100	14.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					124.999.550		430.000.000		132.500.000		135.000.000		145.000.000	
Meningkatnya kearifan lokal tentang pengelolaan ladang berpindah	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya (%)	42,86	57,13	57,13	124.999.550	57,13	430.000.000	57,13	132.500.000	57,13	135.000.000	57,13	145.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas (%)	42,86	57,13	57,13		57,13		57,13		57,13		57,13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					25.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000	
Meningkatknya pengetahuan masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup (%)	82,5	82,5	82,5	25.000.000	82,5	25.000.000	82,5	26.000.000	82,5	27.000.000	82,5	28.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					550.000.000		600.000.000		625.000.000		650.000.000		675.000.000	
Meningkatnya Sekolah dengan Kategori Adiwiyata	Persentase Sekolah yang menjadi sekolah adiwiyata (%)	38,97	44,88	50,78	550.000.000	56,69	600.000.000	62,59	625.000.000	68,5	650.000.000	74,4	675.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					11.999.900		15.000.000		17.500.000		20.000.000		22.500.000	
Terselesaikanya pengaduan kasus lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	11.999.900	100	15.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	100	22.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					10.289.892.963		9.993.460.874		9.568.000.000		10.172.252.088		9.718.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya sampah yang terkelola	Persentase Sampah Terkelola (%)	79,29	80	81	10.289.892.963	82	9.993.460.874	83	9.568.000.000	84	10.172.252.088	85	9.718.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11.686.592.578		12.541.457.891		13.092.399.776		13.669.825.493		14.276.272.633	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.719.248.677		11.529.016.796		12.030.050.624		12.553.697.385		13.104.338.122	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	23,7	26	26,25	72.862.800	26,25	79.855.940	26,25	83.848.737	26,25	87.041.175	26,25	92.443.232	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	23,1	23,25	23,25		23,25		23,25		23,25		23,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12	12,25	12,25		12,25		12,25		12,5		12,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	19,25	19,5	19,5		19,5		19,75		19,75		19,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5.042.177.693	100	5.548.147.788	100	5.825.555.177	100	6.116.832.937	100	6.422.674.583	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	830.429.900	100	888.545.870	100	916.641.595	100	945.652.159	100	975.608.605	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	83,3	86	87	4.773.778.284	88	5.012.467.198	89	5.204.005.115	90	5.404.171.114	91	5.613.611.702	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					304.866.101		307.459.405		326.469.875		344.204.869		362.165.111	
Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sesuai Standar Pelayanan	Persentase pemohon KTP yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	10.298.000	100	10.812.900	100	11.353.545	100	11.921.222	100	12.517.283	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase pemohon KIA yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	" Persentase Permohonan IKD yang diselesaikan sesuai tepat waktu" (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Aktivasi Indentitas Kependudukan Digital	Persentase permohonan aktivasi identitas kependudukan digital yang diverifikasi (%)	0	100	100	241.031.700	100	237.333.285	100	248.449.949	100	260.122.447	100	272.378.569	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	" Persentase hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang ditindaklanjuti" (%)	100	100	100	21.000.000	100	25.400.000	100	26.670.000	100	28.003.500	100	29.403.675	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk Pelayanan Keliling	Persentase Hasil Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk Pelayanan Keliling yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5.290.667	100	5.555.200	100	5.832.960	100	6.124.608	100	6.430.838	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi dengan para stakeholder untuk pelayanan aktivasi Indentitas Kependudukan Digital	Persentase Koordinasi dengan para stakeholder untuk pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang ditindaklanjuti (%)	0	100	100	3.464.000	100	3.637.200	100	6.189.060	100	10.160.013	100	10.668.014	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi ke Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan Sosialisasi	Persentase Hasil Koordinasi ke Desa/Kelurahan untuk kegiatan sosialisasi yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	8.200.400	100	8.610.420	100	9.040.941	100	9.492.988	100	9.967.637	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Sekolah (PAUD/TK/SD/SMP sederajat)	Persentase Hasil Koordinasi dengan pihak sekolah (PAUD/ TK/ SD/ SMP/ Sederajat) yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5.290.667	100	5.555.200	100	5.832.960	100	6.124.608	100	6.430.838	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya monitoring dan evaluasi petugas pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang mendapatkan nilai >90 berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai (Orang)	-	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	7.267.500	12	6.130.875	12	7.937.419	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Sekolah (SLTA sederajat)	Hasil Koordinasi dengan pihak sekolah (SLTA sederajat) yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100	5.290.667	100	5.555.200	100	5.832.960	100	6.124.608	100	6.430.838	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					259.420.900		275.241.945		288.504.043		302.429.245		317.050.707	
Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Permohonan Akta kelahiran yang Diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100	43.400.500	100	45.570.525	100	47.849.051	100	50.241.504	100	52.753.579	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Permohonan Akta Kematian yang Diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Permohonan Akta Perkawinan yang Diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Permohonan Akta Perceraian yang Diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pelayanan Akta Kelahiran secara kolektif	Persentase Permohonan Akta Kelahiran secara kolektif yang diselesaikan standar pelayanan (%)	100	100	100	85.020.000	100	89.271.000	100	93.734.550	100	98.421.278	100	103.342.341	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pelayanan akta kematian secara kolektif melalui Petugas Desa dan Rukun Kematian	Persentase permohonan akta kematian secara kolektif melalui Petugas Desa dan Rukun Kematian yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	87.629.700	100	92.011.185	100	96.611.744	100	101.442.331	100	106.514.448	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pencatatan Sipil	" Persentase hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti" (%)	100	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk Pelayanan Keliling	Persentase Hasil Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk Pelayanan Keliling yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	7.711.000	100	11.446.550	100	12.018.878	100	12.619.821	100	13.250.812	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi dengan Petugas Desa - Rukun Kematian	Persentase hasil Koordinasi dengan Petugas Desa - Rukun Kematian yang diTindaklanjuti (%)	100	100	100	5.802.600	100	6.092.730	100	6.397.367	100	6.717.235	100	7.053.097	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi dengan Pemuka Agama dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	" Persentase Hasil Koordinasi dengan Pemuka Agama dan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan yang maha Esa yang Ditindaklanjuti" (%)	100	100	100	5.802.600	100	6.092.730	100	6.397.367	100	6.717.235	100	7.053.097	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dengan Pengadilan Negeri	Persentase Hasil Koordinasi dengan Pengadilan Negeri yang Ditindaklanjuti (%)	0	100	100	14.054.500	100	14.757.225	100	15.495.086	100	16.269.841	100	17.083.333	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya monitoring dan evaluasi petugas pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Petugas Pelayanan Pencatatan Sipil yang mendapatkan nilai >90 berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai (Orang)	0	11	11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.000.000	11	5.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					371.566.500		396.674.825		412.657.068		433.039.919		454.441.915	
Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan	Tingkat Akurasi Data (%)	94,43	95	95,25	148.705.200	95,5	159.240.460	95,75	163.434.983	96	171.356.732	96,25	179.674.569	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi terkait Pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil	Hasil Koordinasi terkait pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	67.471.000	100	70.884.550	100	74.386.778	100	78.106.116	100	82.011.422	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi desa dan kelurahan untuk pengawasan data kependudukan	Hasil koordinasi dengan desa dan kelurahan untuk pengawasan data kependudukan yang ditindaklanjuti (%)	0	100	100	17.533.900	100	18.410.595	100	19.331.125	100	20.297.681	100	21.312.565	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pelayanan terhadap hak akses pemanfaatan data	Persentase Permohonan Hak Akses Pemanfaatan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	67.471.000	100	70.884.550	100	74.386.778	100	78.106.116	100	82.011.422	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Data Kependudukan	Persentase Hasil monitoring dan evaluasi data kependudukan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	17.533.900	100	18.410.595	100	19.331.125	100	20.297.681	100	21.312.565	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Regulasi yang Mengatur Pemanfaatan Data Kependudukan	"Persentase Regulasi Daerah yang Ditetapkan Sesuai dengan Amanat Peraturan di atasnya" (%)	75	100	100	52.851.500	100	58.844.075	100	61.786.279	100	64.875.593	100	68.119.372	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					31.490.400		33.064.920		34.718.166		36.454.075		38.276.778	
Penyajian Data Kependudukan yang Tepat Waktu	Persentase Laporan Kependudukan yang Disajikan Tepat Waktu (%)	100	100	100	18.646.400	100	19.578.720	100	20.557.656	100	21.585.539	100	22.664.816	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi terkait Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil	Hasil Koordinasi terkait Data Kependudukan dengan Dirjen Dukcapil yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	12.844.000	100	13.486.200	100	14.160.510	100	14.868.536	100	15.611.962	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					35.343.984.965		37.262.528.503		38.901.578.388		40.618.305.971		42.416.655.761	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.682.344.242		12.762.528.503		12.401.578.388		12.918.305.971		13.016.655.761	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	26,1	27,40	27,5	25.039.250	27,8	25.039.250	28	25.039.250	28,5	25.039.250	28,7	25.039.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	23,7	25,05	26		26,2		26,5		26,8		27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,25	11,3	11,6		11,7		12		12,5		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	16	16,3	16,5		17,2		17,3		18		18,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut dari Hasil Temuan Pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.018.010.557	100	4.018.194.618	100	4.018.194.618	100	4.018.194.618	100	4.018.194.618	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	6.880.349.716	100	6.885.349.916	100	6.885.349.916	100	7.402.077.499	100	7.402.077.499	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	90	91	92	1.758.944.719	94	1.833.944.719	96	1.472.994.604	98	1.472.994.604	100	1.571.344.394	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					151.159.550		151.159.550		352.061.100		192.061.100		192.061.100	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	0	65	100	151.159.550	100	151.159.550	100	352.061.100	100	192.061.100	100	192.061.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					16.713.258.300		18.513.258.300		20.120.315.000		21.410.315.000		22.510.315.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	0	65	100	2.213.258.300	100	2.213.258.300	100	2.320.315.000	100	2.110.315.000	100	2.310.315.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi (%)	10,3	72,9	73,8	14.500.000.000	74	16.300.000.000	74,9	17.800.000.000	75	19.300.000.000	75,9	20.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.246.661.550		4.246.661.550		4.438.703.300		4.358.703.300		4.758.703.300	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan (%)	0	65	100	3.635.582.150	100	3.635.582.150	100	3.827.623.900	100	3.697.623.900	100	3.997.623.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju (%)	5	6	6	611.079.400	7	611.079.400	8	611.079.400	9	661.079.400	10	761.079.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.550.561.323		1.588.920.600		1.588.920.600		1.738.920.600		1.938.920.600	
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi (%)	10,3	72,9	73,8	661.640.723	74	700.000.000	74,9	700.000.000	75	700.000.000	75,9	800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju (%)	5	6	6	888.920.600	7	888.920.600	8	888.920.600	9	1.038.920.600	10	1.138.920.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					12.213.008.819		12.875.955.849		13.442.324.661		14.035.534.769		14.656.949.188	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.415.866.209		6.788.956.088		7.050.974.907		7.324.617.525		7.610.486.081	
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti (%)	100	100	100	1.400.119.150	100	1.470.125.108	100	1.543.631.363	100	1.620.812.933	100	1.701.853.581	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	1.294.874.164	100	1.359.617.872	100	1.427.598.767	100	1.498.978.705	100	1.573.927.641	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.713.672.595	100	3.951.652.793	100	4.071.806.446	100	4.196.490.639	100	4.325.952.849	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Keluarga Berencana
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	23,1	26	26,5	7.200.300	27	7.560.315	27	7.938.331	27	8.335.248	27	8.752.010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	23,1	25,2	25,3		25,5		26		26,2		26,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	10,8	11,25	12,2		13,2		14,2		15,2		16,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	16,75	18	19		20		21		22		24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.073.926.350		1.127.622.668		1.184.003.801		1.243.203.991		1.305.364.190	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase kelompok sasaran mendapatkan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) (%)	100	100	100	1.073.926.350	100	1.127.622.668	100	1.184.003.801	100	1.243.203.991	100	1.305.364.190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase data Pelayanan KB dan Pengendalian lapangan yang tervalidasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Tenaga Lini Lapangan (PKB/PLKB) yang Mencapai Target (%)	99,7	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.180.316.070		2.289.331.872		2.403.798.470		2.523.988.395		2.650.187.816	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	-	15,5	15	2.180.316.070	14,5	2.289.331.872	14	2.403.798.470	13,5	2.523.988.395	13	2.650.187.816	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Unmet Need Pelayanan Kesehatan. ((%))	3,72	3,7	3,68		3,65		3,63		3,61		3,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Peserta KB Aktif (PA) (%)	82,7	83	83,5		84		84,5		85		85,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase peran serta lintas sektor dalam peningkatan peserta KB aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Hasil Koordinasi Pelaksanaan Lintas Sektor Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri yang ditindaklanjuti (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Peserta KB Aktif (PA) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	9,6	10	10,5		11		11,5		12		12,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.542.900.190		2.670.045.221		2.803.547.483		2.943.724.858		3.090.911.101	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja (Indeks)	82,7	84	85,2	2.542.900.190	86,4	2.670.045.221	87,4	2.803.547.483	88,4	2.943.724.858	89	3.090.911.101	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Keluarga Berencana
	Persentase anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif (%)	65	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kelompok BKR yang aktif (%)	65	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	57,2	59,4	61,4		63,3		65		66,5		67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kelompok BKB yang aktif (%)	65	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kelompok UPPKA yang aktif (%)	65	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase MOU yang ditindaklanjuti oleh Mitra Kerja (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					14.770.689.619		15.006.171.790		15.253.328.810		15.515.159.930		15.660.231.934	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.953.315.789		7.962.073.970		7.971.485.890		7.981.250.300		7.989.054.131	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74	72	73	43.035.500	74	43.350.000	75	44.000.000	76	44.250.000	77	45.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	98,33	100	100	6.443.116.574	100	6.448.020.520	100	6.452.331.600	100	6.455.130.300	100	6.546.980.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	98,33	80	80	1.196.162.420	82	1.197.784.280	85	1.200.983.290	87	1.206.104.700	90	1.116.212.431	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	74	80	80	271.001.295	82	272.919.170	85	274.171.000	87	275.765.300	90	280.861.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					4.317.373.830		4.344.097.820		4.370.842.920		4.421.909.630		4.456.177.803	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0,416	0,424	0,433	4.317.373.830	0,441	4.344.097.820	0,45	4.370.842.920	0,459	4.421.909.630	0,468	4.456.177.803	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	71,14	72	73		74		75		76		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					2.500.000.000		2.700.000.000		2.911.000.000		3.112.000.000		3.215.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	0,147	0,15	0,154	2.500.000.000	0,162	2.700.000.000	0,17	2.911.000.000	0,177	3.112.000.000	0,18	3.215.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					10.927.243.498		11.480.611.258		11.930.525.926		12.508.864.946		13.114.701.228	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.673.190.072		5.703.652.489		5.988.351.466		6.156.710.300		6.762.546.582	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	24,6	25,6	26,1	18.320.000	26,1	20.152.000	26,1	22.167.200	26,1	22.167.200	26,1	22.167.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	26,1	26,05	26,55		26,55		26,55		26,55		26,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,85	12,85	12,35		12,85		13,35		13,85		13,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	16,5	16,5	17		17,5		18		18,5		19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.006.000.000	100	4.006.600.000	100	4.007.260.000	100	4.007.260.000	100	4.007.260.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	989.104.916	100	956.158.817	100	1.171.108.428	100	1.339.467.262	100	1.945.303.544	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	100	100	100	659.765.156	100	720.741.672	100	787.815.838	100	787.815.838	100	787.815.838	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.850.202.500		2.035.222.750		2.238.745.025		2.238.745.025		2.238.745.025	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	92	94	12.600.000	96	13.860.000	98	15.246.000	100	15.246.000	100	15.246.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Terpenuhinya jasa publikasi berita daerah	Persentase peningkatan jasa publikasi daerah (%)	80	80	85	1.742.163.500	90	1.916.379.850	95	2.108.017.835	100	2.108.017.835	100	2.108.017.835	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya ketersediaan data informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan (%)	90	96	97	58.130.800	98	63.943.880	99	70.338.268	100	70.338.268	100	70.338.268	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	51	92	94	37.308.200	96	41.039.020	98	45.142.922	100	45.142.922	100	45.142.922	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
online rakyat (SP4N Lapor)	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) (%)													
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.403.850.926		3.741.736.019		3.703.429.435		4.113.409.621		4.113.409.621	
Meningkatnya Implementasi Arsitektur SPBE	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE (Poin)	-	-	1,7	243.850.690	1,8	268.235.759	1,9	295.059.335	2	295.059.335	2,1	295.059.335	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya jaringan intra antar perangkat daerah yang dikelola oleh diskominfo	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra yang dikelola oleh Diskominfo (%)	35	78	82	2.695.715.836	87	2.965.287.420	91	2.851.835.976	96	3.261.816.162	100	3.261.816.162	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
Melakukan integrasi pada seluruh aplikasi layanan administrasi perangkat daerah	Persentase Aplikasi yang sudah terintegrasi (%)	87	80	85	464.284.400	90	508.212.840	95	556.534.124	100	556.534.124	100	556.534.124	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					276.000.000		290.500.000		308.150.000		325.965.000		343.961.500	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					32.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	-	-	-	32.000.000	-	33.000.000	-	34.000.000	-	35.000.000	-	36.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		37.000.000	
Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang Mampu Menerapkan Manajemen Koperasi (%)	-	-	-	33.000.000	-	34.000.000	-	35.000.000	-	36.000.000	-	37.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					48.500.000		52.000.000		56.000.000		60.000.000		64.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	25,31	25,31	26,58	48.500.000	27,5	52.000.000	28,75	56.000.000	30	60.000.000	31,25	64.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					162.500.000		171.500.000		183.150.000		194.965.000		206.961.500	
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	-	-	-	44.500.000	-	47.500.000	-	51.150.000	-	54.965.000	-	58.961.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Terwujudnya Usaha Mikro yang Produktif dan Berdaya Saing	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	-	-	-	118.000.000	-	124.000.000	-	132.000.000	-	140.000.000	-	148.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9.517.291.798		8.371.296.899		8.739.976.326		9.125.196.611		9.529.208.915	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.434.876.998		6.658.966.899		7.099.191.326		7.420.946.611		7.656.058.915	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	23,7	24	24	136.448.750	24,5	141.448.750	25	151.448.750	25	155.448.750	25,5	155.448.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	24	24,5	24,5		25		25		25,5		25,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12	12	12,5		12,5		12,5		13		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	20	20,5	21		21		21,5		21,5		22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.188.580.490	100	4.243.580.490	100	4.303.580.490	100	4.358.580.490	100	4.368.580.490	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Penanaman Modal
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	1.743.324.214	100	1.882.029.115	100	2.152.253.542	100	2.235.253.542	100	2.380.160.042	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	85	86	90	366.523.544	91	391.908.544	92	491.908.544	93	671.663.829	94	751.869.633	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					1.975.290.900		520.350.000		420.350.000		450.900.000		525.780.000	
Meningkatnya potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan	Persentase Potensi unggulan daerah yang akan dipromosikan (%)	100	100	100	1.752.239.850	100	185.000.000	100	185.000.000	100	190.500.000	100	215.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya kebijakan penanaman modal yang terbarukan	Jumlah naskah akademik yang terselesaikan (Angka)	1	1	1	186.009.900	1	290.350.000	1	190.350.000	1	209.900.000	1	234.780.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya Peluang Kemitraan Bagi UMKM Dengan Perusahaan	Jumlah UMKM yang Bermitra dengan Perusahaan (Angka)	4	5	6	37.041.150	7	45.000.000	8	45.000.000	9	50.500.000	10	75.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					148.680.700		150.250.000		152.250.000		155.800.000		165.450.000	
Meningkatnya Efektifitas Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peminat Potensi Investasi Daerah yang Sesuai Ketentuan (%)	0	1	1	138.680.700	1	140.250.000	1	142.250.000	1	145.800.000	1	155.450.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM promosi investasi daerah	Persentase SDM promosi investasi daerah yang bersertifikat (%)	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					800.880.000		850.880.000		850.880.000		851.750.000		870.770.000	
Optimalnya pelayanan penerbitan perizinan berbasis elektronik	Persentase penerbitan perizinan yang berbasis elektronik sesuai ketentuan (%)	77,22	100	100	348.811.200	100	368.811.500	100	368.811.500	100	369.101.500	100	375.441.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya singkronisasi pelaksanaan perizinan daerah	Persentase singkronisasi perizinan daerah (%)	100	100	100	217.124.500	100	232.124.500	100	232.124.500	100	232.414.500	100	238.754.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Penanaman Modal
Terlaksananya tindak lanjut pengaduan	Persentase data pengaduan tentang pelayanan publik yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	234.944.300	100	249.944.000	100	249.944.000	100	250.234.000	100	256.574.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					105.200.000		125.800.000		150.800.000		175.250.000		205.500.000	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin (%)	80	100	100	105.200.000	100	125.800.000	100	150.800.000	100	175.250.000	100	205.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disetujui (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					52.363.200		65.050.000		66.505.000		70.550.000		105.650.000	
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin (%)	80	100	100	52.363.200	100	65.050.000	100	66.505.000	100	70.550.000	100	105.650.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					74.393.638.292		72.355.822.920		76.203.250.120		80.308.900.120		80.782.600.120	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.625.655.838		11.804.633.120		12.339.250.120		12.873.900.120		13.162.600.120	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	27	30	30	13.000.000	30	14.000.000	30	14.500.000	30	15.000.000	30	15.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	22,2	30	30		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	13,5	15	15		15		15		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	21	25	25		25		25		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.834.164.120	100	4.682.633.120	100	4.732.750.120	100	4.782.900.120	100	4.883.100.120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	889.870.864	100	911.000.000	100	929.000.000	100	947.000.000	100	965.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	100	100	100	5.888.620.854	100	6.197.000.000	100	6.663.000.000	100	7.129.000.000	100	7.299.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.183.021.710		2.356.000.000		2.506.000.000		2.656.000.000		2.806.000.000	
Meningkatnya peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda yang Berorganisasi terdaftar (%)	100	100	100	2.067.331.510	100	2.206.000.000	100	2.306.000.000	100	2.406.000.000	100	2.506.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Pemuda yang Aktif di Masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya wirausaha muda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	100	100	100	115.690.200	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					58.969.450.744		56.565.189.800		59.708.000.000		63.109.000.000		63.124.000.000	
Meningkatnya Pegiat yang mengikuti kejuaraan olahraga Masyarakat, Tradisional dan Rekreasi	Persentase Pegiat yang mengikuti kejuaraan olahraga Masyarakat, Tradisional dan Rekreasi (%)	100	100	100	652.643.570	100	800.000.000	100	1.000.000.000	100	1.200.000.000	100	1.400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya atlit yang mengikuti kejuaraan olahraga prestasi	Persentase Atlit yang mengikuti kejuaraan olahraga prestasi (%)	100	100	100	2.434.191.520	100	2.500.000.000	100	2.700.000.000	100	2.900.000.000	100	3.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Atlit yang mengikuti kejuaraan olahraga prestasi	Persentase Atlit yang mengikuti kejuaraan olahraga prestasi (%)	100	100	100	1.240.996.600	100	1.400.000.000	100	1.600.000.000	100	1.800.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga prestasi tingkat kabupaten	Persentase peningkatan atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga prestasi tingkat kabupaten (%)	100	100	100	416.196.400	100	600.000.000	100	800.000.000	100	1.200.000.000	100	1.400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Kemitraan pemanfaatan sarana prasarana olahraga	Persentase Kerjasama kemitraan terkait sarana prasarana olahraga yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	27.528.539.066	100	30.000.000.000	100	32.000.000.000	100	34.000.000.000	100	36.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas organisasi olahraga Masyarakat, Tradisional & Rekreasi	Persentase organisasi olahraga Masyarakat, tradisional dan rekreasi Penerima hibah yang memenuhi kualifikasi (%)	100	100	100	6.044.269.585	100	7.000.000	100	8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas organisasi olahraga Prestasi	Persentase organisasi olahraga prestasi penerima hibah yang memenuhi kualifikasi (%)	100	100	100	2.434.191.520	100	2.600.000.000	100	2.800.000.000	100	3.000.000.000	100	3.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas SDM tenaga keolahragaan	Persentase Pelatih yang Berkompeten (%)	80	80	80	17.518.111.213	80	17.858.189.800	80	17.800.000.000	80	17.800.000.000	80	17.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Juri yang Berkompeten (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Wasit yang Berkompeten (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
Meningkatnya Pegiat yang mengikuti kejuaraan olahraga Masyarakat, Tradisional dan Rekreasi dan Meningkatnya Jumlah Event Olahraga rekreasi dan tradisional	Persentase Pegiat yang mengikuti kejuaraan olahraga Masyarakat, Tradisional dan Rekreasi (%)	100	100	100	700.311.270	100	800.000.000	100	1.000.000.000	100	1.200.000.000	100	14.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga rekreasi dan tradisional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.615.510.000		1.630.000.000		1.650.000.000		1.670.000.000		1.690.000.000	
Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kwartir Ranting Kepramukaan yang memperoleh pembinaan (%)	100	100	100	1.615.510.000	100	1.630.000.000	100	1.650.000.000	100	1.670.000.000	100	1.690.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					614.799.700		671.279.670		733.407.637		733.407.637		733.407.637	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					614.799.700		671.279.670		733.407.637		733.407.637		733.407.637	
Tercapaianya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,63	2,63	2,65	363.826.600	2,65	397.709.260	2,7	434.980.186	2,7	434.980.186	2,75	434.980.186	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
Memastikan Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Menuju Satu Data Indonesia	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas (%)	90	52	54	25.000.000	56	25.000.000	58	25.000.000	60	25.000.000	62	25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
Tersedianya data statistik sektoral tepat waktu	Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu (%)	90	52	54	225.973.100	56	248.570.410	58	273.427.451	60	273.427.451	62	273.427.451	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					364.799.700		401.279.670		441.407.637		441.407.637		441.407.637	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					364.799.700		401.279.670		441.407.637		441.407.637		441.407.637	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah - Meningkatnya Pelaksanaan Computer Security Incident Response Team (CSIRT)	Tingkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	-	66	68	163.045.200	70	179.349.720	72	197.284.692	74	197.284.692	76	197.284.692	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kegiatan Computer Security Icident Response Team (CSIRT) (%)	-	92	94		96		98		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
Meningkatnya Kompetensi SDM Keamanan Informasi	Persentase SDM yang memiliki sertifikat keamanan informasi (%)	0	47	60	106.113.000	73	116.724.300	87	128.396.730	100	128.396.730	100	128.396.730	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
Meningkatnya Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) Perangkat Daerah	Persentase titik Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi PHKS yang teramankan (%)	33	20	40	95.641.500	60	105.205.650	80	115.726.215	100	115.726.215	100	115.726.215	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					6.519.469.143		6.519.469.143		6.583.930.143		6.559.469.143		6.591.712.143	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.434.655.073		5.434.655.073		5.434.655.073		5.434.655.073		5.434.655.073	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	24,67	25	25	10.516.600	25	10.516.600	25,05	10.516.600	25,05	10.516.600	25,1	10.516.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	22,75	24	24		24,15		24,2		24,2		24,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	15,25	16	16		16,1		16,1		16,1		16,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	12,3	14	15		15		15,15		15,15		15,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.836.969.388	100	3.836.969.388	100	3.836.969.388	100	3.836.969.388	100	3.836.969.388	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90% (Dengan Satuan:%) (%)	90	90	90	1.215.383.565	90	1.215.383.565	90	1.215.383.565	90	1.215.383.565	90	1.215.383.565	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	4,3	4,3	4,3	371.785.520	4,4	371.785.520	4,4	371.785.520	4,4	371.785.520	4,4	371.785.520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					413.225.250		413.225.250		413.225.250		413.225.250		413.225.250	
Meningkatnya promosi seni budaya	Jumlah Promosi Seni Budaya yang Terlaksana (Kali)	5	5	5	413.225.250	5	413.225.250	7	413.225.250	9	413.225.250	10	413.225.250	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					483.021.620		483.021.620		483.021.620		483.021.620		483.021.620	
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif (%)	81	0	60	483.021.620	65	483.021.620	70	483.021.620	75	483.021.620	80	483.021.620	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					188.567.200		188.567.200		188.567.200		188.567.200		188.567.200	
Meningkatnya Pelindungan Cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilindungi (%)	21,2	0	25	188.567.200	28,57	188.567.200	32,14	188.567.200	35,71	188.567.200	39,28	188.567.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya Tak benda yang dilindungi (%)	16,9	0	17,43		17,94		18,46		18,97		19,48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					0		0		64.461.000		40.000.000		72.243.000	
Pengembangan Museum Seni Digital	Jumlah Konten Kesenian yang di digitalisasi (Konten Digital)	0	0	0	0	0	0	6	64.461.000	8	40.000.000	10	72.243.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					6.544.880.025		6.882.081.814		7.190.881.012		7.505.586.428		7.836.234.623	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.605.320.829		5.895.544.659		6.155.017.000		6.417.929.216		6.694.194.551	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	16,2	18	18,5	68.742.800	19	69.000.000	20,5	69.200.000	21	69.400.000	21,5	69.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12,6	12,85	13		13,25		13,5		13,75		13,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	23,6	24,2	24,3		24,4		24,5		24,6		24,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Nilai Komponen AKIP- Perencanaan KInerja (Nilai)	25,6	27,85	28		28,25		28,35		28,45		28,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	96	97	98	3.757.218.220	99	3.759.000.000	100	3.761.200.000	100	3.762.400.000	100	3.763.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	94	95	96	1.387.606.233	97	1.674.954.224	98	1.929.947.044	99	2.189.375.762	100	2.462.153.424	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	89	90	91	391.753.576	92	392.590.435	93	394.669.956	94	396.753.454	95	398.841.127	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					878.595.796		922.525.585		968.651.864		1.017.084.457		1.067.938.680	
Meningkatnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP),	Persentase Perpustakaan Yang Terakreditasi (%)	1	1,27	1,59	878.595.796	1,91	922.525.585	2,23	968.651.864	2,39	1.017.084.457	2,55	1.067.938.680	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					60.963.400		64.011.570		67.212.148		70.572.755		74.101.392	
Meningkatnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Persentase Perpustakaan Yang Terakreditasi (%)	0	1,27	1,59	60.963.400	1,91	64.011.570	2,23	67.212.148	2,39	70.572.755	2,55	74.101.392	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					395.197.800		434.717.580		447.759.107		470.147.062		492.619.419	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					351.697.800		386.867.580		398.473.607		418.397.287		439.317.151	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis Dan Statis Sesuai NSPK,	Persentase Arsip Dinamis Dan Statis Yang Sesuai NSPK (%)	33,33	84,84	87,87	351.697.800	90,9	386.867.580	93,93	398.473.607	96,96	418.397.287	100	439.317.151	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					43.500.000		47.850.000		49.285.500		51.749.775		53.302.268	
Meningkatnya Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK (%)	0	21,21	24,24	43.500.000	27,27	47.850.000	30,3	49.285.500	33,33	51.749.775	36,36	53.302.268	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					11.069.356.311		11.670.223.532		12.183.556.344		12.721.216.976		13.284.440.806	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.337.548.074		7.500.223.532		7.700.556.344		7.901.216.976		8.224.440.806	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	71,7	80	80,5	7.337.548.074	81	7.500.223.532	81,5	7.700.556.344	82	7.901.216.976	83	8.224.440.806	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	23,1	25	25		25		25		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	21,3	23	23		23		23,5		23,5		24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	10,8	11,5	12		12		12		12		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	16,5	20,5	20,5		21		21		21,5		22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					236.281.000		350.000.000		400.000.000		490.000.000		510.000.000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:%) (%)	100	100	100	236.281.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	490.000.000	100	510.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.982.476.139		2.900.000.000		3.100.000.000		3.300.000.000		3.450.000.000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya (Dengan Satuan:%) (%)	100	100	100	2.982.476.139	100	2.900.000.000	100	3.100.000.000	100	3.300.000.000	100	3.450.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					143.142.100		320.000.000		350.000.000		380.000.000		400.000.000	
Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Terlaksananya pengawasan sumberdaya perikanan (Dengan Satuan:%) (%)	100	100	100	143.142.100	100	320.000.000	100	350.000.000	100	380.000.000	100	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					369.908.998		600.000.000		633.000.000		650.000.000		700.000.000	
Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Perikanan	Terlaksananya program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Dengan Satuan:%) (%)	100	100	100	369.908.998	100	600.000.000	100	633.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.113.599.148		1.527.937.652		1.881.915.273		2.212.668.568		2.641.049.413	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					395.898.983		703.114.700		1.000.832.108		1.262.831.200		1.447.636.700	
Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikelola dengan baik (Attraction, Amenity, Accesibility) (%)	5	30	37,6	395.898.983	37,6	703.114.700	44,9	1.000.832.108	44,9	1.262.831.200	44,9	1.447.636.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					408.765.050		408.765.050		473.226.050		408.765.050		408.765.050	
Meningkatnya Perluasan pemasaran Pariwisata daerah	Persentase Kerjasama untuk pemasaran pariwisata daerah sesuai yang ditargetkan (%)	25	0	25	408.765.050	35	408.765.050	50	473.226.050	65	408.765.050	80	408.765.050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					55.625.150		124.186.937		154.547.150		205.415.150		344.597.150	
Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:%) (%)	-13	0,5	1	55.625.150	1,2	124.186.937	1,5	154.547.150	1,8	205.415.150	2,1	344.597.150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					253.309.965		291.870.965		253.309.965		335.657.168		440.050.513	
Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM Pariwisata yang terlatih (%)	0	0	25	253.309.965	25,75	291.870.965	27,5	253.309.965	30	335.657.168	35	440.050.513	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					67.324.556.634		74.057.012.299		81.502.713.527		89.608.984.878		98.569.883.361	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.624.521.745		28.186.973.920		31.045.671.312		34.106.238.443		37.516.862.287	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	20	24	24	67.320.000	24	74.052.000	24	81.457.200	24	89.602.920	24	98.563.212	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Kinerja TindakLanjut dari Hasil Temuan Pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	17.596.690.731	100	19.356.359.805	100	21.291.995.785	100	23.421.195.364	100	25.763.314.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	2.266.814.880	100	2.493.496.368	100	2.782.846.005	100	3.017.130.605	100	3.318.843.612	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	95,45	100	100	5.693.696.134	100	6.263.065.747	100	6.889.372.322	100	7.578.309.554	100	8.336.140.563	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					7.376.550.155		8.114.205.171		8.925.625.687		9.818.188.255		10.800.007.082	
Meningkatnya luas panen Tanaman Pangan	persentase peningkatan luas panen Padi (%)	4,84	1,5	1,5	512.600.391	1,5	563.860.430	1,5	620.246.473	1,5	682.271.120	1,5	750.498.232	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	persentase peningkatan luas panen jagung (%)	0	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya produktivitas Tanaman Pangan	persentase peningkatan produktivitas Padi (%)	0	0,1	0,1	116.420.040	0,1	128.062.044	0,1	140.868.248	0,1	154.955.073	0,1	170.450.581	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya produktivitas Hortikultura	Persentase peningkatan produktivitas Cabai Rawit Hiyung (%)	0	0,07	0,07	423.830.880	0,07	466.213.968	0,07	512.835.365	0,07	564.118.901	0,07	620.530.791	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	persentase peningkatan produktivitas jahe (%)	0,74	0,05	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	persentase peningkatan produktivitas Jeruk (%)	0	0,27	0,27		0,27		0,27		0,27		0,27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya produktivitas Perkebunan	persentase peningkatan produktivitas Karet (%)	0,45	1	1	3.319.669.221	1	3.651.636.143	1	4.016.799.757	1	4.418.479.733	1	4.860.327.706	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	persentase peningkatan produktivitas Kelapa Sawit (%)	30,25	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya populasi ternak	Persentase peningkatan populasi ternak Sapi, (%)	6,77	0,6	0,6	2.385.382.583	0,6	2.623.920.842	0,6	2.886.312.926	0,6	3.174.944.219	0,6	3.492.438.641	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase peningkatan populasi ternak Kambing (%)	17,95	0,51	0,51		0,51		0,51		0,51		0,51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase peningkatan populasi ternak Unggas (%)	0	0,07	0,07		0,07		0,07		0,07		0,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengelolaan pasca panen Tanaman Pangan	persentase kelompok tani yang melakukan pasca panen Tanaman Pangan (%)	8	8	8	169.839.120	8	186.823.032	8	205.505.335	8	226.055.868	8	248.661.455	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pengelolaan pasca panen Hortikultura	persentase kelompok tani yang melakukan pasca panen Hortikultura (%)	12,5	5	5	448.807.920	5	493.688.712	5	543.057.583	5	597.363.341	5	657.099.676	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					29.081.515.384		31.989.666.923		35.188.633.615		38.707.496.976		42.578.246.667	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana & prasarana produksi	persentase pemenuhan sarana dan prasarana produksi (%)	95	100	100	29.081.515.384	100	31.989.666.923	100	35.188.633.615	100	38.707.496.976	100	42.578.246.667	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	persentase pemenuhan sarana dan prasarana produksi dengan kondisi baik (%)	85	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					865.997.000		952.596.700		1.047.856.369		1.152.642.007		1.267.906.208	
Meningkatnya pengendalian terhadap penyakit hewan	Persentase hewan bebas penyakit (%)	100	100	100	865.997.000	100	952.596.700	100	1.047.856.369	100	1.152.642.007	100	1.267.906.208	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					2.896.110.659		3.185.721.725		3.504.293.898		3.854.723.287		4.240.195.616	
Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman Pangan	Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah ambang batas (Tanaman Pangan) (%)	1	2,5	2,5	802.695.159	2,5	882.964.675	2,5	971.261.143	2,5	1.068.387.257	2,5	1.175.225.983	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman Hortikutura	Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah ambang batas (Hortikultura) (%)	1	1,5	1,5	632.820.100	1,5	696.102.110	1,5	765.712.321	1,5	842.283.553	1,5	926.511.908	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman Perkebunan.	Persentase intensitas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dibawah ambang batas (Perkebunan) (%)	1	1,5	1,5	1.460.595.400	1,5	1.606.654.940	1,5	1.767.320.434	1,5	1.944.052.477	1,5	2.138.457.725	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					231.605.000		254.765.500		280.242.050		308.266.255		339.092.881	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perijinan usaha pertanian	Persentase Perijinan yang dipenuhi (%)	100	100	100	231.605.000	100	254.765.500	100	280.242.050	100	308.266.255	100	339.092.881	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.248.256.691		1.373.082.360		1.510.390.596		1.661.429.655		1.827.572.620	
Meningkatnya kapasitas penyuluh dan kelompok tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani lanjut ke Madya (%)	3	3	3	1.248.256.691	3	1.373.082.360	3	1.510.390.596	3	1.661.429.655	3	1.827.572.620	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penyuluh yang berkompeten (%)	25	25	25		25		25		25		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					11.566.869.457		12.194.742.706		12.731.147.304		13.292.973.138		13.881.511.111	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.177.041.257		7.227.581.374		7.615.777.935		8.188.698.575		8.392.475.111	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	24	24	30	10.734.000	30	12.000.000	30	14.000.000	30	16.000.000	30	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	22	22	29		29		29		29		29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12	12,5	15		15		15		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	17	17,5	24		24		24		24		24		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.862.987.271	100	4.875.049.000	100	4.965.756.000	100	4.871.707.269	100	4.969.574.071	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	1.840.616.080	100	1.880.828.468	100	2.173.318.028	100	2.838.287.400	100	2.937.555.480	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	80	81	82	462.703.906	82	459.703.906	82	462.703.907	82	462.703.906	82	465.345.560	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					41.770.000		79.000.000		95.000.000		105.000.000		125.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
optimalnya pengendalian dan penerbitan rekomendasi izin usaha dagang	Tertib usaha (%)	60	63	67	41.770.000	68	79.000.000	69	95.000.000	70	105.000.000	71	125.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					3.399.598.232		3.802.021.804		3.886.680.369		3.810.818.563		3.899.036.000	
Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap kewajiban membayar retribusi pasar - Meningkatnya kualitas pengelola sarana distribusi perdagangan	Persentase penerimaan retribusi pasar (%)	100	100	100	81.559.800	100	87.559.800	100	91.559.000	100	81.559.800	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar (IKM)	78	79	80	3.318.038.432	83	3.714.462.004	84	3.795.121.369	85	3.729.258.763	86	3.799.036.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik (Unit)	9	10	11		12		13		13		13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Pertumbuhan Sistem Resi Gudang (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					217.348.220		285.000.000		300.000.000		307.000.000		520.000.000	
Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok (%)	1	0,9	0,85	217.348.220	0,7	285.000.000	0,65	300.000.000	0,6	307.000.000	0,55	520.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					210.993.748		241.693.028		260.689.000		296.456.000		325.000.000	
Meningkatnya Promosi Produk berpotensi Ekspor	Jumlah Produk berstandar ekspor yang dipromosikan (Nilai)	10	12	12	210.993.748	13	241.693.028	14	260.689.000	15	296.456.000	16	325.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					394.486.150		429.446.500		435.000.000		445.000.000		470.000.000	
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terhadap ketentuan berlaku - Meningkatnya	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan (%)	60	70	72	394.486.150	72	429.446.500	72	435.000.000	72	445.000.000	72	470.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengawasan kemetrologian														
	Persentase Tindak Lanjut Hasil pengawasan UTTP (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase kesesuaian Barang Dalam Keadaan Terbungkus terhadap ketentuan (%)	40	50	52		52		52		52		52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					125.631.850		130.000.000		138.000.000		140.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha perdagangan produk dalam negeri (%)	75	78	100	125.631.850	100	130.000.000	100	138.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					7.279.042.103		8.020.046.212		8.833.450.731		9.729.795.703		10.717.375.172	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.966.042.103		6.672.696.212		7.446.365.731		8.282.002.203		9.219.802.322	
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	1.562.900.000	100	1.679.600.000	100	1.735.000.000	100	1.730.500.000	100	1.789.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	0	0	0	6.100.000	0	6.710.000	0	7.381.000	0	8.119.100	0	8.931.010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya Kinerja Tindaklanjut dari Hasil Temuan Pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	-	-	-	4.102.542.103	-	4.684.386.212	-	5.394.984.731	-	6.225.383.103	-	7.095.871.312	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	80	80	80,1	294.500.000	80,2	302.000.000	80,3	309.000.000	80,4	318.000.000	80,5	326.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.038.500.000		1.054.350.000		1.081.085.000		1.128.793.500		1.166.572.850	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Agro dan Kimia (%)	-	-	-	145.000.000	-	150.000.000	-	155.000.000	-	160.000.000	-	165.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM Berbasis Logam dan Aneka (%)	-	-	-		-		-		-		-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya Kapasitas Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase Produk IKM yang Dihasilkan Melalui Fasilitas Produksi (%)	-	-	-	868.500.000	-	887.350.000	-	907.085.000	-	947.793.500	-	979.572.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Agro dan Kimia (%)	-	-	-	25.000.000	-	17.000.000	-	19.000.000	-	21.000.000	-	22.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Persentase Pertumbuhan IKM Berbasis Logam dan Aneka (%)	-	-	-		-		-		-		-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					115.000.000		127.000.000		134.000.000		141.000.000		147.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Izin Usaha Industri yang Ditindaklanjuti (%)	60	100	100	115.000.000	100	127.000.000	100	134.000.000	100	141.000.000	100	147.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					159.500.000		166.000.000		172.000.000		178.000.000		184.000.000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	100	100	100	159.500.000	100	166.000.000	100	172.000.000	100	178.000.000	100	184.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					133.197.203.070		140.388.898.395		145.652.722.802		153.207.286.664		159.767.834.548	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					101.155.403.903		106.610.433.714		110.387.518.641		116.384.851.062		121.314.471.368	
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	80	80	81	600.000.000	82	632.520.000	83	660.360.000	84	689.520.000	85	720.060.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas publikasi dan informasi kegiatan pimpinan daerah	Persentase publikasi dan informasi kegiatan pimpinan daerah yang sesuai standar (waktu, konten, cakupan media) (%)	100	100	100	5.589.777.900	100	5.902.287.659	100	6.166.945.460	100	6.445.099.967	100	6.737.364.667	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyederhanaan Birokrasi, Terlaksananya Penataan Organisasi, Terlaksananya Penyesuaian Sistem Kerja	Persentase Tingkat Kematangan SKPD Berkategori tinggi (%)	50	55,55	66,66	449.850.600	77,77	475.008.690	88,88	495.915.922	100	517.814.444	100	540.749.317	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD yang menerapkan sistem kerja baru sesuai ketentuan (%)	5	11	20		31		50		75		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terpenuhinya sarana Kdh/Wkdh dan Sekretariat Daerah sesuai Ketentuan	Persentase sarana Kdh/Wkdh dan Sekretariat Daerah yang dipenuhi sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	23.599.249.948	100	24.889.269.677	100	25.980.837.488	100	26.119.285.551	100	28.332.740.477	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah (Poin)	89,71	90	90,2	166.148.200	90,4	175.153.432	90,6	182.862.709	90,8	192.773.867	91	199.394.455	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Tata Usaha	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Tata Usaha (Poin)	89,71	90	90,2	100.000.000	90,4	105.420.000	90,6	110.060.000	90,8	116.025.252	91	120.010.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	27	27	27,1	295.000.000	27,15	310.989.000	27,2	324.677.000	27,25	339.014.000	27,3	354.029.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	25,2	25,25	25,3		25,35		25,4		25,45		25,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	13,5	13,5	13,55		13,6		13,65		13,7		13,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	20,25	20,25	20,25		20,3		20,35		20,4		20,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	29.216.197.632	100	30.761.182.082	100	31.203.925.227	100	34.710.346.100	100	34.968.949.309	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terpenuhinya Sarana prasarana Sesuai Ketentuan	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana yang terpenuhi sesuai ketentuan (%)	100	100	100	16.641.060.933	100	17.642.882.740	100	18.276.225.476	100	18.936.456.242	100	19.624.521.182	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Sekretariat Daerah
Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik (%)	90	92,5	95	19.268.323.660	97,5	20.231.739.842	100	21.243.326.834	100	22.305.493.176	100	23.420.767.834	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dinas Kdh dan Wkdh sesuai ketentuan	Persentase kebutuhan rumah tangga dinas Kdh dan Wkdh yang terpenuhi sesuai ketentuan (%)	100	100	100	3.866.510.780	100	4.059.836.320	100	4.262.828.134	100	4.475.969.542	100	4.699.768.019	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas tata kelola pelaporan dan pencatatan aset daerah/BMD	Persentase aset daerah yang tercatat sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan (%)	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Optimalnya kualitas pelayanan kegiatan keprotokolan Kdh dan Wkdh	Indeks Kualitas Pelayanan Keprotokolan (Poin)	96	86,4	90	545.088.500	92	565.088.500	95	585.088.500	98	605.088.500	100	625.088.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik dan Meningkatnya Pembinaan dan Internalisasi Budaya Kerja Terhadap SKPD	Persentase Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat minimal 85 (%)	95	96	97	422.245.950	98	444.355.492	99	463.913.542	100	484.398.910	100	505.853.754	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD dengan Nilai Budaya Kerja berkategori Sehat (%)	75	78	81		83		85		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja dan Dokumen SAKIP SKPD yang sesuai ketentuan	Persentase SKPD yang menyampaikan dokumen SAKIP sesuai ketentuan dan tepat waktu (%)	100	100	100	345.949.800	100	364.700.280	100	380.552.349	100	397.565.511	100	415.174.354	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Sakip Pemkab Tapin Komponen Pelaporan Kinerja (Poin)	10,59	11	12		13		14		14,5		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					29.765.962.820		31.379.278.005		32.760.418.679		34.207.044.473		35.722.131.980	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya capaian IKK LPPD yang memenuhi standar, Meningkatnya capaian Penerapan SPM dan Meningkatnya Rekomendasi LKPJ yang ditindaklanjuti dan Meningkatnya Kerja Sama Daerah sesuai ketentuan	Persentase IKK LPPD yang memenuhi standar (%)	100	100	100	929.967.884	100	980.372.144	100	1.023.522.653	100	1.068.719.093	100	1.116.054.458	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) (Poin)	99	99	99,25		99,5		99,75		99,9		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase kerja sama daerah yang terlaksana sesuai dengan kesepakatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	pPersentase OPD yang menindaklanjuti evaluasi, rekomendasi, dan reviu LPPD dan LKPJ (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi kewilayahan	Persentase kesesuaian titik koordinat/bats wilayah sesuai peraturan Dokumen Kewilayahan (%)	100	100	100	929.967.883	100	980.372.142	100	1.023.522.652	100	1.068.719.091	100	1.116.054.456	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pelayanan Administrasi pemerintahan terhadap Eksekutif dan Legislatif dan Meningkatnya Perkembangan Kelurahan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pemerintahan terhadap Eksekutif dan Legistlatif (Indeks)	75	100	100	929.967.883	100	980.372.142	100	1.023.522.652	100	1.068.719.091	100	1.116.054.456	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Kelurahan dengan status cepat berkembang (%)	70	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkanya Kualitas Pelayanan Pembinaan Sosial Keagamaan dan Optimalnya Kegiatan Pembinaan Mental Spritual	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan Sosial Keagamaan (Poin)	89	90	91	7.801.727.151	93	8.224.580.763	94	8.586.580.902	95	8.965.744.842	96	9.362.852.754	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Pembinaan Mental Spritual yang Tepat Waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Lembaga	Persentase Bantuan Dana Hibah yang Tepat Sasaran (%)	100	100	100	18.204.030.019	100	19.190.688.446	100	20.035.355.439	100	20.920.071.298	100	21.846.656.426	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan														Sekretariat Daerah
	Persentase Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang Tepat Sasaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase Pelayanan Bantuan Hukum yang Diselesaikan (%)	100	100	100	280.000.000	100	290.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas hukum dan kebijakan daerah yang didukung dengan proses dan SDM yang profesional	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan (%)	100	100	100	400.302.000	100	432.892.368	100	457.914.381	100	495.071.058	100	534.459.430	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum Daerah yang dilakukan Harmonisasi sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya pemahaman masyarakat dan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase Masyarakat yang paham atas Produk Hukum yang disosialisasikan (%)	100	100	100	290.000.000	100	300.000.000	100	310.000.000	100	320.000.000	100	330.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.275.836.347		2.399.186.676		2.504.785.482		2.615.391.129		2.731.231.200	
Meningkatnya kinerja BUMD dan BLUD	Persentase BUMD yang menerapkan Good Corporate Governance (%)	100	100	100	280.400.000	100	291.300.000	100	306.250.000	100	319.780.000	100	326.670.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase BLUD yang memiliki Tata Kelola Baik sesuai standar BPKP (%)	0	80	85		90		95		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya realisasi penggunaan produk dalam negeri (P3DN)	Realisasi TKDN (%)	90,24	90,25	90,3	100.735.000	90,35	111.200.000	90,4	118.655.000	90,45	121.950.000	95	137.660.306	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	70.000.000	100	75.800.000	100	76.350.236	100	78.050.352	100	80.218.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Peran TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dalam	Persentase Hasil Koordinasi Pengendalian Inflasi yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	415.825.000	100	434.430.000	100	451.783.000	100	477.709.000	100	499.477.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kegiatan Pengendalian Inflasi														
Meningkatnya Peran Forum CSR	Persentase Forum CSR yang aktif (%)	80	80	85	120.100.000	90	127.828.652	95	133.320.000	100	136.840.000	100	140.545.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Persentase keterisian formasi Pengelola Pengadaan barang/Jasa Sesuai rekomendasi LKPP (%)	68,18	72,73	77,27	517.810.767	81,82	545.876.111	90,91	569.902.530	95,45	595.068.133	100	621.424.702	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Persentase pemanfaatan sistem pengadaan oleh SKPD pada proses pengadaan barang/jasa (%)	81,26	84,5	87	403.938.198	90	425.831.648	93	444.574.380	96,17	464.205.777	100	484.766.231	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Level Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	35,56	40	40	367.027.382	40	386.920.265	40	403.950.336	40	421.787.867	40	440.469.561	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					80.461.919.976		84.829.556.980		88.560.916.101		92.469.111.443		95.994.657.830	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.490.212.676		38.728.023.080		41.372.956.300		43.603.221.242		45.663.741.242	
Meningkatnya pelayanan administrasi dan dukungan Sekretariat terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase administrasi yang tepat waktu (%) (%)	100	100	100	36.490.212.676	100	38.728.023.080	100	41.372.956.300	100	43.603.221.242	100	45.663.741.242	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					43.971.707.300		46.101.533.900		47.187.959.801		48.865.890.201		50.330.916.588	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan administrasi dan dukungan Sekretariat terhadap tugas dan fungsi DPRD, Meningkatnya layanan dukungan terhadap penyelesaian produk hukum oleh DPRD, Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan persidangan, Meningkatnya layanan dalam penghimpunan aspirasi masyarakat dan dukungan kegiatan pengawasan oleh DPRD, Meningkatnya layanan dalam penghimpunan aspirasi masyarakat dan dukungan kegiatan pengawasan oleh DPRD, Meningkatnya layanan dukungan terhadap Pembahasan anggaran oleh DPRD	Persentase administrasi yang tepat waktu (%) (%)	100	100	100	43.971.707.300	100	46.101.533.900	100	47.187.959.801	100	48.865.890.201	100	50.330.916.588	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase naskah akademik yang selesai tepat waktu (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase layanan rapat persidangan yang sesuai jadwal (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Fasilitasi Aspirasi masyarakat yang teakomodir (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase fasilitasi rapat dengar pendapat pengawasan yang terakomodir (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase pembahasan anggaran tepat waktu sesuai siklus anggaran (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					11.457.000.000		12.164.807.441		12.528.560.068		12.996.670.411		13.608.965.395	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					8.291.000.000		8.752.807.441		8.699.424.733		8.803.924.733		9.187.080.277	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	27	27	27,2	107.000.000	27,35	107.000.000	27,5	107.000.000	27,65	107.000.000	27,8	107.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	25,2	25,3	25,35		25,5		25,65		25,8		25,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12,75	12,75	12,9		13,05		13,2		13,35		13,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	21	21	21,15		21,3		21,45		21,6		21,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5.590.000.000	100	5.890.305.031	100	5.718.424.733	100	5.752.924.733	100	5.787.424.733	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% ((%)	100	100	100	1.789.000.000	100	1.949.000.000	100	2.069.000.000	100	2.139.000.000	100	2.209.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	4	4	4	805.000.000	4	806.502.410	4	805.000.000	4	805.000.000	4	1.083.655.544	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.446.000.000		2.586.000.000		2.905.135.335		3.170.745.678		3.301.885.118	
Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	100	100	100	300.000.000	100	356.000.000	100	386.000.000	100	446.000.000	100	525.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Terlaksananya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil koordinasi dan partisipasi usulan masyarakat	Presentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	60	62	64	501.000.000	66	545.000.000	68	570.000.000	70	630.000.000	72	639.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	100	100	100	65.000.000	100	68.000.000	100	85.000.000	100	88.000.000	100	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan - Terlaksananya Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	100	100	100	1.375.000.000	100	1.404.000.000	100	1.619.135.335	100	1.753.745.678	100	1.801.885.118	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Hasil Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan (Dokumen)	3	3	2		2		3		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Persentase Implementasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah (%)	-	80	85	205.000.000	90	213.000.000	95	245.000.000	100	253.000.000	100	261.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					720.000.000		826.000.000		924.000.000		1.022.000.000		1.120.000.000	
Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan - Terlaksananya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil koordinasi - Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan	Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	100	100	100	380.000.000	100	440.000.000	100	500.000.000	100	560.000.000	100	620.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDMr yang ditindaklanjuti sesuaiÂ rekomendasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Hasil Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Hasil Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuaiÂ rekomendasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Terlaksananya Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan - Terlaksananya Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase Hasil Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	100	100	100	260.000.000	100	290.000.000	100	320.000.000	100	350.000.000	100	380.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Hasil Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuaiÂ rekomendasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Hasil Reviu Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Hasil Reviu Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuaiÂ rekomendasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan Renja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan Renja Bidang Sosial dan SDM terhadap RKPD (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja danÂ PaguÂ Indikatif) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya tindak lanjut atas hasilmonitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan	Persentase Implementasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah	0	70	75	80.000.000	80	96.000.000	85	104.000.000	90	112.000.000	95	120.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bidang Sosial dan SDM (%)													
	Persentase Implementasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi danÃ Infrastruktur (%)	0	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					285.623.340.963		301.127.558.036		314.373.118.902		328.246.412.145		342.779.314.299	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.746.554.523		28.871.187.705		31.047.916.581		33.413.333.903		35.984.167.531	
BAPENDA : Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	22,2	22	23	13.324.050	23	14.047.547	23	14.665.638	23	15.312.393	24	15.990.731	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	25,2	25	25		26		26		26		26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12,6	13	13		13		13		14		14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	20,25	21	21		21		22		22		22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
BAPENDA : Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	9.022.941.030	100	9.512.536.391	100	9.930.811.310	100	10.369.404.635	100	10.828.194.697	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
BAPENDA : Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	90	90	90	1.875.696.000	90	1.977.546.292	90	2.064.558.330	90	2.155.605.352	90	2.251.098.669	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
BAPENDA : Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	80	80	80	1.115.871.132	80	1.176.462.934	80	1.228.227.305	80	1.282.392.128	80	1.339.202.099	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	3.588.888.952	100	3.947.777.847	100	4.342.555.634	100	4.776.811.196	100	5.254.492.314	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,6	80	81	8.938.270.303	82	9.832.097.333	82	10.815.307.066	83	11.896.837.772	84	13.086.521.551	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	100	100	100	2.191.563.056	100	2.410.719.361	100	2.651.791.298	100	2.916.970.427	100	3.208.667.470	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					247.435.522.275		260.012.662.981		270.298.552.052		280.963.790.641		292.017.526.845	
Menigkatnya Kualitas Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Anggaran yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan (%)	0	100	100	243.053.386.396	100	255.192.313.513	100	264.996.167.638	100	275.131.167.786	100	285.601.641.705	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Anggaran yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan (%)	0	100	100	1.475.701.865	100	1.623.272.052	100	1.785.599.257	100	1.964.159.181	100	2.160.575.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase pembahasan anngaran tepat waktu sesuai siklus anggaran (%) (%)	100	100	100	1.973.238.124	100	2.170.561.937	100	2.387.618.130	100	2.626.379.944	100	2.889.017.938	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (%)	100	100	100	933.195.890	100	1.026.515.479	100	1.129.167.027	100	1.242.083.730	100	1.366.292.102	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.964.607.031		4.361.067.734		4.797.174.509		5.276.891.960		5.804.581.156	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart (%)	100	100	100	3.964.607.031	100	4.361.067.734	100	4.797.174.509	100	5.276.891.960	100	5.804.581.156	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.476.657.134		7.882.639.616		8.229.475.760		8.592.395.641		8.973.038.767	
Meningkatnya kuantitas wajib pajak dan Optimalnya Penggunaan Alat Perekam Transaksi (APT)	Persentase peningkatan wajib pajak (%)	10	10	10	1.786.580.850	10	1.883.592.191	10	1.966.470.247	10	2.053.191.584	10	2.144.147.971	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Wajib Pajak yang terdaftar dan terverifikasi menggunakan Alat Perekam Transaksi (APT) (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dan Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaaan Wajib Pajak yang Menggunakan Alat Perekam Transaksi (APT)	Persentase wajib pajak dan wajib retribusi yang patuh pajak dan retribusi Jumlah Kebijakan Pajak Daerah (%)	50	50	50	2.181.104.400	50	2.299.538.369	50	2.400.718.057	50	2.506.589.724	50	2.617.631.648	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Pengawasan Pajak yang menggunakan Alat Perekam Transaksi (APT) (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Tersedianya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kebijakan Pajak Daerah (Angka)	7	3	3	75.115.750	3	79.194.535	3	82.679.095	3	86.325.243	3	90.149.451	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Optimalnya Pelayanan Kepada Wajib Pajak dan Meningkatnya Pemantauan Alat Perekam Transaksi yang Beroperasi dan Optimalnya pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,03	87,41	87,79	3.433.856.134	88,17	3.620.314.521	88,55	3.779.608.361	88,93	3.946.289.090	89,31	4.121.109.697	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alat Perekam Transaksi (APT) yang beroperasi (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase realisasi pendapatan transfer terhadap pendapatan transfer (%)	-	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					10.463.357.780		11.096.468.611		11.637.347.781		12.203.860.245		12.797.307.674	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.493.658.180		8.126.769.011		8.667.648.181		9.234.160.645		9.827.608.074	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	26	26	27	80.000.000	27	80.000.000	28	80.000.000	29	80.000.000	30	80.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dengan Satuan:LAPORAN) (Laporan)	73	80	83		87		91		91		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	22,2	26	26		27		27		28		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,55	12	13		13		13		14		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	15,25	16	17		18		19		20		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.532.705.540	100	5.165.816.371	100	5.706.695.541	100	6.273.208.005	100	6.866.655.434	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Pelayanan BKPSDM Tapin dan Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	87	88	89	2.880.952.640	90	2.880.952.640	91	2.880.952.640	92	2.880.952.640	93	2.880.952.640	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	92	92	93		94		95		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600		2.969.699.600	
Meningkatnya Kompetensi ASN	IKM Pelayanan Dokumen Kepegawaian Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur (Dengan Satuan:Point) (poin)	85	85	86	116.000.000	87	116.000.000	88	116.000.000	89	116.000.000	90	116.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Persentase ASN dengan kualifikasi pendidikan meningkat (%)	10	20	20	1.429.899.600	20	1.429.899.600	25	1.429.899.600	25	1.429.899.600	30	1.429.899.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (Dengan Satuan:Nilai) (poin)	85	85	86	1.423.800.000	87	1.423.800.000	88	1.423.800.000	89	1.423.800.000	90	1.423.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
Meningkatnya Akuisisi Talenta ASN	Persentase ASN yang sudah diasesmen (%)	0	0	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Pengembangan dan Retensi Talenta ASN	Persentase Kesesuaian Talenta ASN dengan kebutuhan Jabatan (%)	0	0	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.563.190.149		1.915.190.149		2.232.190.149		2.429.190.149		2.566.190.149	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.125.000.000		1.400.000.000		1.665.000.000		1.790.000.000		1.875.000.000	
Meningkatnya kajian pengembangan potensi unggulan daerah yang dimanfaatkan - Tersedianya rekomendasi hasil kelitbangan dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase dokumen kajian pengembangan potensi unggulan daerah yang dimanfaatkan (%)	0	100	100	1.055.000.000	100	1.322.000.000	100	1.569.000.000	100	1.676.000.000	100	1.743.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase dokumen rekomendasi hasil kelitbangan dalam pengembangan potensi unggulan daerah (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian permasalahan daerah yang dimanfaatkan - Tersedianya rekomendasi hasil kelitbangan dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase dokumen Kajian penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan (%)	0	100	100	70.000.000	100	78.000.000	100	96.000.000	100	114.000.000	100	132.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase dokumen rekomendasi hasil kelitbangan dalam penyelesaian permasalahan daerahahan daerah (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					438.190.149		515.190.149		567.190.149		639.190.149		691.190.149	
Meningkatnya inovasi daerah yang berkembang dan berkelanjutan - Meningkatnya pemahaman dalam penyusunan inovasi daerah berkelanjutan	Persentase inovasi daerah yang berkembang dan berkelanjutan (%)	21,76	18,25	20,71	138.190.149	22,67	163.190.149	24,38	188.190.149	25,88	213.190.149	27,22	238.190.149	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase inovator yang mampu memenuhi indikator inovasi daerah (%)	21,76	18,25	20,71		22,67		24,38		25,88		27,22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya rekomendasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti	persentase rekomendasi inovasi daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	275.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	100	395.000.000	100	420.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Terlaksananya pembinaan hak kekayaan intelektual	Jumlah individu/kelompok yang memamahami hak kekayaan intelektual (Angka)	10	12	17	25.000.000	22	27.000.000	27	29.000.000	32	31.000.000	37	33.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					26.132.902.153		27.493.932.286		27.566.655.704		29.781.760.839		30.785.070.666	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.698.927.323		19.666.271.605		20.469.375.357		21.219.729.424		21.937.070.145	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	85,95	86	87	3.540.800	88	3.753.248	89	3.893.377	90	4.098.546	91	4.303.474	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas apip (Level)	3	3	3	18.695.386.523	3	19.662.518.357	3	20.465.481.980	4	21.215.630.878	4	21.932.766.671	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					5.723.641.550		6.014.707.404		6.220.393.940		6.487.786.436		6.768.548.559	
Meningkatnya kualitas penyelenggaran pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	77,58	100	100	5.723.641.550	100	6.014.707.404	100	6.220.393.940	100	6.487.786.436	100	6.768.548.559	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.710.333.280		1.812.953.277		876.886.407		2.074.244.979		2.079.451.962	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi yang diselesaikan (%)	100	100	100	1.710.333.280	100	1.812.953.277	100	876.886.407	100	2.074.244.979	100	2.079.451.962	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					58.082.359.423		60.778.470.875		63.078.173.044		65.670.632.538		68.737.306.787	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.459.017.568		50.499.166.322		52.320.967.645		54.248.870.262		56.843.421.309	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bungur - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	23,7	26	26,5	14.737.500	26,5	14.737.500	26,6	14.737.500	26,7	14.737.500	26,8	14.737.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	22,2	24	24		24,2		24,3		24,5		24,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	10,35	12	12		12,2		12,3		12,4		12,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	16,5	18	18		18,1		18,3		18,4		18,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Bungur - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	2.788.313.278	100	2.818.868.750	100	2.857.369.250	100	2.907.868.750	100	2.957.868.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Bungur - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	700.989.258	100	734.000.000	100	785.000.000	100	865.000.000	100	925.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Bungur - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	80,29	80,3	80,5	1.151.608.750	81	1.159.608.750	81,5	1.168.608.750	82	1.178.608.750	82,5	1.769.929.954	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Tengah - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	27	27	27	19.943.550	27	22.443.550	27	28.243.550	27	35.243.550	27	42.943.550	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	25,2	25,2	25,2		25,2		25,2		25,2		25,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	13,5	13,5	13,5		13,5		13,5		13,5		13,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	20,25	20,25	20,25		20,26		20,27		20,28		20,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Tengah - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	2.337.316.723	100	2.380.379.530	100	2.445.096.703	100	2.475.791.255	100	2.534.312.423	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Tengah - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	238.683.792	100	248.183.792	100	260.283.792	100	288.883.792	100	301.683.792	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Tengah - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	71,78	72	72	266.169.190	72,5	334.969.190	73	355.669.190	73,5	401.569.190	74	424.169.190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Candi Laras Selatan - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	23,7	24	24,05	22.928.000	24,1	28.928.000	24,2	34.928.000	24,3	40.928.000	24,4	46.928.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	24	25	25,05		25,1		25,15		25,2		25,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12	13	13,05		13,15		13,2		13,25		13,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	17,25	18	18,1		18,15		18,2		18,25		18,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Selatan - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	2.926.001.039	100	3.029.001.039	100	3.084.001.039	100	3.154.001.039	100	3.211.001.039	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Selatan - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	457.481.400	100	465.481.400	100	476.665.235	100	488.391.335	100	507.481.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Selatan - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	89,73	100	100	397.518.510	100	477.194.349	100	568.518.510	100	653.518.510	100	753.840.749	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Utara - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	26,65	27,15	27,25	17.920.700	27,4	17.925.500	27,65	17.930.300	27,3	17.934.300	28	17.939.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	15,96	16,15	16,25		16,4		16,65		16,96		17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	11,27	11,35	11,55		11,75		11,95		12,5		12,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	0,92	1,25	1,5		1,75		2		2,25		2,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Utara - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	2.132.635.885	100	2.132.638.285	100	2.132.640.685	100	2.132.643.085	100	2.132.645.485	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Utara - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	513.490.200	100	513.495.000	100	513.499.800	100	513.504.600	100	513.509.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Utara - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	70	71	72	917.651.431	73	917.661.831	74	917.672.231	75	917.682.631	80	900.105.031	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kecamatan
Lokpaikat - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	27	27	27	17.943.550	27	18.700.000	27	20.500.000	27	21.700.000	27	23.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	25,2	25,2	25,2		25,2		25,2		25,2		25,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	13,5	13,5	13,5		13,5		13,5		13,5		13,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	20,25	20,25	20,25		20,26		20,27		20,28		20,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Lokpaikat - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.707.862.911	100	3.808.262.911	100	3.908.662.911	100	4.009.062.911	100	4.109.462.911	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Lokpaikat - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	344.115.885	100	380.738.502	100	433.301.165	100	472.186.846	100	521.920.167	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Lokpaikat - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	71,78	72	72	471.211.318	72,5	573.106.318	73	611.106.318	73,5	674.106.318	74	737.106.318	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Hatungun - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	27	27	27	21.002.100	27	24.500.000	27	24.500.000	27	28.000.000	27	28.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	23,7	23,7	23,7		23,7		23,7		23,7		23,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12,3	12,3	12,3		12,3		12,3		12,3		12,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	18,5	18,5	18,75		18,8		18,85		18,9		18,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Hatungun - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	1.962.097.006	100	1.963.050.572	100	2.005.794.560	100	2.006.000.000	100	2.006.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Hatungun - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	320.874.469	100	422.500.000	100	453.000.000	100	482.572.667	100	547.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Hatungun - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	72,67	72,67	72,67	316.101.900	72,67	347.250.000	72,67	397.550.000	72,67	483.300.000	72,67	563.201.466	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Piani - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	24,8	27	27	19.175.750	27	20.600.000	27	22.720.350	27	26.750.000	27	29.750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	17,15	23,7	23,8		23,85		24		24,1		24,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12,95	12,3	12,45		12,5		12,85		13		13,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	19,55	18,5	18,6		18,65		18,9		18,9		18,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Piani - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	2.459.817.349	100	2.536.642.012	100	2.590.337.989	100	2.654.170.017	100	2.741.176.821	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Piani - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	390.066.276	100	440.498.950	100	502.136.847	100	540.521.000	100	590.078.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Piani - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	70	72	75	331.664.500	75,8	369.325.400	76	403.301.900	76,5	427.864.500	76,85	455.983.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Utara - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	22,2	27	27	24.160.000	27	30.160.000	27	36.160.000	27	42.160.000	27	102.160.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	23,7	20	20,05		20,1		20,15		20,2		20,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	10,8	12	12		12		12		12		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	16,5	21	21		21		21		21		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Utara - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5.925.591.096	100	6.157.859.164	100	6.426.174.129	100	6.711.707.282	100	6.686.332.972	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Utara - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	472.262.800	100	528.262.800	100	584.262.800	100	640.262.800	100	800.262.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tapin Utara - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	70	70	70	677.290.610	70	696.290.610	70	715.290.610	70	734.290.610	70	924.290.610	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Selatan - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	23,7	27	27	17.943.550	27	17.943.550	27	17.943.550	27	17.943.550	27	17.943.550	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	21	20	20,05		20,1		20,15		20,2		20,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	10,5	12	12		12		12		12		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	17,5	21	21		21		21		21		21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Selatan - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.139.231.355	100	3.139.231.355	100	3.139.231.355	100	3.139.231.355	100	3.139.231.355	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Selatan - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	201.571.092	100	389.728.186	100	522.661.641	100	632.004.805	100	767.004.805	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Selatan - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	70	70	70	577.808.735	70	625.727.020	70	693.727.020	70	794.839.930	70	880.302.187	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Bakarangan - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	27	27	27	8.500.000	27	9.850.000	27	11.250.000	27	12.750.000	27	14.250.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	25,2	25,2	25,2		25,2		25,2		25,2		25,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	13,5	13,5	13,5		13,5		13,5		13,5		13,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	20,25	20,25	20,25		20,25		20,25		20,25		20,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Bakarangan - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	2.414.587.655	100	2.456.520.963	100	2.499.380.666	100	2.575.402.491	100	2.617.304.755	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Bakarangan - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	365.666.322	100	484.180.369	100	521.849.374	100	534.250.264	100	589.170.658	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kecamatan
Bakarangan - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	71,78	72	72	565.096.138	72,5	593.750.000	73	674.500.000	73,5	755.250.000	74	836.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Salam Babaris - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	23,7	23,7	24,05	19.075.000	21,1	20.300.000	24,2	22.075.000	24,3	24.350.000	24,4	26.575.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	24	24	25,05		25,1		25,15		25,2		25,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	12	12	12,05		13,15		13,2		13,25		13,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	17,25	17,25	18,1		18,15		18,2		18,25		18,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Salam Babaris - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	1.756.325.000	100	1.806.450.000	100	1.856.575.000	100	1.906.700.000	100	1.956.825.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Salam Babaris - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	338.650.000	100	352.000.000	100	358.350.000	100	373.700.000	100	379.150.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Salam Babaris - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	72,78	72	72	341.725.000	72,5	372.275.000	73	390.875.000	73,5	409.600.000	74	435.575.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Binuang - Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP-Perencanaan KInerja (Nilai)	27	27	27	18.000.000	27	25.000.000	27	32.000.000	27	41.000.000	27	41.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Evaluasi Internal (Nilai)	25,25	25,25	25,25		25,25		25,25		25,25		25,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pelaporan Kinerja (Nilai)	13,5	13,55	13,56		13,57		13,58		13,59		13,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Komponen AKIP - Pengukuran Kinerja (Nilai)	25,2	25,2	25,2		25,2		25,2		25,2		25,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Binuang - Meningkatnya kinerja tindaklanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.102.210.995	100	4.206.946.174	100	4.238.884.925	100	4.327.886.629	100	4.432.766.971	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Binuang - Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	905.000.000	100	990.000.000	100	1.075.000.000	100	1.130.000.000	100	1.195.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Binuang - Meningkatnya pelayanan sektetariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	78,61	79	79,1	1.323.000.000	79,2	1.396.000.000	79,3	1.471.000.000	79,4	1.533.000.000	79,5	1.595.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					508.135.989		526.136.789		546.137.589		572.138.389		594.539.189	
Bakarangan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	92,13	92,13	92,14	37.264.942	92,15	37.264.942	92,16	37.264.942	92,17	37.264.942	92,18	37.264.942	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Tengah - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	87,57	89	90	32.264.942	90,15	35.264.942	90,3	37.264.942	90,45	42.264.942	90,6	46.664.942	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Selatan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	86,9	90	90,05	16.762.200	90,1	16.762.200	90,15	16.762.200	90,2	16.762.200	90,25	16.762.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Hatungun - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	0	90	90,05	29.000.000	90,1	30.000.000	90,15	30.000.000	90,2	33.000.000	90,25	33.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Piani - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	87,2	90	90,05	40.003.200	90,1	40.003.200	90,13	40.003.200	90,18	40.003.200	90,23	40.003.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Utara - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	84,25	84,5	84,75	14.517.200	85	14.518.000	85,25	14.518.800	85,5	14.519.600	85,75	14.520.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Bungur - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	88,13	90	90,5	111.381.100	91	111.381.100	91,5	111.381.100	92	111.381.100	92,5	111.381.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Candi Laras Selatan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	89,63	90	90,15	46.542.405	90,3	49.542.405	90,45	52.542.405	90,6	55.542.405	90,75	58.542.405	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Utara - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	91,46	92,5	92,55	50.000.000	92,6	55.000.000	92,65	60.000.000	92,7	65.000.000	92,75	70.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Binuang - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	90,025	91	91,1	40.400.000	91,2	46.400.000	91,3	56.400.000	91,4	66.400.000	91,5	76.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Lokpaikat - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	97,21	90	90,05	10.000.000	90,1	10.000.000	90,15	10.000.000	90,2	10.000.000	90,25	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Salam Babaris - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	87,11	87,2	87,3	80.000.000	88,4	80.000.000	88,5	80.000.000	88,6	80.000.000	89,7	80.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7.739.322.326		8.262.508.344		8.589.216.840		9.089.385.167		9.443.181.889	
Bakarangan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Poin)	92,13	92,13	92,14	112.361.600	92,15	117.361.600	92,16	122.361.600	92,17	127.361.600	92,18	132.361.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Tengah - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Poin)	87,57	89	90	114.722.000	90,15	124.722.000	90,3	131.922.000	90,45	140.522.000	90,6	151.922.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Selatan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Poin)	86,9	90	90,05	261.722.000	90,1	261.722.000	90,15	261.722.000	90,2	261.722.000	90,25	261.722.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Hatungun - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Poin)	88,19	90	90,05	83.000.000	90,1	90.000.000	90,15	95.000.000	90,2	102.000.000	90,25	102.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Piani - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Poin)	87,2	90	90,05	87.633.527	90,1	94.322.980	90,13	98.322.600	90,18	103.850.350	90,23	105.900.650	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Utara - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	84,25	84,5	84,75	103.003.860	85	103.007.860	85,25	103.011.860	85,5	103.015.860	85,75	103.019.860	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Bungur - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Poin)	88,13	90	90,5	101.060.351	91	98.256.912	91,5	36.070.200	92	131.070.200	92,5	76.070.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Selatan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Poin)	89,63	90	90,15	117.326.000	90,3	124.326.000	90,45	131.326.000	90,6	138.326.000	90,75	145.326.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Utara - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Poin)	91,46	92,5	92,55	600.000.000	92,6	700.000.000	92,65	700.000.000	92,7	700.000.000	92,75	700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Binuang - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Poin)	90,025	91	91,1	834.185.459	91,2	934.185.459	91,3	1.034.185.459	91,4	1.134.185.459	91,5	1.234.185.459	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lokpaikat - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial (Poin)	87,77	90	90,05	235.495.100	90,1	250.198.500	90,15	275.198.500	90,2	300.198.500	90,25	325.018.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Salam Babaris - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	87,11	87,2	87,3	17.750.000	88,4	18.075.000	88,5	18.600.000	88,6	19.325.000	89,7	19.825.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Kelurahan Tambarangan - Nilai survei kepuasan masyarakat kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	86,9	90	90,05	525.595.377	90,1	554.125.766	90,15	578.499.844	90,2	604.029.055	90,25	630.772.060	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Kelurahan Binuang - Nilai survei kepuasan masyarakat kelurahan	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	80,52	80,77	81	568.816.890	81,25	599.693.430	81,5	626.071.873	81,75	653.700.439	82	682.642.612	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Kelurahan Raya Belanti - Nilai survei kepuasan masyarakat kelurahan	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	79,61	79,75	80	590.227.683	80,25	622.266.444	80,5	649.637.795	80,75	678.306.326	81	708.337.910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Kelurahan Karangan Putih - Nilai survei kepuasan masyarakat kelurahan	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	79,61	79,75	80	583.853.151	80,25	615.545.890	80,5	642.621.627	80,75	670.980.535	81	700.687.773	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Kelurahan Kupang - Nilai survei kepuasan masyarakat kelurahan	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	80	81	82	597.897.987	83	630.353.109	84	658.080.164	85	687.121.257	86	717.543.116	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Kelurahan Rantau Kiwa - Nilai survei kepuasan masyarakat kelurahan	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	80	81	82	587.842.055	83	619.751.320	84	647.012.040	85	675.564.696	86	705.474.896	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Kelurahan Rangda Malingkung - Nilai survei kepuasan masyarakat kelurahan	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	89,25	89,3	89,35	566.736.935	89,4	597.500.571	89,45	623.782.557	89,5	651.310.096	89,55	680.146.439	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Kelurahan Rantau Kanan - Nilai survei kepuasan masyarakat kelurahan	Nilai Point Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Point) (poin)	80	81	82	541.147.708	83	570.522.308	84	595.617.613	85	621.902.233	86	649.436.561	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Kelurahan Bitahan - Nilai survei kepuasan masyarakat kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	87,5	90	90,05	508.944.643	90,1	536.571.195	90,15	560.173.108	90,2	584.893.561	90,25	610.789.353	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					135.628.520		149.388.620		165.900.470		183.851.620		203.053.600	
Bakarangan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan	92,13	92,13	92,14	10.459.600	92,15	10.459.600	92,16	10.459.600	92,17	10.459.600	92,18	10.459.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	ketentraman dan ketertiban umum (Poin)													
Tapin Tengah - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	87,57	89	90	22.841.700	90,15	26.841.700	90,3	28.641.700	90,45	30.641.700	90,6	35.341.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Selatan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	86,9	90	90,05	22.841.700	90,1	22.841.700	90,15	22.841.700	90,2	22.841.700	90,25	22.841.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Hatungun - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	88,19	90	90,05	7.000.000	90,1	7.500.000	90,15	7.500.000	90,2	8.000.000	90,25	8.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Piani - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	87,2	90	90,05	7.732.000	90,1	8.915.500	90,13	9.500.750	90,18	10.850.300	90,23	11.300.680	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Utara - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	84,25	84,5	84,75	19.830.620	85	19.832.220	85,25	19.833.820	85,5	19.835.420	85,75	19.837.020	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Bungur - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	88,13	90	90,5	7.545.800	91	7.545.800	91,5	7.545.800	92	7.545.800	92,5	7.545.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Selatan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	89,63	90	90,15	11.999.600	90,3	13.999.600	90,45	15.999.600	90,6	17.999.600	90,75	19.999.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Utara - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	91,46	92,5	92,55	5.466.000	92,6	7.466.000	92,65	9.466.000	92,7	11.466.000	92,75	13.466.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Binuang - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	90,025	91	91,1	10.511.500	91,2	14.511.500	91,3	24.511.500	91,4	34.511.500	91,5	44.511.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lokpaikat - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	84,44	90	90,05	6.000.000	90,1	6.000.000	90,15	6.000.000	90,2	6.000.000	90,25	6.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Salam Babaris - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	87,11	87,2	87,3	3.400.000	88,4	3.475.000	88,5	3.600.000	88,6	3.700.000	89,7	3.750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					566.577.520		605.441.600		637.793.200		696.744.800		706.719.300	
Bakarangan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	92,13	92,13	92,14	53.468.720	92,15	55.459.600	92,16	56.459.600	92,17	57.459.600	92,18	58.459.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Tengah - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	87,57	89	90	52.590.320	90,15	58.590.320	90,3	61.390.320	90,45	63.590.320	90,6	68.290.320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Selatan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	86,9	90	90,05	52.590.320	90,1	51.711.920	90,15	51.711.920	90,2	51.711.920	90,25	51.711.920	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Hatungun - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	88,19	90	90,05	55.500.000	90,1	60.750.000	90,15	63.750.000	90,2	69.000.000	90,25	69.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Piani - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	87,2	90	90,05	52.033.450	90,1	56.033.450	90,13	60.033.450	90,18	64.033.450	90,23	68.033.450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Utara - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	84,25	84,5	84,75	60.486.100	85	60.487.700	85,25	60.489.300	85,5	60.490.900	85,75	60.492.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Bungur - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	88,13	90	90,5	37.545.800	91	37.545.800	91,5	37.545.800	92	62.545.800	92,5	41.318.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Candi Laras Selatan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	89,63	90	90,15	52.033.450	90,3	56.033.450	90,45	60.033.450	90,6	64.033.450	90,75	68.033.450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Utara - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	91,46	92,5	92,55	12.645.500	92,6	14.645.500	92,65	16.645.500	92,7	18.645.500	92,75	20.645.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Binuang - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	90,025	91	91,1	52.983.860	91,2	62.983.860	91,3	72.983.860	91,4	82.983.860	91,5	92.983.860	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Lokpaikat - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Poin)	84,44	90	90,05	36.000.000	90,1	41.400.000	90,15	46.800.000	90,2	52.200.000	90,25	57.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Salam Babaris - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	87,11	87,2	87,3	48.700.000	88,4	49.800.000	88,5	49.950.000	88,6	50.050.000	89,7	50.150.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					673.677.500		735.829.200		818.157.300		879.642.300		946.391.500	
Bakarangan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	92,13	92,13	92,14	80.653.800	92,15	80.653.800	92,16	80.653.800	92,17	80.653.800	92,18	80.653.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Tengah - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	87,57	89	90	44.731.400	90,15	67.731.400	90,3	95.731.400	90,45	117.731.400	90,6	150.531.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Selatan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	86,9	90	90,05	42.398.400	90,1	42.398.400	90,15	42.398.400	90,2	42.398.400	90,25	42.398.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Hatungun - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	88,19	90	90,05	42.000.000	90,1	45.000.000	90,15	45.000.000	90,2	48.000.000	90,25	48.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Piani - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	87,2	90	90,05	58.598.200	90,1	65.477.200	90,13	87.475.500	90,18	91.580.700	90,23	93.250.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Utara - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	84,25	84,5	84,75	53.206.500	85	53.211.300	85,25	53.216.100	85,5	53.220.900	85,75	53.225.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Bungur - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	88,13	90	90,5	37.192.100	91	37.192.100	91,5	37.192.100	92	37.192.100	92,5	37.192.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Candi Laras Selatan - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	89,63	90	90,15	162.482.250	90,3	177.482.250	90,45	192.482.250	90,6	207.482.250	90,75	222.482.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tapin Utara - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	91,46	92,5	92,55	67.000.000	92,6	70.000.000	92,65	75.000.000	92,7	80.000.000	92,75	85.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Binuang - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	90,025	91	91,1	22.482.750	91,2	29.482.750	91,3	39.482.750	91,4	49.482.750	91,5	59.482.750	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Lokpaikat - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Poin)	97,21	90	90,05	50.432.100	90,1	54.500.000	90,15	56.600.000	90,2	58.700.000	90,25	60.800.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Salam Babaris - Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Poin)	87,11	87,2	87,3	12.500.000	88,4	12.700.000	88,5	12.925.000	88,6	13.200.000	89,7	13.375.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					11.741.470.311		12.388.242.891		12.901.472.186		13.480.209.288		14.036.462.578	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.983.031.207		6.216.193.000		6.572.749.146		6.958.638.633		7.408.764.307	
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	73,85	81	81	35.666.260	81,5	35.666.260	82	35.666.260	82,5	35.666.260	83	35.666.260	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bangsa Dan Politik
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3.222.820.183	100	3.455.981.976	100	3.515.156.244	100	3.801.045.731	100	4.101.171.405	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	90	90	90	1.647.666.316	90	1.647.666.316	90	1.647.666.316	90	1.647.666.316	90	1.647.666.316	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	80	80	80	1.076.878.448	81	1.076.878.448	82	1.374.260.326	83	1.474.260.326	84	1.624.260.326	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					4.382.300.280		4.382.300.280		4.382.300.280		4.534.601.883		4.566.139.472	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persentase masyarakat yang lulus dengan syarat 80% dari total peserta (%)	83	83	83,3	4.382.300.280	83,5	4.382.300.280	83,8	4.382.300.280	83,9	4.534.601.883	84	4.566.139.472	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan forum pembauran kebangsaan (%)	-	72	72		72,4		72,6		73		73,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					948.240.182		1.336.308.969		1.364.969.414		1.367.673.024		1.373.593.679	
Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat	Persentase masyarakat yang lulus dengan syarat 80% dari total peserta (%)	100	100	100	98.408.090	100	98.408.090	100	127.068.535	100	129.772.145	100	135.692.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bangsa Dan Politik
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan partai Politik	Persentase Parpol yang mendapatkan predikat telah sesuai dengan peraturan yang terkait (%)	100	100	100	849.832.092	100	1.237.900.879	100	1.237.900.879	100	1.237.900.879	100	1.237.900.879	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					16.110.200		26.110.200		36.110.200		36.699.222		31.468.594	
Meningkatnya partisipasi ormas dalam pembangunan daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	30	30	30	16.110.200	30,5	26.110.200	31	36.110.200	31,5	36.699.222	32	31.468.594	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					229.850.609		229.850.609		287.490.567		293.590.927		346.590.927	
Meningkatnya pencegahan pemakaian narkotika	Persentase kampanye, penyuluhan anti narkotika yang sesuai standar (%)	80	81	82	173.568.300	82,5	173.568.300	83	212.889.678	83,5	212.889.678	84	262.889.678	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Jumlah Peserta Penyuluhan Anti Narkotika (Peserta)	200	200	200		200		200		200		200		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya kerja sama, toleransi dan kesetaraan antar umat beragama	persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan forum kerukunan umat beragama (%)	-	73	73	56.282.309	73,5	56.282.309	73,8	74.600.889	74	80.701.249	74,3	83.701.249	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					181.937.833		197.479.833		257.852.579		289.005.599		309.905.599	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase potensi konflik sosial yang diselesaikan (%)	100	81	81	181.937.833	82	197.479.833	83	257.852.579	84	289.005.599	85	309.905.599	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					**1.825.852.891.609**		**1.904.745.204.615**		**2.000.700.212.715**		**2.101.573.998.438**		**2.200.051.554.764**	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dibagi menjadi beberapa indikator kinerja yakni Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama, Indikator Utama Pembangunan, dan Indikator Kinerja Daerah yang didalamnya terdapat Indikator Kinerja Kunci. Rincian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapin dapat dilihat sebagai berikut.

4.2.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara makro/umum. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun target indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2.
Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tapin

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,06	74,29-74,4	74,5 -75,2	75,21-76,71	76,82-77,22	77,42-78,72	78,52-80,22
2	Gini Ratio	Nilai	0,260	0,259-0,257	0,259-0,255	0,259-0,252	0,258-0,25	0,258-0,247	0,256-0,245
3	Tingkat Kemiskinan	%	3,33	3,25-2,50	3,16 - 2,49	3,02-2,47	2,89-2,43	2,75-2,29	2,61-2,15
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,89-3,09	3,67 - 3,09	3,66-3	3,60-2,9	3,55-2,81	3,50-2,72
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,3-5,6	5,5 - 5,97	5,57-6,04	5,63-6,1	5,7-6,17	6,17-8,00
6	PDRB Perkapita	(Rp Juta)	72,45	74,32	81,67	89,02	96,36	103,71	111,06
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,11	69,87	70,08	70,30	70,51	70,72	70,93
8	Persentase Penurunan Emisi GRK	TonCO_2	NA	64.330,25	111.769,89	194.028,09	186.851,01	155.859,87	231.336,78
9	Kontribusi PDRB Kab. Tapin ke Provinsi	%	5,07	5,30	5,39	5,47	5,56	5,64	5,73

4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tapin. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program

pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2025-2029.

Tabel IV.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tapin tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	74,26	75,71	77,17	78,62	80,08	
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,2	76,71	77,22	78,72	80,22	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,51	78,14	78,77	79,93	80,75	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	70,08	70,42	70,76	71,11	71,45	
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,97	6,04	6,1	6,17	8,00	
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	99	98	97	96	95	
7.	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	81,67	89,02	96,36	103,71	111,06	
8.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,2	3,26	3,33	3,4	3,47	
9.	Indeks Kesehatan	poin	0,844	0,845	0,846	0,900	0,905	
10.	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,79	88,17	88,55	88,93	89,31	
12.	Nilai SAKIP	poin	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
13.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	70	72	73	74	75	
14.	Indeks Pendidikan	poin	0,636	0,644	0,659	0,700	0,706	
15.	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	1,67	1,56	1,45	1,34	1,21	
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,09	3	2,91	2,81	2,71	
17.	Rasio Gini	Indeks	0,255	0,252	0,247	0,242	0,237	
18.	Indeks Infrastruktur	Angka	79,88	80,68	81,49	82,3	83,13	
19.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7	
20.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	82	82,5	83	83,5	84	
21.	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	5,16	5,22	5,28	5,34	5,4	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
22.	Tingkat Kemiskinan	(%)	2,49	2,47	2,43	2,29	2,15	
23.	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)	Indeks	91,01	92,03	930,7	94,11	95,17	
24.	Nilai LPPD	poin	3,25	3,3	3,5	3,55	3,6	
25.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	74	75	75,7	76	77	
26.	Nilai RB General	poin	68,07	68,62	69,18	70,26	71	
27.	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	8,01	8,1	8,19	8,28	8,37	
28.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,34	3,42	3,51	3,6	3,69	
29.	Nilai RB Tematik	poin	9,44	9,52	9,59	9,67	9,75	
30.	Survey Penilaian Integritas	poin	75,09	76,40	77,71	79,02	80,34	
31.	LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	7,52	7,85	8,16	8,25	8,5	

4.2.3 Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapin diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.4.
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapin tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	66,11	69,74	70,08	70,42	70,76	71,11	71,45	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	106,7	100	99	98	97	96	95	
3	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	0	1,7	1,67	1,56	1,45	1,34	1,21	
4	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7	
5	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	93	92,51	93,56	94,59	95,58	96,56	97,6	
6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	66,11	66,28	66,62	66,96	67,3	67,64	67,99	
8	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	88,58	89,06	89,54	90,02	90,5	90,98	91,46	
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,65	1,17	1,13	1,1	1,05	1,02	0,99	
10	Rasio Penduduk	%	101,27	102,07	102,01	101,93	101,86	101,78	101,71	
11	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	2.680	2.706,31	2.733,37	2.760,7	2.788,31	2.816,19	2.844,35	
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	54,4	60,35	62,33	64,31	66,3	68,28	70,26	
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	80,67	82,43	83,306	84,185	85,063	85,942	86,82	
14	Intensitas Energi Primer	(SBM/Rp Milyar)	1,61	1,64	1,66	1,68	1,69	1,71	1,73	
15	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Tapin	%	71,73	74,11	74,91	75,7	76,5	77,29	78,08	
16	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	81,38	83,07	83,92	84,77	85,61	86,46	87,31	
17	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	28.892,38	30.575,32	31.009,86	31.444,4	31.878,94	32.313,47	32.748,01	
18	Kapasitas Air Baku	(%)	5,79	5,81	5,82	5,83	5,84	5,85	5,86	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
19	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93,21	93	93	94	94	95	96	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,06	74,4	75,2	76,71	77,22	78,72	80,22	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,6	5,97	6,04	6,1	6,17	8,00	
3	PDRB Per Kapita	Rp	72,45	74,32	81,67	89,02	96,36	103,71	111,06	
4	Indeks Pendidikan	poin	0,615	0,628	0,636	0,644	0,659	0,700	0,706	
5	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	81	81,05	82	82,5	83	83,5	84	
6	Rasio Gini	Indeks	0,26	0,257	0,255	0,252	0,247	0,242	0,237	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,16	3,09	3	2,91	2,81	2,71	
8	Indeks Kesehatan	poin	0,842	0,843	0,844	0,845	0,846	0,900	0,905	
9	Tingkat Kemiskinan	(%)	3,33	2,50	2,49	2,47	2,43	2,29	2,15	
10	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	226	225	224	223	222	221	220	
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase penemuan kasus TB di Kabupaten Tapin	%	49,71	52,11	54,51	56,9	59,3	61,69	64,09	
14	Persentase Penduduk Bekerja yang Memiliki Jenjang Pendidikan SLTA ke Atas	%	38,22	40,15	41,19	42,24	43,28	44,32	45,36	
15	Indeks Gini	Poin	0,26	0.257-0.259	0.255-0.258	0.252-0.257	0.247-0.257	0.242-0.252	0.237-0.245	
16	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,15	8,31	8,42	8,53	8,64	8,75	8,85	
18	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	
19	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,56	0,52	0,512	0,499	0,486	0,474	0,462	
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	21,2	21,2	25	28,57	32,14	35,71	39,28	
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,34	12,64	12,79	12,93	13,08	13,22	13,37	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	85	100	100	100	100	100	100	
23	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja	%	67,41	68,09	68,43	68,78	69,12	69,46	69,8	
24	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	13,2	12,6	12	11,4	10,8	10,2	10,2	
25	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,72	74,9	75,1	75,29	75,49	75,68	75,88	
26	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	0	26	27,7	29,4	31,1	32,8	34,5	
27	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	100	100	100	100	100	100	100	
28	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Angka	18,18	24,24	28,03	31,82	35,6	39,39	43,18	
29	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	0	3,845	6,725	9,61	12,5	15,38	18,27	
30	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	0	15,38	18,46	21,53	24,61	27,69	30,77	
31	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	59,11	60,46	61,14	61,81	62,49	63,16	63,84	
32	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,14	86,2	86,35	86,5	86,7	86,8	87	
33	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,15	64,2	65	65,2	65,3	66	66,3	
34	Skor Kabupaten Layak Anak	Skor	585	620	650	700	720	750	780	
35	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IBANGGA)	Indeks	62,62	65	66,5	68,1	69,6	71,2	72,9	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	72,8	73,53	74,26	75,71	77,17	78,62	80,08	
2	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,74	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	
3	Indeks Infrastruktur	Angka	78,31	79,09	79,88	80,68	81,49	82,3	83,13	
4	Indeks Inovasi Daerah	Angka	67,68	73,14	74	75	75,7	76	77	
5	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	4,23	5,1	5,16	5,22	5,28	5,34	5,4	
6	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,56	7,91	8,01	8,1	8,19	8,28	8,37	
7	LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	7,18	7,35	7,52	7,85	8,16	8,25	8,5	
8	Net Ekspor Barang dan Jasa	%	33,07	33,57	32,375	30,67	28,965	27,265	25,56	
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	8,04	8,44	8,54	8,65	8,75	8,85	8,95	
10	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	3,01	5,7	6,30	6,9	7,5	8,1	8,71	
11	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Indeks	6,07	6,37	6,5	6,62	6,73	6,83	6,91	
12	Return on Asset (ROA) BUMD	%	1,14	1,63	1,87	2,12	2,36	2,6	2,84	
13	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	1,26	1,56	1,77	1,97	2,18	2,38	2,59	
14	Rasio Kewirausahaan	Persentase	0	5	5,14	5,28	5,41	5,55	5,69	
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	9,28	2,07	2,13	2,19	2,24	2,3	2,36	
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	17,15	17,32	18,86	19,32	19,775	20,23	20,68	
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,12	69,49	70,26	71,02	71,79	72,55	73,32	
18	Tingkat Inflasi	(%)	2,52	2	2	2	2	2	2	
19	Kontribusi Sektor Pertanian (ADHB)	%	14,58	14,6	14,76	14,93	15,1	15,27	15,44	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
20	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	(%)	0,38	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47	
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	52,67	53,73	54,32	54,91	55,5	56,1	56,69	
22	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Nilai	6,07	0,9	0,84	0,78	0,71	0,65	0,59	
23	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	63,03	68,85	70,15	71,47	72,82	74,2	75,6	
24	Return on Aset (ROA) BUMD	%	0,55	1,04	1,28	1,28	1,77	2,01	2,25	
25	Angka Ketergantungan	%	47,14	47,1	46,9	46,61	46,25	45,91	45,66	
26	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	7,2	7,63	7,77	7,91	8,05	8,19	8,33	
27	Rasio PAD	%	0:0	0:1.40	1.40:1.40	1.40:1.43	1.43:1.45	1.45:1.46	1.46:1.48	
28	Jumlah Tamu Wisatawan (Hotel Berbintang)	Orang	3.156.802	3.156.828	3.156.855	3.156.883	3.156.910	3.156.938	3.220.077	
29	Jumlah kamar yang terjual	Unit	0	21,223	21,684	22,146	22,607	23,068	23,529	
30	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	2,65	2,92	3,08	3,24	3,39	3,55	3,71	
31	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	(%)	30	55	60	65	70	75	80	
32	Kontribusi PDRB Kab/Kota ke Provinsi	*	5,07	5,3	5,39	5,47	5,56	5,64	5,73	
33	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	55,5	56,62	60,2	60,83	61,45	62,07	62,7	
34	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	2,74	3,31	3,35	3,38	3,42	3,46	3,5	
35	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	%	4,8	5,7	6,3	6,9	7,5	8,1	8,71	
36	Rasio Volume	%	0:0.05	0.05:0.29	0.29:0.41	0.41:0.53	0.53:0.64	0.64:0.76	0.76:0.88	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Usaha Koperasi terhadap PDRB									
37	Persentase Desa Mandiri	%	59,52	38,09	41,27	44,44	47,62	50,79	53,97	
38	Indeks Desa	Poin	0	490	493,2	496,4	499,6	502,8	506	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,27	76,9	77,51	78,14	78,77	79,93	80,75	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,69	3,13	3,2	3,26	3,33	3,4	3,47	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,03	87,41	87,79	88,17	88,55	88,93	89,31	
4	Nilai SAKIP	poin	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	66,98	68	70	72	73	74	75	
6	Nilai LPPD	poin	-	3,1	3,25	3,3	3,5	3,55	3,6	
7	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)	Indeks	89	90	91,01	92,03	930,7	94,11	95,17	
8	Nilai RB General	poin	66,98	67,53	68,07	68,62	69,18	70,26	71	
9	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,15	3,25	3,34	3,42	3,51	3,6	3,69	
10	Survey Penilaian Integritas	poin	72,47	73,78	75,09	76,40	77,71	79,02	80,34	
11	Nilai RB Tematik	poin	9,29	9,37	9,44	9,52	9,59	9,67	9,75	
12	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	61	61	76	76	76	76	76	
13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,81	4,1	-	-	-	-	-	
14	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	(%)	64,62	67	67,75	68,5	69,25	70	70,75	
15	Indeks Integritas Nasional	Indeks	72,47	73,78	75,09	76,4	77,71	79,02	80,34	
16	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	poin	4,54	4	4,1	4,2	4,3	4,5	4,7	
17	Indeks Pemerintaha Digital (Pemdi)	Indeks	-	-	3,5	3,7	3,8	4	4,2	
18	Persentase Capaian Aksi HAM	%	95,48	95,89	96,10	96,3	96,51	96,71	96,92	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
19	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,76	3,82	3,86	3,89	3,92	3,96	3,97	
21	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	50	51,48	52,96	54,43	55,91	57,38	58,86	
22	Nilai RB General	Angka	66,98	67,53	68,07	68,62	69,187	70,26	70,28	
23	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	

4.2.4 Indikator Utama Pembangunan

Indikator utama pembangunan merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Indikator ini mencakup aspek-aspek fundamental yang mencerminkan kemajuan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta keberlanjutan lingkungan yang diharapkan mampu memotret setiap tahapan pembangunan jangka panjang. Adapun indikator utama pembangunan Kabupaten Tapin dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel IV.5.
Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tapin

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,06	74,29-74,4	74,5 - 75,2	75,21-76,71	76,82-77,22	77,42-78,72	78,52-80,22
2	Gini Ratio	Nilai	0,260	0,259-0,257	0,259-0,255	0,259-0,252	0,258-0,25	0,258-0,247	0,256-0,245
3	Tingkat Kemiskinan	%	3,33	3,25-2,50	3,16 - 2,49	3,02-2,47	2,89-2,43	2,75-2,29	2,61-2,15
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	3,89-3,09	3,67 - 3,09	3,66-3	3,60-2,9	3,55-2,81	3,50-2,72
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	5,3-5,6	5,5 - 5,97	5,57-6,04	5,63-6,1	5,7-6,17	6,17-8,00
6	PDRB Perkapita	Juta Rp.	72,45	74,32	81,67	89,02	96,36	103,71	111,06
7	Indeks inovasi daerah	Poin	68,67	73,13	75,51	77,96	80,5	81,81	83,14
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	0,06	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	0,21
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	66,11	69,87	70,08	70,30	70,51	70,72	70,93
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	% RT	80,67*	82,43	83.306	84.185	85.063	85.942	86.820
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	ton	340,91	350	400	500	600	700	800

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab. Tapin	%	79,29	80	81	82	83	84	85
13	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N.a	1,70	1,67	1,56	1,45	1,34	1,21
14	Indeks Risiko Bencana	poin	106,7	100	99	98	97	96	95
15	Usia Harapan Hidup	tahun	74,72	74,9	75,10	75,29	75,49	75,68	75,88
16	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	226	225	224	223	222	221	220
17	Prevalensi Stunting	%	13,2	12,6	12	11,4	10,8	10,2	10,2
18	Persentase penemuan kasus TB di Kabupaten Tapin	%	49,71	52,11	54,51	56,90	59,30	61,69	64,09
19	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan NasionaI	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,15	8,31	8,42	8,53	8,64	8,75	8,85
22	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,34	12,64	12,79	12,93	13,08	13,22	13,37
23	- Rata-Rata Kemampuan Literasi SD	%	70,51	65,98	68,48	70,98	73,48	75,98	78,48
24	- Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD	%	62,13	59,79	62,69	65,59	68,49	71,39	74,29
25	- Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP	%	68,23	68,07	69,17	70,27	71,37	72,47	73,57
26	- Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP	%	68,81	61,43	62,93	64,43	65,93	67,43	68,93
27	- Literasi Membaca	%	N.a	15,38	18,46	21,53	24,61	27,69	30,77
28	- Numerasi	%	N.a	3.845	6.725	9,61	12,5	15,38	18,27
29	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	85	100	100	100	100	100	100
30	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	81	81,05	82	82,50	83	83,50	84
31	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	angka	18,18*	24,24	28,03	31,82	35,60	39,39	43,18
32	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indek	62,62	65	66,5	68,1	69,6	71,2	72,9

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
33	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,577	0,520	0,512	0,499	0,486	0,474	0,462
34	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja	%	67,41*	68,09	68,43	68,78	69,12	69,46	69,80
35	Persentase Penduduk Bekerja yang Memiliki Jenjang Pendidikan SLTA ke Atas	%	38,22	40,15	41,19	42,24	43,28	44,32	45,36
36	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	N.a	26	27,70	29,40	31,10	32,80	34,50
37	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,80	4,80	4,82	4,84	4,86	4,88	4,90
38	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Proxy LPE Kategori pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	7,18	7,35	7,52	7,85	8,16	8,25	8,5
39	Jumlah kamar yang terjual	Unit/tahun	36,995	37.112	37.235	37.542	37.875	38.223	38.564
40	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Proxy Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	orang	591	600	610	615	630	650	700
41	Rasio Kewirausahaan	%		5	5,14	5,28	5,41	5,55	5,69
42	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	2,65*	2,92	3,08	3,24	3,39	3,55	3,71
43	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	1,26*	1,56	1,77	1,97	2,18	2,38	2,59
44	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51
45	Return on Aset (ROA) BUMD (BPR)	%	0,55*	1,04	1,28	1,53	1,77	2,01	2,25
46	Return on Aset (ROA) BUMD (PDAM)	%	1,14*	1,63	1,87	2,12	2,36	2,60	2,84
47	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	52,67*	53,73	54,32	54,91	55,50	56,10	56,69
48	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer pada PJU	%	8,04	8,44	8,54	8,65	8,75	8,85	8,95

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	di Kabupaten Tapin								
49	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	6,07*	6,37	6,50	6,62	6,73	6,83	6,91
50	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	17,15*	17,32	18,86	19,32	19.775	20,23	20,68
51	Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	33,07*	33,57	32.375	30,67	28.965	27.265	25,56
52	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	63,03*	68,85	70,15	71,47	72,82	74,20	75,60
53	Persentase Desa Mandiri	%	59,52	30,95%	36,51%	39,68%	42,86%	46,03%	49,21%
54	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	%		1,40	1,42	1,43	1,45	1,46	1,48
55	Tingkat Inflasi	%	2,52**	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
56	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kab/Kota	nilai	0,5	0,90	0,84	0,78	0,71	0,65	0,59
57	Kontribusi PDRB Kab. Tapin ke Provinsi	%	5,07	5,30	5,39	5,47	5,56	5,64	5,73
58	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku	%	14,58	14,60	14,76	14,93	15,10	15,27	15,44
59	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	55,5*	56,62	60,20	60,83	61,45	62,07	62,70
60	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	30*	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
61	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	76,27	76,89	77,52	78,14	78,76	79,39	80,01
62	Indeks Reformasi Hukum	poin	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
63	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	poin	(SPBE) 3,09*	3,25	3,34	3,43	3,51	3,60	3,69
64	Indeks Pelayanan Publik	poin	1,29*	1,63	1,80	1,96	2,13	2,30	2,47
65	Indeks Integritas Nasional/ proxy Survei Penilaian Integritas	poin	72,47	73,78	75,09	76,40	77,71	79,02	80,34
66	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100
67	Persentase Capaian Aksi HAM	%	95,48*	95,89	96,10	96,30	96,51	96,71	96,92
68	Indeks Demokrasi Indonesia	%	80,34	80,5	80,6	80,7	80,8	80,85	80,9

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
69	Indeks Daya Saing Daerah	poin	2,99*	3,13	3,2	3,26	3,33	3,4	3,47
70	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	64,62**	67,00	67,75	68,50	69,25	70,00	70,75
71	Total Dana Pihak Ketiga (BPR)/PDRB	%	0,38*	0,39	0,41	0,42	0,44	0,45	0,47

4.2.5 Indikator TPB/SDG's

Implementasi target indikator **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)** dalam RPJMD Kabupaten Tapin merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan agenda pembangunan nasional dan komitmen global. Integrasi ini dilakukan melalui penetapan indikator kinerja utama daerah yang beririsan langsung dengan capaian TPB, sehingga setiap program dan kegiatan perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian sasaran RPJMD, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Tapin diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.6.
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 TANPA KEMISKINAN Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun										
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1.25 dolar amerika per hari.Amerika per hari.									
1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	%	3,33	3,25-2,50	3,16 - 2,49	3,02-2,47	2,89-2,43	2,75-2,29	2,61-2,15
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persen	3,33	3,25-2,50	3,16 - 2,49	3,02-2,47	2,89-2,43	2,75-2,29	2,61-2,15
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persen	100,00	36,92	37,61	38,29	38,98	39,66	40,34
1.3	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persen	100,00	36,92	37,61	38,29	38,98	39,66	40,34
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	dokumen	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.									

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.a	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	%		40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,50
2 TANPA KELAPARAN Menghilangkan Kelaparan. Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik. serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan										
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	skor	3,5	4,04	3,91	3,79	3,66	3,53	3,40
2.1	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	desa	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.1	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persen		0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25
2.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persen		0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	skor	93,21	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50
2.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		13,26	12,85	12,43	12,02	11,61	11,20
2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		6,00	5,75	5,50	5,25	5,00	4,75
2.2	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		15,09	13,58	12,07	10,56	9,05	7,54
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.									
2.3	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Ton							
2.3	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	ton							
2.3	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Juta Rp/tenaga kerja		33,10	33,43	33,77	34,11	34,45	34,79

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.3	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Ton/Orang (Padi)		6,46	6,52	6,59	6,65	6,72	6,79
2.3	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rupiah		33.102.245	33.433.267	33.767.600	34.105.276	34.446.329	34.790.792
2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.									
2.a	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	rupiah		5.729.426.023	5.786.720.284	5.844.587.486	5.903.033.361	5.962.063.695	6.021.684.332
2.c	Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.									
2.c	Indikator anomali harga pangan.	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	laporan	1	1	1	1	1	1	1
3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia										
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	per 100.000 KH		189,00	180,30	171,60	162,90	154,20	145,50
3.1	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		73,83	74,57	75,32	76,07	76,83	77,60
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Per 1.000 Kelahiran hidup		17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50
3.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	per 1000 KH		19,49	18,52	17,59	16,71	15,88	15,08
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kasus		97	93	88	84	79	75
3.3	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kasus		11	11	10	10	9	9

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kasus (Kusta dan Filariasis)		8	8	7	7	6	6
3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	kasus		6	6	6	5	5	5
3.3	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kasus		300	295	290	285	280	275
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		5,50	5,25	5,00	4,75	4,50	4,25
3.4	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		10,82	10,28	9,77	9,28	8,81	8,37
3.4	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >=18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		4,92	4,67	4,44	4,22	4,01	3,81
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.5	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	%	75,20	80,87	81,68	82,50	83,32	84,16	85,00
3.7	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	%	75,20	80,87	81,68	82,50	83,32	84,16	85,00
3.7	Total Fertility Rate (TFR).	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Anak	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,10
3.7	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		59,17	59,76	60,36	60,96	61,57	62,18
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
3.a	Persentase merokok pada penduduk umur >=15 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		5,50	5,25	5,00	4,75	4,50	4,25
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.b	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI 80% OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL		13	13	13	13	13	13
4 PENDIDIKAN BERKUALITAS Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan										

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua										
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		65,26	65,91	66,57	67,23	67,91	68,58
4.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		47,77	48,25	48,73	49,22	49,71	50,21
4.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		72,49	73,21	73,95	74,68	75,43	76,19
4.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		45,59	46,04	46,50	46,97	47,44	47,91
4.1	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		16,87	16,02	15,22	14,46	13,74	13,05
4.1	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		3,52	3,34	3,18	3,02	2,87	2,72
4.1	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		8,16	7,75	7,36	6,99	6,65	6,31

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		70,72	71,43	72,15	72,87	73,60	74,33
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.									
4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		28,66	28,95	29,24	29,53	29,83	30,13
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.5	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		94,41	95,35	96,31	97,27	98,24	99,23
4.5	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		78,31	79,10	79,89	80,69	81,49	82,31
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
4.6	Persentase angka melek aksara penduduk umur >=15 tahun.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
4.a	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN	persen	0	0	0	0	0	0	0

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		KHUSUS ANAK								
4.a	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	100,00	85,59	86,44	87,31	88,18	89,06	89,95
4.a	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	100,00	71,78	72,50	73,23	73,96	74,70	75,45
4.a	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	100,00	39,31	39,71	40,10	40,51	40,91	41,32
4.a	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	100,00	83,35	84,19	85,03	85,88	86,74	87,60

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.a	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	100,00	39,31	39,71	40,10	40,51	40,91	41,32
4.a	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%		67,61	68,29	68,97	69,66	70,36	71,06
4.a	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%	65,40	86,71	87,58	88,45	89,34	90,23	91,13
5 KESETARAAN GENDER Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan										
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat, (b) pemerintah daerah.	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
5.5	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	persen		0,63	0,73	0,83	0,93	1,03	1,13
6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan										
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persen	74,66	83,07	83,92	84,77	85,61	86,46	87,31
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persen	89,39	82,43	83,31	84,18	85,06	85,94	86,82

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dengan air dan sabun.									
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3	Kualitas air permukaan sebagai air baku.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	poin	53,53	57,81	58,39	58,97	59,56	60,16	60,76
8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh. serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua										
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1	PDB per kapita.	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Juta	72,45	74,32	81,67	89,02	96,36	103,71	111,06
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persen		5,3-5,6	5,5 - 5,97	5,57-6,04	5,63-6,1	5,7-6,17	6,17-8,00
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persen		5,3-5,6	5,5 - 5,97	5,57-6,04	5,63-6,1	5,7-6,17	6,17-8,00

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk		5	5	5	5	5	5
8.1	PDB per kapita.	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persen		5,3-5,6	5,5 - 5,97	5,57-6,04	5,63-6,1	5,7-6,17	6,17-8,00
8.1	PDB per kapita.	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persen		5,3-5,6	5,5 - 5,97	5,57-6,04	5,63-6,1	5,7-6,17	6,17-8,00
8.1	PDB per kapita.	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk		5	5	5	5	5	5
8.4	Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.									
8.4	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persen		30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00
8.4	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.4	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.5	Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5	Upah rata-rata per jam pekerja.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rupiah	18976	19535	20095	20655	21215	21775	22335
8.5	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persen		3,49	3,43	3,36	3,30	3,23	3,17

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kelamin dan kelompok umur.									
8.6	Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah.									
8.6	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persen		71,58	72,30	73,02	73,75	74,49	75,23
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9	Jumlah wisatawan mancanegara.	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	orang	90	82	87	92	97	102	107
8.9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	orang	3.156.712	2,563,555	2,589,191	2,615,083	2,641,233	2,667,646	2,694,322
8.9	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	%	7,18	8,66	8,77	8,86	8,96	9,06	9,16
9 INDUSTRI. INOVASI DAN INFRASTRUKTUR Membangun Infrastruktur yang Tangguh. Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan. serta Mendorong Inovasi										
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1	Jumlah pelabuhan penyeberangan.	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Buah	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Jumlah pelabuhan strategis.	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Unit	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Kondisi mantap jalan nasional.	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persen	70,19	70,89	71,60	72,32	73,04	73,77	74,51

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	%		2	2	2	2	2	2
9.2	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	%		5,70	6,30	6,90	7,50	8,10	8,71
9.2	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	%		5,10	5,16	5,22	5,28	5,34	5,40
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
9.4	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	-	-	-	-	-	-	-
10 BERKURANGNYA KESENJANGAN Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara										
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1	Rasio Gini.	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	nilai	0,26	0,259-0,257	0,259-0,255	0,259-0,252	0,258-0,25	0,258-0,247	0,256-0,245

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persen		3,25-2,50	3,16 - 2,49	3,02-2,47	2,89-2,43	2,75-2,29	2,61-2,15
10.1	Jumlah Desa tertinggal	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Jumlah Desa Mandiri.	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa	75	48	52	56	60	64	68
11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan										
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
11.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	%	90,63	68,85	70,15	71,47	72,82	74,20	75,60
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jiwa	0	0	0	0	0	0	0

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	%	100	100	100	100	100	100	100
11.6	Persentase sampah nasional yang terkelola	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	%	79,29	74,11	74,91	75,70	76,50	77,29	78,08
11.6	Indeks Kualitas Udara	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	poin	97,92	94,42	94,89	95,36	95,84	96,32	96,80
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
11.7	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	%	6,67	6,63	6,64	6,65	6,66	6,67	6,68
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.b	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan										
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.5	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Ton	4881,59	5004,47	5054,51	5105,06	5156,11	5207,67	5259,75
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
12.6	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya (untuk 9 sektor utama)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.									
12.8	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Entitas	41	41	41	42	42	43	43
13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM Mengambil Tindakan Cepat										

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya										
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.									
13.2	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Gg CO2-eq	5869,312	9884,87	10296,99	10728,60	11180,76	11654,56	12151,18
13.2	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	38,16	30,30	32,20	34,10	35,90	37,60	39,30
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.									
13.3	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Entitas	41	41,00	41,00	42,00	42,00	43,00	43,00
13.a	Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.									
13.a	Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rupiah	161.890.173	163.509.075	165.144.165	166.795.607	168.463.563	170.148.199	171.849.681
15 EKOSISTEM DARATAN Melindungi. Merestorasi dan Meningkatkan										

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan. Mengelola Hutan secara Lestari. Menghentikan Penggurunan. Memulihkan Degradasi Lahan. serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati										
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.									
15.1	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan.	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	%	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33
15.1	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Ha	74	74	74	74	74	74	90
16 PERDAMAIAN. KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan. Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua. dan Membangun Kelembagaan yang Efektif. Akuntabel. dan Inklusif di Semua Tingkatan										
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.1	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kasus	8	5	5	4	4	4	3
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.2	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) >= B	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Point	100	100	100	100	100	100	100
16.6	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) >= B	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Point	100	100	100	100	100	100	100
16.6	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Unit Layanan	1	1	1	1	1	1	1
16.6	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persen	99,30	99,500	99,750	100,000	100,000	100,000	100,000
16.9	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16.9	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persen	99,03	99,500	99,750	100,000	100,000	100,000	100,000
17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan										

Pilar/Kode	Sasaran / Indikator	Program	Satuan	realisasi	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	%	0,79	1,40	1,42	1,43	1,45	1,46	1,48
17.1	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	%	0,24	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55
17.1	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	%	5,66	7,26	7,59	7,92	8,25	8,58	8,91
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persen	100	100	100	100	100	100	100
17.19	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari *milestone* pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tapin lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Tapin serta kerjasama dengan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bappelitbang.

Dokumen RPJMD ini menjadi pijakan utama bagi transformasi pembangunan Kabupaten Tapin menuju **Terwujudnya Tapin Maju dan Beriman (Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis, dan Berkelanjutan)**, sehingga dapat merangkum komitmen kolektif dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut. Mengingat pentingnya Sustainable Development Goals (SDGs) dalam perencanaan pembangunan global, RPJMD ini juga disusun dengan memperhatikan keterkaitannya terhadap tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Seluruh arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam RPJMD diarahkan agar sejalan dengan upaya pencapaian SDGs. Dengan demikian, RPJMD ini tidak hanya menjadi panduan pembangunan jangka menengah daerah, tetapi juga menjadi instrumen lokal untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan global secara terpadu dan berkelanjutan.

5.1 Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD

sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tapin maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan oleh perangkat daerah dan Bappelitbang sebagai koordinator. Terkait dengan perubahan RPJMD, Permendagri 86 Tahun 2017 memperkenankan perubahan RPJMD apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang signifikan, seperti:

1. Terjadi **perubahan mendasar** yang berpengaruh terhadap asumsi dalam RPJMD;
2. Terjadi **bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial**, atau kondisi luar biasa lainnya;
3. Adanya **perubahan kebijakan nasional atau provinsi** yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan daerah;
4. **Perubahan struktur organisasi perangkat daerah** yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan strategis;
5. Hasil **pengendalian dan evaluasi** menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak dapat dicapai.

Proses perubahan RPJMD harus melalui mekanisme yang diatur, termasuk konsultasi dengan DPRD dan mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Substansi yang dapat diubah dalam RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja daerah. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Dengan pengendalian, evaluasi, dan mekanisme perubahan yang tertib dan terstruktur, pemerintah daerah dapat menjaga fleksibilitas serta akuntabilitas

dalam pelaksanaan pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.3 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan tahun 2026-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029
3. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, Bappelitbang Kabupaten Tapin berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
5. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
6. RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka perubahan Renstra dilakukan dengan memedomani RPJMD pada nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bappelitbang Kabupaten Tapin melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;

9. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati. Evaluasi dilaksanakan sesuai kaidah peraturan yang berlaku dan dilakukan oleh Bappelitbang Kabupaten Tapin serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
10. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan RPJMD memperhatikan konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan jika terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BUPATI TAPIN

YAMANI